

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan tuntunanNya, kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2019, sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur patut mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur atas kesediaan untuk mengevaluasi serta memberikan usul/saran dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila laporan yang kami sajikan ini kurang sesuai atau belum memenuhi harapan, baik menyangkut penyajian data dan penjelasan maupun teknik penyusunannya.

Semoga Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup dan karya kita selanjutnya.

Borong, 24 Maret 2020

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS, SH,M.HUM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	3
C. Kondisi Geografis Daerah	4
1. Letak Wilayah.....	4
2. Batas Administrasi wilayah	5
3. Luas Wilayah	6
4. Geologi dan Topografis	6
D. Gambaran Umum Demografis.....	8
E. Kondisi Ekonomi	11
a. Potensi Unggulan Daerah	11
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Manggarai Timur.....	54
F. Indikator Kinerja Makro	60
1. Indeks Pembangunan Manusia	60
2. Angka kemiskinan	61
3. Angka Pengangguran	63
4. Pertumbuhan Ekonomi	64
5. Pendapatan Per Kapita	65
6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	66
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	67
A. Visi dan Misi.....	67
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	70
C. Prioritas Pembangunan Daerah	74
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75
A. Urusan Konkuren	75
a. Ringkasan Urusan Wajib	75
1. Urusan Pendidikan.....	75
2. Urusan Kesehatan	85
3. Urusan Pekerjaan Umum.....	93
4. Urusan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	118
5. Urusan Perumahan.....	123
6. Urusan Sosial	125

7. Urusan Penataan Ruang	129
➤ Dinas Pekerjaan Umum	129
➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	131
8. Urusan Lingkungan Hidup.....	133
9. Urusan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu	138
10. Urusan Kebudayaan	143
11. Urusan Statistik.....	145
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	146
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	150
14. Urusan Koperasi dan UKM	156
15. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160
16. Urusan Ketenagakerjaan	164
17. Urusan Ketahanan Pangan.....	169
18. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	173
19. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	176
20. Urusan Perhubungan	177
21. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	181
22. Urusan Pertanahan	186
23. Urusan Perpustakaan.....	189
24. Urusan Kearsipan.....	193
b. Ringkasan Urusan Pilihan	194
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	194
2. Urusan Pertanian.....	198
3. Urusan Pariwisata	204
4. Urusan Perdagangan	207
5. Urusan Perindustrian.....	209
6. Urusan Transmigrasi.....	211
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya).....	212
1. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	212
2. Urusan Administrasi Keuangan Daerah	216
3. Urusan Kepegawaian dan Persandian.....	218
4. Inspektorat Daerah.....	221
5. Urusan Sekretariat KORPRI.....	224
6. Bagian Administrasi Pemerintahan	226
7. Bagian Administrasi Pembangunan.....	228
8. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	230

9. Bagian Hukum	232
10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	234
11. Bagian Umum	236
12. Bagian Administrasi Perekonomian	238
13. Bagian Organisasi	240
14. Bagian Humas dan Protokol	242
15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	244
16. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah	247
17. Kecamatan-Kecamatan	249
➤ Kecamatan Borong	249
➤ Kecamatan Kota Komba	251
➤ Kecamatan Lamba Leda	253
➤ Kecamatan Poco Ranaka	255
➤ Kecamatan Elar	258
➤ Kecamatan Sambu Rampas	260
➤ Kecamatan Poco Ranaka Timur	262
➤ Kecamatan Rana Mese	264
➤ Kecamatan Elar Selatan	267
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	269
D. Indikator Kinerja Kunci	271
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)	
TAHUN 2019	280
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	289
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	289
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	295
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	296
A. Kerjasama Antar Daerah	296
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	297
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	306
D. Pembinaan Batas Wilayah	308
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	309
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	310
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	310
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	314
7.1 Urusan Pendidikan	314
7.2 Urusan Kesehatan	322
7.3 Urusan Pekerjaan Umum	329

7.4 Urusan Perumahan Rakyat	331
7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	333
7.6 Urusan Sosial.....	337
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	341
BAB IX PENUTUP	545
LAMPIRAN III : INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat capaian kinerja makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan), capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (indikator kinerja) dan capaian kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) digunakan sebagai dasar dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penilaian, perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga kementerian/ atau lembaga pemerintah non kementerian.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 yang disusun secara komprehensif, terintegrasi dan informatif tentang aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah yang terdiri atas Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum seperti yang diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 150);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 160);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6977/OTDA Tanggal 31 Desember 2019 Perihal: Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang bkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007. Kabupaten Manggarai Timur terletak di bagian barat pulau Flores dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Ngada
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Manggarai

Gambar Peta Admininstrasi Manggarai Timur



C. Kondisi Geografis Daerah

1. Letak Wilayah

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai Timur terletak diantara $08^{\circ} 14'$ Lintang Selatan - $09^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}20'$ Bujur Timur - $120^{\circ}55'$ Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategis

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2007.

c) Kondisi Kawasan

1) Pedalaman

Terdapat kawasan pedalaman yang masih sulit diakses baik dari aspek komunikasi maupun transportasi. Wilayah pedalaman tersebut menyebar di Kecamatan Lamba Leda bagian tengah, Sambi Rampas bagian tengah, Elar dan Elar Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngada, serta Kecamatan Rana Mese berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

2) Terpencil

Daerah terpencil di Kabupaten Manggarai Timur identik dengan daerah pedalaman yang disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas. Daerah terpencil tersebut menyebar di Kecamatan Lamba Leda bagian tengah, Sambi Rampas bagian tengah, Elar dan Elar Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngada serta Kecamatan Rana Mese berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

3) Pesisir

Daerah pesisir menyebar di Kecamatan Sambu Rampas (Desa Nampar Sepang, Desa Nanga Mbalang, Desa Nanga Mbaur, Kelurahan Pota dan Kelurahan Nanga Baras), Kecamatan Lamba Leda (Desa Satar Padut, Satar Kampas, Satar Punda dan Satar Punda Barat), Kecamatan Rana Mese (Desa Lidi, Bea Ngencing), Kecamatan Borong (Desa Compang Ndejing, Nanga Labang, Kelurahan Kota Ndora, Kelurahan Rana Loba) dan Kecamatan Kota Komba (Kelurahan Tanah Rata, Bamo dan Watu Nggene). Luas daerah pesisir di Kabupaten Manggarai Timur ±609,78 km².

4) Pegunungan

Secara geografis, Wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari pegunungan bagian dari Pegunungan Mando Sawu yang membentang dari Timur ke Barat. Wilayah pegunungan ini melewati Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba Leda, Sambu Rampas Bagian Selatan, Elar, Elar Selatan, Kota Komba Bagian Utara, Borong Bagian Utara dan Kecamatan Rana Mese.

2. Batas Administrasi Wilayah

Timur	: Kabupaten Ngada
Barat	: Kabupaten Manggarai
Utara	: Laut Flores
Selatan	: Laut Sawu

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur sampai saat ini terdiri dari 9 Kecamatan, 159 Desa dan 17 Kelurahan dengan rincian per Kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Desa /Kelurahan per Kecamatan
di Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1	Lamba Leda	24	0	24
2	Elar	14	1	15
3	Poco Ranaka	21	3	24
4	Kota Komba	19	3	22
5	Sambu Rampas	14	6	20
6	Borong	15	3	18
7	Rana Mese	21	0	21
8	Poco Ranaka Timur	18	0	18
9	Elar Selatan	13	1	14

Sumber data: BP3 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan baik daratan dan laut adalah 2.642,93 Km² atau 264.293 ha.

4. Geologi dan Topografi

1. Geologi

➤ Komposisi Jenis Tanah

a) Struktur dan Karakteristik

Keadaan geologi Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi geologi yang cukup kompleks. Satuan geologi yang dijumpai dalam wilayah ini dibagi dalam 4 jenis yaitu :

- Intermediate basic (basa menengah)
- Neogen
- Alluvium terrace deposite and coral reefs (alluvium undak dan terumbu coral)
- Silific efusives (efisiva berasam kersik)

Wilayah Manggarai Timur bagian Selatan sepanjang arah Barat – Timur banyak ditemukan jenis Intermediate Basic (basa menengah). Sedangkan pada bagian Utara banyak ditemukan batuan kapur pada formasi neogen. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari :

- Latosol

Tanah latosol semula tergolong tanah mineral yang sudah mempunyai perkembangan profil dalam horizon terselubung merah hingga kuning, liat, lemah hingga gumpal. Jenis tanah ini meliputi 3 golongan yaitu : latosol coklat, latosol coklat merah dan latosol merah kuning.

- Mediterian

Tanah mempunyai lapisan solum yang tebal. Kadar unsur basa yang terkandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang.

- Litosol

Merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan diatas batuan kukuh, dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm.

b) Potensi Geologi

Dari jenis tanah di atas, potensi geologi di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

- Latosol

Golongan latosol coklat memiliki kemampuan dan potensi yang baik, karena kadar NPK cukup tersedia. Jenis latosol coklat merah dan latosol merah

kuning memiliki kemampuan untuk pertanian sangat kecil, karena terdapat indikasi kekurangan sulfur.

- Mediterian

Sifat-sifat fisik dan kimianya baik sehingga nilai produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

- Litosol

Jenis tanah ini mempunyai hambatan kedangkalan profil disertai kadang-kadang kurangnya air, kemungkinan di gunakan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Penyebaran untuk jenis tanah litosol banyak dijumpai di Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Borong. Jenis tanah mediteran banyak dijumpai menyebar, khususnya banyak dijumpai di kawasan bagian Utara.

Selain potensi diatas, terdapat juga potensi geologi berupa kawasan rawan bencana alam dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan rawan bencana alam gunung berapi merupakan wilayah sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap luncuran gas beracun, lahar panas dan dingin, luncuran awan panas dan semburan api, dan tempat lalunya tumpahan benda-benda lain akibat letusan gunung berapi yang terletak di Kecamatan Poco Ranaka.

2. Topografi

➤ Ketinggian Lahan (Topografi)

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada di atas 100 meter dpl. Untuk lebih jelasnya kondisi ketinggian lahan wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Wilayah dan Persentase Menurut Ketinggian diatas Permukaan Laut Per Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian Dari Muka Laut								Total Luas (HA)
	0-100 (m)	%	100-500 (m)	%	500-100 (m)	%	> 1000 (m)	%	
Borong	4.211	14,93	9.310	33,01	6.590	23,37	8.091	28,69	28.202
Rana Mese	1.130	5,43	7.321	35,16	5.143	24,70	7.230	34,72	20.824
Poco Ranaka	0	0,00	402	3,83	6.475	61,66	3.624	34,51	10.501
Poco Ranaka Timur	0	0,00	384	3,68	5.838	56,01	4.201	40,31	10.423
Lamba Leda	4.887	13,60	18.867	52,49	11.269	31,35	920	2,56	35.943
Sambi Rampas	8.452	21,13	19.971	49,92	8.926	22,31	2.660	6,65	40.009
Elar	4.550	13,86	12.440	37,90	12.421	37,84	3.413	10,40	32.824

Elar Selatan	0	0,00	10.528	43,99	11.103	46,39	2.303	9,62	23.934
Kota Komba	7589	15,43	18293	37,19	12975	26,38	10336	21,01	49193
Jumlah	30.819	12,24	97.516	38,72	80.740	32,06	42.778	16,99	251.853

Sumber Data : BP3 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

➤ **Kemiringan Tanah**

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada pada kemiringan 15% - 40%, seperti terlihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Luas Wilayah Daratan dan Persentase Menurut Kemiringan Tanah Per Kecamatan

Kecamatan	Lereng								Total Luas (HA)
	0-2 % (ha)	%	2-15 % (ha)	%	15-40 % (ha)	%	> 40 % (ha)	%	
Borong	207	1,92	2.577	39,18	4.632	13,59	20.786	10,37	28.202
Rana Mese	281	2,61	1.902	28,92	3.421	10,04	15.220	7,59	20.824
Poco Ranaka	--	-	285	4,33	2.827	8,29	7.389	3,69	10.501
Poco Ranaka Timur	--	-	282	4,29	2.807	8,24	7.334	3,66	10.423
Lamba Leda	996	9,24	384	5,84	3.832	11,24	30.731	15,33	35.943
Sambi Rampas	8.344	77,42	-	-	943	2,77	30.722	15,33	40.009
Elar	411	3,81	-	-	-	-	32.414	16,17	32.824
Elar Selatan	300	2,78	-	-	-	-	23.624	11,79	23.934
Kota Komba	238	2,21	1.147	17,44	15.624	45,84	32.185	16,06	49.193
	10.777	100	6.577	100	34.086	100	200.415	100	251.855

Sumber Data : BP3 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

D. Gambaran Umum Demografis

- Jumlah penduduk : **269.686** orang
- Komposisi penduduk menurut jenis kelamin :
 - Laki – laki : 137.324 Orang
 - Perempuan : 132.362 Orang
- Komposisi sebaran penduduk menurut kecamatan

Adapun sebaran penduduk pada 9 (Sembilan) kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kode	Kecamatan	Penduduk	Penduduk		Total KK
				Laki-laki	Perempuan	
1	531901	Borong	41,023	20,830	20,193	10,881
2	531902	Poco Ranaka	33,572	16,938	16,634	8,946
3	531903	Lamba Leda	31,506	16,149	15,357	8,699
4	531904	Samba Rampas	26,096	13,438	12,658	7,615
5	531905	Elar	14,613	7,528	7,085	3,967
6	531906	Kota komba	50,199	25,363	24,836	13,292

7	531907	Rana Mese	28,650	14,583	14,067	7,257
8	531908	Poco Ranaka Timur	26,788	13,612	13,176	7,352
9	531909	Elar Selatan	17,239	8,883	8,356	4,600
Jumlah			269,686	137,324	132,362	72,609

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

- d. Komposisi Sebaran Penduduk Menurut Struktur Usia :

Sebaran penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Komposisi penduduk menurut usia

NO_KAB	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
5319	00-04	7.240	6.828	14.068
5319	05-09	14.842	14.027	28.869
5319	10-14	17.006	16.090	33.096
5319	15-19	16.721	16.001	32.722
5319	20-24	14.711	14.046	28.757
5319	25-29	9.687	9.919	19.606
5319	30-34	8.988	9.797	18.785
5319	35-39	8.974	9.662	18.636
5319	40-44	8.377	9.241	17.618
5319	45-49	7.721	7.917	15.638
5319	50-54	7.398	7.364	14.762
5319	55-59	5.931	5.130	11.061
5319	60-64	3.988	2.960	6.948
5319	65-69	2.622	1.657	4.279
5319	70-74	1.535	1.018	2.553
5319	>75	1.583	705	2.288
JUMLAH		137.324	132.362	269.686

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

- e. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Komposisi penduduk sesuai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk menurut tingkat pendidikan

NO_KAB	KODE	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
5319	1	TIDAK/BLM SEKOLAH	26.012	24.987	50.999
5319	2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	23.776	22.229	46.005
5319	3	TAMAT SD/SEDERAJAT	49.053	52.115	101.168
5319	4	SLTP/SEDERAJAT	13.948	12.830	26.778
5319	5	SLTA/SEDERAJAT	17.829	14.343	32.172
5319	6	DIPLOMA VII	622	625	1.247
5319	7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	999	1.520	2.519
5319	8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.007	3.684	8.691
5319	9	STRATA-II	78	29	107
5319	10	STRATA-III	0	0	0
JUMLAH			137.324	132.362	269.686

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

f. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

NO_KAB	NO_PROP	URUT	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				LAKI LAKI	PEREMPUAN	
19	53	1	Belum/Tidak Bekerja	27.746	25.891	53.637
19	53	2	Mengurus rumah tangga	0	12.937	12.937
19	53	3	Pelajar/Mahasiswa	44.569	41.362	85.931
19	53	4	Pensiunan	383	58	441
19	53	5	Pegawai Negeri Sipil	2.162	1.162	3.324
19	53	6	Tentara Nasional Indonesia	50	2	52
19	53	7	Kepolisian RI	92	3	95
19	53	8	Perdagangan	43	21	64
19	53	9	Petani/pekebun	52.507	45.270	97.777
19	53	10	Peternak	10	10	20
19	53	11	Nelayan/Perikanan	782	43	825
19	53	12	Industri	2	1	3
19	53	13	Konstruksi	1	1	2
19	53	14	Transportasi	17	1	18
19	53	15	Karyawan Swasta	1.115	542	1.657
19	53	16	Karyawan BUMN	18	10	28
19	53	17	Karyawan BUMD	3	2	5
19	53	18	Karyawan honorer	375	241	616
19	53	19	Buruh Harian Lepas	58	7	65
19	53	20	Buruh tani/perkebunan	255	150	405
19	53	21	Buruh nelayan/perikanan	24	4	28
19	53	22	Buruh peternakan	1	0	1

19	53	23	Pembantu rumah tangga	4	21	25
19	53	24	Tukang cukur	1	0	1
19	53	25	Tukang listrik	1	0	1
19	53	26	Tukang batu	6	0	6
19	53	27	Tukang kayu	38	0	38
19	53	29	Tukang las/pandai besi	4	0	4
19	53	30	Tukang jahit	3	6	9
19	53	32	Penata rias	1	1	2
19	53	33	Penata busana	2	1	3
19	53	35	Mekanik	6	0	6
19	53	40	Penterjemah	0	0	0
19	53	41	Imam Mesjid	2	0	2
19	53	42	Pendeta	2	0	2
19	53	43	Pastor	40	0	40
19	53	44	Wartawan	13	0	13
19	53	45	Ustadz/Mubaligh	1	0	1
19	53	58	Bupati	1	0	1
19	53	59	Wakil Bupati	1	0	1
19	53	63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	29	1	30
19	53	64	Dosen	6	4	10
19	53	65	Guru	2.416	2.514	4.930
19	53	67	Pengacara	3	0	3
19	53	68	Notaris	1	0	1
19	53	71	Konsultan	8	1	9
19	53	72	Dokter	2	6	8
19	53	73	Bidan	0	502	502
19	53	74	Perawat	203	344	547
19	53	75	Apoteker	4	7	11
19	53	79	Pelaut	3	0	3
19	53	80	Peneliti	0	0	0
19	53	81	Sopir	623	0	623
19	53	84	Pedagang	19	8	27
19	53	85	Perangkat Desa	79	7	86
19	53	86	Kepala Desa	157	2	159
19	53	87	Biarawati	0	70	70
19	53	88	Wiraswasta	3.432	1.149	4.581
Jumlah				137.324	132.362	269.686

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Manggarai Timur memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu potensi yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai Timur. Komoditi unggulan

Kabupaten Manggarai Timur untuk sektor pertanian terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dan padi sawah menjadi produksi paling banyak dengan tingkat produksi sebesar 90.730,54 ton pada tahun 2019. Sedangkan terendah terdapat pada kacang kedelai. Adapun peningkatan produksi pertanian dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2019

No	Jenis Tanaman	2017		2018		2019	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	22.957	89.807	21.234,2	82.919	22.750,7	90.730,54
2	Padi Lahan Kering	1.618	2.044	1.554	2.019	1.762,2	2281,62
3	Jagung	6.147	18.581,18	6.394,2	27.161,47	6.106,5	2.5266,1
4	Kacang Kedelai	319	240,10	1.776,7	1.332,53	125,5	48,55
5	Kacang Hijau	254	207,40	131	113,40	167,6	124,88
6	Kacang Tanah	61	55,50	67	182	36,2	49,61
7	Ubi Kayu	1.684	8.095,86	1.656	8.667,53	1.228,1	677,5
8	Ubi Jalar	537	2.469,90	500	2.399,2	318,7	1202,37

Sumber data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Luas lahan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan 31 Desember 2019 terdiri dari:

- ✓ Lahan sawah (Fungsional) : 15.217 Ha
- ✓ Lahan pertanian bukan sawah : 215.528,2 Ha

Adapun data luas lahan sawah menurut jenis pengairan per kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.9
Data Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur

No.	Kecamatan	Irigasi Teknis	Irigasi setengah Teknis	Irigasi sederhana	Irigasi desa/Non PU	Tadah Hujan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Borong	-	721,6	1.024,3	-	223,6	1.969,5
2	Rana Mese	299,53	399,51	-	465,77	47,85	1.212,7
3	Kota Komba	-	178	2.026	-	288	2.492
4	Elar	238	341	39	53	570	1.241
5	Elar Selatan	-	841	606,3	-	756,2	2.203,5
6	Sambi Rampas	-	558	316,9	-	376	1250,9
7	Poco Ranaka	-	500	257	-	794	1.551
8	Poco Ranaka Timur	-	380	560	-	1.105,5	2.005,5
9	Lamba Leda	-	278	104,9	310	598	1.290,9
Jumlah		537,53	4.197,11	4934,4	828,77	4.759,15	15.217

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Data luas lahan bukan sawah menurut penggunaannya per kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10
Data luas lahan bukan sawah menurut penggunaannya per kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Sawah	LUAS LAHAN BUKAN PERTANIAN									LUAS BUKAN PERTANIAN	
			Lahan/Tegalan Kebun (Ha)	Lahan/Ladang/Huma (Ha)	Perkebunan (Ha)	Lahan Tanaman Kayu-kayuan/Hutan Rakyat (Ha)	Pengembalaa n/padang rumput (Ha)	Hutan Negara	Lahan sementara tidak diusahakan (Ha)	Lainnya	Jumlah	(Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	Total Luas Wilayah (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Borong	1.969,5	1.188,6	884,0	4.097,8	3.430,8	-	-	1.615,3	225,0	11.441,50	6.866	20.277
2	Kota Komba	2.492	4.267	3.518	10.260	3.126	5.114	7.257	10.022	301	43.865	2.837	49.194
3	Elar	1.241	3.600	2.507	4.611	2.015	219	14	11.380	2.307	26.653	117,00	28.011
4	Sambi Rampas	1.250,90	4.360	7.394	1.030	2.572	2.361	-	9.304,10	11.376	38.397,1	361	40.009
5	Lamba Leda	1.290,90	8.735,9	2.000	-	430	-	-	3.870,80	5.555,40	20.592,10	14.160,00	36.043
6	Poco Ranaka	1.551	1.934,5	30	9.480	639	-	1.960,50	2.730,50	600,20	17.374,70	474,30	19.400
7	Elar Selatan	2.203,50	5.701	1.579	9.250	2.390	1.150	2.970,90	1.150	1.036,60	25.227,50	1.317	28.748
8	Poco Ranaka Timur	2.005,50	1.458,5	277	7.476,5	305	-	498	656	5,00	10.676	1.180,50	13.862
9	Rana Mese	1.212,70	8.466,6	-	4.625,3	2.948,50	20	1.181	4.050,30	9,60	21.301,30	6.235,00	28.749
Jumlah		15.217	39.712,10	18.189	50.830,60	17.856,30	8.864	13.881,40	44.779	21.415,80	215.528,20	33.547,80	264.293

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

2). Data Potensi Ternak Tahun 2019

a. Populasi ternak besar menurut jenis ternak (ekor) yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.11
Jumlah Populasi Ternak Besar Per Kecamatan Tahun 2017- 2019

No	Kecamatan	Tahun								
		2017			2018			2019		
		Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi	Kerbau	Kuda
1	2	9	10	11	12	13	14	12	13	14
1.	Borong	2.168	803	66	2.065	801	121	2.044	754	89
2.	Rana Mese	2.892	637	23	2.433	781	24	2.388	698	23
3.	Kota Komba	5.111	2.337	1.042	4.471	1.960	1.240	4.308	1.852	1.196
4.	Elar	227	517	380	193	560	377	209	589	399
5.	Elar Selatan	743	1.256	828	1.117	2.268	412	780	1.934	381
6.	Sambi Rampas	875	631	455	557	609	432	248	640	431
7.	Poco Ranaka	183	612	125	202	603	165	241	589	160
8.	Poco Ranaka Timur	57	365	135	109	392	217	116	356	219
9.	Lamba Leda	2.806	649	242	2.405	692	331	2.493	705	298
Jumlah		15.062	7.807	3.296	13.552	8.666	3.319	12.827	8.117	3.196

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

b. Populasi ternak kecil menurut jenis ternak yang tersebar pada 9 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.12
Jumlah Populasi Ternak Kecil Per Kecamatan Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun								
		2017			2018			2019		
		Babi	Kambing	Domba	Babi	Kambing	Domba	Babi	Kambing	Domba
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Borong	8.418	2.463	0	6.965	2.571	0	7.303	2.408	0
2.	Rana Mese	4.768	1.975	0	7.049	2.487	0	6.975	2.378	0
3.	Kota Komba	15.455	3.766	0	20.758	2.836	0	20.748	2.799	0
4.	Elar	2.603	2.542	0	3.581	3.080	0	3.946	3.097	0
5.	Elar Selatan	5.309	1.572	0	3.977	762	0	3.517	569	0
6.	Sambi Rampas	4.283	9.016	0	4.756	7.434	0	3.317	7.830	0
7.	Poco Ranaka	3.133	2.347	0	4.341	4.109	0	4.257	4.200	0
8.	Poco Ranaka Timur	3.524	2.912	0	2.856	2.799	0	2.453	2.733	0
9.	Lamba Leda	4.739	2.634	0	7.477	3.276	0	7.311	3.369	0
Jumlah		52.232	29.227	0	61.730	29.354	0	59.827	29.383	0

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

c. Populasi ternak unggas menurut jenis ternak yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.13
Jumlah Populasi Ternak Unggas Per Kecamatan Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017			2018			2019		
		Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik /Bebek	Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik /Bebek	Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik /Bebek
		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Borong	32.942	1.775	1.993	64.543	8.961	0	60.886	1.716	0
2	Rana Mese	21.510	790	1.617	35.387	455	0	29.113	0	0
3	Kota Komba	53.332	1.473	1.205	136.136	932	0	235.674	1.104	0
4	Elar	8.100	19	375	23.941	0	0	22.704	0	0
5	Elar Selatan	12.537	105	894	7.439	0	0	5.304	0	0
6	Sambi Rampas	45.913	2.546	6.141	177.103	2.984	0	216.701	7.225	0
7	Poco Ranaka	17.315	730	265	22.296	2.425	0	21.565	1.885	0
8	Poco Ranaka Timur	11.843	-	154	15.573	0	0	12.776	0	0
9	Lamba Leda	21.836	591	214	41.930	1.069	0	41.710	1.010	0
Jumlah		225.328	8.029	12.851	524.348	16.826	0	646.433	12.740	0

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

3). Data Potensi Perkebunan Tahun 2019

a. Komoditi: Kelapa

Tabel 1.14
Komoditi Kelapa Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas areal (ha)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)	Jumlah (kk)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	Lamba Leda	261,93	156,2	0	418,13	200,01	1,28	279
2	Poco Ranaka	21,25	9,6	0	30,85	9,9	1,03	223
3	Poco Ranaka Timur	10,5	0	0	10,5	0	0	123
4	Borong	86,9	41,59	0	128,49	43,78	1,05	439
5	Rana Mese	67,55	2,25	11	69,8	20,33	9,04	169
6	Kota Komba	581,5	267,7	0	849,2	673,1	2,51	2.208
7	Elar	159	79,91	12	238,91	68,39	0,86	143
8	Elar Selatan	0	0	1,8	0	0	0	121
9	Sambi Rampas	112,13	42,98	0	155,11	54,82	1,28	446
Jumlah		1300,76	600,23	24,8	1.900,99	1.070,33	1,78	4.151

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

b. Komoditi: Jambu Mete

Tabel 1.15
Komoditi Jambu Mete Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	678,49	204,6	-	883,09	83,24	0,41	1.920
2	Poco Ranaka	0	0	-	0	0	0	-
3	Poco Ranaka Timur	0	0	-	0	0	0	-
4	Borong	259,01	0	9,75	259,01	0	0	601
5	Rana Mese	137,75	0	3,25	137,75	0	0	352
6	Kota Komba	402	70,5	-	472,5	35,25	0,5	1.182
7	Elar	34	5,6	2,07	39,6	5,52	0,99	64
8	Elar Selatan	15	0	2	15	0	0	53
9	Sambi Rampas	113,52	0	-	113,52	0	0	212
JUMLAH		1.639,77	280,7	17,07	1.920,47	124,01	0,44	4.384

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

c. Komoditi: Kopi Arabika

Tabel 1.16
Komoditi Kopi Arabika Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	76,1	76,1	-	152,2	19,45	0,26	513
2	Poco Ranaka	866,55	580	25	1471,55	253,98	0,44	2.187
3	Poco Ranaka Timur	2.042,40	2.022,75	87	4152,15	800,18	0,4	2.261
4	Borong	853,76	693,18	7,47	1554,41	316	0,46	1.521
5	Rana Mese	545,57	284,14	48,35	878,06	91,63	0,32	1.523
6	Kota Komba	983,89	853,25	20,5	1857,64	469,32	0,55	4.171
7	Elar	380,37	373,5	196,11	949,98	224,1	0,6	1.508
8	Elar Selatan	617,3	490,25	0	1107,55	294,15	0,6	1.572
9	Sambi Rampas	318,82	261,2	-	580,02	103,11	0,39	1.119
JUMLAH		6.684,76	5.634,37	397,63	12.716,76	2.571,92	0,46	16.375

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

d. Komoditi: Kopi Robusta

Tabel 1.17
Komoditi Kopi Robusta Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	244,87	153,7	-	398,57	15,37	0,1	1.764
2	Poco Ranaka	5.482,00	3.616,00	166	9264	1.447,04	0,4	5.839
3	Poco Ranaka Timur	2.082,00	4.141,00	73	6296	642,25	0,16	4.205
4	Borong	1.269,97	1.001,00	5,85	2276,82	448,66	0,45	2.580
5	Rana Mese	702,42	398,43	113,27	1214,12	130,54	0,33	2.271
6	Kota Komba	1.685,75	1.328,25	107	3121	531,3	0,4	6.264
7	Elar	1.070,01	515,5	113,9	1699,41	197,25	0,38	2.118
8	Elar Selatan	1.578,16	1.109,00	80,48	2767,64	332,8	0,3	2.036
9	Sambi Rampas	367,44	191,95	-	559,39	69,6	0,36	1.206
Jumlah		14.482,62	12.454,83	659,5	27.596,95	3.814,80	0,31	28.283

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

e. Komoditi: Kakao

Tabel 1.17
Komoditi Kakao Per kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produkti vitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	343,8	156,76	-	500,56	55,45	0,35	2.153
2	Poco Ranaka	243	104	43,4	390,4	36,57	0,35	1.585
3	Poco Ranaka Timur	302	128,9	3	433,9	64,4	0,5	896
4	Borong	636,92	284,14	-	921,06	131,36	0,46	1.292
5	Rana Mese	538,93	308,96	36	883,89	105,6	0,34	2.384
6	Kota Komba	2.830,25	1.791,27	5	4626,52	1.125,15	0,63	7.735
7	Elar	702,46	360,71	31,4	1094,57	199,69	0,55	1.918
8	Elar Selatan	496,14	273,14	4,91	774,19	163,88	0,6	1.814
9	Sambi Rampas	351,07	108,5	-	459,57	39,59	0,36	1.495
Jumlah		6.444,57	3.516,38	123,71	10.084,66	1.921,69	0,55	21.272

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

f. Komoditi: Kemiri

Tabel 1.18
Komoditi Kemiri Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	1.436,30	237,7	0,4	1674,4	107,08	0,45	3.979
2	Poco Ranaka	270,75	0	40	310,75	0	0	962
3	Poco Ranaka Timur	136	0,5	-	136,5	0,35	0,7	549
4	Borong	284,47	110,18	-	394,65	102,75	0,93	599
5	Rana Mese	753,75	603,67	6,35	1.363,77	530,31	0,88	2.776
6	Kota Komba	1.982,50	1.710,50	12,75	3705,75	4.170,99	2,44	5.217
7	Elar	688,04	615	9,8	1312,84	246	0,4	1.564
8	Elar Selatan	663,73	159,5	23,44	846,67	79,75	0,5	1.960
9	Sambi Rampas	458,84	0	-	458,84	0	0	1.480
Jumlah		6.674,38	3.437,05	92,74	10.204,17	5.237,23	1,52	19.086

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

g. Komoditi: Kapuk

Tabel 1.19
Komoditi Kapuk Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	0	0	-	0	0	0	-
2	Poco Ranaka	0	0	-	0	0	0	-
3	Poco Ranaka Timur	0	0	-	0	0	0	-
4	Borong	0	0	-	0	0	0	-
5	Rana Mese	0	0	-	0	0	0	-
6	Kota Komba	42	8,5	4	54,5	1,7	0,2	344
7	Elar	0	0	-	0	0	0	-
8	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		42	8,5	4	54,5	1,7	0,2	344

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

h. Komoditi: Cengkeh

Tabel 1.20
Komoditi Cengkeh Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas areal (ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	41,85	4,12	2,3	48,27	4,12	1	223
2	Poco Ranaka	647,11	303	35	985,11	121,2	0,4	2.340
3	Poco Ranaka Timur	208,5	73	-	281,5	14,6	0,2	1.343
4	Borong	539,26	140	-	679,26	77	0,55	928
5	Rana Mese	440,7	116,5	-	557,2	38,23	0,33	1.555
6	Kota Komba	1.468,70	661,25	-	2129,95	437,6	0,66	4.670
7	Elar	266,13	17,23	11,3	294,66	5,34	0,31	774
8	Elar Selatan	272,59	9,65	0,14	282,38	7,72	0,8	826
9	Sambi Rampas	109,04	21,88	-	130,92	7,98	0,36	1.630
Jumlah		3993,88	1346,63	48,74	5389,25	713,79	0,53	14.289

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

i. Komoditi: Pinang

Tabel 1.21
Komoditi Pinang Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	26,5	24,37	-	50,87	13,9	0,57	1.323
2	Poco Ranaka	0	0	-	0	0	0	0
3	Poco Ranaka Timur	27	17,5	-	44,5	10,4	0,59	256
4	Borong	64,93	38,67	-	103,6	17,19	0,44	341
5	Rana Mese	72,42	72,15	3,25	147,82	38,54	0,53	684
6	Kota Komba	93,5	38,25	-	131,75	38,25	1	952
7	Elar	39,68	26,42	2,7	68,8	6,39	0,24	234
8	Elar Selatan	21,69	0	8	29,69	0	0	312
9	Sambi Rampas	17,79	7	-	24,79	1,8	0,26	358
Jumlah		363,51	224,36	13,95	601,82	126,47	0,56	4460

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

j. Komoditi: Vanili

Tabel 1.22
Komoditi Vanili per Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas areal (ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	5,1	1,45	-	6,55	1,39	0,96	145
2	Poco Ranaka	2	0	-	2	0	0	10
3	Poco Ranaka Timur	6,95	0,5	-	7,45	0,1	0,2	15
4	Borong	47,5	14,75	-	62,25	1,32	0,09	208
5	Rana Mese	41,75	2,5	-	44,25	1,11	0,44	268
6	Kota Komba	32,25	6	-	38,25	4,8	0,8	665
7	Elar	0	0	-	0	0	0	0
8	Elar Selatan	0	0	-	0	0	0	-
9	Sambi Rampas	2,1	0,65	-	2,75	0,15	0,23	-
Jumlah		137,65	25,85	-	163,5	8,87	0,34	1.349

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

k. Komoditi: Lada/ Merica

Tabel 1.23
Komoditi Lada/Merica Per Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	7,4	5,05	-	12,45	0,5	0,1	152
2	Poco Ranaka	10,25	4	-	14,25	0,8	0,2	310
3	Poco Ranaka Timur	0	0	-	0	0	0	-
4	Borong	8,55	0	-	8,55	0	0	38
5	Rana Mese	1,5	0	-	1,5	0	0	15
6	Kota Komba	4,25	1,1	-	5,35	2,3	2,09	129
7	Elar	19,3	1,9	-	21,2	0,48	0,25	47
8	Elar Selatan	0	0	-	0	0	0	43
9	Sambi Rampas	6,25	0	-	6,25	0	0	-
Jumlah		57,5	12,05	-	69,55	0,98	0,08	734

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

l. Komoditi: Asam

Tabel 1.24
Komoditi Asam Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	2,2	13,26	-	15,46	13,26	1.000	716
2	Poco Ranaka	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-
4	Borong	-	-	-	-	-	-	-
5	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Komba	8,5	1	-	9,5	1	1.000	78
7	Elar	-	1	-	1	0,25	250	7
8	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10,7	15,26	-	25,96	14,51	950,85	801

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

m. Komoditi: Jarak Pagar

Tabel 1.25
Komoditi Jarak Pagar Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	2	-	-	2	-	-	83
2	Poco Ranaka	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-
4	Borong	-	-	-	-	-	-	-
5	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Komba	4	-	-	4	-	-	46
7	Elar	-	-	-	-	-	-	-
8	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6	-	-	6	-	-	129

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

n. Komoditi: Tembakau

Tabel 1.26
Komoditi Tembakau Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	11.235,00	-	-	11.235,00	-	-	57
2	Poco Ranaka	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka Timur	14	14	-	28	6	0,43	54
4	Borong	-	-	-	-	-	-	-
5	Rana Mese	7	-	-	7	-	-	42
6	Kota Komba	6	6	-	12	3	0,5	20
7	Elar	-	-	-	-	-	-	-
8	Elar Selatan	19,3	20	-	39,3	9	0,45	-
9	Sambi Rampas	19,3	-	-	19,3	-	-	-
Jumlah		11.300,60	40	-	11.340,60	18	0,45	173

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

o. Komoditi: Aren/ Lontar

Tabel 1.27
Komoditi Aren/Lontar Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	18,85	39,3	1,4	59,55	23,58	600	1,333
2	Poco Ranaka	15,8	-	-	15,8	-	-	32
3	Poco Ranaka Timur	-	-	-	0	-	-	-
4	Borong	-	-	-	0	-	-	-
5	Rana Mese	2,75	6,43	0,1	9,28	-	-	77
6	Kota Komba	1	5,75	-	6,75	6,9	1.200	77
7	Elar	-	-	-	0	-	-	-
8	Elar Selatan	-	-	-	0	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah		38,4	51,48	1,5	91,38	32,88	638,69	1.519

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

p. Komoditi: Cassivera/ Kayu Manis

Tabel 1.28
Komoditi Cassivera /Kayu Manis Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-
2	Poco Ranaka	2	-	-	2	-	-	30
3	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-
4	Borong	-	-	-	-	-	-	-
5	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-
6	Kota Komba	-	-	-	-	-	-	-
7	Elar	-	-	-	-	-	-	-
8	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	-	-	2	-	-	30

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

q. Komoditi: Pala

Tabel 1.29
Komoditi Pala Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	2019						
		Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah (KK)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-
2	Poco Ranaka	-	-	-	-	-	-	-
3	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-
4	Borong	12,5	-	-	12,5	-	-	37
5	Rana Mese	3	-	-	3	-	-	45
6	Kota Komba	8	-	-	8	-	-	60
7	Elar	-	-	-	-	-	-	-
8	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		23,5	-	-	23,5	-	-	142

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

4).Data Potensi Hortikultura Tahun 2019

a) Komoditi : Bawang Merah

Tabel 1.30
Komoditi Bawang Merah Per Kecamatan Tahun 2018- 2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	2	2	2	4	0	0	0	0
2	Rana Mese	1	1	2,5	2,5	0	0	0	0
3	Kota Komba	1	1	1,75	1,75	2	2	3,1	6,2
4	Elar	-	-	-	-	0	0	0	0
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0	0	0	0
6	Sambi Rampas	240	166	2,9	481,8	128	128	4,59	588,7
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	0	0	0	0
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	1	1	4,5	4,5
9	Lamba Leda	21,35	20,6	3,22	66,3	11	11	3,5	38,5
Jumlah		265,35	190,6	12,37	556,35	142	142	4,49	637,9

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

b) Komoditi : Bawang Putih

Tabel 1.31
Komoditi Bawang Putih Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	0,3	-	-	-	4	3	1,16	3,5
2	Rana Mese	-	-	-	-	1	1	0,3	0,3
3	Kota Komba	1	-	-	-	1	1	1,5	1,5
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0	0	-	-
6	Samba Rampas	-	-	-	-	0	0	-	-
7	Poco Ranaka	1	-	-	-	11	2	1,45	2,9
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	17	11	0,44	4,9
9	Lamba Leda	-	-	-	-	0	0	-	-
	Jumlah	2	-	-	-	34	18	0,72	13,1

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

c) Komoditi : Kubis

Tabel 1.32
Komoditi Kubis Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	0,12	0,12	3,5	0,42	2	0	0	0
2	Rana Mese	-	-	-	-	1	1	2,5	2,5
3	Kota Komba	4	4	15	60	5	5	10	50
4	Elar	2	-	-	-	3	3	15,33	46
5	Elar Sselatan	1,05	1,05	3,5	4	3	3	7,06	21,2
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0	0	0
7	Poco Ranaka	2	2	46	92	1	1	40	40
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	10	10	11,55	115,5
9	Lamba Leda	1	1	3,75	3,75	0	0	0	0
	Jumlah	10,17	8,17	19,57	159,85	25	23	11,96	275,2

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

d) Komoditi : Petsai/ Sawi

Tabel 1.33
Komoditi Petsai/Sawi Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas	Luas	Produkti	Produksi	Luas	Luas	Produkti	Produksi
		Tanam	Panen	vitais	(Ton)	Tanam	Panen	vitais	(Ton)
(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)		(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)			
1	Borong	6,3	6,25	3,4	21,24	8	6	1,06	6,4
2	Rana Mese	1	1	7	7	5	5	4,2	21
3	Kota Komba	22	21	6,48	136	21	21	7,5	157,7
4	Elar	2	2	0,75	1,5	3	3	7,3	22
5	Elar Selatan	6,13	6	10,68	64,1	7	7	18,6	130,2
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	1	1	20	20
7	Poco Ranaka	9	8,5	6	51	14	14	13,68	191,6
8	Poco Ranaka Timur	8,5	8,5	0,65	5,5	9	9	1,35	12,2
9	Lamba Leda	12	12	2,42	29	6	6	1,13	6,8
Jumlah		66,93	65,25	4,83	315,3	74	72	7,88	567,9

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

e) Komoditi : Kacang Merah

Tabel 1.34
Komoditi Kacang Merah Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas	Luas	Produkti	Produksi	Luas	Luas	Produkti	Produksi
		Tanam	Panen	Vitais	(ton)	Tanam	Panen	Vitais	(ton)
(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)		(Ha)	(Ha)	(Ton/Ha)			
1	Borong	12	12	2,75	33	14	14	1,86	26,1
2	Rana Mese	-	-	-	-	1	2	0,85	1,7
3	Kota Komba	13	11	3,64	40	1	8	1,42	11,4
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0	0	-	-
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0	-	-
7	Poco Ranaka	8	8	3	24	0	0	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0	-	-
9	Lamba Leda	2	2	4	8	3	3	0,5	1,5
Jumlah		35	33	3,18	105	19	27	1,5	40,7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

f) Komoditi : Kacang Panjang

Tabel 1.35
Komoditi Kacang Panjang Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	27,92	17,22	2,44	42	7	15	1,16	17,5
2	Rana Mese	3	2	3	6	6	7	1,62	11,4
3	Kota Komba	72	53	4,38	232	29	51	1,5	76,5
4	Elar	-	-	-	-	3	0	-	-
5	Elar Selatan	4	-	-	-	3	8	6,66	53,3
6	Sambi Rampas	1	-	-	-	6	9	0,62	5,6
7	Poco Ranaka	4	4	15	60	0	0	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0	-	-
9	Lamba Leda	22	13	8,15	106	1	12	0,2	2,4
Jumlah		133,92	89,22	5	446	55	102	1,63	166,7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

g) Komoditi : Buncis

Tabel 1.36
Komoditi Buncis Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	35	19,92	2,13	42,34	14	19	0,51	9,7
2	Rana Mese	2	2	7,25	14,5	3	4	2,8	11,2
3	Kota Komba	37	23	1,35	31	7	14	5	70
4	Elar	5	1	1,24	1,24	4	0	-	-
5	Elar Selatan	-	-	-	-	2	2	7,55	15,1
6	Sambi Rampas	7	1	1	1	4	6	0,83	5
7	Poco Ranaka	11	9	0,32	2,86	2	4	0,57	2,3
8	Poco Ranaka Timur	35	26	1,73	45,05	5	5	0,28	1,4
9	Lamba Leda	4	2	3,5	7	0	4	0,77	3,1
Jumlah		136	83,92	1,73	144,99	41	58	2,03	117,8

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

h) Komoditi : Tomat

Tabel 1.37
Komoditi Tomat Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	3,6	3,6	4,82	17,3	1	0	-	-
2	Rana Mese	1	2	4,25	8,5	1	1	4,5	4,5
3	Kota Komba	17	17	6,47	110	10	11	7,54	83
4	Elar	2	-	-	-	4	3	5	15
5	Elar Selatan	-	-	-	-	3	3	12,2	36,6
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	5	5	0,98	4,9
7	Poco Ranaka	4	4	2,68	10,7	5	7	15,82	110,8
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	4	4	9,85	39,4
9	Lamba Leda	3	3	2,03	6,1	1	1	6	6
J u m l a h		30,6	29,6	152,64	5,16	34	35	8,57	300,2

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

i) Komoditi : Terung

Tabel 1.38
Komoditi Terung Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	20	14	64,33	900,6	3	5	2,36	11,8
2	Rana Mese	9	8	5,28	42,2	5	7	3,94	27,6
3	Kota Komba	43	35	5,55	194,4	19	31	5,93	184
4	Elar	-	-	-	-	1	6	0,53	3,2
5	Elar Selatan	1	0,5	1,1	0,55	2	2	10,35	20,7
6	Sambi Rampas	3	2	2,75	5,5	6	10	0,92	9,2
7	Poco Ranaka	4	7	2,53	17,7	9	6	25,03	150,2
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0	-	-
9	Lamba Leda	31	21	2,46	51,6	3	7	1,35	9,5
J u m l a h		111	87,5	13,86	1.212,55	48	74	5,62	416,20

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

j) Komoditi : Labu Siam

Tabel 1.39
Komoditi Labu Siam Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	126	79	0,8	63	51	46	3,14	144,6
2	Rana Mese	9	6	120,83	725	4	6	8,25	49,5
3	Kota Komba	40	32	31,44	1.006,00	12	29	5,44	158
4	Elar	6	4	450,5	1.802,00	4	5	5,02	25,10
5	Elar Selatan	10	7	-	-	0	8	2,77	22,2
6	Sambi Rampas	3	3	7,33	22	2	12	1,06	12,8
7	Poco Ranaka	124	4	73,75	295	4	18	1,61	29,1
8	Poco Ranaka Timur	2	1	40	4	21	22	0,57	12,7
9	Lamba Leda	29	14	45	630	2	22	0,72	15,9
Jumlah		349	150	30,55	4.583,00	100	168	2,79	469,90

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

k) Komoditi : Kangkung

Tabel 1.40
Komoditi Kangkung Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	12,46	4	1,75	7	2	2	0,5	1
2	Rana Mese	1	2	5	10	2	2	4,75	9,5
3	Kota Komba	4	4	5	20	15	21	4,82	101,4
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	1	-	-	-	1	1	5,4	5,4
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0	-	-
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	0	0	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	3	2	0,5	1
9	Lamba Leda	11	10	1,1	11	6	8	0,9	7,2
J U M L A H		29,46	20	2,4	48	29	36	3,48	125,5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

l) Komoditi : Bayam

Tabel 1.41
Komoditi Bayam Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	57	25	1,04	26	6	10	0,6	6
2	Rana Mese	1	-	-	-	0	1	1	1
3	Kota Komba	4	3	2,27	6,8	11	16	1,55	24,9
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0	0	-	-
6	Sambi Rampas	2	1	3,5	3,5	3	7	0,74	5,2
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	0	0	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	1	1	0,3	0,3
9	Lamba Leda	-	-	-	-	0	1	1,5	1,5
Jumlah		64	29	1,25	36,3	21	36	1,08	38,9

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

m) Komoditi : Cabe Rawit

Tabel 1.42
Komoditi Cabe Rawit Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	29,47	10,12	1,39	14,05	13	15	0,85	12,8
2	Rana Mese	2	2	1,25	2,5	3	3	1	3
3	Kota Komba	25	17	0,92	15,6	10	19	1,15	21,9
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	5	-	-	-	0	0	-	-
6	Sambi Rampas	1	3	0,67	2	2	4	6,52	26,1
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	2	1	1,2	1,2
8	Poco Ranaka Timur	3	-	-	-	2	2	6,5	13
9	Lamba Leda	3	2	2,05	4,1	1	2	0,4	0,8
Jumlah		68,47	34,12	1,12	38,25	33	46	1,71	78,8

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

n) Komoditi : Cabe Besar

Tabel 1.43
Komoditi Cabe Besar Per Kecamatan tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produkti vitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produkti vitas (ton/ha)	Produksi (ton)
1	Borong	1	1	1,25	1,25	0	0	0	0
2	Rana Mese	-	-	-	-	0	0	0	0
3	Kota Komba	1	1	0,8	0,8	0	0	0	0
4	Elar	-	-	-	-	0	0	0	0
5	Elar Selatan	0,3	0,3	1,8	0,54	0	0	0	0
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0	0	0
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	0	0	0	0
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0	0	0
9	Lamba Leda	2,59	2,59	2,01	5,2	1	2	0,3	0,6
Jumlah		4,89	4,89	1,59	7,79	1	2	0,3	0,6

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

o) Komoditi : Ketimun

Tabel 1.44
Komoditi Ketimun Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	10	10	0,33	3,3	0	0	-	-
2	Rana Mese	2	2	1	2	0	1	4	4
3	Kota Komba	9	4	0,38	1,5	1	7	8	56
4	Elar	-	-	-	-	0	0	-	-
5	Elar Selatan	2	1,5	2	3	0	6	6	36
6	Sambi Rampas	2	1,75	2,06	3,06	3	8	20	160
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	0	0	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0	-	-
9	Lamba Leda	5	5	0,64	3,2	0	8	0,75	6
Jumlah		30	24,25	0,68	16,6	4	30	8,73	262

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

p) Komoditi : Kentang

Tabel 1.45
Komoditi Kentang Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	2	2	1,5	3	1	1	0,5	0,5
2	Rana Mese	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Komba	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Elar	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Elar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Poco Ranaka	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	2	1,5	3	1	1	0,5	0,5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

q) Komoditi : Wortel

Tabel 1.46
Komoditi Wortel Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	2,25	2,25	4,38	9,85	-	-	-	-
2	Rana Mese	7,5	7,5	3,47	26	-	-	-	-
3	Kota Komba	1	1	2,5	2,5	-	1	0,3	0,3
4	Elar	-	-	-	-	1	1	21,1	21,1
5	Elar Selatan	-	-	-	-	8	8	25	200
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Poco Ranaka	3	3	8	24	3	3	14,4	43,2
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	1	1	20	20
9	Lamba Leda	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13,75	13,75	4,53	62,35	13	14	20,32	284,6

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Hortikultura (Buah-Buahan)

Perbedaan produksi pada komoditi hortikultura tahun 2019 dimana luas panen lebih besar dari luas tanam disebabkan oleh tanaman yang ditanam pada tahun-tahun sebelumnya dipanen ditahun 2019 sedangkan yang tercatat dikolom luas tanam hanya realisasi tanam Tahun 2019.

1. Komoditi : Mangga

Tabel 1.47
Komoditi Mangga Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	0,17	-	0,5	65	0,22	50	2	100
2	Rana Mese	74	13,5	42,6	574,5	2	14	2,43	34
3	Kota Komba	351	21	0,1	2,1	0,75	1	2,5	2,5
4	Elar	-	-	-	-	0	29	8	232
5	Elar Selatan	47,9	10	2	20	0,2	0		-
6	Sambi Rampas	44	-	-	-	0	0		-
7	Poco Ranaka	14,5	7,15	4,9	35	0	6,6	10	66
8	Poco Ranaka Timur	12	-	-	-	0	12,3	3,01	37
9	Lamba Leda	181,5	-	-	-	0	0		-
Jumlah		910,9	189,65	3,6	676,6	3,17	112,9	4,18	471,5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

2. Komoditi : Alpukat

Tabel 1.48
Komoditi Alpukat Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	129	55,5	6	322,1	0	0		0
2	Rana Mese	4	2	17	34	0,4	0,25	70	17,5
3	Kota Komba	156	26	3	75	0,06	2,92	16,03	46,8
4	Elar	-	-	-	-	0	0,27	16,30	4,4
5	Elar Selatan	28,2	7,76	56	432	0	0		0
6	Sambi Rampas	35	175		12,2	0	2,14	12,01	25,7
7	Poco Ranaka	16,5	4,35	3	15	0	0,62	40,81	25,3
8	Poco Ranaka Timur	4,16	1,56	2	3,12	0	13,74	13,83	190
9	Lamba Leda	31,4	1,6	3	4,8	0	0,12	16,67	2
Jumlah		404,26	273,77	3	886,22	0,46	20,06	15,54	311,7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

3. Komoditi : Rambutan

Tabel 1.49
Komoditi Rambutan Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	59,20	31,50	23,8	750,00	0.9	0.5	8	4
2	Rana Mese	84,00	15,00	60,0	900,00	6.6	1.5	44	66
3	Kota Komba	184,00	45,00	5,0	225,00	12.47	4.51	20.02	90.3
4	Elar	-	-	-	-	0.045	0.16	50	8
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0.35	0		0
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0		0
7	Poco Ranaka	2,04	-	-	-	0.08	0.04	100	4
8	Poco Ranaka Timur	4,00	-	-	-	0.9	0.07	60	4.2
9	Lamba Leda	-	-	-	-	0	0		0
Jumlah		333,24	91,50	20,49	1.875,00	21.35	6.78	26.03	176.50

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

4. Komoditi : Durian

Tabel 1.50
Komoditi Durian Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	6	6	1,3	8,00	0	0.36	15	5.4
2	Rana Mese	16	3,00	30,0	90,00	0.4	0.7	8.57	6
3	Kota Komba	55	4	14,5	58,00	0.1	0.4	7.50	3
4	Elar	-	-	-	-	0	0.08	7.50	0.6
5	Elar Selatan	0,26	-	-	-	0	0		0
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0		0
7	Poco Ranaka	15	1,6	15,0	24,00	0.01	0.54	28.89	15.6
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0		0
9	Lamba Leda	-	-	-	-	0.1	0		0
Jumlah		92	14,62	14,4	210,00	0.61	2.08	14.71	30.6

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

5. Komoditi : Jambu Biji

Tabel 1.51
Komoditi Jambu Biji Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Borong	24,99	12,0-0	0,4	5,30	0	2,01	5,47	11
2	Rana Mese	-	-	-	-	0	0		0
3	Kota Komba	9,99	3,33	1,6	5,30	0,45	1,5	6,67	10
4	Elar	-	-	-	-	0	0,28	5,36	1,5
5	Elar Selatan	-	-	-	-	0	0		0
6	Sambi Rampas	15	5	11,7	58,33	0	2,25		40
7	Poco Ranaka	0,43	0,09	0,4	0,08	0	0,09	6,67	0,6
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0		0
9	Lamba Leda	17,00	0,99	2,0	3,93	0	2,31		12,4
Jumlah		67,41	21,41	3,4	72,94	0,45	8,44	8,95	75,5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

6. Komoditi : Jeruk Keprok

Tabel 1.52
Komoditi Jeruk Keprok Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	22	3,50	3,5	12	0	3	3	9
2	Rana Mese	20	105,00	1,0	105	0	0		0
3	Kota Komba	269,66	51,00	3,0	153	11,67	53,8	4,50	242,2
4	Elar	-	-	-	-	0	0,27	2,96	0,8
5	Elar Selatan	24,27	1,20	1,0	1,20	0	6,67	6,00	40
6	Sambi Rampas	-	-	-	-	0	0		0
7	Poco Ranaka	0,30	0,11	6,0	0,66	0	0,05	12	0,6
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	1,11	15,32	17
9	Lamba Leda	6,00	-	-	-	0	0,54	15	8,1
Jumlah		342,23	160,81	1,7	271,86	11,67	65,44	4,85	317,7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

7. Komoditi : Nangka/ Cempedak

Tabel 1.53
Komoditi Nangka/Campedak Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	121	75,00	0,13	1	0	32	0.04	1.43
2	Rana Mese	-	-	-	-	0	0		0
3	Kota Komba	236	70,3	0,02	1,27	1	12.75	0.19	2.45
4	Elar	-	-	-	-	0	7.8	0.18	1.41
5	Elar Selatan	2,8	-	-	-	0.15	1.2	2.78	3.33
6	Sambi Rampas	179,34	-	-	-	0	0		0
7	Poco Ranaka	9,9	4,1	16,46	67,50	0.5	5.1	0.54	2.75
8	Poco Ranaka Timur	-	-	-	-	0	0		0
9	Lamba Leda	187,52	44,1	1,13	50,0	0	0		0
J u m l a h		737,00	193,50	0,62	119,77	1.65	58.85	0.19	11.37

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

8. Komoditi : Nenas

Tabel 1.54
Komoditi Nenas Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti Vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	1,04	0,84	0,5	0,41	0	0.18	71.67	12.9
2	Rana Mese	4,00	3,50	0,2	0,83	0	1.25	29.60	37
3	Kota Komba	54,00	12,37	0,8	9,80	6.88	1.91	94.87	181.2
4	Elar	-	-	-	-	0	0.01	30.00	0.3
5	Elar Selatan	0,37	-	-	-	0.01	0		0
6	Sambi Rampas	65,96	-	-	-	0	0		0
7	Poco Ranaka	0,01	0,14	0,8	0,12	0	0		0.3
8	Poco Ranaka Timur	1,00	0,50	5,0	13,94	0	8.48	24.15	204.8
9	Lamba Leda	0,64	0,02	1,0	1,30	0	0		0
J u m l a h		126,02	17,37	1,5	26,42	6.89	11.83	36.90	436.5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

9. Komoditi : Pepaya

Tabel 1.55
Komoditi Pepaya Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	127,50	18,00	0,20	3,54	0.02	0.76	13.68	10.4
2	Rana Mese	13,00	8,00	6,00	48,00	1.79	3.66	43.06	157.6
3	Kota Komba	158,31	55,76	0,04	2,05	4.14	36.76	49.81	1831
4	Elar	-	-	-	-	0	0.31	17.42	5.4
5	Elar Selatan	10,13	3,00	68	205,00	0.1	2.08	37.98	79
6	Sambi Rampas	39,00	6,00	14,8	88,50	0	4.14	72.46	300
7	Poco Ranaka	0,93	0,18	2,0	3,60	0.09	0.12	25.00	3
8	Poco Ranaka Timur	7,20	0,80	7,0	16,00	0	15	10.20	153
9	Lamba Leda	23,51	8,57	4,1	35,50	0	5.6	14.52	81.3
J u m l a h		379,58	100,30	4,0	402,19	6.14	68.43	38.30	2620.7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

10. Komoditi : Pisang

Tabel 1.56
Komoditi Pisang Per Kecamatan Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Tahun							
		2018				2019			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Produksi (ton)
1	Borong	348,00	24,00	19,32	463,70	0	86.1	55.75	4800
2	Rana Mese	52,40	34,53	4,25	146,70	4	21.66	17.65	382.3
3	Kota Komba	2,10	519,50	12,85	6.677,60	46	544.09	35.96	19565.5
4	Elar	-	-	-	-	0.55	12.34	28.50	351.7
5	Elar Selatan	12,36	4,24	218,64	951,10	1.45	6.8	32.06	218
6	Sambi Rampas	137,41	145,41	19,83	2.883,00	0	145.41	17.26	2510.5
7	Poco Ranaka	135,34	96,80	0,67	65,00	0.17	98.8	29.35	2900
8	Poco Ranaka Timur	6,75	1,00	11,00	11,00	0	630.65	25.05	15800
9	Lamba Leda	150,19	35,69	9,86	351,90	8	9.32	40.02	373
J u m l a h		844,55	856,93	12,37	10.598,90	60.17	1.555.17	30.16	46.901

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

2) Potensi Bidang Perikanan

Data Perikanan keadaan tahun 2019, seperti pada tabel 1.57 di bawah ini :

a. Data Armada Penangkapan Ikan Tahun 2019

Tabel 1.57
Armada Penangkapan Ikan Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Perahu Tanpa Motor		Motor Tempel	Kapal Motor			Jumlah
		Jukung	Perahu Papan		0-5 Gt	5 - 10 GT	10 GT Keatas	
1	Borong	20	8	7	91	37	1	164
2	Rana Mese	12	0	17	5	0	0	34
3	Kota Komba	7	18	25	15	9	0	74
4	Elar	25	0	28	5	3	0	61
5	Elar Selatan	0	0	0	0	0	0	0
6	Sambi Rampas	52	3	44	42	5	1	147
7	Poco Ranaka	0	0	0	0	0	0	0
8	Poco Ranaka Timur	0	0	0	0	0	0	0
9	Lamba Leda	21	19	57	131	33	2	263
	Manggarai Timur	137	48	178	289	87	4	743

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

b. Banyaknya Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019

Tabel 1.58
Jumlah Nelayan Per Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Status Nelayan		
		Penuh	Sambilan	Musiman
1	Borong	768	16	14
2	Rana Mese	38	33	0
3	Kota Komba	182	42	8
4	Elar	75	10	0
5	Elar Selatan	0	0	0
6	Sambi Rampas	392	39	18
7	Poco Ranaka	0	0	0
8	Poco Ranaka Timur	0	0	0
9	Lamba Leda	786	68	27
	Manggarai Timur	2.241	208	67

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

c. Kelompok Nelayan, Petani Ikan, Petani Rumput Laut dan Wanita Nelayan Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Tabel 1.59
Pengelompokkan Nelayan Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelompok				Jumlah
		Nelayan	Petani Ikan	Petani Rumput Laut	Wanita Nelayan	
1	Borong	99	49	0	0	148
2	Ranamese	12	37	0	0	49
3	Kota Komba	27	78	0	0	105
4	Elar	11	28	0	0	39
5	Elar Selatan	0	25	0	0	25
6	Sambi Rampas	54	27	0	0	81
7	Poco Ranaka	0	38	0	0	38
8	Poco Ranaka Timur	0	54	0	0	54
9	Lamba Leda	162	17	0	0	179
	Manggarai Timur	365	353	0	0	718

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

- d. Banyaknya alat penangkapan ikan yang digunakan untuk usaha perikanan laut menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Tabel 1.60
Jenis Alat Penangkapan Ikan Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Pukat		Jaring Insang		Jaring Angkat		Pancing			Jumlah
		Pantai	Cincin	Tetap	Hanyut	Bagan Perahu	Bagan Tancap	Tonda	Ulur	Lainnya	
1	Borong	0	39	72	22	0	0	25	142	36	336
2	Rana Mese	0	0	36	9	0	0	19	20	0	84
3	Kota Komba	0	14	22	9	0	0	2	41	15	103
4	Elar	0	0	72	5	0	0	45	1	12	135
5	Elar Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sambi Rampas	2	0	56	42	0	0	61	272	21	454
7	Poco Ranaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Poco Ranaka Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lamba Leda	0	0	35	172	34	0	31	52	24	348
	Manggarai Timur	2	53	293	259	34	0	183	528	108	1460

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

- e. Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Budidaya menurut Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Tabel 1.61
Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Budidaya Tahun 2019

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya					
		Tambak	Kolam	Budidaya Laut/Rumput Laut	Sawah	KJA	Jumlah
1	Borong	5	242	-	305	-	552
2	Ranamese	-	151	-	255	-	406
3	Kota Komba	-	403	-	410	-	813
4	Elar	0	102	-	208	-	310
5	Elar Selatan	-	121	-	152	-	273
6	Sambi Rampas	0	151	-	135	-	286
7	Poco Ranaka	-	331	-	120	-	451
8	Poco Ranaka Timur	-	315	-	256	-	571
9	Lamba Leda	0	120	0	120	-	240
	Manggarai Timur	5	1936	0	1961	0	3902

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

f. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019

Tabel 1.62
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya (Ton)					
		Tambak	Kolam	Budidaya Laut/Rumput Laut	Sawah	Laut	Jumlah
1	Borong	3,8	17,4	-	16,5	-	37,7
2	Ranamese	-	12,4	-	17,3	-	29,7
3	Kota Komba	-	24,8	-	11,7	-	36,5
4	Elar	-	5,5	-	5,1	-	10,6
5	Elar Selatan	-	4,2	-	4,3	-	8,5
6	Sambi Rampas	-	4,6	-	12,5	-	17,1
7	Poco Ranaka	-	18,3	-	17,5	-	35,8
8	Poco Ranaka Timur	-	24,6	-	16,4	-	41,0
9	Lamba Leda	-	6,4	-	12,8	-	19,2
	Manggarai Timur	3,8	118,2	0,0	114,1	0,0	236,1

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

g. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019

Tabel 1.63
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019

No	Jenis ikan	Produksi (ton)						
		Borong	Kota Komba	Rana Mese	Lamba Leda	Sambi Rampas	Elar	Total
1	Tembang	269,10	51,80	5,70	37,80	16,20	8,20	388,80
2	Terbang	3,60	1,20	0,50	150,90	9,40	1,30	166,90
3	Kembung	96,80	25,70	3,30	79,50	32,50	6,70	244,50
4	Selar	2,80	0,60	0,20	17,40	9,80	2,70	33,50

5	Lemuru	42,40	11,90	2,80	37,60	14,30	3,20	112,20
6	Julung – Julung	58,50	7,80	1,50	28,60	9,50	4,90	110,80
7	Cendro	15,60	3,70	1,60	8,20	6,60	2,80	38,50
8	Layang	73,40	16,50	1,50	52,80	16,70	3,10	164,00
9	Belanak	3,10	0,60	0,30	14,50	4,30	2,20	25,00
10	Peperek	17,70	4,60	1,50	3,40	0,50	0,40	28,10
11	Kuwe	6,50	1,30	1,80	10,50	6,50	0,90	27,50
12	Teri	-	-	-	324,70	-	-	324,70
13	Tenggiri	5,30	1,40	0,50	9,70	10,30	1,30	28,50
14	Tuna	4,40	5,60	-	79,70	227,70	5,70	323,10
15	Tongkol	428,50	125,90	5,60	302,00	326,50	14,30	1202,80
16	Cakalang	93,50	19,40	1,50	98,40	160,10	5,30	378,20
17	Lemadang	1,40	0,80	0,20	3,40	6,00	0,60	12,40
18	Sunglir	0,80	0,40	0,20	3,60	6,90	0,80	12,70
19	Kakap	14,90	8,50	2,30	23,10	33,60	12,40	94,80
20	Kerapu	9,40	3,30	0,90	24,50	29,20	9,90	77,20
21	Pisang pisang	2,70	1,50	0,60	17,50	13,80	8,30	44,40
22	Ekor Kuning	0,60	0,50	0,50	8,90	7,70	7,90	26,10
23	Kurisi	0,40	1,20	1,90	2,50	2,90	2,10	11,00
24	Baronang	0,80	0,60	0,30	3,50	4,60	2,80	12,60
25	Biji Nangka	0,60	0,40	0,90	2,70	2,80	2,60	10,00
26	Sunu	2,50	0,70	0,60	10,80	10,70	9,70	35,00
27	Kencam/Katamba	8,90	4,20	3,50	27,80	28,70	16,20	89,30
28	Kakatua	0,80	0,50	0,60	6,80	7,80	3,90	20,40
29	Gurita	4,40	25,80	-	8,83	-	-	39,03
TOTAL		1.169,4	3.26,4	40,8	1.399,6	1.005,6	140,2	4.082,03

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

3) Potensi Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Untuk menggambarkan kondisi Ketahanan Pangan dapat dilihat dari aspek ketersediaan, skor PPH, dan stok pangan.

a) Skor PPH

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk suatu wilayah. PPH selain dapat menilai tingkat kecukupan gizi, juga menilai tingkat keragaman dan

mutu gizi pangan yang tersedia/dikonsumsi oleh suatu wilayah lingkup Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam Pola Pangan Harapan (PPH), pangan dikelompokkan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian meliputi beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandum dan olahannya. Umbi-umbian meliputi ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas. Pangan hewani meliputi daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, susu dan olahannya. Minyak dan lemak meliputi minyak kelapa, minyak sawit, margarin dan lemak hewani. Buah/biji berminyak meliputi kelapa, kemiri, kenari dan coklat. Kacang-kacangan meliputi kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, taoge, oncom, sari kedelai, kacang dan emping. Gula meliputi gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol/kaleng, Sayur dan buah meliputi sayur segar dan olahannya, buah segar dan olahannya. Lain-lain meliputi teh, kopi, terasi, cengkeh, ketumbar, marica, pala, asam dan bumbu masak.

Tabel 1.64
Konsumsi Aktual dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019.

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1.	Padi-padian	1499.7	68.0	69.8	0.5	34.0	34.9	25.0	9.9	25.0
2.	Umbi-umbian	121.1	5.5	5.6	0.5	2.7	2.8	2.5	0.3	2.5
3.	Pangan Hewani	116.0	5.3	5.4	2.0	10.5	10.8	24.0	-13.2	10.8
4.	Minyak dan Lemak	157.6	7.2	7.3	0.5	3.6	3.7	5.0	-1.3	3.7
5.	Buah/Biji Berminyak	7.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
6.	Kacang-kacangan	67.0	3.0	3.1	2.0	6.1	6.2	10.0	-3.8	6.2
7.	Gula	11.8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	2.5	-2.2	0.3
8.	Sayur dan Buah	124.0	5.6	5.8	5.0	28.1	28.8	30.0	-1.2	28.8
9.	Lain-lain	99.9	4.5	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	2204.7	100.0	102.5	11.5	85.5	87.7	100.0		77.5

Sumber data: Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Skor PPH Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 mencapai 77,5 lebih tinggi 1 point dari skor PPH Tahun 2018 sebesar 76,5 dan pencapaiannya 77 % dari target 100 %. Skor PPH 77,5 mengindikasikan pola konsumsi masyarakat Manggarai Timur semakin beragam.
- Jumlah angka kecukupan energi Kabuapten Manggarai Timur Tahun 2018 berdasarkan hasil survey sebesar 2.204,7 Kkal/Kap/hari, yang dianjurkan oleh WKNPG tahun 2012 sebsar 2.150 Kkal/kap/hari dan kontribusi terbesar dari kelompok pangan padi-padian.

b) Ketersediaan pangan

Ketersediaan Pangan meliputi ketersediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur seperti pada tabel 1.65

Tabel 1.65
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Manggarai Timur

Item		Satuan	2019
1	Produksi gabah (GKG)	Ton	92.863
2	Produksi beras	Ton	58.263
3	Penjualan ke luar daerah	Ton	0
	Jml beras stl penjualan	Ton	58.263
4	Pembelian beras dari luar daerah	Ton	3.671
	Jumlah beras stl pembelian	Ton	61.933
5	Selisih stok awal - stok akhir di Dolog Kab/Kota	Ton	0
	Jumlah persediaan beras	Ton	61.933
6	Kecukupan konsumsi beras/kapita/hari	Gram	405
	Jumlah penduduk	Jiwa	299.427
	Total konsumsi beras	Ton	44.285
7	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Tahun	Ton	17.649
8	Jumlah Ketersediaan Pangan (Kg)		61.933.255
	Rata rata Kebutuhan Pangan per Hari (KG)		121.328
	Rata Rata Ketersediaan Pangan Per Tahun	Hari	510.462
	% Hari Ketersediaan Pangan		170%
	% Ketersediaan Pangan		140%
	Ketersediaan Pangan	Hari	510,46
	% Stok Pangan	%	40%
	Cadangan Pangan	Hari	145
	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Tahun	Kg	17.648.600,36
	Jumlah Kecukupan Cadangan Beras/Hari	Ton	48

Tingkat rata rata ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019 mencapai 140%. Pencapaian ini lebih tinggi dari pencapaian pada Tahun 2018 sebesar 129% dan menggambarkan tingkat ketersediaan pangan yang cukup. Pencapaian ketersediaan pangan utama pada Tahun 2019 belum mencapai target sebesar 160% dari target di Tahun 2019 sebesar 100%.

c) Stok Pangan

Stok pangan merupakan kondisi pangan yang berada di gudang cadangan pangan, RMU, pusat/tempat penjualan pangan dan sisa pangan yang tidak dikonsumsi dari ketersediaan yang ada. Stok pangan Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2020 sebesar 17.649 ton atau 40% dari kebutuhan konsumsi masyarakat Manggarai Timur atau 145 hari.

4) Potensi Pariwisata

a) Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Potensi obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Timur baik wisata alam maupun budaya berjumlah 133 ODTW yang terbagi dalam 4 klaster:

- Klaster I : Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba dan sekitarnya;
- Klaster II: Kecamatan Rana Mese, Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Poco Ranaka Timur dan sekitarnya;
- Klaster III: Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Sambi Rampas dan sekitarnya;
- Klaster IV: Kecamatan Elar, Kecamatan Elar Selatan dan sekitarnya.

Tabel 1.66

Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Manggarai Timur

No.	Kecamatan	Potensi ODTW	
		Alam	Budaya
1.	Borong (19 ODTW)	<ol style="list-style-type: none">1. Pantai Cepi Watu (Ds.Nanga Labang)2. Pantai Liang Bala (Kel.Kota Ndora)3. Poco Ndeki (Kel.Kota Ndora)4. Longka (Lubang) Jong (Ds.Poco Rii)5. Watu Empo (Ds.Balus Permai)6. Air Terjun Cunca Ngkuang7. Pantai Purang Mese8. Mata Air Panas Rana Roko9. Air Terjun Cunca Ncuar10. Persawahan Wae Laku11. Batu Bergambar (Ds.Golo Lalong)	<ol style="list-style-type: none">1. Situs Compang Riwu (Ds.Benteng Riwu)2. Tengku Manuk Desa BentengRaja3. Situs Pemukiman Tenda (Bekas Kampung Tenda lama)4. Caci5. Danding6. Mbata7. Raga Sae8. Penti
2.	Lamba Leda (13 ODTW)	<ol style="list-style-type: none">1. Gua Cincoleng di Ketang Desa Tengku Leda2. Gua Wer Witu di Desa Tengku Leda3. Pantai Laing Lewe (Ds.Satar Padut)4. Tiwu Cewe (Ds.Golo Lencur)5. Pantai Nanga Lirang (Ds. Satar Padut)6. Tanjung Kurbaja (Ds. Satar Padut)7. Liang Wusu dan Liang Bone (Ds. Tengku Leda)	<ol style="list-style-type: none">1. Situs Pemukiman Kuno Kampung Ninge2. Kampung Tua Compang Baju Manurung dan Cunga Bura3. Compang Deru (Ds. Compang Deru)4. Kampung Tua Poser (Ds. Rana Masa)5. Kampung Ngendeng (Ds. Golo Munga)6. Tenun Ikat Songke7. Caci8. Danding9. Mbata10. Raga Sae11. Penti / Upacara Adat
3.	Kota Komba (26 ODTW)	<ol style="list-style-type: none">1. Taman Laut Wae Wole (Kel. Watu Nggene)2. Pantai Nanga Rawa (Ds.Bamo)	<ol style="list-style-type: none">1. Vera2. Benteng Tonda (Ds. Rana Kolong)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pantai Bondei 4. Pantai Mbalata (Kel. Watu Nggene) 5. Pantai Batu Biru (Ds. Bamo) 6. Tuna Rengga Ko'it (Belut Raksasa)Ds. Golo Nderu 7. Padang Mausui 8. Hutan Wisata Ronggo Niki (Ds. Ruwan) 9. Mata Air Panas Rana Masak (Ds. Golo Ndele) 10. Pantai Maba Ruju (Waelengga) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kampung Tua Suka (Ds. Rana Kolong) 4. Situs Watu Nggene 5. Situs Kubur Tua Sambu Lewa (Kel. Watu Nggene) 6. Batu Susu Rongga 7. Benteng Kursi dan Meja (Ds., Wae Mokel) 8. Watu Flores (Ds.Bamo) 9. Benteng Ndalo (Ds. Golo Meni) 10. Watu Mundung (Ds. Golo Meni) 11. Batu Kelamin Laki-Laki (Watu Embu Kode Haki) dan Batu Kelamin Perempuan (Watu Embu Kode Fai) di Puncak Gunung Poco Ndeki) Puncak poco Ndeki,Kel. Tana Rata 12. Watu Lamba (Kel. Watu Nggene) 13. Meriam Kuno (Ds. Mbengan) 14. Rumah Adat Leluhur La (Ds. Rana Mbeling) 15. Anyaman Topi Khas Rongga 16. Festival Tanjung Bendera 17. Caci 18. Danding 19. Mbata 20. Raga Sae 21. Penti / Upacara Adat
4.	Elar (15 ODTW)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Rana Kulan Desa Rana Kulan (Ds. Rana Kulan) 2. Gua Liang Toge Kel. Lempang Paji 3. Danau Rana Gapang (Ds. Rana Gapang) 4. Danau Rana Kulan (Ds. Rana Kulan) 5. Taman Laut Labuan Kelambu (Ds. Golo Lijun) 6. Taman Laut Leko Lembo 7. Teluk Nangga Lok (Ds. Golo Lijun) 8. Danau Rana Ngandong (Ds. Golo Lebo) 9. Jembatan Alam Lampang (Ds. Rana Kulan) 10. Golo Munde (Ds. Golo Munde) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situs Kampung Wanger (Ds. Biting) 2. Benteng Sipi (Ds. Golo Wunis) 3. Batu Manusia (Kel. Lempang Paji) 4. Gong Legur Lai (Kel. Lempang Paji) 5. Tenun Ikat 6. Caci 7. Danding 8. Mbata 9. Raga Sae 10. Penti / Upacara Adat
5.	Sambu Rampas (8 ODTW)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Rana Tonjong (Ds. Nanga Mbaling) 2. Pantai Watu Pajung (Ds. Nanga Mbaur) 3. Rugu (Buaya Darat Pota) Ds. Nanga Mbaur 4. Perepak Baras (Ds. Nanga Baras) 5. Pantai Nanga Baras (Ds. Nanga Baras) 6. Gereja Tua Lengko Ajang (Kel. Golo Wangkung) 7. Kawasan Buaya Darat Rugu Pota (Ds. Nampar Sepang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenun Ikat 2. Caci 3. Danding 4. Mbata 5. Raga Sae 6. Penti / Upacara Adat
6.	Poco Ranaka (14)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pong Dode di Kelurahan Mandosawu 2. Air Terjun Cunca Pik (Kel. Nggalak Leleng) 3. Cunca Lelo (Ds. Leong) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compang Mano (Kel. Mandusawu) 2. Compang Kuleng (Ds. Bangka

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Gua LiangLeong (Ds. Leong) 5. Peke Tana (Ds. Leong) 6. Danau Rana Poja (Ds. Rende Nao) 7. Danau Rana Rawuk (Ds. Rende Nao) 8. Gunung Mandusawu (Kel. Mandusawu) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kuleng 3. Compang Bangka Pau (Ds. Bangka pau) 4. Benteng Empu, Tombak dan Keris Pusaka (Ds. Poco Lia) 5. Watu Likang Telu (Kel. Mandusawu) 6. Watu Lanur (Ds. Watu lanur) 7. Caci 8. Danding 9. Mbata 10. Raga Sae 11. Penti / Upacara Adat
7.	Poco Ranaka Timur (7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Rana Dara (Ds. Wejang Mawe) 2. Cunca Radi Ntangis (Ds. Ulu Wae) 3. Cunca Wek (Ds. Ulu Wae) 4. Cunca Nenteng Anggo (Ds. Ulu Wae) 5. Danau Rana Laco (Ds. Rengkam) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung TuaBeo Leda (Ds. Ulu Wae) 2. Watu Tokol (Ds. Ulu Wae) 3. Caci 4. Danding 5. Mbata 6. Raga Sae 7. Penti / Upacara Adat
8.	Elar Selatan (22)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Likang Telu (Ds. Teno Mese) 2. Jembatan AlamTetes Tanah (Ds. Golo Wuas) 3. Liang Toge (Kel. Lempang Paji) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benteng Sipi 2. Compang Tuwit (Ds. Langgasai) 3. Watu Rombeng (Ds. Gising) 4. Watu Pia/Batu belah (Ds. Langgasai) 5. Woko Rajong (Ds. Langgasai) 6. Watu Kowang (Ds. Langgasai) 7. Watu Lianggasai (Ds. Langgasai) 8. Watu Banggang (Ds. Langgasai) 9. Watu Poso (Ds. Langgasai) 10. Benga Ndiwal (Ds. Langgasai) 11. Botol Tanah (Ds. Langgasai) 12. Deru Pirong (Ds. Nanga Meje) 13. Watu Ulu Wawi (Ds. Nanga Meje) 14. Watu Ndalo Dea (Ds. Nanga Meje) 15. Watu Dopo Wing (Ds. Nanga Meje) 16. Watu Seken/Cekeng (Ds. Nanga Meje) 17. Repa Ndiwal (Ds. Nanga Meje) 18. Anyaman Topi Rajong 19. Tarian Rawa 20. Caci 21. Danding 22. Mbata 23. Raga Sae 24. Penti / Upacara Adat
9.	Rana Mese (9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Rana Mese (Ds. Golo Loni) 2. Air Terjun Cunca Rede (Ds. Sana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Teber (Ds. Compang Teber)

		3. Lokom) Air Terjun Cunca Ncuar (Ds. Sana Lokom) 4. Mata Air Panas Wakas (Ds. Golo Loni) 5. Wae Kolang dan Cunca WaeNgcung (Ds. Rondo Woing) 6. Pantai Nanga Lanang (Ds. Bea Ngencung)	2. Compang Lalang (Ds. Satar Lahing) 3. Cepi Ndejing/Bekas Kampung Tua (Ds. Compang Ndejing) 4. Caci 5. Danding 6. Mbata 7. Raga Sae 8. Penti / Upacara Adat
--	--	---	--

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019

b) Data Perkembangan Pembangunan Kepariwisata

➤ Data Kunjungan Wisatawan

Tabel 1.67

Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2009-2019

No.	Tahun	Wisatawan		Total
		Wisman	Wisnus	
1	2	3	4	5
1.	2009	112	7.186	7.298
2.	2010	0	4.440	4.440
3.	2011	0	3.658	3.658
4.	2012	101	7.267	7.368
5.	2013	-	6.166	6.166
6.	2014	43	9.294	9.337
7.	2015	89	10.755	10.844
8.	2016	182	12.657	12.839
9.	2017	145	14.290	14.435
10.	2018	55	14.840	14.895
11.	2019	150	15.463	15.613
Jumlah		877	106.016	106.893

➤ Usaha Jasa Pariwisata

Usaha jasa pariwisata seperti jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, jasa konservasi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata sampai saat ini belum tersedia di Kabupaten Manggarai Timur.

➤ Usaha Sarana Pariwisata

▪ Hotel

Tabel 1.68

Jumlah Hotel di Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Hotel	Jumlah Fasilitas		Alamat
		Room	Bed	
1.	Sama Jaya	8	16	Borong
2.	Kharisma	12	14	Borong
3.	Primadona	15	28	Borong
4.	AA	10	20	Borong

5.	Kasih Sayang	19	19	Borong
6.	Krisna	8	16	Borong
7	Golden Hill	10	16	Peot –Borong
8	Hotel Gloria	17	28	Toka,Nanga Labang
9	Embun Pagi	9	14	Borong
10	Wae Bobo Homestay	5	12	Borong
11	Penginapan Leko Lembo	2	4	Waelengga
12	Mbalata Cottage	5	5	Waewole
13	Teratai	5	8	Pota
14	Empat Pohon	5	5	Golo Lijun- Elar Selatan

▪ Salon Kecantikan

Tabel 1.69
Data Salon/Pangkas Rambut di Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Salon / Pangkas Rambut	Alamat
1	Salon Ayu	Borong
2	Salon Sella	Borong
3	Salon Kartini	Borong
4	Salon Hesti	Borong
5	Salon Hilda	Borong
6	Salon Duta	Borong
7	Bangkalan Purnama 1	Borong
8	Bangkalan Purnama 2	Borong
9	Salon Vons	Borong

▪ Billiard

Tabel 1.70
Jumlah Usaha Billiard

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Billiard
1	Kotakomba	14
2	Borong	6
3	Lamba Leda	3
4	Poco Ranaka	5
5	Elar	2
6	Sambi Rampas	2

▪ Karaoke

Tabel 1.71
Jumlah usaha Karaoke

No	Nama Karaoke	Alamat
1	Cepi Watu Karaoke Hall	Pantai Cepi Watu
2	Stefany	Pantai Cepi Watu
3	Flamboyan	Jl.Trans Flores Kotandora
4	Zona Café	Pantai Cepi Watu
5	Cemara Café	Pantai Cepi Watu
6	Pelangi Café	Pantai Cepi Watu

▪ Pemdokan

Tabel 1.72
Jumlah Pemdokan di Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Pemdokan	Tipe
1	Pemdokan Haris	Tipe C (1-9 Kamar)
2	Pemdokan Darwin	Tipe B (10 – 19 Kamar)
3	Pemdokan Simson	Tipe B (10 – 19 Kamar)
4	Pemdokan Purnawan	Tipe B (10 – 19 Kamar)
5	Pemdokan Halim	Tipe C (1-9 Kamar)

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Manggarai Timur Tahun 2019

▪ Rumah Makan

Tabel 1.73
Jumlah Usaha Rumah Makan di Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Rumah Makan	Jumlah Fasilitas		Jenis Masakan	Alamat
		Meja	Kursi		
1.	Bakso Udin	8	4	Indonesia	Borong
2.	Timur Raya	8	4	Indonesia	Borong
3.	Bakso Pelangi			Indonesia	Borong
4.	Saiyo	13	-	Indonesia	Borong
5.	Merapi Indah	-	-	Indonesia	Borong
6.	Sederhana Mandiri (Makasar)	6	-	Indonesia	Borong
7.	Saba Mananti	7	-	Indonesia	Borong
8.	Ayyu	10	-	Indonesia	Wae Lengga
9.	Bakso Urat	-	-	Indonesia	Borong

10.	Mulia	-	-	Indonesia	Borong
11.	Bakso Solo	-	-	Indonesia	Borong
12.	Semarang	4	-	Indonesia	Borong
13.	Bougenvile	20	80	Indonesia	Borong
14.	Aveno	-	-	Indonesia	Borong
15.	Arema	-	-	Indonesia	Borong
16.	Laudante Indah	6	-	Indonesia	Borong
17.	Nunca Lale	4	-	Indonesia	Mbolata
18.	RM Ojo Lali	-	-	Indonesia	Borong
19.	Bakso Rudal	-	-	Indonesia	Borong
20.	RM. Dua Putra	-	-	Indonesia	Borong
21.	RM. Jawa Bintaro	-	-	Indonesia	Borong
22.	Warung Bakso Abad	-	-	Indonesia	Borong

Sumber data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

c) Kelembagaan Pariwisata

Kelompok Sadar Wisata : 6 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak : 278 orang, terdiri dari laki-laki : 216 orang dan perempuan : 62 orang.

➤ Kelompok Sadar Wisata

Tabel 1.74
Data Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	Nama POKDARWIS	Ketua	Alamat	Anggota		Jumlah	Produk
			(Kelurahan/Kecamatan)	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cincoleng	Kasmir Kanoni	Ds.Tengku Leda	41	9	50	Kegiatan yang telah dilaksanakan: * Pelestarian Budaya: - Seni Musik dan Tarian Tradisional: Musik Tradisional: Gendang, Gong, Gambus Tarian Tradisional: Caci, Raga Sae, Danding - Tenun ikat : Songke, Selendang - Upacara Adat: Penti (Upacara persiapan menanam dan sukuran panen), Upacara Perkawinan, Upacara kematian * Pelestarian Alam: - Penghijauan: Penanaman pohon di mata air

							- Kebersihan: gotong-royong membersihkan lingkungan desa * Kegiatan Usaha: Kios/Toko cenderamata: dijual langsung oleh pengrajin(umbi-umbian)
2	Compang Mano	Nikolaus Sulaiman	Kel. Mandosawu, Kec.Poco Ranaka	48	2	50	* Musik Tradisional: Gendang, Gong, Gambus * Tarian Tradisional: Caci, Raga Sae, Danding * Makanan Tradisional: Kolo,kopi, rani sombu * Tenun Ikat: Songke * Upacara Adat : - Penti (Upacara persiapan menanam dan sukuran panen), Upacara Perkawinan, Upacara kematian
3	Watu Pajung	Yusuf Sampang	Ds. Nanga Mbaur, Kec. Sambi Rampas	42	5	47	* Musik Tradisional: Gendang, Gong, gambus * Tarian Tradisional: Caci, Danding * Tenun Ikat: Songke * Makanan Tradisional: Kolo,kopi * Upacara Adat : Penti (Upacara persiapan menanam dan sukuran panen), Upacara Perkawinan, Upacara kematian
4	Rana Mese	Rofinus Bot	Ds. Golo Loni, Kec. Rana Mese	21	10	31	* Musik Tradisional: Gendang, Gong, Nggiring * Tarian Tradisional: Caci, Danding, * Tenun Ikat: Songke * Upacara Adat : Penti (Upacara persiapan menanam dan sukuran panen), Upacara Perkawinan, Upacara kematian
5	Masak Leros	Titus Jeheno	Desa Golo Ndele Kec. Kota Komba	38	17	55	* Musik Tradisional: Gendang, Gong, Nggiring * Tarian Tradisional: Caci Danding, * Tenun Ikat: Songke * Upacara Adat : Penti * Program Pelestarian Alam: Penghijauan, Bersi Pantai, Bakti Sosial
6.	Watu Lamba	Antonius Joni	Kel. Watu Nggene Kecamatan Kota Komba	26	19	45	* Musik Tradisional: Gendang, Gong, Nggiring * Tarian Tradisional: Caci, Raga Sae, Danding, Rangkuk Alu * Tenun Ikat: Songke * Upacara Adat : Penti * Program Pelestarian Alam: Penghijauan, Bersi Pantai, Bakti Sosial

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019

5) Potensi Bidang Perhubungan

➤ Perhubungan Darat

Tabel 1.75
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No.	Jenis Kendaraan	Ket	
		2019	
1.	Mini Bus	115	
2.	Light Truck	165	
3.	Damp Truck	183	
4.	Pick Up	95	
5.	Tangkie	5	
6.	Micro Bus	15	
7.	Mobil penumpang	-	
Jumlah		578	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

a) Data Trayek, seperti pada tabel 1.76 berikut :

➤ Trayek Pengangkutan Barang

Tabel 1.76
Trayek PB (Pengangkutan Barang)

No	Trayek	Jumlah	Keterangan
1.	Terminal Borong – Wae Lengga	2	
2.	Terminal Borong – Satar Lahing	4	
3.	Terminal Borong – Mukun	1	
4.	Terminal Borong – Rokat	1	
5.	Terminal Borong – Golo Meleng	1	
Jumlah		9	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

➤ Trayek Po (Pengangkutan Orang)

Tabel 1.77
Trayek PO (Pengangkutan Orang)

No	Trayek	Jumlah	Keterangan
1.	Terminal Borong – Ketang	5	
2.	Terminal Borong – Pa'an Leleng	4	
3.	Terminal Borong – Wae Lengga	17	
4.	Terminal Borong – Ntaur	1	
5.	Terminal Borong – Mano	4	
6.	Terminal Borong – Bea Laing	2	
7.	Terminal Borong – Satar Lahing	4	
8.	Terminal Borong – Kakang	1	
9.	Terminal Borong – Sita	3	
10.	Terminal Borong – Teber	1	
11.	Terminal Borong – Nunur	2	
12.	Terminal Borong – Mukun	6	
13.	Terminal Borong – Elar	1	
14.	Terminal Borong – Lalang	3	
15.	Reo – Pota – Mbay	1	
16.	Terminal Borong – Rokat	1	
17.	Terminal Borong – Golo Meleng	1	
18.	Benteng Jawa – Reo	1	

19.	Terminal Borong-Satar Mata	1	
20.	Terminal Borong- Runus	1	
21.	Terminal Borong- Waling	4	
22.	Terminal Borong- Mukun-Mano	1	
23.	Terminal Borong-Wukir-Mano	1	
24.	Terminal Borong-Wojang-Wae Sugi	2	
25.	Terminal Borong-Benteng Jawa-Satar Teu	1	
26.	Terminal Borong-Lait	1	
27.	Terminal Borong-Comu	1	
28.	Terminal Borong-Waling-Mukun	1	
29.	Terminal Borong-Lidi	1	
30.	Terminal Borong-Sambi rampas	1	
31.	Terminal Borong-Colol	1	
32.	Terminal Borong-Mamba	1	
Jumlah		76	

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Matim Tahun 2019

➤ Perhubungan Laut dan Udara

1) Perhubungan Laut

- Tanah Tambatan Perahu Dampek
- Tambatan Perahu Dampek
- Tambatan Perahu Pota
- Tambatan Perahu Borong

2) Perhubungan Udara

Tanjung Bendera (Kecamatan Kota Komba), telah dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan bandar udara. Saat ini masih menunggu ijin prinsip pembangunan bandar udara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pembebasan lahan sudah dilakukan di tahun 2015 seluas 100 ha (hektar).

6) Data Potensi Bidang Energi

Sistem ketenagalistrikan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur saat ini masih didominasi oleh PT. PLN (persero) sebagai BUMN yang operasionalnya dilakukan oleh PT.PLN (persero) Cabang Flores Bagian Barat yang mengelolah pemasaran dan pelayanan kelistrikan pada pelanggan dan calon pelanggan di daerah Borong dan sekitarnya.

Tabel 1.78
Data Pelanggan PLN Manggarai Timur

N o	Kecamatan	Prabayar	Pascabayar	SEHEN	Total
1.	Borong dan Rana Mese	8.244	6	1.484	9.734
2.	Elar	0		1.100	1.100
3.	Elar Selatan	0	0	966	966
4.	Kota Komba	1.702		556	2.258

5.	Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur	10.120	2	480	1.004
6	Lamba Leda	524		1.059	11.181
7	Sambi Rampas	1.268		1.056	2.324
	Jumlah	21.858	8	6.701	28.567

Sumber : PT. PLN (Persero) wilayah NTT, Cabang Flores Bagian Barat

7) Potensi Bidang Industri dan Perdagangan

a) Jumlah Unit Usaha Industri

Jumlah unit usaha industri di Kabupaten Manggarai Timur tahun dapat dilihat pada tabel 1.79 berikut:

Tabel 1.79
Jumlah Unit Usaha Industri

No	Jenis usaha industri	Keterangan	
		2019	
1	Industri Formal	22	
2	Industri Non Formal	14	
	Jumlah	36	

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi & UKM, Kab. Manggarai Timur Tahun 2019

b) Jumlah Unit Usaha Perdagangan Formal

Jumlah unit usaha perdagangan formal di Kabupaten Manggarai Timur seperti pada tabel 1.80 berikut :

Tabel 1.80
Jumlah Unit Usaha Perdagangan Formal

No	Jenis Usaha Perdagangan	Unit Usaha Perdagangan Formal
1	Pedagang Besar	88
2	Pedagang Menengah	184
3	Pedagang Kecil	633
4	Pedagang Mikro	1101
5	Jumlah	2056

Sumber Data : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Manggarai Timur

8) Potensi Bidang Koperasi dan UKM

a) Jumlah Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019

Jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

Tabel 1.81
Data Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	Jenis Koperasi	Koperasi di Manggarai Timur	Ket
1	Koperasi berbadan hukum	99	
2	Pra Koperasi	152	
	Jumlah	251	

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi & UKM, Kab. Manggarai Timur Tahun 2019

- b) Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, seperti pada tabel 1.82 berikut :

Tabel 1.82
Data Jenis Usaha di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	Jenis usaha	Tahun 2019	Ket
1	Menengah	9	
2	Kecil	293	
3	Mikro	1.019	
Jumlah		1.430	

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi & UKM, Kab. Manggarai Timur Tahun 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Manggarai Timur

1) Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah serta pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan/dimanfaatkan oleh suatu wilayah.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil/manfaat bagi antara nilai tambah yang dihasilkan/dimanfaatkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB Manggarai Timur atas dasar harga berlaku 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mencapai 3,21 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 243 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 2,99 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 1,93 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 2,03 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Manggarai Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,03

persen, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Manggarai Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Manggarai Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Manggarai Timur pada tahun 2019 dihasil/manfaatkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 44,78 persen (angka ini menurun dari 46,96 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintah sebesar 15,36 persen (naik dari 13,41 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,80 persen (naik dari 11,65 persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,27 persen (naik dari 9,17 persen di tahun 2015) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,34 persen (naik dari 5,63 persen di tahun 2015).

Tabel 1.83
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 – 2019

Kategori Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46.96	46.17	45.75	45.36	44.78
B - Pertambangan dan Penggalian	4.55	4.21	3.57	3.10	2.57
C - Industri Pengolahan	0.56	0.55	0.55	0.56	0.58
D - Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	0
F - Konstruksi	5.63	5.83	6.04	6.18	6.34
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.65	11.90	12.03	12.32	12.80
H - Transportasi dan Pergudangan	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
J - Informasi dan Komunikasi	9.17	9.29	9.38	9.25	9.27

K - Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.47	0.48	0.48	0.45
L - Real Estate	1.46	1.45	1.43	1.41	1.31
M,N - Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.41	13.84	14.37	14.87	15.36
P - Jasa Pendidikan	2.57	2.63	2.68	2.74	2.78
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.46	2.53	2.57	2.60	2.63
R,S,T,U - Jasa lainnya	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30
PDRB	100	100	100	100	100

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kab. Manggarai Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Diantara kelima lapangan usaha tersebut Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Konstruksi serta Lapangan Usaha Komunikasi dan Informasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Manggarai Timur 2015 - 2019

a) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 - 2019

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasil/manfaatkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Manggarai Timur pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Manggarai Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2,03 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 1,93 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Industri Pengolahan yaitu 8,51 persen. Sedangkan, yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Pertambangan dan Penggalian menurun sebesar -4,15 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi menurun sebesar -0,58 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen. Sedangkan dua lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah yaitu kurang dari lima persen serta satu lapangan usaha yang belum mempunyai kontribusi dalam PDRB Manggarai Timur yaitu jasa perusahaan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen tersebut antara lain: lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,51 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar 5,58 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,92 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,29 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3.73 persen dan jasa lainnya sebesar 4,16 persen.

Tabel 1.84
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Manggarai Timur Lapangan Usaha (persen), 2015 – 2019

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	3.27	4.39	3.49	3.73
B - Pertambangan dan Penggalian	-0.96	2.22	-6.55	-2.98	-4.15
C - Industri Pengolahan	2.45	3.78	3.96	5.08	8.51
D - Pengadaan Listrik dan Gas	15.98	15.53	1.87	12.71	1.03
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.51	4.95	4.44	5.38	5.58
F – Konstruksi	6.98	7.15	7.33	7.73	5.96
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.99	7.91	7.17	7.91	7.92
H - Transportasi dan Pergudangan	4.84	5.11	5.72	5.75	3.78
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.48	7.15	7.71	9.39	6.32
J - Informasi dan Komunikasi	7.30	6.75	6.66	6.22	6.13
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	6.12	5.24	6.43	2.21	-0.58

L - Real Estate	6.74	5.10	5.80	5.70	0.39
M,N - Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.03	7.13	6.91	7.32	8.29
P - Jasa Pendidikan	6.71	6.93	6.02	5.95	5.68
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.50	7.11	7.30	7.25	6.09
R,S,T,U - Jasa lainnya	3.50	3.82	3.89	4.08	4.16
PDRB	5.10	5.11	5.08	5.03	5.04

Sumber: Buku PDRB Kab. Manggarai Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

Keterangan **) angka sangat sementara

*) angka sementara

b) Struktur Ekonomi Manggarai Timur

Selama lima tahun terakhir (2015 - 2019) struktur perekonomian Manggarai Timur didominasi oleh lima (5) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Manggarai Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Manggarai Timur pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 44,78 persen (angka ini menurun dari 46,96 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 15,36 persen (naik dari 13,41 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,80 persen (naik dari 11,65 persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,27 persen (naik dari 9,17 persen di tahun 2015) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,34 persen (naik dari 5,63 persen di tahun 2015).

Tabel 1.85
Rata-rata Distribusi PDRB Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

Lapangan Usaha/Industry		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	47,50	46,96	46,17	45,48	45,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,10	4,55	4,21	3,61	3,15
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,40	5,63	5,83	6,02	6,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	11,15	11,65	11,90	12,09	12,35
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,68	0,67	0,68	0,70	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,45	9,17	9,29	9,45	9,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,44	1,46	1,45	1,44	1,41
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	12,91	13,41	13,84	14,39	14,96
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,52	2,57	2,63	2,73	2,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,37	2,46	2,53	2,59	2,66
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur

c) Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2014-2018

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Manggarai Timur atas

dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 7,59 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 10,55 juta rupiah (lihat tabel 1.40). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 1.86
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Manggarai Timur, 2014-2018

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2014	2015	2016	2017	2018
- ADHB/ at current price	2.038	2.254	2.494	2.732	2.991
- ADHK/ at 2010 Constant Price	1.582	1.663	1.747	1.836	1.929
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	7.594	8.273	9.014	9.753	10.558
- ADHK/ at 2010 Constant Price	5.892	6.104	6.316	6.555	6.810
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,92	3,59	3,48	3,78	3,89
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	268,4	272,5	276,6	280,1	283,3
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,30	1,53	1,51	1,26	1,14

Sumber: PDRB Kab. Manggarai Timur Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

F. Indikator Kinerja Makro

1) Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* menempatkan manusia sebagai *tujuan akhir* penyelenggaraan pembangunan sedangkan penyelenggaraan pembangunan dipandang sebagai *sarana* untuk mencapai *tujuan akhir*. IPM merupakan perhitungan indeks komposit yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Manggarai Timur sebesar 59,49, meningkat sebesar 0.98 dari 58,51 pada tahun 2017. Pada tahun yang sama IPM Provinsi NTT lebih tinggi daripada IPM Kabupaten Manggarai Timur yaitu sebesar 63,73 pada tahun 2017, meningkat menjadi 64,39 pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Kabupaten Manggarai Timur lebih rendah lagi. Pada tahun 2017 IPM Nasional sudah mencapai 70,81 poin dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,39. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya kualitas SDM Kabupaten Manggarai Timur. IPM Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.87
IPM Kabupaten Manggarai Timur dan Komponen-Komponen Pembentuknya
Tahun 2013-2018

INDIKATOR	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usia Harapan Hidup (thn)	67.26	67.27	67.27	67.39	67.4	67.62
Harapan Lama Sekolah (thn)	9.91	10.15	10.3	10.58	11.04	11.34
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6.04	6.42	6.43	6.44	6.45	6.65
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	5,170	5,208	5,246	5,396	5,643	8,219
IPM Manggarai Timur	55.74	56.58	56.83	57.5	58.51	59.49
IPM Provinsi NTT	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39
IPM Nasional	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39

Sumber: BPS, 2019

2) Angka Kemiskinan

Salah satu indikator sosial-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat diukur dengan beberapa indikator. Pertama, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kedua, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Ketiga, garis atau batas kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya belum signifikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 77,670 jiwa atau sebesar 28,64% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut sedikit menurun pada tahun 2016 sebanyak 76,370

jiwa, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 74,850 jiwa atau sebesar 26,80% dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 263,639 jiwa. Jika persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi NTT dan Nasional, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur jauh lebih tinggi.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806 /kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp.106.414 /kapita/bulan. Setiap semester garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester. Garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebesar Rp.299,530,- meningkat dari Rp.276,703,- pada tahun 2017. Pada tahun yang sama garis kemiskinan NTT sudah mencapai Rp. 322,947, meningkat menjadi Rp 346,737,- pada tahun 2017. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 4,72, meningkat menjadi 5,14 pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 4,39. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan Provinsi NTT lebih rendah yaitu 4,06 pada tahun 2015, meningkat menjadi 4,69 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 4,34. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam perkembangannya indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,09, meningkat menjadi 1,35 pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 1,17 pada tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan Provinsi NTT mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tidak jauh berbeda dengan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan

di NTT 1,07, meningkat menjadi 1,29 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,17. Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.88
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	ANGKA KEMISKINAN (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	66,100	64,720	77,670	76,370	74,850
Garis Kemiskinan Rp./Kapita/Bulan)	161,358	260,411	260,411	276,703	299,530
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	3.36	3.3	4.72	5.14	4.39
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0.68	0.69	1.09	1.35	1.17
Persentase Penduduk Miskin Manggarai Timur	24.38	24.01	28.64	27.71	26.8
Persentase Penduduk Miskin NTT	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	11.47	10.96	11.13	10.7	10.12

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

3) Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berumur 15 – 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 TPT sebesar 0,50%, menurun dari 2,18% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

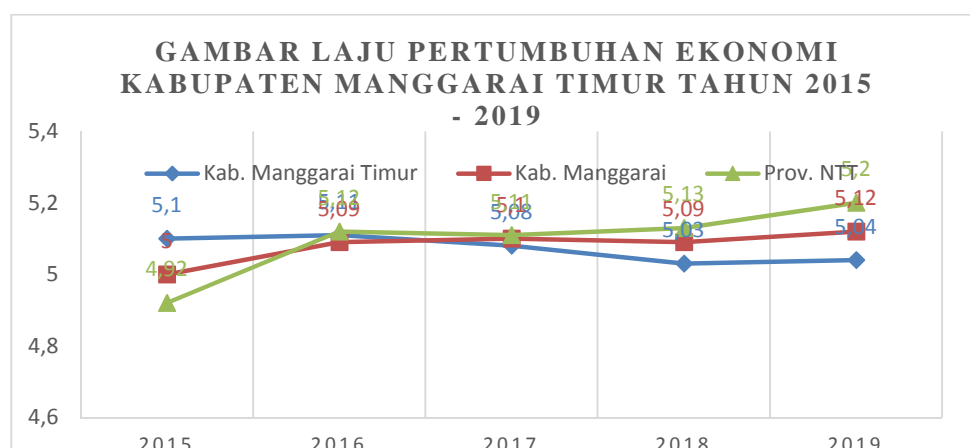
Tabel 1.89
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2014-2018

Uraian	Kabupaten Manggarai Timur					
	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	68,716	53,997	122,713	76,903	75,126	152,029
• Pengangguran Terbuka	1,945	735	2,680	555	201	756
• Tingkat Pengangguran Terbuka	2.83%	1.36%	2.18%	0.72%	0.27%	0.50%

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

4) Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur terus menurun, namun rata-rata penurunannya relatif sangat kecil, yaitu sebesar 1%. Persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,08%, menurun menjadi 5,03% pada tahun 2018 dan tahun 2019 naik menjadi 5,04%. Pada lima tahun terakhir (2015-2019) rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sebesar 5,07%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT meningkat dengan baik karena pada tahun 2019 pertumbuhan ekonominya sebesar 5,20%, naik dari 5,13% pada tahun 2018. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT lima tahun terakhir (2015-2019) sebesar 5,10%.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.90
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Manggarai Timur Lapangan Usaha (persen), 2015 – 2019

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	3.27	4.39	3.49	3.73
B - Pertambangan dan Penggalian	-0.96	2.22	-6.55	-2.98	-4.15
C - Industri Pengolahan	2.45	3.78	3.96	5.08	8.51
D - Pengadaan Listrik dan Gas	15.98	15.53	1.87	12.71	1.03
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.51	4.95	4.44	5.38	5.58
F – Konstruksi	6.98	7.15	7.33	7.73	5.96
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.99	7.91	7.17	7.91	7.92
H - Transportasi dan Pergudangan	4.84	5.11	5.72	5.75	3.78
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.48	7.15	7.71	9.39	6.32
J - Informasi dan Komunikasi	7.30	6.75	6.66	6.22	6.13
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	6.12	5.24	6.43	2.21	-0.58
L - Real Estate	6.74	5.10	5.80	5.70	0.39
M,N - Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.03	7.13	6.91	7.32	8.29
P - Jasa Pendidikan	6.71	6.93	6.02	5.95	5.68
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.50	7.11	7.30	7.25	6.09
R,S,T,U - Jasa lainnya	3.50	3.82	3.89	4.08	4.16
PDRB	5.10	5.11	5.08	5.03	5.04

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

5) Pendapatan Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu maka akan menghasilkan PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp.6,81 (Juta), naik dari Rp.6,55 (Juta) pada tahun 2017. Nilai PDRB Per Kapita tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB Per Kapita Provinsi NTT karena pada tahun 2017 PDRB Per Kapita Provinsi NTT sebesar Rp.11,87 (Juta). Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.91
PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2015-2018

No	Uraian	PDRB ADHK 2010 PER KAPITA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (Juta Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
1	PDRB ADHK 2010 (Rp.)	1,662,326.70	1,747,252.89	1,836,270.27	1,929,472.67
2	Jumlah Penduduk*	272,514	276,620	280,118	283,313
3	Pendapatan Per Kapita Kab. Manggarai Timur (Rp.)	6.09	6.31	6.55	6.81
4	Pendapatan Per Kapita Provinsi NTT (Rp.)	11,13	11,47	11,87	

* Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur dan BPS Provinsi NTT, 2019

6) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur selama ini belum dilakukan penghitungan, sehingga belum diketahui tentang ketimpangan antarwilayah. Hal ini terjadi karena data PDRB tingkat kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur belum dilakukan pengukuran.

Tabel 1.92
Indeks Gini di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Gini Manggarai Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Gini NTT	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36

Sumber: BPS NTT, 2018

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

1. Visi Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. Karena itu, visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur (RPJPD) Tahun 2009-2029 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan maka perumusan visi misi harus mengacu pada RPJPD tersebut.

Visi Kabupaten Manggarai Timur perlu dipahami dan didukung bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholder dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada kurun waktu 5 tahun yang telah lewat. Dengan demikian maka dirumuskan visi Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

Visi :“ Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya” (MATIM SEBER)

Penjabaran dari visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

1. SEBER

SEBER merupakan sebuah akronim dari Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya. Dalam bahasa Manggarai, kata SEBER diartikan sebagai rajin dan ulet. SEBER juga mengandung makna budaya kerja dan etos kerja. Pemerintah bersama masyarakat didorong untuk memiliki budaya kerja yang berorientasi pada hasil maksimal dan unggul. Maksimal dan unggul bermakna pembangunan yang adil dan merata serta terpenuhinya hak-hak dasar bagi segenap warga masyarakat Manggarai Timur.

2. SEJAHTERA

SEJAHTERA adalah harapan setiap manusia. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dengan keterpenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan bagian dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama.

3. BERBUDAYA

Kebudayaan adalah cerminan harkat dan martabat manusia yang perlu dijunjung oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai budaya Manggarai merupakan penuntun tingkah laku bagi setiap masyarakat untuk menjadi penyelaras kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah dan menumbuhkan jati diri dan kepribadian bangsa.

4. BERDAYA

Peningkatan standar hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik sangat tergantung dorongan dari diri sendiri untuk maju; untuk menggunakan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, untuk meyakinkan diri sehingga pantas dan layak melakukan sesuatu. Atas dasar itu pencapaian kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.

2. Misi Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024

Misi merupakan komponen yang paling mendasar bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sehingga mampu menyatukan segenap komponen dasar dalam organisasi dalam mencapai Visi. Agar rumusan misi mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi, maka perlu ada upaya untuk menjabarkan rumusan visi secara nyata dalam berbagai kondisi yang diperkirakan akan menandai atau mengindikasikan terwujudnya visi tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut diatas maka dirumuskan misi Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

a. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelatihan Keterampilan Serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

b. Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Unggulan Berbasis Pertanian Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Industri Kecil, Koperasi

Dan UMKM Serta Mewujudkan Pembangunan Desa Berbasis Budaya Lokal.

Misi ini menjelaskan bahwa konsep pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur ke depannya dalam rangka menjawab misi mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat antara lain dengan cara peningkatan produktifitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan sumberdaya petani, pariwisata berbasis masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat lokal baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program - program pariwisata.

c. Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Daerah Yang Berbasis Lingkungan Hidup Untuk Memudahkan Akses Ke Pelayanan Dasar Dan Mendukung` Prioritas Ekonomi Unggulan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas infrstruktur ini harus mempertimbangkan daya dukung dan ekologi wilayah sebagai bagian dari pola pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Manggarai Timur.

d. Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Ramah Perempuan Dan Layak Anak

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua aspek kehidupan, dimana kontribusi perempuan ini salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, swasta dan aspek lainnya. Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat.

e. Misi 5 : Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Inovatif Agar Terbangun Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Terpercaya Melayani Masyarakat

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, reformasi birokrasi dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat .

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat		
Misi IV : Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak		
Meningkatkan Kualitas SDM		Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pendidikan formal, informal/nonformal
		Meningkatnya akses dan peningkatan kualitas guru, siswa kualitas layanan

		pendidikan dan pemuda
		Mengembangkan pembelajaran yang kontekstual
		Revitalisasi kelompok-kelompok pemuda
	Meningkatnya kualitas layanan dan aksesibilitas	- Peningkatan kualitas dan kuantitas dokter - Peningkatan mutu tenaga dokter
	Kesehatan Masyarakat pelayanan	Peningkatan mutu tenaga kesehatan, sarana dan prasarana
		Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan system informasi data PMKS berbasis digital
	Menurunnya masalah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak
	kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sarana dan prasarana dan jaringan antar stakeholder dalam pemenuhan lapangan pekerjaan pemberdayaan kawasan transmigrasi
Misi II: Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat		
Meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ramah lingkungan
		Peningkatan industri berbasis pertanian
		Pengembangan desa berbasis potensi lokal desa
		Penguatan jaringan perdagangan dan pemasaran
		Pengembangan pariwisata berbasis

		masyarakat
	Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Memperkuat pelabuhan laut untuk perdagangan antar pulau komoditi ternak dan komoditi pertanian lainnya
	Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
		Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD)
Misi III :meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan		
Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang merata	Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, drainase dan perumahan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
		Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
Meningkatkan mutu lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	Meningkatkan pengelolaan Lingkungan hidup dan ekowisata
		Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
		Pengendalian tata ruang
		Menyediakan prasarana sampah daur ulang
Misi V :Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,transparan dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung oleh penguatan kelembagaan
		Penguatan perencanaan Pemerintah Daerah melalui e-smart (E-Government)
		Mensinkronisasi pengelolaan keuangan

		dan aset daerah sesuai regulasi
		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dengan memperkuat kapasitas sumber daya aparatur
		Mengembangkan kemitraan pemerintah daerah dengan semua stakeholder dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Meningktanya kinerja pelayanan public	Meningktakan kualitas SDM Pemerintah melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi
		Mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait dalam mendukung infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi
		Penguatan peran lembaga adat dalam meningktkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
		Membangun system pelayanan publik yang berbasis kearifan local

2.Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur

Arah Kebijakan				
Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekonomi dengan mengembangkan potensi unggulan lokal menuju industri berbasis pertanian	Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal	Pengangrustum aan budaya berbasis penguatan modal sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan percapita masyarakat Matim

C. Prioritas Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Menetapkan 11 (Sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu;

MISI	PROGRAM PRIORITAS
Misi 1 dan 2	<ol style="list-style-type: none">1. Program Sekolah Bahagia2. Program Manggarai Timur Sehat3. Program Peningkatan Kesejahteraan PMKS berbasis partisipasi masyarakat
Misi 3	<ol style="list-style-type: none">1. Program pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan2. Program Koperasi Likang Telu3. Program Community Based Tourism4. Program Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif
Misi 4	<ol style="list-style-type: none">1. Program Infrastruktur Tuntas2. Program Ramah dan cinta lingkungan
Misi 5	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan system akuntabilitas Pemerintah Daerah2. Program Sistem Pelayanan publik berbasis kearifan lokal

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.3.525.227.702,- dan realisasi Rp.3.292.966.546,- atau 93,41%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j) Monitoring dan evaluasi
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.705.300.000,- dan realisasi Rp.456.468.256,- atau 64,72%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.231.020.000,- dan realisasi Rp.169.691.560,- atau 73,45%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
- 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dialokasikan dana Rp.631.100.000,- dan realisasi Rp.620.074.900,- atau 98,25%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pembangunan gedung sekolah
 - b) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

- c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - d) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
 - e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAUD
- 5) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dialokasikan dana Rp.24.451.694.448,- dan realisasi Rp.23.899.107.991,- atau 97,74%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembangunan gedung sekolah
 - b) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
 - c) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
 - d) Pembangunan perpustakaan sekolah
 - e) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
 - f) Pengadaan mebeleur sekolah
 - g) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
 - h) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
 - i) Penyelenggaraan paket A setara SD
 - j) Penyelenggaraan paket B setara SMP
 - k) Kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
 - l) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
- m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- n) Pengadaan media pendidikan
 - o) Pengadaan peralatan LAB IPA FISIKA
 - p) Pengadaan peralatan LAB Komputer
 - q) Pengadaan sarana pendidikan PJOK
 - r) Pengadaan peralatan seni budaya
 - s) Pengadaan alat kesenian tradisional
 - t) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya
 - u) Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif
 - v) Rehab ruang perpustakaan
 - w) Rehabilitasi toilet siswa
 - x) Rehabilitasi ruang laboratorium IPA beserta prabotnya
 - y) Rehabilitasi ruang kantor
 - z) Pengadaan peralatan LAB IPA Biologi
- 6) Program pendidikan non formal, dialokasikan dana Rp.1.407.574.630,- dan realisasi Rp.1.232.032.630,- atau 87,53%, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan :
- a) Pembangunan ruang kelas baru (prasarana SKB) beserta prabotannya
 - b) Pembangunan ruang praktik/bengkel

- c) Pembangunan jamban beserta sanitasinya (SKB)
 - d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan (SKB)
 - e) Pengadaan peralatan pendidikan (SKB)
 - f) Pengadaan media pendidikan (SKB)
 - g) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
 - h) Rehabilitasi ruang penunjang (prasarana SKB) beserta prabotannya
- 7) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dialokasikan dana Rp.12.924.695.100,- dan realisasi Rp.12.795.246.114,- atau 99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
 - b) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - c) Pembinaan kelompok kerja guru
 - d) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - e) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
 - f) Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran
 - g) Kegiatan literasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian angka kredit
- 8) Program manajemen pelayanan pendidikan, dialokasikan dana Rp.1.804.982.800,- dan realisasi Rp.1.543.157.112,- atau 85,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
 - b) Kegiatan pembinaan dewan pendidikan
- 9) Program BOS, dialokasikan dana Rp.52.956.832.935,- dan realisasi Rp.49.604.475.615,- atau 93,67% untuk mendukung kegiatan BOS.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai, perangko dan terlaksananya pengiriman jasa surat-surat dinas sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung operasional perkantoran.

- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang siap pakai guna mendukung mobilitas perkantoran.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honor pengelola keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket alat pembersih dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket alat tulis kantor yang digunakan untuk kepentingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKB, PAUD satuan PNF dan 9 TK Negeri guna mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen penggandaan guna mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
 - h) Penyediaan makan minum rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman kantor sehingga terwujudnya kelancaran aktivitas perkantoran.
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - j) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat terukurnya capaian kinerja OPD.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 3 unit laptop dan 10 unit printer guna mendukung pelaksanaan tugas dan kelancaran aktivitas perkantoran.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kantor dinas yang layak dan nyaman guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan

- dinas/operasional roda 4 (empat) 2 unit dan 31 unit kendaraan roda 2 (dua) guna mendukung pelaksanaan mobilitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dengan hasil/manfaat: tersedianya guru – guru PNS dengan pangkat dan golongan yang sesuai aturan.
 - 4) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan gedung sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbangunnya 1 ruang kelas TK Al Hidayah Borong guna mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah.
 - b) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehab PAUD 2 ruang di TK Negeri Borong guna mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
 - c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pertemuan /seminar PAUD, Bunda Paud dan Porseni guru TK guna meningkatkan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten.
 - d) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD berbasis sekolah bahagia.
 - e) Monitoring dan evaluasi PAUD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan supervisi PAUD guna peningkatan kinerja tenaga pendidik.
 - 5) Program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan gedung sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya gedung sekolah baru 19 ruang (DAU), pembangunan pagar tembok 1 (DAU) dan 10 ruang kelas baru DAK SD dan SMP) guna mendukung kegiatan belajar mengajar.
 - b) Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, guru dan penjaga sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 10 unit rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah guna mendukung kinerja tenaga pendidik.
 - c) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah dengan hasil/manfaat: tersedianya ruang laboratorium dan ruang praktikum 6 unit yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

- d) Pembangunan perpustakaan sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 3 unit ruang perpustakaan untuk mendukung minat membaca siswa.
- e) Pengadaan buku dan alat tulis siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa guna mendukung program wajib belajar sembilan tahun.
- f) Pengadaan mebeleur sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 2.689 mebeleur sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
- g) Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya gedung sekolah yang layak pakai yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
- h) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya lomba OSN dan O2SN tingkat SD dan SMP.
- i) Penyelenggaraan paket A setara SD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 4 (empat) kelompok belajar guna menyetarakan Paket A dengan SD.
- j) Penyelenggaraan paket B setara SMP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 3 (tiga) kelompok belajar guna menyetarakan Paket B dengan SMP.
- k) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terselenggaranya lomba cerdas cermat, lomba olympiade sains, lomba seni budaya, lomba pop singer guna mendukung minat, bakat dan kreativitas siswa.
- l) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya sosialisasi konsep sekolah bahagia tingkat SD/SMP dan sosialisasi E-Raport SMP tahun 2019.
- m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengawasan di tahun 2019 sebagai pedoman dalam membuat kebijakan program dan kegiatan.
- n) Pengadaan media pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 9 paket media pendidikan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah.

- o) Pengadaan peralatan laboratorium IPA Fisika, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 9 paket peralatan laboratorium IPA Fisika guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.
- p) Pengadaan peralatan laboratorium komputer, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 6 paket peralatan laboratorium komputer guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.
- q) Pengadaan sarana pendidikan Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- r) Pengadaan peralatan seni budaya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 4 paket peralatan seni budaya yang memadai guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- s) Pengadaan alat kesenian tradisional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 paket alat kesenian tradisional guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.
- t) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jamban bagi siswa/guru guna menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman serta mendukung proses belajar mengajar.
- u) Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 ruang gedung sebagai pusat sumber pendidikan inklusif tahun 2019.
- v) Rehab ruang perpustakaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 2 unit ruang perpustakaan yang dapat mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- w) Rehabilitasi toilet siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 6 unit toilet yang bersih dan nyaman guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- x) Rehabilitasi ruang laboratorium IPA beserta prabotnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rehab 2 laboratorium IPA guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- y) Rehabilitasi ruang kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rehab ruang kantor 1 unit guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

- z) Pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 5 paket peralatan laboratorium IPA Biologi guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
- 6) Program pendidikan non formal, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan ruang kelas baru (prasarana SKB) beserta prabotnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 2 unit kelas baru guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
 - b) Pembangunan ruang praktek/bengkel, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 2 unit ruang praktek guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - c) Pembangunan jamban beserta sanitasinya (SKB), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit jamban guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
 - d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 3 paket buku – buku guna menunjang minat membaca siswa/siswi di sekolah.
 - e) Pengadaan peralatan pendidikan (SKB), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 unit peralatan pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
 - f) Pengadaan media pendidikan (SKB), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 unit media pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar.
 - g) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya diklat dan sosialisasi pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
 - h) Rehabilitasi ruang penunjang (prasarana SKPB) beserta prabotnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rehab 1 unit ruang penunjang yang mendukung proses belajar mengajar.
- 7) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kegiatan:
- a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terselenggaranya ujian sertifikasi guru/tenaga pendidik guna meningkatkan kesejahteraan pendidik.
 - b) Kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya guru yang siap mengikuti PLPG di Kupang guna meningkatkan mutu pendidik.

- c) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru demi tercapainya tujuan pendidikan yang baik.
 - d) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan peningkatan etos kerja dan Bimtek pengelolaan BOS sehingga terwujudnya tenaga kependidikan yang bermutu dan berkualitas.
 - e) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya honorarium bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga pendidik/tenaga kependidikan.
 - f) Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya sosialisasi kegiatan MGMP guna mendukung proses belajar mengajar.
 - g) Kegiatan literasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian angka kredit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembinaan literasi guru tahun 2019.
- 8) Program manajemen pelayanan pendidikan, dengan kegiatan :
- a) Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya UN/US pada tahun anggaran 2019 (SD dan SMP).
 - b) Pembinaan dewan pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya sosialisasi dewan pendidikan dan terbentuknya pengurus dewan pendidikan.
 - c) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.
- 9) Program BOS, kegiatan ini telah dilaksanakan melalui kegiatan BOS dengan hasil/manfaat: terealisasinya BOS untuk SD/SMP guna mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.

d. Jumlah Pegawai

Jumlah PNS pada urusan Pendidikan berjumlah 2.101 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 2 orang

- b) Sarjana (S1) : 1.175 orang
 - c) Sarjana Muda : 415 orang
 - d) SLTA : 499 orang
 - e) SLTP : 8 orang
 - f) SD : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
- a) Golongan IV : 686 orang
 - b) Gongan III : 1.088 orang
 - c) Golongan II : 324 orang
 - d) Golongan I : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
- a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 16 orang
- 4) Jabatan Fungsional : 19 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	202.085.003.300	198.613.433.278	98,28
Belanja langsung	98.638.427.615	93.613.220.724	94,91
Belanja pegawai	20.794.368.286	19.972.648.628	96,05
Belanja barang dan jasa	32.808.366.824	31.460.888.435	95,89
Belanja Modal	45.035.692.505	42.179.683.661	93,66
Jumlah	300.723.430.915	292.226.654.002	97,17

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Setiap tahun OPD menyusun rencana kebutuhan dalam rencana kerja berdasarkan Renstra OPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang dan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
- 2) Selanjutnya OPD menyusun Renja mengacu kepada RKPD dan Renstra OPD.
- 3) Pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS.
- 4) OPD menyusun RKA mengacu kepada KUA PPAS.
- 5) Pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- 6) Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- 7) Berdasarkan APBD dan penjabarannya, OPD membuat DPA sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan OPD.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang aktivitas kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masalah utama yang dihadapi adalah akurasi data pendidikan yang belum maksimal
- b. Luasnya cakupan pelayanan yang dibatasi dengan rendahnya aksesibilitas karena kondisi geografis
- c. Terbatasnya sumber daya pegawai yang berkompeten di bidangnya
- d. Terbatas sumber pembiayaan bagi pembangunan fisik fasilitas pendidikan

2) Solusi

- a. Rekonsiliasi data yang terjadwal dan menyiapkan sistem pendataan yang memadai
- b. Mobilitas seperti kendaraan dinas untuk operasional bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pelatihan-pelatihan
- d. Mengusahakan sumber pembiayaan dari berbagai pihak yang dapat mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur

2. Urusan Kesehatan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.041.500.000,- dan realisasi Rp.801.397.755,- atau 76,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan alat tulis kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan makanan dan minuman
 - f) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.1.460.043.597,- dan realisasi Rp.1.072.610.382,- atau 73,46%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.141.350.000,- dan realisasi Rp.141.350.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
- 4) Program obat dan perbekalan kesehatan, dialokasikan dana Rp.2.180.277.913,- dan realisasi Rp.2.091.379.348,- atau 95,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- 5) Program upaya kesehatan masyarakat, dialokasikan dana Rp.51.486.617.000,- dan realisasi Rp.49.397.217.481,- atau 95,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesehatan masyarakat
 - b) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
 - c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
 - d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
 - e) Pendampingan akreditasi puskesmas
 - f) Penyusunan UPL/UKL puskesmas
- 6) Program perbaikan gizi masyarakat, dialokasikan dana Rp.2.746.999.000,- dan realisasi Rp.2.740.798.850,- atau 99,77%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya penurunan stunting.
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dialokasikan dana Rp.560.720.000,- dan realisasi Rp.549.606.607,- atau 98,02%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
 - b) Pengadaan vaksin penyakit menular
 - c) Peningkatan imunisasi
 - d) Pengadaan prasarana dan alat kesehatan pengendalian pencegahan PTM
- 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan, dialokasikan dana Rp.319.553.000,- dan realisasi Rp.319.553.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, dialokasikan dana Rp.29.770.375.712,91,- dan realisasi Rp.27.855.569.978,66,- atau 93,57%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Pembangunan puskesmas
 - b) Pembangunan puskesmas pembantu
 - c) Pengadaan puskesmas keliling
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
 - e) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
 - f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - g) Rehabilitasi puskesmas
 - h) Rehabilitasi rumah para medis
 - i) Pengadaan sarana dan prasarana IFK
 - j) Pembangunan rumah para medis
- 10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, dan rumah sakit mata, dialokasikan dana Rp.18.265.609.502,10,- dan realisasi Rp.17.844.836.391,09,- atau 97,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Pembangunan rumah sakit
 - b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
 - c) Pengadaan ambulance/mobil jenazah
 - d) Pengadaan mebeleur rumah sakit
 - e) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, laundry, ruangan pasien, ruangan tunggu dan lain-lain).
- 11) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dialokasikan dana Rp.4.343.169.756,- dan realisasi Rp.2.571.416.000,- atau 59,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
 - b) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
 - c) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya rekening air dan listrik bagi Puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honor pengelola keuangan guna terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

- c) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor bagi Dinas Kesehatan sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayanan perkantoran.
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
 - e) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.
 - f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna sinkronisasi program dan kegiatan di pusat, provinsi dan daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya gedung kantor Dinas Kesehatan dan gudang farmasi.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua, STNK dan pajak roda dua dan roda empat guna memperlancar mobilitas perkantoran.
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: untuk biaya pendidikan S1 keperawatan, S2 dokter spesialis dan bantuan pendidikan mahasiswa ijin belajar.
 - 4) Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya obat-obatan dan BHP sehingga terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - 5) Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan kesehatan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya datasering dokter ke wilayah /puskesmas yang tidak memiliki dokter guna meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.
 - b) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan mesin, alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan.

- c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa Dokter PNS, dokter PTT, THL, Perawat, Tenaga Bidan dan tenaga kesehatan lainnya sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tabung oksigen puskesmas dan pergantian regulator puskesmas, operasional GFK guna memenuhi kebutuhan pasien.
 - e) Pendampingan akreditasi puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pendampingan akreditasi pada puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur.
 - f) Penyusunan UPL/UKL puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya izin lingkungan pada 5 (lima) Puskesmas yakni Puskesmas Elar, Pota, Benteng Jawa, Dampek dan Watunggong.
- 6) Program perbaikan gizi masyarakat, melalui kegiatan upaya penurunan stunting telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya antropometri, sanitarian kit, cetakan jamban dan BKB Kit guna mengurangi jumlah stunting.
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan:
- a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk guna mencegah jumlah populasi nyamuk malaria.
 - b) Pengadaan vaksin penyakit menular, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) guna mencegah penyebaran penyakit rabies.
 - c) Peningkatan imunisasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan pengepakan vaksin, pengambilan vaksin di Kupang dan cholchain.
 - d) Pengadaan prasarana dan alat kesehatan pengendalian pencegahan PTM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya cyroterapi dan BMHP pemeriksaan HIV pada Puskesmas Waelengga dan Pota guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data profil

kesehatan sehingga terpenuhinya informasi/data standar pelayanan bidang kesehatan.

- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi di Puskesmas guna mengetahui perkembangan program/kegiatan.
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, dengan kegiatan :
- a) Pembangunan puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan gedung puskesmas afirmasi yakni Puskesmas Pota, Puskesmas Watunggong, Puskesmas Elar, Puskesmas Benteng Jawa, guna menunjang pelayanan kesehatan.
 - b) Pembangunan puskesmas pembantu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan Pustu Wae Tua di Puskesmas Dampek.
 - c) Pengadaan puskesmas keliling, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya pusling roda dua sebanyak 15 unit untuk Puskesmas Elar, Pota dan Benteng Jawa guna memperlancar mobilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan air bersih, pada puskesmas-puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - e) Rehabilitasi puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya gedung Puskesmas Weleng, Mombok, Waenenda dan Puskesmas Lebi.
 - f) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya gedung puskesmas pembantu pada Pustu Pel di Kecamatan Borong.
 - g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pengawasan DAK afirmasi dan DAK reguler guna mengetahui perkembangan jalannya proyek.
 - h) Rehabilitasi rumah para medis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya rumah paramedis Puskesmas Weleng guna terciptanya tempat yang layak bagi para medis.

- i) Pengadaan sarana dan prasarana IFK, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya sarana dan prasarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).
 - j) Pembangunan rumah para medis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya pembangunan rumah para medis pada Puskesmas Pota, Elar dan Benteng Jawa.
- 10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata, dengan kegiatan :
- a) Pembangunan rumah sakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan selasar rumah sakit, review master plan rumah sakit dan rumah dinas rumah sakit guna menunjang pelayanan kesehatan.
 - b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit.
 - c) Pengadaan ambulance/mobil jenazah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 unit ambulance dan 1 unit mobil jenazah guna meningkatkan pelayanan kesehatan.
 - d) Pengadaan mebeleur rumah sakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya mebeleur rumah sakit.
 - e) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
- 11) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan:
- a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya premi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
 - b) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya informasi bagi aparatur dinas dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - c) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa dokter PTT Daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 708 orang, yaitu:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 105 orang
 - b) Sarjana Muda : 460 orang

- c) SLTA : 142 orang
- d) SLTP : 1 orang
- 2) Menurut Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 6 orang
 - b) Golongan III : 566 orang
 - c) Golongan II : 136 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 12 orang
- 4) Staf : 690 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	41.157.412.209	41.073.196.089	99.80
Belanja langsung	112.316.215.481	105.385.735.792,75	93.83
Pegawai	13.883.433.050	13.661.964.850	98.40
Barang dan jasa	43.770.178.760	39.349.344.993	89.90
Modal	54.662.603.671	52.374.425.949,75	95.81
Total	153.473.627.690	146.458.931.881,75	95.43

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah personil.
- b) Kurangnya Diklat terkait pengelolaan keuangan bagi bendahara /pembantu bendahara pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang sebagian besar latar belakang pendidikan kesehatan.
- c) Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d) Mekanisme pengadaan melalui e - purchasing dianggap masih sulit karena tidak ada di e-katalog dan barang yang dibutuhkan terlambat tayang.
- e) Keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban kegiatan.
- f) Keterbatasan waktu, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, terutama kegiatan yang dianggarkan di perubahan anggaran.
- g) Keterlambatan verifikasi kepesertaan BPJS dari anggaran Jamkesda sehingga realisasinya sangat rendah.

2) Solusi

- a) Pengadaan tenaga harian lepas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik untuk di Dinas Kesehatan maupun di UPTD.
- b) Memberikan kesempatan kepada bendahara/pembantu bendahara untuk mencermati pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- c) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai di lingkup Dinas Kesehatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengadaan barang/jasa.
- d) Mempercepat proses pengadaan melalui e purchasing.
- e) Setiap bidang dan sub bagian harus menyampaikan atau melaporkan pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pembagian pada anggaran kas setiap triwulan.
- f) Diusulkan untuk dianggarkan pada APBD induk tahun berikutnya.
- g) Mempercepat proses verifikasi peserta BPJS agar realisasinya meningkat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.899.713.785,- dan realisasi Rp.836.138.706,- atau 92,93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.387.810.000,- dan realisasi Rp.341.827.816,- atau 88,14%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pengadaan mebeleur
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.260.996.000,- dan realisasi Rp.226.691.689,- atau 86,86%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
- a) Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b) Penyusunan program kerja, pengolahan data dan informasi
- 4) Program pembangunan jalan dan jembatan, dialokasikan dana Rp.144.912.331.853,50,- dan realisasi Rp.133.920.918.383,- atau 92,42%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembangunan jalan (DAU)
 - b) Pembangunan jembatan
 - c) Pembangunan jalan (DAK)
- 5) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dialokasikan dana Rp.420.976.470,- dan realisasi Rp.420.976.470,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- 6) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dialokasikan dana Rp.600.000.000,- dan realisasi Rp.600.000,- atau 0,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
- 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dialokasikan dana Rp.2.676.269.750,- dan realisasi Rp.153.842.750,- atau 5,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan alat-alat berat
 - b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
- 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dialokasikan dana Rp.17.379.714.159,- dan realisasi Rp.10.773.367.150,- atau 61,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
 - b) Pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi secara partisipatif (DAU)
 - c) Pembangunan jaringan irigasi (DAK)
 - d) Pembangunan jaringan irigasi (DAU)
 - e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU-IPDMIP)

- 9) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dialokasikan dana Rp.23.988.477.584,50,- dan realisasi Rp.20.904.253.633,- atau 87,14%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
 - b) Pengembangan sistem distribusi air minum
 - c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAU)
 - d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - e) Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SANIMAS)/pendamping
 - f) Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) /pendamping
 - g) Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air limbah
 - h) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAK)
 - i) Peningkatan pelayanan BLUD SPAM
- 10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dialokasikan dana Rp.1.513.907.000,- dan realisasi Rp.1.208.896.230,- atau 79,85%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur.
 - b) Monitoring evaluasi dan pelaporan
 - c) Penyelenggaraan bangunan dan gedung
- 11) Program pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, dialokasikan dana Rp.752.531.000,- dan realisasi Rp.645.016.174,- atau 85,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembinaan jasa konstruksi sistem informasi
 - b) Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
 - c) Pembinaan kapasitas sumber daya aparatur jasa konstruksi

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perangko dan meterai sehingga terpenuhinya jumlah surat yang terkirim.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan air dan listrik guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional guna mendukung kegiatan perkantoran.

- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan kantor guna terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor guna memperlancar kegiatan perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang aktivitas perkantoran.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan sumber informasi aktual aparatur.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya makan dan minum rapat guna mendukung kelancaran tugas perkantoran.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat:terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
 - l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring dalam daerah guna terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan di daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 5 (lima) unit sehingga menunjang kegiatan perkantoran.
 - b) Pengadaan mebeleur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya mebeleur sebanyak 12 (dua belas) unit yang menunjang kegiatan perkantoran.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya peralatan gedung kantor sebanyak 32

(tiga puluh dua) unit sehingga pelaksanaan aktivitas perkantoran dapat berjalan lancar.

- d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya 34 (tiga puluh empat) unit kendaraan dinas/operasional guna mendukung mobilitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan:
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan guna peningkatan kinerja OPD.
 - b) Penyusunan program kerja, pengolahan data dan informasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan program kerja, pengolahan data dan informasi pada sub bagian perencanaan.
- 4) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan jalan (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen pembangunan perencanaan jalan DAU sebanyak 40 paket, pembangunan jalan DAU sebanyak 55 paket, pengawasan jalan DAU sebanyak 40 paket, perencanaan pembangunan jalan DAU (untuk fisik TA.2020) sebanyak 13 paket, pembangunan jalan kabupaten luncuran sebanyak 4 paket dan pengawasan DAU (swakelola) sebanyak 17 paket guna meningkatkan persentase kondisi jalan kabupaten/kota yang baik dan sedang dengan rincian sebagai berikut:
 - Perencanaan jalan DAU yakni:
 - Peningkatan jalan Kp.Tilir - Wakos - Kp.Riwu
 - Peningkatan jalan Sp.Perang - Kp.Riwu
 - Peningkatan jalan Kembur - Paka - Nceang (HRS)
 - Peningkatan jalan Bea Borong - SDI Golo Cigir - Sp.Jati
 - Peningkatan jalan Lingkar luar Kota Borong
 - Peningkatan jalan Longko - Kp.Mondo
 - Pembangunan jalan Lehong - Paka (Jalur Tengah)
 - Peningkatan jalan Kp.Toka- SDI Cepi Watu
 - Peningkatan jalan Watu Nggong - Mombok - Elar
 - Peningkatan jalan dalam Kota Kecamatan Elar
 - Peningkatan jalan Elar - Lempang Paji
 - Peningkatan jalan Kigit - Lewurla - Sangan Kalo
 - Peningkatan jalan Mukun - Koit - Watu - Nio

- Peningkatan jalan Mamba - Kejek - Lengor - Sp. Lima
 - Peningkatan jalan Munde - Pandoa - Munting
 - Peningkatan jalan masuk ke Maba Ruju
 - Peningkatan jalan masuk rumah adat Mukun
 - Peningkatan jalan dalam Kelurahan Rongga Koe
 - Peningkatan jalan Wae Nenda - Kp.Bawe
 - Peningkatan jalan Benteng Jawa - Necak
 - Peningkatan jalan Sp.Tangkul - Benteng Jawa
 - Peningkatan jalan Satar Teu - Benteng Jawa
 - Peningkatan jalan Benteng Jawa - Dampek
 - Pembangunan deker ruas jalan Benteng Jawa - Wae Naung
 - Peningkatan jalan Ceka Likang - Kp.Mbelar + jalan masuk SMPN 8 Poco Ranaka
 - Peningkatan jalan Kedel - Nggola
 - Peningkatan jalan Mano - Bajar - Lenang
 - Peningkatan jalan Mawe - Lawir - Wae Togong
 - Peningkatan jalan Kp.Lagos - Kp.Bobo - Kp.Wunis
 - Peningkatan jalan Paka - Ntaur - Pupung
 - Peningkatan jalan Jengok - Golo Nderu - Golo Meleng
 - Peningkatan jalan Kp.Kawit - Kp.Puntu
 - Peningkatan jalan Nanga Lanang - Lidi
 - Peningkatan jalan dalam kota Pota + jalan masuk Danau Rana Tonjong
 - Peningkatan jalan Watu Nggong - Wae Kara - Baras
 - Peningkatan jalan Dp.Wangkung - Golo Tango
 - Peningkatan jalan Bea Lenda - Wae Wao menuju jalan Compang Necak Kec.Poco Ranaka
 - Lanjutan peningkatan jalan Kisol - Bondei
 - Perencanaan jalan DAU (10 lokasi)
 - Peningkatan jalan Sopang Rajong - Lete
- Pembangunan jalan DAU, yaitu:
- Peningkatan jalan Kp. Tilir - Wakos - Kp.Riwu
 - Peningkatan jalan Sp. Perang - Kp. Riwu
 - Peningkatan jalan Kembur - Paka - Nceang (HRS)
 - Peningkatan jalan Bea Borong - SDI Golo Cigir - Sp. Jati
 - Peningkatan jalan lingkaran luar Kota Borong

- Peningkatan jalan Longko - Kp. Mondo
- Pembangunan jalan Lehong - Paka (jalur tengah)
- Peningkatan jalan Kp. Toka- SDI Cepi Watu
- Peningkatan jalan Watu Nggong - Mombok - Elar
- Peningkatan jalan dalam kota Kecamatan Elar
- Peningkatan jalan Elar - Lembang Paji
- Peningkatan jalan Kigit - Lewurla - Sangan Kalo
- Peningkatan jalan Mukun - Koit - Watu - Nio
- Peningkatan jalan Mamba - Kejek - Lengor - Sp. Lima
- Peningkatan jalan Munde - Pandoa - Munting
- Peningkatan jalan masuk ke Maba Ruju
- Peningkatan jalan masuk rumah adat Mukun
- Peningkatan jalan dalam Kelurahan Rongga Koe
- Peningkatan jalan Wae Nenda - Kp. Bawe
- Peningkatan jalan Benteng Jawa - Necak
- Peningkatan jalan Sp.Tangkul - Benteng Jawa
- Peningkatan jalan Satar Teu - Benteng Jawa
- Peningkatan jalan Benteng Jawa - Dampek
- Pembangunan deker ruas jalan Benteng Jawa - Wae Naung
- Peningkatan jalan Ceka Likang - Kp.Mbelar + jalan masuk SMPN 8 Poco Ranaka
- Peningkatan jalan Kedel - Nggola
- Peningkatan jalan Mano - Bajar - Lenang
- Peningkatan jalan Mawe - Lawir - Wae Togong
- Peningkatan jalan Kp. Lagos - Kp. Bobo - Kp. Wunis
- Peningkatan jalan Paka - Ntaur - Pupung
- Peningkatan jalan Jengok - Golo Nderu - Golo Meleng
- Peningkatan jalan Kp.Kawit - Kp. Puntu
- Peningkatan jalan Nanga Lanang - Lidi
- Peningkatan jalan dalam kota Pota + jalan masuk Danau Rana Tonjong
- Peningkatan jalan Watu Nggong - Wae Kara - Baras
- Peningkatan jalan Sp.Wangkung - Golo Tango
- Peningkatan jalan Bea Lenda - Wae Wao menuju jalan Compang Necak Kecamatan Poco Ranaka
- Lanjutan peningkatan jalan Kisol - Bondei

- Pembukaan jalan baru di Kelurahan Rongga Koe
 - Pembangunan telford di Kampung Rasan di Kelurahan Rongga Koe
 - Pembangunan jalan baru di Desa Komba (swakelola)
 - Lanjutan penggusuran jalan Sambi Desa Lembur menuju Sola Desa Ruan
 - Pembangunan drainase jalan Rejo - Watu Lanur
 - Pembukaan jalan baru di SMAN I Poco Ranaka menuju Desa Golo Lobos Kec.Poco Ranaka
 - Pembukaan jalan baru dari Alang Kelurahan Mando Sawu menuju Likang Telu, Golo Lobos Kecamatan Poco Ranaka
 - Pembukaan jalan baru Kampung Ceka Likang menuju Motang sampai Desa Gurung Turi Kecamatan Poco Ranaka
 - Pembukaan jalan baru Kampung Nengkal menuju Desa Bangka Kuleng Kecamatan Poco Ranaka
 - Pembukaan jalan baru Kampung Purak - obyek Wisata Pemandian air panas Rana Masak (Swakelola)
 - Peningkatan jalan Sopang Rajong - Lete
 - Pembangunan Cross Way Wae Musur (Swakelola)
 - Pembangunan Cross Way Wae Munting (swakelola)
 - Pembangunan bensmark Lehong
 - Pembangunan deker Wae Labe Desa Deno Kec. Poco Ranaka (ruas jalan Deno-Marang-Sp. Welu (swakelola)
 - Pembangunan limpasan Wae Kempet Desa Arus Kec. Poco Ranaka Timur (ruas jalan Deno-Marang-Sp.Welu) (Swakelola)
 - Pembangunan deker Wae Monggol di Jong Desa Benteng Raja Kec. Borong
- Pengawasan jalan DAU, yaitu:
- Peningkatan jalan Kp. Tilir - Wakos - Kp. Riwu
 - Peningkatan jalan Sp. Perang - Kp. Riwu
 - Peningkatan jalan Kembur - Paka - Nceang (HRS)
 - Peningkatan jalan Bea Borong - SDI Golo Cigir - Sp. Jati
 - Peningkatan jalan Lingkar Luar Kota Borong
 - Peningkatan jalan Longko - Kp. Mondo
 - Pembangunan jalan Lehong - Paka (Jalur Tengah)
 - Peningkatan jalan Kp. Toka- SDI Cepi Watu
 - Peningkatan jalan Watu Nggong - Mombok - Elar

- Peningkatan jalan dalam kota Kecamatan Elar
 - Peningkatan jalan Elar - Lempang Paji
 - Peningkatan jalan Kigit - Lewurla - Sangan Kalo
 - Peningkatan jalan Mukun - Koit - Watu - Nio
 - Peningkatan jalan Mamba - Kejek - Lengor - Sp. Lima
 - Peningkatan jalan Munde - Pandoa - Munting
 - Peningkatan jalan masuk ke Maba Ruju
 - Peningkatan jalan masuk rumah adat Mukun
 - Peningkatan jalan dalam Kelurahan Rongga Koe
 - Peningkatan jalan Wae Nenda - Kp. Bawe
 - Peningkatan jalan Benteng Jawa - Necak
 - Peningkatan jalan Sp. Tangkul - Benteng Jawa
 - Peningkatan jalan Satar Teu - Benteng Jawa
 - Peningkatan jalan Benteng Jawa - Dampek
 - Pembangunan deker ruas jalan Benteng Jawa - Wae Naung
 - Peningkatan jalan Ceka Likang - Kp. Mbelar + jalan masuk SMPN 8 Poco Ranaka
 - Peningkatan jalan Kedel - Nggola
 - Peningkatan jalan Mano - Bajar - Lenang
 - Peningkatan jalan Mawe - Lawir - Wae Togong
 - Peningkatan jalan Kp. Lagos - Kp. Bobo - Kp. Wunis
 - Peningkatan jalan Paka - Ntaur - Pupung
 - Peningkatan jalan Jengok - Golo Nderu - Golo Meleng
 - Peningkatan jalan Kp. Kawit - Kp. Puntu
 - Peningkatan jalan Nanga Lanang - Lidi
 - Peningkatan jalan dalam Kota Pota + jalan masuk danau Rana Tonjong
 - Peningkatan jalan Watu Nggong - Wae Kara - Baras
 - Peningkatan jalan Dp. Wangkung - Golo Tango
 - Peningkatan jalan Bea Lenda - Wae Wao menuju jalan Compang Necak Kec. Poco Ranaka
 - Lanjutan peningkatan jalan Kisol - Bondei
 - Perencanaan jalan DAU (10 Lokasi)
 - Peningkatan jalan Sopang Rajong - Lete
- Perencanaan pembangunan jalan DAU (untuk fisik TA. 2020) yaitu:
- Perencanaan pembangunan jalan DAU paket I

- Perencanaan pembangunan jalan DAU paket II
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket III
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket IV
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket V
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket VI
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket VII
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket VIII
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket IX
 - Perencanaan pembangunan jalan DAU paket X
- Pembangunan jalan Kabupaten luncuran, yaitu:
- Peningkatan jalan Sp. Perang-Tilir
 - Pemeliharaan jalan Benteng Jawa-Dampek
 - Pembangunan jalan taku Desa Satar Tesem (Telford) Kec. Poco Ranaka (Lanjutan TA. 2015)
 - Pembangunan jalan (penggusuran) Rewung Golo Pau, Desa Tango Molas, Kec. Poco Ranaka Timur (lanjutan TA. 2016)
- Pengawasan DAU (Swakelola), yaitu:
- Peningkatan jalan Sp. Perang – Kp. Riwu
 - Pembangunan jalan Lehong-Paka (jalur tengah)
 - Peningkatan jalan Kp. Toka – SDI Cepi Watu
 - Peningkatan jalan Watu Nggong – Mombok – Elar
 - Peningkatan jalan Munde – Pandoa – Munting
 - Peningkatan jalan masuk ke Maba Ruju
 - Peningkatan jalan masuk rumah adat Mukun
 - Peningkatan jalan dalam Kelurahan Rongga Koe
 - Peningkatan jalan Satar Teu – Benteng Jawa
 - Pembangunan deker ruas jalan Benteng Jawa – Wae Naong
 - Peningkatan jalan Ceka Likang – Kp. Mbelar + jalan masuk SMPN 8 Poco Ranaka
 - Peningkatan jalan dalam kota Mano
 - Peningkatan jalan Mano – Bajar – Lenang
 - Peningkatan jalan Kp. Lagos – Kp. Bobo – Kp. Wunis
 - Peningkatan jalan Welu – Wuas – Lawir
 - Peningkatan jalan Jengok – Golo Nderu – Golo Meleng
 - Peningkatan jalan Kp. Kawit – Kp. Puntu

b) Pembangunan jembatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan sebanyak 5 paket, pembangunan jembatan sebanyak 3 unit dan pengawasan pembangunan jembatan sebanyak 2 paket guna meningkatkan kemantapan jalan dengan rincian:

1) Perencanaan pembangunan jembatan, terdiri dari:

- Perencanaan pembangunan jembatan Wae Mokel 3 (kampung Lendo) Kecamatan Kota Komba
- Perencanaan pembangunan jembatan Wae Laku Hulu
- Perencanaan pembangunan jembatan Wae Ghera (Ruas Jalan Sp. Ladok - Watu - Deruk)
- Perencanaan penggantian jembatan Wae Lampang (Ruas Jalan Lengko Ajang - Rana Kulan - Pota)
- Perencanaan pembangunan jembatan Wae Mokel IV Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba.

2) Pembangunan jembatan, terdiri dari:

- Pembangunan jembatan Wae Mokel 3 (kampung Lendo) Kecamatan Kota Komba
- Pembangunan jembatan Wae Laku Hulu
- Pembangunan jembatan (Luncuran TA. 2018) Wae Musur II.

3) Pengawasan pembangunan jembatan, terdiri dari:

- Pengawasan pembangunan jembatan Wae Mokel 3 (kampung Lendo) Kecamatan Kota Komba
- Pengawasan pembangunan jembatan Wae Laku Hulu

c) Pembangunan jalan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan jalan (DAK Reguler) sebanyak 5 paket, pembangunan jalan (DAK penugasan) sebanyak 9 paket, pembangunan jalan (DAK Afirmasi) sebanyak 3 paket, perencanaan pembangunan jalan (DAK Reguler) sebanyak 8 paket, pengawasan pembangunan jalan (DAK Reguler) sebanyak 4 paket, pengawasan pembangunan jalan (DAK Penugasan) sebanyak 3 paket dan pengawasan pembangunan jalan (DAK Afirmasi) sebanyak 1 paket guna meningkatkan persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pembangunan jalan DAK Reguler, terdiri dari:

- Peningkatan jalan dalam Kota Borong

- Peningkatan jalan Sp. Mok - Ajang - Wae Lengga
 - Peningkatan jalan Wae Lengga - Nanga Rawa
 - Peningkatan jalan Warat - Paan Leleng
 - Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan
- Pembangunan jalan DAK Penugasan, terdiri dari:
- Peningkatan jalan Kembur - Metuk
 - Peningkatan jalan Lehong - Paka - Kembur
 - Peningkatan jalan Lehong - Jengok
 - Peningkatan jalan Watu Cie - Deno (Lanjutan TA. 2018)
 - Peningkatan jalan Watu Nggong - Wea - Wae Togong (Lanjutan TA. 2018)
 - Peningkatan jalan Benteng Jawa - Necak (Lanjutan TA. 2018)
 - Peningkatan jalan dalam ibu kota Kec. Elar Selatan (Lanjutan TA. 2018)
 - Peningkatan jalan Kp. Raong - Wukir - Kp. Wirang (Lanjutan TA. 2018)
 - Peningkatan jalan Sp. Welu - Wuas - Wangkar (Lanjutan TA. 2018)
- Pembangunan jalan DAK Afirmasi, terdiri dari:
- Peningkatan jalan Wae Lengga - Lete - Sopang Rajong
 - Peningkatan jalan Wae Lengga - Nanga Rawa - Wolo Kolo (Swakelola)
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Afirmasi (untuk fisik TA. 2020)
- Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler, terdiri dari:
- Peningkatan jalan Sp. Mok - Ajang - Wae Lengga
 - Peningkatan jalan Wae Lengga - Nanga Rawa
 - Peningkatan jalan Warat – Pa'an Leleng
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler paket I (untuk fisik TA. 2020)
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler paket II (untuk fisik TA. 2020)
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler paket III (untuk fisik TA. 2020)
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler paket IV (untuk fisik TA. 2020)
 - Perencanaan pembangunan jalan DAK Reguler paket V (untuk fisik TA. 2020)
- Pengawasan pembangunan jalan DAK Reguler, terdiri dari:
- Peningkatan jalan dalam Kota Borong
 - Peningkatan jalan Sp. Mok - Ajang - Wae Lengga

- Peningkatan jalan Wae Lengga - Nanga Rawa
 - Peningkatan jalan Warat – Pa'an Leleng
 - Pengawasan pembangunan jalan DAK Penugasan, terdiri dari:
 - Peningkatan jalan Kembur - Metuk
 - Peningkatan jalan Lehong - Paka - Kembur
 - Peningkatan jalan Lehong - Jengok
 - Pengawasan pembangunan jalan DAK Afirmasi, terdiri dari peningkatan jalan Wae Lengga - Lete - Sopang Rajong - Sp. Lima.
- 5) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya perencanaan dan pengawasan serta pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 1 paket, sehingga terpenuhinya kebutuhan drainase dalam kota, dengan rincian:
- Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terdiri dari perencanaan pembangunan drainase/gorong - gorong permukiman Kelurahan Tanah Rata (Swakelola)
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, terdiri dari pembangunan saluran drainase/gorong gorong permukiman Kelurahan Tanah Rata.
 - Pengawasan pembangunan drainase/gorong-gorong, terdiri dari pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong permukiman Kelurahan Tanah Rata (Swakelola)
- 6) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya 1 paket jalan guna meningkatkan kemantapan jalan yang terdiri dari rehabilitasi/pemeliharaan jalan (menyebar).
- 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kegiatan:
- a) Pengadaan alat-alat berat, tidak dilaksanakan karena rekanan/penyedia yang mendaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penyedia (SIKAP) hanya 1 (satu) rekanan saja.
 - b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya alat-alat berat guna operasional perkantoran.
- 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan:
- a) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada

sesuai dengan kewenangannya guna mengetahui panjang sungai yang dinormalisasi dengan rincian:

- Perencanaan normalisasi muara kali Wae Bobo terdiri dari 1(satu) paket perencanaan normalisasi Muara Kali Wae Bobo
 - Perencanaan pembangunan turap sungai kali Wae Reca terdiri dari 1(satu) paket perencanaan pembangunan turap sungai kali Wae Reca
 - Normalisasi muara kali Wae Bobo terdiri dari 1 (satu) paket normalisasi muara kali Wae Bobo
 - Pembangunan turap sungai kali Wae Reca terdiri dari 1 (satu) paket pembangunan turap sungai kali Wae Reca
 - Pengawasan normalisasi muara kali wae Bobo terdiri dari 1(satu) paket pengawasan normalisasi muara kali Wae Bobo
 - Pengawasan pembangunan turap sungai kali Wae Reca terdiri dari 1(satu) paket pengawasan pembangunan turap sungai kali Wae Reca
- b) Pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi secara partisipatif (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan jaringan irigasi berupa perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DAU (swakelola), pengawasan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) (partisipatif) sebanyak 6 paket, dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dau (swakelola), terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Kembang II (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Gurung Pumbu (partisipatif GP3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Nampe (partisipatif GP3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Ntoreng (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Reno Ulas (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Mata Kutung (partisipatif P3A)
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) (partisipatif), terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Kembang II (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Gurung Pumbu (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Nampe (partisipatif GP3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Ntoreng (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Reno Ulas (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Mata Kutung (partisipatif P3A)
 - Pengawasan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) (swakelola) terdiri dari:

- Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Kembang II (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Gurung Pumbu (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Nampe (partisipatif GP3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Ntoreng (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Reno Ulas (partisipatif P3A)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Mata Kutung (partisipatif P3A)
- c) Pembangunan jaringan irigasi (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsi dengan baiknya jaringan irigasi melalui 12 (dua belas) paket rehab (DAK penugasan) dengan rincian:
- Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Wau Kecamatan Sambu Rampas
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Dara Kecamatan Poco Ranaka
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Laka Cewe Kecamatan Kota Komba
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Loe Kecamatan Lamba Leda
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Mbajar Kecamatan Poco Ranaka Timur
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Melur Kecamatan Sambu Rampas
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Mokel II/Kiri Matok Kecamatan Kota Komba
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Mura I Kecamatan Borong
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Pelus Kecamatan Elar Selatan
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Rana Mese Kecamatan Rana Mese
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Wina I Kecamatan Lamba Leda
 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Wae Lampang Kecamatan Elar
- d) Pembangunan jaringan irigasi (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya melalui 5 (lima) paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi (DAU) paket I dan paket II (Swakelola), 19 (sembilan belas) paket peningkatan jaringan irigasi (DAU), 6 (enam) paket pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket I, 5 (lima) paket pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket II (Swakelola Dinas), 3 (tiga) paket perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK, 3 (tiga) paket pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi DAK, 8 (delapan) paket perencanaan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket III (Swakelola Dinas) dan 8 (delapan) paket pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket III (Swakelola Dinas) dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan peningkatan jaringan irigasi (DAU), Paket I (Swakelola Dinas), terdiri dari:

- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wangkung (Suplesi) (Kecamatan Rana Mese) (Swakelola Dinas)
- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wina II (Kecamatan Lamba Leda) (Swakelola Dinas)
- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Watu Persawahan Mbong, Kecamatan Elar Selatan
- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Tuan Kebe Mbaru (Kecamatan Kota Komba)
- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Redang, Kecamatan Poco Ranaka
- Perencanaan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket II (Swakelola Dinas), terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Rowa (Kec. Poco Ranaka Timur)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Kembung (Kec. Poco Ranaka)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Ngeles (Kecamatan Elar)
 - Peningkatan jaringan Irigasi DI Wae Ulu Galung (Kecamatan Sambu Rampas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Maras Lewe (Kecamatan Borong)
- Peningkatan jaringan irigasi (DAU), terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wangkung (Suplesi) (Kecamatan Rana Mese) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wina II (Kecamatan Lamba Leda) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Laku Sawah Gurung (Kecamatan Borong) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Watu Persawahan Mbong (Kecamatan Elar Selatan)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Tuan Kebe Mbaru (Kecamatan Kota Komba)
 - Peningkatan jaringan Irigasi DI Wae Redang (Kec. Poco Ranaka)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Rowa (Kec. Poco Ranaka Timur)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Kembung (Kec. Poco Ranaka)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Ngeles (Kecamatan Elar)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Ulu Galung (Kecamatan Sambu Rampas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Maras Lewe (Kecamatan Borong)
 - Pembangunan persawahan Watu Desa Golo Lalong (Kecamatan Borong)

- Pembangunan irigasi Wae Bobo persawahan Tolok Warat Kelurahan Satar Peot
- Pembangunan irigasi Wae Lampang - Pel Desa Poco Rii, Kecamatan Borong
- Pembangunan Irigasi Wae Boru, Desa Leong, Kec. Poco Ranaka
- Pembangunan irigasi Wae Sonot Dampek Desa Satar Padut
- Pembangunan Bronjong Tiwu Moro
- Pembangunan irigasi Persawahan Cambir
- Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Bola Kecamatan Sambu Rampas
- Pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket I, terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wangkung (Suplesi) (Kecamatan Rana Mese) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Wina II (Kecamatan Lamba Leda) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Laku Sawah Gurung (Kecamatan Borong) (Swakelola Dinas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Watu Persawahan Mbong (Kecamatan Elar Selatan)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Tuan Kebe Mbaru (Kecamatan Kota Komba)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Redang (Kecamatan Poco Ranaka)
- Pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket II (Swakelola Dinas), terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Rowa (Kecamatan Poco Ranaka Timur)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Kembung (Kecamatan Poco Ranaka)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Ngeles (Kecamatan Elar)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Ulu Galung (Kecamatan Sambu Rampas)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Maras Lewe (Kecamatan Borong)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK, terdiri dari:
 - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket I (Swakelola Dinas)
 - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket II (Swakelola Dinas)
 - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket III (Swakelola Dinas)

- Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi DAK, terdiri dari:
 - Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket I (Swakelola Dinas)
 - Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket II (Swakelola Dinas)
 - Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket III (Swakelola Dinas)
- Perencanaan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket III (Swakelola Dinas), terdiri dari:
 - Pembangunan persawahan Watu, Desa Golo Lalong, Kec.Borong
 - Pembangunan irigasi Wae Bobo Persawahan Tolok Warat, Kel.Satar Peot
 - Pembangunan irigasi Wae Lampang - Pel. Desa Poco Rii,Kec.Borong
 - Pembangunan irigasi di Wae Boru, Desa Leong, Kec.Poco Ranaka
 - Pembanguna irigasi Wae Sonot Dampek, Desa Satar Punda
 - Pembangunan bronjong Tiwu Moro
 - Pembangunan irigasi Persawahan Cambir
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Bola, Kec.Sambi Rampas
- Pengawasan peningkatan jaringan irigasi (DAU) Paket III (Swakelola Dinas), terdiri dari:
 - Pembangunan persawahan Watu, Desa Golo Lalong, Kec. Borong
 - Pembangunan irigasi Wae Bobo persawahan Tolok Warat, Kel.Satar Peot
 - Pembangunan irigasi Wae Lampang - Pel, Desa Poco Rii, Kec.Borong
 - Pembangunan irigasi di Wae Boru, Desa Leong, Kec. Poco Ranaka
 - Pembangunan irigasi Wae Sonot Dampek, Desa Satar Punda
 - Pembangunan bronjong Tiwu Moro
 - Pembangunan irigasi persawahan Cambir
 - Peningkatan jaringan irigasi DI Wae Bola, Kec.Sambi Rampas
- Peningkatan jaringan irigasi (DAU) Luncuran TA. 2018, terdiri dari:
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Manggo (Kec. Elar Selatan)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Rina (Kec. Poco Ranaka Timur)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Warungai (Kec. Elar Selatan)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Lobak (Kec. Elar Selatan)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Nggero Desa Wejang Mali (Kec. Poco Ranaka Timur)
 - Peningkatan jaringan irigasi DI. Wae Wera (Saluran Tersier) Kel. Nanga Baras (Kec. Sambi Rampas)

➤ Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK (untuk kegiatan fisik TA.2020), terdiri dari:

- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket I (Swakelola Dinas)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket II (Swakelola Dinas)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket III (Swakelola Dinas)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket IV (Swakelola Dinas)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket V (Swakelola Dinas)
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket V
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket VI
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket VII
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket VIII
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket IX
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket X
- Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi DAK Paket XI

e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU-IPDMIP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsi dengan baiknya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya dengan rincian sebagai berikut :

➤ Rehabilitasi daerah irigasi, terdiri dari:

- Rehabilitasi DI. Tiwu Sengit
- Rehabilitasi DI. Buntal
- Rehabilitasi DI. Wae Muli
- Rehabilitasi DI. Wae Sele
- Rehabilitasi DI. Wae Reca
- Rehabilitasi DI. Wae Koe
- Rehabilitasi DI. Wae Mao

➤ Fasiltiasi O dan P

- Fasilitasi OP DI Tiwu Sengit
- Fasilitasi OP DI Wae Reca dan DI Wae Koe

9) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan:

a) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya septic tank pada masyarakat berpenghasilan rendah

melalui pembangunan prasarana sanitasi (DAK Penugasan) 8 paket, pembangunan prasarana sanitasi (DAK Afirmasi) 6 paket, pembangunan prasarana sanitasi DAK Reguler (lanjutan TA. 2018) 1 paket guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan rincian:

- Pembangunan prasarana sanitasi (DAK Penugasan) sebanyak 8 paket, terdiri dari:
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Lengko Namut, Kecamatan Elar
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Wae Lokom, Kecamatan Elar
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Compang Teo, Kecamatan Elar
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Torok Golo, Kecamatan Rana Mese
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba

- Pembangunan prasarana sanitasi (DAK Afirmasi) sebanyak 6 paket, terdiri dari:
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Nampar Tabang, Kecamatan Lamba Leda
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Ngampang Mas, Kecamatan Borong
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka
 - Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong

- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Gunung Baru, Kecamatan Kota Komba
 - Pembangunan prasarana sanitasi DAK Reguler (Lanjutan TA. 2018) sebanyak 1 paket, yakni pembangunan baru SPALD terpusat skala permukiman Kecamatan Kota Komba
- b) Pengembangan sistem distribusi air minum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya air minum bersih di Kabupaten Manggarai Timur melalui pembangunan air minum bersih (HAMB) paket I dan pembangunan air minum bersih (HAMB) paket II dengan rincian, sebagai berikut:
- Pembangunan Air Minum Bersih (HAMB) Paket I, terdiri dari:
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Compang Loni
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Compang Kempo
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Compang Necak
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Ngkiong Dora
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Satar Tesem
 - Pembangunan Air Minum Bersih (HAMB) Paket II, terdiri dari:
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Compang Teber
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Golo Ngawan
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Golo Lembur
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Golo Ndari
 - Pemasangan sambungan rumah AMB Desa Bangka Arus
- c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsi dengan baiknya sarana dan prasarana air minum bersih sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih melalui perencanaan pembangunan jaringan air minum bersih DAU sebanyak 3 paket, pembangunan air minum bersih (DAU paket I) sebanyak 6 paket, pembangunan air minum bersih (DAU paket II) sebanyak 6 paket, pengawasan pembangunan jaringan air minum bersih (DAU) sebanyak 3 paket, pembangunan air minum bersih (DAU) Paket III sebanyak 3 paket, pembangunan air minum bersih (DAU) paket III sebanyak 5 paket dan pembangunan air minum bersih (Lanjutan TA. 2018) sebanyak 3 paket dengan rincian, sebagai berikut:
- Perencanaan pembangunan jaringan air minum bersih DAU, terdiri dari:
 - Perencanaan pembangunan/rehabilitasi air minum bersih (DAU)/paket I

- Perencanaan pembangunan/rehabilitasi air minum bersih (DAU)/paket II
- Perencanaan pembangunan/rehabilitasi air minum bersih (DAU) Swakelola/paket III
- Pembangunan air minum bersih (DAU) Paket I, terdiri dari:
 - Pembangunan air minum bersih Desa Satar Punda Barat, Kec. Lamba Leda
 - Rehab air minum bersih Desa Gising, Kec. Elar Selatan
 - Perluasan jaringan AMB Golo Ndele - Rana Masak Kec. Borong
 - Lanjutan pembangunan AMB Desa Bamo Kec. Kota Komba
 - Optimalisasi jaringan Kisol - Tanggo Kec. Kota Komba
 - Rehabilitasi AMB IKK Benteng Jawa (Broncaptering Rana Poja)
- Pembangunan air minum bersih (DAU) paket II, terdiri dari:
 - Lanjutan pembangunan AMB Desa Rana Gapang, Kec. Elar
 - Lanjutan pembangunan air minum bersih Cunca Roda, Kec. Poco Ranaka
 - Perluasan jaringan AMB Kampung Golo Labang, Desa Watu Lanur, Kec. Poco Ranaka
 - Perluasan jaringan AMB Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda
 - Penambahan debit air baku di Desa Gurung Liwut, Kec. Borong
 - Pembangunan AMB Wae Tok Kel. Nggalak Leleng, Kec. Poco Ranaka
- Pengawasan pembangunan jaringan air minum bersih (DAU), terdiri dari:
 - Pengawasan pembangunan air minum bersih (DAU)/swakelola paket I
 - Pengawasan pembangunan air minum bersih (DAU)/swakelola paket II
 - Pengawasan pembangunan air minum bersih (DAU)/swakelola paket III
- Pembangunan air minum bersih (DAU) Paket III, terdiri dari:
 - Pembangunan bak penampung air di Munting Warat, Kel. Satar Peot
 - Pembangunan AMB Wae Pepe Desa Compang Laho, Kec. Poco Ranaka
 - Pembangunan AMB Wae Repun Ledu, Desa Compang Wunis, Kec. Poco Ranaka Timur
 - Lanjutan pembangunan AMB Desa Satar Punda, Kec. Lamba Leda
 - Rehab AMB Kampung Purak, Desa Ngampang Mas Kec. Borong
- Pembangunan air minum bersih (Lanjutan TA. 2018), terdiri dari:
 - Pembangunan AMB Golo Ndele – Rana Masak
 - Pembangunan AMB Paleng Desa Mokel Kecamatan Kota Komba

- Pembangunan AMB Lengko Lolok, Desa Satar Punda Kec. Lamba Leda
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya informasi dan kebutuhan data dalam pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- e) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SANIMAS)/Pendamping, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya sarana dan prasarana air limbah untuk masyarakat.
- f) Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)/Pendamping, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya air minum bersih untuk masyarakat Manggarai Timur.
- g) Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air limbah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM sehingga menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan dengan rincian, sebagai berikut:
- Perencanaan dan pengawasan peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM (DAK Reguler)
 - Perencanaan peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM (DAK Reguler)
 - Perencanaan peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM (DAK Reguler) Swakelola
 - Perencanaandan pengawasan pengembangan jaringan perpipaan SPAM DAK penugasan, terdiri dari:
 - Perencanaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM (DAK Penugasan)
 - Pengawasan pengembangan jaringan perpipaan SPAM (DAK Penugasan)/Swakelola
 - Perencanaan air minum bersih DAK (untuk kegiatan fisik TA. 2020) yakni perencanaan air minum bersih DAK Paket I
- h) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsi dengan baik sarana dan prasarana air minum bersih untuk masyarakat Manggarai Timur guna terbangunnya IKK melalui peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM (DAK Reguler) sebanyak 2 paket dan pengembangan jaringan perpipaan SPAM (DAK Penugasan) sebanyak 2 paket, dengan rincian sebagai berikut:
- Peningkatan kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM (DAK Reguler), terdiri dari:

- Pengembangan jaringan perpipaan SPAM IKK Mukun Desa Golo Meni, Kec. Kota Komba
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM IKK Elar, Desa Rana Gapang dan Kel. Tiwu Kondo Kec. Elar
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM (DAK Penugasan), terdiri dari:
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Arus Kec. Poco Ranaka Timur
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Arus Kec. Poco Ranaka Timur (Lanjutan)
 - i) Peningkatan pelayanan BLUD SPAM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: jumlah pelanggan BLUD SPAM yang mendapatkan air minum bersih di Kabupaten Manggarai Timur.
- 10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang infrastruktur melalui perencanaan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 1 paket, pembangunan jalan lingkungan sebanyak 2 paket dan pengawasan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 1 paket dengan rincian sebagai berikut:
 - Perencanaan pembangunan jalan lingkungan
 - Pembangunan jalan lingkungan, terdiri dari:
 - Lanjutan rabat menuju SDI Sambi Koe, Kelurahan Watu Nggene
 - Lanjutan rabat beton di Kelurahan Tanah Rata
 - Pengawasan pembangunan jalan lingkungan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan bangunan dan gedung.
 - c) Penyelenggaraan bangunan dan gedung, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tertatanya kompleks Lehong sebanyak 3 paket sehingga meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis dan cepat tumbuh, dengan rincian sebagai berikut:
 - Perencanaan pembangunan/penataan kawasan Lehong
 - Pembangunan/penataan kawasan Lehong
 - Pengawasan pembangunan/penataan kawasan Lehong

- 11) Program pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, dengan kegiatan:
- a) Pembinaan jasa konstruksi sistem informasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya bimtek penyedia jasa konstruksi guna menambah pengetahuan penyedia jasa konstruksi dan system informasi.
 - b) Penyelenggaraan izin usaha dan jasa konstruksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya layanan jasa konstruksi dan system informasi guna mengetahui jumlah layanan jasa konstruksi.
 - c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jasa konstruksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkendalinya penyelenggaraan ijin usaha jasa kostruksi.

d. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas di dukung SDM sebanyak 56 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 26 orang
 - b) Sarjana Muda : 8 orang
 - c) SLTA : 18 orang
 - d) SD : 4 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 28 orang
 - c) Golongan II : 20 orang
 - d) Golongan I : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 6 orang
 - c) Eselon IV : 11 orang
- 4) Staf : 36 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2019, dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.581.101.122	3.131.717.807	87,45
Belanja Langsung	193.792.727.602	169.436.979.615	87,43
Belanja Pegawai	6.286.568.800	5.498.170.546	87,46
Belanja Barang dan Jasa	14.031.490.554,75	10.795.084.597	76,93
Belanja Modal	173.474.668.247,25	153.143.724.472	88
Jumlah	197.373.828.724	172.568.697.422	87,43

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Eselon IV tidak terisi sebanyak 7 orang
- b) ASN sangat kurang sementara volume dan beban kerja di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur sangat tinggi.
- c) Infrastruktur jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan infrastruktur lainnya yang belum dibangun secara merata karena keterbatasan anggaran.
- d) Terbatasnya tenaga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan yang mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e) Kondisi topografi yang mempunyai kemiringan tajam dan curah hujan cukup tinggi menyebabkan sering terjadinya longsoran tebing dan badan jalan sehingga umur konstruksi relatif singkat.
- f) Kurang profesionalnya kontraktor pelaksana dalam pengaturan jadwal kegiatan dilapangan sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu.
- g) Belum tersedianya sarana dan prasarana laboratorium penguji dan pengendalian mutu bangunan.

2) Solusi

- a) Mengusulkan kepada Bupati Manggarai Timur cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM untuk mengisi jabatan yang lowong
- b) Menambah anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan infrastruktur lainnya.
- c) Diklat pengadaan barang/jasa pemerintah 2 (dua) kali dalam setahun
- d) Infrastruktur dibangun secara bertahap sesuai kondisi lapangan
- e) Melakukan pengawasan secara berkala agar pekerjaan selesai tepat waktu.
- f) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat kegiatan tersebut.
- g) Melaksanakan diklat-diklat teknis bidang ke PU-an
- h) Menganggarkan pengadaan peralatan laboratorium penguji dan pengendalian mutu bangunan.

4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan kegiatan.

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.320.799.400,- dan realisasi Rp.316.936.000,- atau 98,79%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.254.019.409,- dan realisasi Rp.235.442.000,- atau 92,68%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.33.000.000,- dan realisasi Rp.32.987.700,- atau 99,96%, digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran.
- 4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dialokasikan dana Rp.1.962.123.500,- dan realisasi Rp.1.821.609.500,-, atau 92,83%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengendalian keamanan lingkungan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c) Operasi penertiban penyerobotan tanah Pemda/Negara dan PKL
 - d) Pembinaan dan pencegahan penyakit masyarakat
 - e) Pembekalan konsolidasi dan pencegahan penyakit masyarakat
- 5) Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dialokasikan dana Rp.158.075.000,- dan realisasi Rp.157.594.000,- atau 99,69%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap Perda dan Perbup, dialokasikan dana Rp.75.200.000,- dan realisasi Rp.75.200.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perbup.
- 7) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dialokasikan dana Rp.15.000.000,- dan realisasi Rp.14.925.000,- atau 99,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya jasa surat menyurat guna memperlancar aktivitas perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya lingkungan kantor yang bersih sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya peralatan kantor yang menunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor guna memperlancar aktivitas perkantoran.
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan dan pengetahuan pegawai.
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna mewujudkan sinkronisasi program/kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 6 unit kendaraan dinas roda dua guna memperlancar mobilitas perkantoran.
 - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya mebeleur 2 unit dan kursi 1 paket guna mendukung aktivitas perkantoran.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk kelancaran mobilitas kantor.
- 3) Program peningkatan sumber daya aparatur, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat:

terlaksananya pendidikan dan pelatihan anggota pemadam kebakaran guna meningkatkan pengetahuan anggota.

- 4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan:
 - a) Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dan Kabupaten guna terwujudnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya patroli dan patwal dalam kota serta 9 (sembilan) kecamatan dalam rangka terselenggaranya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - c) Operasi penertiban penyerobotan tanah Pemda/Negara dan PKL, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penertiban tanah Pemda/Negara dan PKL di 9 (sembilan) kecamatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - d) Pembinaan dan pencegahan penyakit masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - e) Pembekalan konsolidasi dan pencegahan penyakit masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 5) Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan:
 - a) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Prajatelah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya partisipasi evaluasi Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi NTT guna peningkatan pengetahuan dan sharing dengan anggota Polisi Pamong Praja dari kabupaten lain.
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terciptanya pengawasan dan evaluasi guna mewujudkan keamanan melalui kegiatan Polisi Pamong Praja.
- 6) Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap Perda dan Perbup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penegakan Perda guna menambah wawasan masyarakat untuk menaati peraturan yang berlaku.
- 7) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan hasil/manfaat: meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram.

d. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 8 orang
 - c) Sarjana Muda : 4 orang
 - d) SLTA : 7 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 14 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 9 orang
- 4) Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Trantibumlinmas pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.361.187.697	1.301.880.193	95,64
Belanja Langsung	2.818.217.309	2.654.694.200	94,19
Belanja Pegawai	1.826.541.800	1.693.700.200	92,72
Belanja Barang dan Jasa	839.266.100	814.236.000	97,01
Belanja Modal	152.409.409	146.758.000	96,29
Jumlah	4.179.405.006	3.956.574.393	94,66

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Tidak terlaksananya beberapa kegiatan utama karena keterbatasan anggaran
 - b) Sumber daya anggota belum semuanya terlatih dalam pendidikan Polisi Pamong Praja karena penyelenggaraan Diklat telah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dimana akan membutuhkan koordinasi dan anggaran yang cukup besar.
- 2) Solusi
 - a) Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

- b) Melaksanakan latihan rutin mingguan khusus latihan PBB serta pembinaan disiplin melalui swadaya anggota untuk pengadaan pakaian seragam Polisi Pamong Praja.

5. Urusan Perumahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pengembangan perumahan, dialokasikan dana Rp.728.640.800,- dan realisasi Rp.705.155.300,- atau 96,78%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
- 2) Program lingkungan sehat perumahan, dialokasikan dana Rp.175.335.000,- dan realisasi Rp.174.083.000,- atau 99,29%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan kawasan permukiman.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan perumahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan hasil/manfaat: tersedianya perumahan masyarakat yang layak huni guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Program lingkungan sehat perumahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan: Penataan kawasan permukiman, dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan jalan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh guna mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Manggarai Timur.

d. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai untuk urusan Perumahan tahun 2019 berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 6 orang
 - c) Sarjana Muda : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Gongan III : 6 orang

- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan perumahan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	-	-	
Belanja langsung	903.975.800	879.238.300	97,26
Belanja pegawai	500.752.200	477.791.400	95,41
Belanja barang dan jasa	403.223.600	401.446.900	99,56
Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah	903.976.100	879.238.300	97,26

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan

Kurang menunjang pelaksanaan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum adanya ASN pada bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa T.A 2019.
- b) Minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Produk perencanaan atau konstruksi dalam perencanaan (KDP) bidang kawasan permukiman Tahun 2018 tidak dapat ditindaklanjuti karena anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

2. Solusi

- a) Mengambil ASN dari OPD lain untuk menjadi PPK dan pejabat pengadaan serta ASN pada Urusan Perumahan wajib mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
- b) Penambahan anggaran tahun 2019 untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional kegiatan.
- c) Produk perencanaan atau konstruksi dalam perencanaan (KDP) bidang kawasan permukiman diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur karena urusan bidang

kawasan permukiman telah dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur.

6. Urusan Sosial

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.620.058.925,- dan realisasi Rp.604.653.425,- atau 97,52%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - k) Monitoring dan evaluasi
- 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.1.849.900,- dan realisasi Rp.1.849.900,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 3) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dialokasikan dana Rp.634.740.000,- dana realisasi Rp.622.171.850,- atau 98,20%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya.
 - b) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - c) Koordinasi pengelolaan beras sejahtera.
- 4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dialokasikan dana Rp.177.990.000,- dan realisasi Rp.155.690.000,- atau 87,47%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
 - b) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
- 5) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dialokasikan dana Rp.160.726.275,- dan realisasi Rp.160.644.275,- atau 99,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pemberian jaminan hidup bagi penyandang cacat dan lansia terlantar
 - b) Pemberdayaan trauma siaga bencana
- 6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dialokasikan dana Rp.54.765.700,- dan realisasi Rp.54.740.700,- atau 99,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembentukan dan pelantikan pengurus kelompok karang taruna
 - b) Pendataan dan inventarisasi lembaga-lembaga sosial

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
- a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai dan pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung ketersediaan penerangan bangunan kantor dan kebutuhan air.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan operasional roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk kelancaran mobilitas perkantoran.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honorarium pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan pembersih dan alat pembersih sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri untuk kenyamanan pelayanan tugas kedinasan.

- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja yang memadai untuk kelancaran pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran.
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - j) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring guna sinkronisasi program dan kegiatan
 - k) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna sinkronisasi program dan kegiatan ditingkat Provinsi dan Pusat.
- 2) Program peningkatan pengembangan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja OPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja dan pengelolaan keuangan yang transparan.
- 3) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan kegiatan:
- a) Peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya terwujudnya peningkatan petugas dan penyelenggaraan pendamping sosial, KAT dan PMKS lainnya melalui PKH yang efektif dan efisien.
 - b) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat yang mendapat pelatihan.
 - c) Koordinasi pengelolaan beras sejahtera, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersalurnya RASTRA kepada RTS PM.
- 4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan:
- a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak telah dilaksanakan dengan

hasil/manfaat: meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.

- b) Pelayanan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tertanganinya korban bencana selama masa tanggap darurat.
- 5) Program pembinaan para penyandang cacat dan taruna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya jaminan hidup bagi penyandang cacat dan lansia.
- 6) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan:
 - a) Pembentukan dan pelatihan pengurus kelompok karang taruna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbentuknya kelompok karang taruna tingkat Kabupaten Manggarai Timur.
 - b) Pendataan dan inventarisasi lembaga-lembaga sosial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terdapatnya data lembaga sosial pada Dinas Sosial.

d. Jumlah Pegawai

Pelaksanaan urusan Dinas Sosial didukung SDM sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 9 orang
 - c) Sarjana Muda : 6 orang
 - d) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 12 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 10 orang
- 4) Staf : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Sosial pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.549.636.534	1.535.849.459	99,11
Belanja Langsung	1.650.130.800	1.599.750.150	96,94
Belanja Pegawai	426.554.400	404.943.500	94,93
Belanja Barang dan Jasa	1.223.576.400	1.194.806.650	97,64
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.199.767.334	3.135.599.609	97,99

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Cukup menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Masih rendahnya intervensi pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di 9 kecamatan 159 Desa/17Kelurahan.
- b) Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di bidang sosial.

2) Solusi

- a) Mengalokasikan anggaran untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b) Membuat proposal kepada Kementerian Sosial untuk diberikan bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan soial.

7. Urusan Penataan Ruang

➤ **Dinas Pekerjaan Umum**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program perencanaan tata ruang, dialokasikan dana Rp.463.520.000,- dan realisasi Rp.421.177.386,- atau 90,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK dan RTBL
 - b) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
- 2) Program pemanfaatan ruang, dialokasikan dana Rp.1.712.000.000,- dan realisasi Rp.1.257.089.517,- atau 73,43%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
 - b) Penataan ruang terbuka hijau
- 3) Program pengendalian pemanfaatan ruang, dialokasikan dana Rp.221.480.000,- dengan realisasi Rp.195.265.301,- atau 88,16%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

- 1) Program perencanaan tata ruang, dengan kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK dan RTBL, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : persentase rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten guna penyempurnaan KLHS RDTR Kota Borong.
 - b. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: persentase rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- 2) Program pemanfaatan ruang, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya diklat aparat pemanfaatan tata ruang.
 - 3) Program pengendalian pemanfaatan ruang, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : persentase pemanfaatan tata ruang kawasan strategis kabupaten.

d. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan:
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan:
 - Golongan III : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	2.397.000.000	1.873.532.204	78,16
Belanja Pegawai	62.232.000	31.043.600	49,88
Belanja Barang dan Jasa	531.248.000	364.592.276	68,83
Belanja Modal	1.803.520.000	1.477.896.328	81,95
Jumlah	2.397.000.000	1.873.532.204	78,16

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pekerjaan Umum.

g. Kondisi sarana dan prasarana

Cukup menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

h. Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan
 - Eselon IV tidak terisi 1 (satu) orang

- Masih terbatasnya jumlah sumber daya aparatur
- Keterbatasan anggaran berkaitan dengan pengalokasian pengadaan peta dasar dan peralatan survey total station

2) Solusi

- Eselon IV yang lowong untuk segera diisi
- Perlu penambahan pegawai terutama ASN
- Penambahan anggaran pada tahun-tahun mendatang

➤ **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program perencanaan tata ruang, dialokasikan dana Rp.236.320.000,- dengan realisasi Rp.210.232.495,- atau 88,96% untuk mendukung kegiatan:
 - a) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
 - b) Penetapan kebijakan tentang RTRW Kabupaten Manggarai Timur
- 2) Program pemanfaatan ruang, dialokasikan dana sebesar Rp.62.779.724,- dan realisasi Rp.62.435.000,- atau 99,45% untuk mendukung kegiatan: monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program perencanaan tata ruang, dengan kegiatan:
 - a) Kegiatan penetapan kebijakan tentang RTRW Kabupaten Manggarai Timur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terselenggaranya koordinasi dan konsultasi rencana penyusunan RTRW Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019.
 - b) Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi penataan ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Timur guna meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan.
- 2) Program pemanfaatan ruang melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemanfaatan ruang.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan:
 - Sarjana (S1) : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan:
 - Golongan III : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 1 orang
- 4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan penataan ruang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	299.099.724	272.667.495	99,2
Belanja Pegawai	1.100.000	-	0
Belanja Barang dan Jasa	297.999.724	272.667.495	91,50
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	299.099.724	272.667.495	99,20

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi sarana dan prasarana

Cukup menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya upaya pengendalian Tata Ruang
- b) Perangkat organisasi, badan koordinasi, pengendalian ruang daerah belum berfungsi secara optimal
- c) Perkembangan pembangunan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Manggarai Timur perlu disesuaikan kembali
- d) Sumber daya manusia yang belum optimal dalam mendukung pengelolaan teknis RTRW

2) Solusi

- a) Memaksimalkan peran BKPRD dalam pengendalian struktur dan pola ruang
- b) Melakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW dan revisi RTRW
- c) Penambahan personil yang memiliki latar belakang ilmu tata ruang
- d) Penambahan peralatan kerja saat diperlukan sebagai pendukung.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.550.616.100,- dan realisasi Rp.549.125.800,- atau 99,73%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.317.401.000,- dan realisasi Rp.306.723.500,- atau 96,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.47.500.000,- dan realisasi Rp.47.407.000,- atau 99,80%, digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.1.255.000,- dan realisasi Rp.1.255.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dialokasikan dana Rp.1.331.688.000,- dan realisasi Rp.1.327.956.225,- atau 99,72%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

- 6) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dialokasikan dana Rp.322.504.000,- dan realisasi Rp.270.363.450,- atau 83,83%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pemantauan kualitas lingkungan
 - b) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - c) Pengkajian dampak lingkungan
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - e) Fasilitasi izin pemakaian kawasan hutan negara
- 7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.1.348.290.000,- dan realisasi Rp.1.344.893.513,- atau 99,75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
- 8) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dialokasikan dana Rp.1.143.152.473,66,- dan realisasi Rp.1.040.716.230,66,- atau 91,04%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang terbuka hijau.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai, perangko sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa sumber daya listrik dan air, pulsa internet/modem untuk memperlancar aktivitas perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa administrasi dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat kebersihan kantor dan pembayaran jasa cleaning service sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya komputer, laptop dan printer yang siap pakai sehingga memperlancar penyelesaian tugas perkantoran.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran penyelesaian tugas perkantoran.

- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya fotocopy dan penjilidan sehingga tersedianya dokumen kantor.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa penerangan kantor guna kelancaran kegiatan kantor.
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan guna menambah wawasan ASN.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman rapat kantor guna kelancaran kegiatan kantor.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna mewujudkan sinkronisasi program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya GPS 3 unit dan mesin potong rumput 5 unit sehingga dapat memperlancar kegiatan perkantoran.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua, roda tiga, roda empat dan roda enam sehingga dapat memperlancar kegiatan perkantoran dan kegiatan kebersihan di lapangan.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dengan hasil/manfaat: tersedianya tenaga teknis laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas air sehingga dapat melakukan pengujian kualitas air dengan hasil yang baik dan akurat.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD guna mengukur kinerja OPD.
- 5) Program pengembangan kinerja persampahan, dengan kegiatan:
- a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya sarana persampahan berupa tong sampah guna menjaga kebersihan lingkungan.

- b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya petugas kebersihan lapangan yang bertugas menangani sampah, petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang mendukung kegiatan kebersihan lingkungan.
- 6) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan:
- a) Pemantauan kualitas lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengujian kualitas air sungai dan sumur guna memperoleh data dan informasi air yang berkualitas bagi kebutuhan masyarakat.
 - b) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi terhadap pencemaran guna menjaga kelestarian lingkungan.
 - c) Pengkajian dampak lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data usaha/kegiatan yang berpotensi terhadap pencemaran sehingga usaha/kegiatan tersebut wajib memiliki dokumen izin lingkungan guna mendukung lingkungan yang sehat dan asri.
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya pengendalian lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan.
 - e) Fasilitasi izin pemakaian kawasan hutan negara, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya izin pemakaian kawasan hutan negara.
- 7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, telah dilaksanakan melalui kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, dengan hasil/manfaat: tersedianya embung dan terlaksananya penanaman anakan pohon sehingga terpeliharanya sumber-sumber mata air.
- 8) Program pengelolaan ruang terbuka hijau, telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan ruang terbuka hijau, dengan hasil/manfaat: tersedianya ruang terbuka hijau sehingga mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklim.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 3 orang

- b) Sarjana (S1) : 14 orang
- c) Sarjana Muda : 2 orang
- d) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - a) Golongan III : 15 orang
 - b) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 4 orang
 - c) Eselon IV : 7 orang
- 4) Staf : 8 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.427.753.260	1.427.753.260	100
Belanja Langsung	5.062.406.573,66	4.888.440.718,66	96,56
Belanja Pegawai	2.177.191.200	2.174.175.600	99,86
Belanja Barang dan Jasa	1.813.086.900	1.743.757.888	96,17
Belanja Modal	1.072.128.473,66	970.507.230,66	90,52
Jumlah	6.490.159.833,66	6.316.193.978,66	97,32

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Seperti yang tergambar pada Urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- a) Sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah dan bak sampah banyak yang rusak.
- b) Masyarakat masih mencampuradukan sampah organik dan an-organik
- c) Terbatasnya alat pengujian air
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat akan peraturan tentang perlindungan sumber mata air
- e) Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui jenis usaha yang berdampak lingkungan harus memiliki izin lingkungan berupa UKL/UPL maupun SPPL.

b) Solusi

- a) Sampah rumah tangga disimpan pada wadah (karung plastic/kantong plastic) yang mempermudah PKL dalam pengangkutan dan akan dianggarkan pengadaan tong sampah dan bak sampah pada tahun 2019.

- b) Akan terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce/pemilahan, Reuse/pemanfaatan kembali, Recycle/daur ulang)
- c) Pengujian kualitas air tetap dilakukan namun terbatas pada pengujian parameter lapangan
- d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku
- e) Akan terus dilakukan sosialisasi tentang lingkungan hidup kepada masyarakat

9. Urusan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.438.783.200,- dan realisasi Rp.432.806.115,- atau 98,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.74.084.000,- dan realisasi Rp.68.913.500,- atau 93,021%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.5.000.000,- dan realisasi Rp.5.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

- 4) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dialokasikan dana Rp.169.000.000,- dan realisasi Rp.143.749.947,- atau 85,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antarusaha besar dan usaha kecil menengah
 - b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - c) Penyelenggaraan pameran investasi
 - d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 5) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dialokasikan dana Rp.83.300.000,- dan realisasi Rp.83.300.000,- atau 85,06%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
 - b) Optimalisasi/sosialisasi perda penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
- 6) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dialokasikan dana Rp.287.840.000,- dan realisasi Rp.277.247.600,- atau 96,32%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan pelayanan perizinan
 - b) Peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan
- 7) Program pengendalian penanaman modal dan pelayanan data informasi, dialokasikan dana Rp.105.000.000,- dan realisasi Rp.102.704.500,- atau 97,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pendataan jenis-jenis usaha
 - b) Penyusunan laporan kegiatan penanaman modal dan PTSP
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya aktivitas surat menyurat sehingga terwujudnya peningkatan pelayanan.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya jasa listrik kantor sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal.

- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service guna mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya peralatan kerja kantor seperti laptop, printer, stavol, komputer PC dan UPS yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetak dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya surat kabar guna menambah wawasan aparatur.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makan dan minum rapat guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas/operasional demi peningkatan pelayanan.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan:
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan capaian kinerja guna mengukur capaian kinerja.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- 4) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penilaian kelompok usaha produktif dan potensial dan terlaksananya penyampaian dokumen ke BKPM provinsi.
 - b. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen hasil koordinasi perencanaan penanaman modal.
 - c. Penyelenggaraan pameran investasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pameran investasi.
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen hasil monitoring sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.
- 5) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan:
 - a) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen penyederhanaan prosedur perizinan guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
 - b) Optimalisasi/sosialisasi Peraturan Daerah penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan terpadu.
- 6) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan:
 - a) Pengembangan pelayanan perizinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya media penyebaran informasi perizinan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perizinan.
 - b) Peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data hasil survey di lapangan guna meningkatkan pelayanan perizinan.
- 7) Program pengendalian penanaman modal dan pelayanan data informasi, dengan kegiatan:
 - a) Pendataan jenis usaha, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data jenis usaha guna mengukur perkembangan usaha serta mengevaluasi kepemilikan dokumen ijin usaha.
 - b) Penyusunan laporan kegiatan penanaman modal dan PTSP dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan kegiatan penanaman modal dan PTSP guna mengukur capaian kinerja.

- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen hasil monitoring sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 19 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 2 orang
 - b) Sarjana (S1) : 14 orang
 - c) Sarjana Muda : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 6 orang
 - b) Golongan III : 13 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon IV : 10 orang
 - b) Eselon III : 4 orang
 - c) Eselon II : 1 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.543.971.977	1.533.772.069	99,30
Belanja Langsung	1.162.707.200	1.113.721.662	95,69
Belanja Pegawai	348.830.800	340.611.000	97,64
Belanja Barang dan Jasa	786.376.400	745.610.662	94,84
Belanja Modal	27.500.000	27.500.000	100
Jumlah	2.706.679.177	2.647.493.731	97,81

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Menunjang kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi.

- 1) Permasalahan
 - a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya dengan mengurus izin.
 - b) Keterbatasan sumber daya aparatur pada bidang tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan.
 - c) Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- d) Kurangnya penyebarluasan dan optimalisasi pemanfaatan potensi investasi daerah yang berdampak pada kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Manggarai Timur.
 - e) Kurangnya koordinasi dari OPD teknis terkait izin-izin yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP dan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dari OPD teknis dalam mengevaluasi pelaksanaan perda-perda sebagai upaya meningkatkan PAD.
 - f) Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat yang menyebabkan terganggunya proses pelayanan perizinan.
- 2) Solusi
- a) Peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan pelayanan langsung dan peningkatan penyebarluasan informasi perizinan dengan mengadakan sosialisasi melalui radio dan berbagai instrument sosialisasi.
 - b) Mengirimkan aparatur DPMPTSP untuk mengikuti diklat.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana kantor (kendaraan, peralatan, perlengkapan dan mebeleur).
 - d) Mengadakan rapat koordinasi dengan setiap OPD teknis dalam rangka penyamaan persepsi dan koordinasi yang berujung pada upaya penyederhanaan proses perizinan dan proaktif untuk terus mendorong OPD teknis untuk dapat mengajukan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan izin yang menjadi kewenangan OPD.
 - e) Senantiasa mengupdate regulasi-regulasi pada tingkat pusat.
 - f) Melakukan konsultasi secara intens ke instansi – instansi terkait dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

10. Urusan Kebudayaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pengembangan nilai budaya, dialokasikan dana Rp.175.465.000,- dan realisasi Rp.147.782.926,- atau 84,22%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
- 2) Program pengelolaan keragaman budaya, dialokasikan dana Rp.110.000.000,- dan realisasi Rp.34.625.000,- atau 31,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan nilai budaya telah dilaksanakan melalui kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan festival seni budaya di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019.
- 2) Program pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan:
 - a) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya survey dan pembuatan film dokumenter.
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring dan evaluasi dalam daerah.

d. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai untuk urusan Kebudayaan berjumlah 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
Sarjana (S1) : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Gongan III : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	-	-	
Belanja langsung	285.465.000	182.407.926	63,90
Belanja Pegawai	4.950.000	4.950.000	100
Belanja Barang dan Jasa	280.515.000	177.457.926	63,26
Belanja Modal	-	-	

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan

Kurang menunjang pelaksanaan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Peran lembaga adat yang belum optimal
 - b) Pembinaan kelompok kesenian yang belum optimal
- 2) Solusi
 - a) Peningkatan dan penguatan peran dan fungsi lembaga dan tokoh adat secara optimal
 - b) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kesenian dan menyelenggarakan festival seni budaya pada setiap tingkatan yang melibatkan kelompok kesenian tersebut.

11. Urusan Statistik

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

Program pengembangan data/informasi statistik daerah, dialokasikan dana Rp.80.000.000,- dan realisasi Rp.77.598.970,- atau 97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- 1) Pengelolaan, updating dan analisis data dan statistik daerah
- 2) Penyusunan profil daerah.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Program pengembangan data dan informasi statistik daerah telah dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pengelolaan, updating dan analisis data dan statistik daerah telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data dan informasi yang sektoral yang tervalidasi dan up to date.
- 2) Penyusunan Profil Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya buku profil daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai sumber informasi capaian pembangunan daerah.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
Sarjana (S1) : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
Golongan III : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 1 orang

4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Statistik pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.80.000.000.- dan realisasi Rp.77.598.970.- atau 97%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Jumlah personil atau Sumber Daya Manusia yang bekerja pada Bidang Statistik sangat terbatas/kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja/kompleksitas kegiatan yang ada
- b) Kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan bidang statistik.

2) Solusi

- a) Mengajukan penambahan staf dalam pelaksanaan tugas/urusan statistic.
- b) Urusan statistik membutuhkan pendekatan anggaran yang disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaannya mulai dari pengumpulan data sampai deseminasi data.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.538.200.000,- dan realisasi Rp.535.401.250,- atau 99,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g) Penyediaan alat tulis kantor
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - l) Penyediaan makanan dan minuman
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.1.000.000,- dan realisasi Rp.1.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.7.600.000,- dan realisasi Rp.7.600.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
 - 4) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dialokasikan dana Rp.593.800.000,- dan realisasi Rp.586.090.000,- atau 98,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 5) Program pembinaan dan pasyarakatatan olah raga dialokasikan dana Rp.113.603.000,- dan realisasi Rp.113.078.000,- atau 99,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan kompetisi olah raga
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 6) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dialokasikan dana Rp.153.050.000,- dan realisasi Rp.152.938.000,- atau 99,93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai sehingga terlaksananya aktivitas surat menyurat selama tahun 2019.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung pelayanan perkantoran
 - c) Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk kelancaran pelayanan.

- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya jasa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya honor cleaning service demi terwujudnya kebersihan kantor dan terciptanya suasana kerja yang nyaman.
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung tugas pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor sehingga terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama tahun 2019.
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan barang cetakan dan penggandaan selama tahun 2019.
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan pendukung kelistrikan selama tahun 2019.
 - j) Peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga dapat menunjang aktivitas perkantoran.
 - k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan selama tahun 2019 guna menambah wawasan aparatur.
 - l) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor selama tahun 2019.
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terealisasinya jasa pemeliharaan gedung kantor yang layak pakai.
 - 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja keuangan OPD.

- 4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan kompetisi olah raga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kompetisi olah raga pertandingan badminton antar kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga tahun 2019 di 9 kecamatan
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan:
 - a) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terfasilitasinya kegiatan PASKIBRAKA tingkat Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga tahun 2019 di 9 kecamatan
- 6) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembangunan tembok pengaman lapangan bola sepak di Mukun Kecamatan Kota Komba sehingga meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 18 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 3 orang
 - b) Sarjana (S1) : 7 orang
 - c) Sarjana Muda : 3 orang
 - d) SLTA : 5 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 11 orang
 - c) Golongan II : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 6 orang
- 4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	170.289.000	168.490.600	98,94
belanja pegawai	129.015.600	128.584.800	99,67
belanja barang dan jasa	41.273.400	39.905.800	96,69
Belanja Modal	-	-	0

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Organisasi kepemudaan tidak terstruktur dan pembentukannya bersifat sementara pada saat ada event saja.
- b) Minimnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga
- c) Tidak adanya pembinaan lanjutan kepada atlet yang berprestasi
- d) Kordinasi untuk urusan olahraga ke tingkat Propinsi dan Pusat belum optimal karena bidang kepemudaan masih melekat pada Dinas Pariwisata.

2) Solusi

- a) Koordinasi berkelanjutan untuk pembentukan organisasi kepemudaan disetiap kecamatan sehingga organisasi kepemudaan terstruktur dan bersifat tetap.
- b) Rendahnya kreativitas
- c) Dianggarkan untuk pembinaan atlet yang berprestasi
- d) Perlu pemisahan bidang olahraga dari Dinas Pariwisata (pembentukan dinas atau badan olahraga)

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.467.262.150,- dan realisasi Rp.457.619.740,- atau 97,94%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telpon
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan makan dan minum
 - i) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.35.610.000,- dan realisasi Rp.34.506.752,- atau 96,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
 - 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dialokasikan dana Rp.210.908.500,- dan realisasi Rp.209.672.703,- atau 99,41%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Fasilitasi pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa.
 - b) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes.
 - 5) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dialokasikan dana Rp.103.961.350,- dan realisasi Rp.100.811.350,- atau 96,97%, digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
 - 6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dialokasikan dana Rp.108.288.000,- dan realisasi Rp.107.841.160,- atau 99,59%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa melalui bulan bakti gotong-royong.
 - 7) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dialokasikan dana Rp.72.154.600,- dan realisasi Rp.70.974.600,- atau 98,36%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a. Evaluasi tingkat perkembangan desa
 - b. Koordinasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan
 - 8) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.1.000.000.000,- dan realisasi Rp.997.105.180,- atau 99,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK.

- 9) Program peningkatan kesejahteraan perangkat Desa dan Kelurahan, dialokasikan dana Rp.319.315.000,- dan realisasi Rp.315.724.200,- atau 99,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa pelayanan pengelola administrasi kelurahan.
- 10) Program pemekaran wilayah desa dan kelurahan, dialokasikan dana Rp.422.479.500,- dan realisasi Rp.420.511.497,- atau 99,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a. Fasilitasi pemilihan kepala desa.
 - b. Fasilitasi pemekaran wilayah desa

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai, peranko untuk memperlancar aktivitas perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya listrik dan air guna mendukung aktivitas perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya pajak dan tersedianya surat-surat kendaraan yang membantu kelancaran pelaksanaan mobilitas perkantoran.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola keuangan OPD dan jasa tenaga harian lepas sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor dan terbayarnya jasa cleaning service.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor guna mendukung aktivitas perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya fotocopy dan penjilidan dokumen perkantoran.
 - h) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makan dan minum kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan perkantoran.

- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna sinkronisasi program/kegiatan.
 - j) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam daerah guna optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dalam daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan: pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya jasa sopir.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tertib dan baik sehingga terukurnya capaian pelaksanaan program/kegiatan.
- 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan:
- a. Fasilitasi pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa dengan hasil/manfaat: tersalurnya dana desa tahap I dan II, ADD tahap I,II,III, bagi 159 desa dan tahap IV bagi 149 desa.
 - b. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen APBDes yang sesuai ketentuan atau akuntabel untuk 159 desa.
- 5) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir pada kelompok SPKP dan UEP yang tersebar pada 176 (seratus tujuh puluh enam) desa/kelurahan.
- 6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan BBGRM dan lomba posyandu.
- 7) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan:
- a. Evaluasi tingkat perkembangan desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penilaian desa guna menentukan kategori masing-masing desa menurut perkembangannya.

- b. Koordinasi pelaksanaan pemerintahan desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan dan sinkronisasi program dari tingkat desa/kelurahan dengan kabupaten.
- 8) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan PKK, guna meningkatkan peran perempuan di pedesaan.
- 9) Program peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan kelurahan telah dilaksanakan melalui kegiatan jasa pelayanan pengelola administrasi kelurahan, dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola administrasi kelurahan guna mendukung tertib administrasi di kelurahan.
- 10) Program pemekaran wilayah desa dan kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi pemilihan kepala desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan PILKADES dan pelantikan 67 kepala desa terpilih tahun anggaran 2019.
 - b. Fasilitasi pemekaran wilayah desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 3 (tiga) buah produk hukum pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai prosedur..

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 18 orang
 - c) D3 : 1 orang
 - d) SLTA : 4 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 16 orang
 - c) Golongan II : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 12 orang
- 4) Staf : 6 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.794.673.831	1.779.537.708	99,15
Belanja Pegawai	1.794.673.831	1.779.537.708	99,15
Belanja Langsung	2.743.479.100	2.718.267.182	99,08
Belanja Pegawai	710.768.800	703.108.800	99,41
Belanja Barang dan Jasa	2.004.210.300	1.986.723.382	98,95
Belanja Modal	28.500.000	28.435.000	99,77
Jumlah	4.538.152.931	4.497.804.890	99,11

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Keterbatasan penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan desa.
- b) Jumlah personil yang terbatas sehingga cukup sulit untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaksana kegiatan di desa.
- c) Peralatan kerja yang belum mendukung seperti computer, laptop dan printer yang sangat terbatas serta ketersediaan kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat dan tidak layak operasi di Desa.
- d) Ruang kerja/kantor yang masih bergabung dengan OPD lain.

2) Solusi

- a) Mengintensifkan pendampingan dan memfasilitasi para perencana desa agar dapat mengalokasikan anggaran DD/ADD untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat, pemantauan, pengawalan terhadap dana perguliran di masyarakat seperti SPKP dan UEP agar memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b) Mempertahankan keberadaan personil yang ada, terutamapara THL di kantor untuk membantu aktivitas pelayanan perkantoran dan pelayanan di desa sekaligus selalu mengusulkan agar perlu penambahan personil yang berkompeten dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan turun langsung ke desa.
- c) Merawat peralatan kerja dan kendaraan dinas yang ada dengan baik, memanfaatkan barang-barang tersebut untuk membantu kelancaran aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

- d) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang ada dengan pengadaan mebel yang minimalis yang mampu menampung pengarsipan semua bidang dan tidak membutuhkan tempat yang luas seperti kursi plastik, sehingga dapat di tata disimpan kembali saat belum dibutuhkan.

14. Urusan Koperasi dan UKM

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.012.475.400,- dan realisasi Rp.987.128.500,- atau 97,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - k) Penyediaan makanan dan minuman
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m) Monitoring dan evaluasi
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.79.077.000,- dan realisasi Rp.78.179.500,- atau 98,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, dialokasikan dana Rp.359.450.000,- dan realisasi Rp.356.692.000,- atau 99,23%, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah.
- 4) Program pengembangan kewirausahaan dan kompetitif UKM, dialokasikan dana Rp.221.000.000,- dan realisasi Rp.220.975.000,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pelatihan agrobisnis
 - b) Pelatihan pencelupan dan pewarna alami
- 5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dialokasikan dana Rp.897.905.000,- dan realisasi Rp.873.096.500,- atau 97,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi
 - b) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
 - c) Peningkatan kualitas SDM koperasi

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
- a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perangko, meterai dan benda pos lainnya untuk kelancaran pengiriman surat-menyurat kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya rekening listrik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai guna mewujudkan pelayanan perkantoran yang optimal.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya tenaga jasa kebersihan untuk kebersihan tempat/ruangan kerja sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kantor yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pencetakan dan penggandaan untuk penyediaan dokumen-dokumen kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan listrik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan dan peraturan perundang - undangan, guna menambah wawasan pegawai.
 - k) Penyediaan makan dan minum rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat staf bulanan, rapat evaluasi dana bergulir (2 kali), rapat harian koperasi tingkat kabupaten, sehingga dapat berjalan lancarnya pelaksanaan rapat harian kantor.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat untuk koordinasi dan konsultasi program/kegiatan sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
 - m) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat untuk koordinasi dan konsultasi program/kegiatan sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas/operasional guna menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dinas/operasional.
- 3) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur kecil dan menengah, dengan hasil/manfaat: tersedianya tenaga pendamping koperasi guna mensosialisasikan pentingnya berkoperasi.
- 4) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, dengan kegiatan:
- a) Pelatihan agrobisnis
 - b) Pelatihan pencelupan dan pewarna alami
- Kedua kegiatan diatas telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlatihnya para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya antara lain, melalui pelatihan agrobisnis yang difokuskan pada pengolahan pakan ternak dan pelatihan pencelupan dan pewarna alami yang difokuskan pada pelatihan pewarna kain menggunakan pewarna alami.

- 5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan kegiatan:
- a) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi sehingga kelembagaan koperasi semakin mantap dan dapat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi.
 - b) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya tenaga pendamping koperasi guna meningkatkan pemahaman tentang manajemen koperasi.
 - c) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya kualitas SDM koperasi dalam mendukung usaha koperasi.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 15 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 13 orang
 - c) Golongan II : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 9 orang
- 4) Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	2.046.045.600	1.991.007.400	97,31
Belanja langsung	2.569.907.400	2.516.071.500	97,91
Belanja pegawai	1.379.908.400	1.353.005.200	98,05
Belanja barang dan jasa	1.189.999.000	1.163.066.300	97,74
Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah	4.615.953.000	4.507.078.900	97,64

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang koperasi
- b) Adanya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurusnya tidak proaktif untuk melaksanakan RAT meskipun pihak dinas sudah memfasilitasi.

2) Solusi

- a) Melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang koperasi
- b) Melakukan rapat anggota luar biasa bagi koperasi yang sudah beberapa tahun tidak melakukan RAT untuk mengaktifkan kembali koperasi yang bersangkutan.

15. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.428.459.700,- dan realisasi Rp.425.106.550,- atau 99,22%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.24.650.000,- dan realisasi Rp.24.000.000,- atau 97,36%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.1.750.000,- dan realisasi Rp.1.750.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- 4) Program penataan administrasi kependudukan, dialokasikan dana Rp.737.505.500,- dan realisasi Rp.729.845.850,- atau 98,96%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
 - b) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - d) Pelaksanaan E-KTP
- 5) Program penataan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu, dialokasikan dana Rp.1.201.732.000,- dan realisasi Rp.1.197.179.110,- atau 99,62%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (DAK)
 - b) Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)
 - c) Pelayanan dokumen kependudukan(DAK)
 - d) Penerbitan dokumen kependudukan(DAK)
 - e) Pengelolaan sistem informasi kependudukan

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perangko dan meterai serta benda pos lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengiriman surat-surat dinas, sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa listrik dan air bersih selama 1 tahun untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya suku cadang dan bahan bakar bagi kendaraan dinas roda empat dan roda dua guna menunjang pelaksanaan mobilitas perkantoran.

- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya peralatan kerja kantor yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor, sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan cetakan dan dokumen perkantoran sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket peralatan instalasi listrik untuk penerangan kantor sehingga terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
 - j) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke pusat dan provinsi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ OPD guna meningkatkan kinerja aparatur.
- 4) Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya blanko KTP, KK dan akte-akte catatan sipil untuk kelancaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil sehingga

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

- b) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honor registran kecamatan desa/kelurahan dan RT sehingga tersedianya laporan informasi database kependudukan yang akurat.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan di lapangan.
 - d) Pelaksanaan e-KTP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelayanan perekaman e-KTP ditingkat kecamatan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen administrasi kependudukan.
- 5) Penataan sistem administrasi kependudukan (SAK), dengan kegiatan:
- a) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
 - b) Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan kependudukan.
 - c) Pelayanan dokumen kependudukan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen kependudukan.
 - d) Penerbitan dokumen kependudukan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen kependudukan bagi masyarakat.
 - e) Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honor panitia kegiatan sehingga tersedianya laporan informasi administrasi kependudukan.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 23 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 20 orang
 - c) Sarjana Muda : 1 orang
 - d) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang

- b) Golongan III : 18 orang
- c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 14 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	1.867.806.107	1.819.748.004	97,42
belanja pegawai	1.867.806.107	1.819.748.004	97,42
Belanja Langsung	2.394.047.200	2.377.831.510	99,32
Belanja pegawai	558.073.800	555.007.050	99,45
Belanja barang dan jasa	1.682.323.400	1.670.874.460	99,32
Belanja Modal	153.650.000	151.950.000	98,89
Total	4.261.853.307	4.197.579.514	98,49

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.

- a) Keterbatasan sarana dan menjangkau akses jaringan komunikasi
- b) Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- c) Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi kependudukan

2) Solusi.

- a) Memaksimalkan pemanfaat sarana dan prasarana dalam mengakses jaringan komunikasi
- b) Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantor
- c) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mengakses jaringan komunikasi.

16. Urusan Ketenagakerjaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.652.435.423,- dan realisasi Rp.643.023.101,- atau 98,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.1.749.900,- dan realisasi Rp.1.749.900,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 3) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dialokasikan dana Rp.614.134.677,- dan realisasi Rp.569.978.587,- atau 92,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja berbasis kompetensi
 - b) Fasilitasi pelayanan bagi pencari kerja
 - c) Penyusunan data base tenaga kerja daerah.
- 4) Program peningkatan kesempatan kerja, di alokasikan dana Rp.524.447.500,- dan realisasi Rp.521.803.500,- atau 99,50%, digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan kesempatan kerja.
- 5) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dialokasikan dana Rp.254.258.500,- dan realisasi Rp.229.038.329,- atau 90,08%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - b) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - c) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja.

6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dialokasikan dana Rp.94.865.000,- dan realisasi Rp.43.958.800,- atau 46,34%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pendataan potensi energi
- b) Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perangko dan materai dan terlaksananya pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya sumber daya air dan listrik dan jasa komunikasi internet.
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kelengkapan administrasi untuk 8 (delapan) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat guna mendukung mobilitas perkantoran.
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih sehingga tercipta kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terawat dan terpeliharanya peralatan kerja kantor guna memaksimalkan pelayanan perkantoran.
- g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya ATK untuk kelancaran pelayanan kantor.
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kartu bagi pencari kerja (kartu kuning), barang cetakan dan penggandaan guna pemenuhan dokumen kantor.
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan undang-undang serta peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan.

- j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas harian.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah guna sinkronisasi program kegiatan.
- 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan telah dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan program dan kegiatan OPD.
- 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan:
- a) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya tenaga kerja terlatih yang dibekali dengan peralatan penunjang keterampilan.
 - b) Fasilitasi pelayanan bagi pencari kerja, telah dilaksanakan dengan hasil manfaat: tersedianya fasilitas penunjang bagi pencari kerja.
 - c) Penyusunan database tenaga kerja daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya database tenaga kerja daerah.
- 4) Program peningkatan kesempatan kerja, telah dilaksanakan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja dengan hasil/manfaat: terserapnya tenaga kerja di 3 (tiga) lokasi sebanyak 120 orang.
- 5) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan kegiatan:
- a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terfasilitasinya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial guna menjaga keharmonisan antara pelaku industri.
 - b) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyelesaian kasus perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - c) Pemantauan kinerja penyalur tenaga kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan 5 perusahaan penyalur tenaga kerja yaitu PT. Timor Sakti Setia, PT. Mitra Sinergi Sukses, PT. Gasindo Buala Sari, PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Mutiara Timur Mitra.
- 6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan:

a) Pendataan potensi energi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data potensi energi di Kabupaten Manggarai Timur.

b) Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpantaunya pelaksanaan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 8 orang
 - b) Diploma III : 1 orang
 - c) SLTA : 4 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 8 orang
 - c) Golongan II : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 4 orang
 - b) Eselon IV : 5 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.269.125.830	1.138.687.750	89,72
Belanja Pegawai	1.269.125.830	1.138.687.750	89,72
Belanja Langsung	2.141.891.000	2.009.552.217	93,82
Belanja Pegawai	570.677.600	544.436.000	95,40
Belanja Barang dan Jasa	1.521.213.400	1.465.116.217	96,31
Belanja Modal	50.000.000	-	0,00
Jumlah (1+3)	3.411.016.830	3.148.239.967	92,29

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Terbatasnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengakibatkan kekosongan pada beberapa jabatan kepala sub bagian.

- b) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang aktivitas perkantoran.
- 2) Solusi
- a) Perlu adanya penambahan personil pada beberapa kepala sub bagian yang belum memiliki kepala sub bagian terutama kasubag perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan kasubag umum dan kepegawaian.
 - b) Perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang aktivitas kerja.

17. Urusan Ketahanan Pangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.555.100.909,- dan realisasi Rp.546.095.541,- atau 98,38%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Rapat-rapat penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat-rapat kordinasi keluar daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.145.270.000,- dan realisasi Rp.145.269.282,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan.
- 4) Program peningkatan ketahanan pangan, dialokasikan dana Rp.993.052.000,- dan realisasi Rp.976.774.047,- atau 98,36%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penanganan daerah rawan pangan
- b) Analisis pola konsumsi pangan
- c) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
- d) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- e) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
- f) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- g) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
- h) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
- i) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- j) Pengembangan desa mandiri pangan
- k) Pengembangan lumbung pangan desa
- l) Pengembangan mutu dan keamanan pangan
- m) Penyuluhan sumber pangan alternatif
- n) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkirimnya laporan/dokumen kegiatan ke provinsi/NTT.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya air dan listrik guna memperlancar kegiatan perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kebersihan kantor Dinas Pangan selama 1 tahun.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya dengan baik peralatan kantor (computer PC dan laptop) yang ada di kantor Dinas Pangan.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan kegiatan perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen/surat/format yang digandakan guna menambah dokumen kantor.
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan aparatur.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makan minum rapat guna mengevaluasi kegiatan Dinas Pangan setiap bulan.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Dinas Ketahanan Pangan NTT dan Badan Ketahanan Pangan RI Kementerian Pertanian selama 1 tahun.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpelihara dan teroperasinya kendaraan dinas guna memperlancar mobilitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui kegiatan penyusunan laporan akhir tahun 2019 (LAKIP, LPPD/LKPJ), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2019
- 4) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), dengan kegiatan:
- a) Penanganan daerah rawan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkoordinasinya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Manggarai Timur.
 - b) Analisis pola konsumsi pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 1 dokumen pola konsumsi dan suplay pangan masyarakat Manggarai Timur.
 - c) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen analisis ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.
 - d) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: teridentifikasinya isu strategis pertanian beserta rekomendasi pemecahannya dalam mendukung ketahanan pangan.
 - e) Kajian rantai dan pasokan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan.
 - f) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersosialisasinya konsep pekarangan yang efektif dan efisien.

- g) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.
- h) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: teridentifikasinya gejolak harga dan potensi desa rawan pangan.
- i) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya komoditi pangan lokal untuk pengembangan pangan lokal.
- j) Pengembangan desa mandiri pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen administrasi keuangan pengelolaan dana DMP yang tertib dan transparan.
- k) Pengembangan mutu dan keamanan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkendalinya pangan yang aman di Kabupaten Manggarai Timur.
- l) Penyuluhan sumber pangan alternatif, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyuluhan pangan non beras ke Masyarakat Manggarai Timur.
- m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: termonitornya pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2019.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 27 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 17 orang
 - c) Diploma III : 1 orang
 - d) SLTA : 8 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 20 orang
 - c) Golongan II : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 4 orang
 - c) Eselon IV : 14 orang
- 4) Staf : 8 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2.154.735.783	1.821.596.920	84,54
Belanja Pegawai	2.154.735.783	1.821.596.920	84,54
Belanja Langsung	1.696.922.909	1.671.638.870	98,51
Belanja Pegawai	419.592.800	413.700.400	98,60
Belanja Barang dan Jasa	1.260.330.109	1.241.438.470	98,50
Belanja Modal	17.000.000	16.500.000	97,06
Pendapatan Asli Daerah	30.000.000	10.300.000	34,33
Jumlah	3.881.658.692	3.503.535.790	90,26

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti pada Urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Ketersediaan tenaga ahli yang kurang di bidang ketahanan pangan merupakan kendala utama dalam melakukan analisis ketahanan pangan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan di bidang ketahanan pangan.
- b) Pasokan data sekunder yang minim dari OPD-OPD terkait adalah kendala utama dalam melakukan analisis di bidang ketahanan pangan.
- c) Tidak adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam menuju upaya peningkatan ketahanan pangan oleh OPD-OPD terkait.

2) Solusi

- a) Diperlukan pelatihan kepada aparatur di Dinas Pangan dalam meningkatkan kemampuan analisis ketahanan pangan
- b) Diperlukan kerjasama yang baik lintas OPD dalam melakukan sinkronisasi data.
- c) Diperlukan pertemuan bersama dinas - dinas rumpun hijau dalam membahas program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

18. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.618.122.000,- dan realisasi Rp.599.905.459,- atau 97,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berikut:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- c) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program Keluarga Berencana, dialokasikan dana Rp.3.786.288.100,- dan realisasi Rp.3.702.282.110,- atau 97,78%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan KIE
- 3) Program pelayanan kontrasepsi, dialokasikan dana Rp.3.077.972.134,- dan realisasi Rp.3.040.366.610,- atau 98,77%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pelayanan konseling KB
 - b) Pengadaan alat dan obat KB

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
- a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman paket kilat dan biasa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya rekening air dan rekening listrik kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai guna mendukung mobilitas perkantoran.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung kelancaran aktivitas kantor.

- g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran.
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya belanja penjilidan dan fotocopy guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makan dan minum rapat kantor serta harian pegawai guna meningkatkan kinerja aparatur.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi provinsi dan pusat guna mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Program keluarga berencana, dengan kegiatan pelayanan KIE, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelayanan KIE guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana.
- 3) Program pelayanan kontrasepsi, dengan kegiatan:
- a) Pelayanan konseling KB, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya pemahaman masyarakat akan alat kontrasepsi/KB.
 - b) Kegiatan pengadaan alat dan obat KB, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat dan obat kontrasepsi yang akan dibagikan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat akan alat kontrasepsi/KB.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 2 orang
 - b) Sarjana (S1) : 9 orang
 - c) Sarjana Muda : 4 orang
 - d) SLTA : 1 orang
2. Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 12 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
3. Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 8 orang
4. Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.499.375.107	1.463.557.479	97,61
2	Belanja Pegawai	1.499.375.107	1.463.557.479	97,61
3	Belanja Langsung	7.482.382.234	7.342.554.679	98,13
4	Belanja Pegawai	3.075.850.400	3.033.403.900	98,62
5	Belanja Barang dan Jasa	4.227.071.834	4.129.690.779	97,69
6	Belanja Modal	179.460.000	179.460.000	100
Total (1+3)		8.981.757.341	8.806.112.158	98,04

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Masih adanya Drop Out peserta Keluarga Berencana KB.
- b) Data UPS kurang lengkap.
- c) Masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d) Kurangnya program dan kegiatan karena keterbatasan fiskal.

2) Solusi

- a) Melakukan pembenahan data PUS oleh setiap petugas lapangan sehingga memudahkan pemantauan jadwal pelayanan.
- b) Mewajibkan petugas lapangan untuk membuat data PUS baru dengan konsep by name, by adress and by phone.
- c) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Membuat kegiatan terpadu dalam kegiatan pelayanan KIE.

19. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

Tidak dilaksanakan pada tahun 2019 namun terdapat kegiatan terpadu yang melekat pada kegiatan pelayanan KIE.

c. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 2 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan
 - Sarjana (S1) : 2 orang
2. Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 1 orang
3. Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tidak ada

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Seperti tergambar pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
 - a) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b) Kurangnya program dan kegiatan karena keterbatasan fiskal
- 2) Solusi
 - a) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b) Membuat kegiatan terpadu dalam kegiatan pelayanan KIE

20. Urusan Perhubungan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.619.276.000,- dan realisasi Rp.602.174.050,- atau 97,24%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor

- g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - i) Penyediaan makan dan minum
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - k) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.187.992.000,- dan realisasi Rp.161.826.550,- atau 86,08%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.31.900.000,- atau 63,80%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
 - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, dialokasikan dana Rp.3.000.000,- dan realisasi Rp.2.999.800,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
 - 5) Program peningkatan pelayanan angkutan, dialokasikan dana Rp.700.884.000,- dan realisasi Rp.671.732.650,- atau 95,84%, digunakan untuk mendukung kegiatan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - 6) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dialokasikan dana Rp.127.001.602,- dan realisasi Rp.109.368.000,- atau 86,12%, digunakan untuk mendukung kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengiriman surat-surat dinas guna mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa listrik dan pulsa internet selama 12 bulan yang menunjang kegiatan perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan dan operator computer sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja berupa 8 unit laptop/computer PC dan 6 unit printer yang siap pakai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya 22 jenis alat tulis kantor sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya belanja fotocopy/penggandaan dan penjilidan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar yang dapat meningkatkan wawasan aparatur.
 - i) Penyediaan makan dan minum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat kantor.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan.
 - k) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada 9 kecamatan guna tersedianya data bidang perhubungan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang siap pakai, guna memperlancar mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas.
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya aparatur yang terampil di bidang pengujian kendaraan bermotor serta sarana dan prasarana.
 - 4) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD guna terukurnya capaian kinerja tahunan OPD.
 - 5) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan raya, telah dilaksanakan dengan

hasil/manfaat: terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan raya guna meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan keselamatan transportasi.

- 6) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan, RPPJ, pengecatan marka jalan dan lampu penerangan jalan guna terwujudnya keselamatan transportasi darat.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 11 orang
 - c) Sarjana Muda : 1 orang
 - d) SLTA : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 11 orang
 - c) Golongan II : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 8 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Perhubungan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.186.763.988	1.135.975.377	95,72
Belanja Langsung	1.688.153.602	1.580.001.950	93,59
Belanja Pegawai	752.939.600	727.134.300	96,57
Belanja Barang dan Jasa	935.214.002	852.867.650	91,19
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2.874.917.590	2.715.977.327	94,47

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sudah menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan

Belum adanya kantor permanen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur yang representatif.

2) Solusi

Perlu dibangunnya kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur yang aman dan representatif.

21. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.365.590.800,- dan realisasi Rp.363.550.623,- atau 99,40%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f) Penyediaan alat tulis kantor
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- j) Penyediaan makanan dan minuman
- k) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l) Monitoring evaluasi dan pelaporan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.70.084.000,- dan realisasi Rp.67.994.745,- atau 97,01%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.500.000,- dan realisasi Rp.2.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.

4) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dialokasikan dana Rp.417.356.000,- dan realisasi Rp.412.373.334,- atau 99,8%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

- b) Pengadaan alat studio dan komunikasi
 - c) Pembinaan dan pengembangan media baru
 - d) Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi
 - e) Pembentukan, pembinaan dan pendampingan KIM
 - f) Pengembangan media tradisional
 - g) Pembangunan infrastruktur jaringan antar OPD.
- 5) Program kerjasama informasi dan mass media, dialokasikan dana Rp.510.134.000,- dan realisasi Rp.504.898.650,- atau 98,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - c) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa
 - d) Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan
 - e) Pengolahan dan produksi informasi audio visual tentang Kabupaten Manggarai Timur
 - f) Penyebarluasan informasi tentang pemerintahan daerah melalui film dokumenter.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan per program dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: kegiatan surat menyurat dan proses administrasi kantor dapat berjalan dengan baik.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya daya listrik dan air bersih selama 12 bulan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan pengadministrasian keuangan yang efektif dan efisien.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya gedung dan ruang kerja yang bersih untuk menunjang kegiatan perkantoran.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: peralatan kerja terawat dan berfungsi dengan baik untuk menunjang pekerjaan.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan selama 12 bulan.

- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pencetakan dan penggandaan dokumen selama 12 bulan.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya penerangan kantor yang berfungsi dengan baik.
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja yang memadai guna mendukung kegiatan perkantoran.
 - j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan demi kelancaran rapat harian pegawai.
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk mendukung kinerja dan pelayanan guna sinkronisasi program dan kegiatan.
 - l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya data dan informasi dalam menunjang kinerja dan pelayanan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat: terawat dan berfungsi dengan baiknya kendaraan dinas roda dua dan roda empat guna memperlancar mobilitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya laporan kinerja dan keuangan yang baik.
- 4) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dengan kegiatan:
- a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga memperluas jaringan informasi.
 - b) Pembinaan dan pengembangan media baru, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya operasional website dan berfungsinya jaringan dan perangkat internet guna mendukung media komunikasi masyarakat.
 - c) Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat studio dan komunikasi yang berfungsi dengan baik

- d) Pembentukan, pembinaan dan pendampingan KIM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: KIM berfungsi maksimal sebagai partner Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan penyebarluasan informasi pembangunan.
 - e) Pengadaan alat studio dan komunikasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan akan peralatan studio dan komunikasi guna mendukung informasi pembangunan.
 - f) Pengembangan media tradisional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: adalah untuk kegiatan Pertunjukan Rakyat (Perjukra) demi menjaga kelestarian budaya lokal Manggarai Timur
 - g) Pengembangan infrastruktur jaringan antar OPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya akses internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur guna mempermudah akses informasi bagi OPD.
- 5) Program kerjasama informasi dengan mass media, dengan kegiatan:
- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terfasilitasinya pengembangan bakat pelajar, festival/keramaian dalam rangka HUT Kabupaten Manggarai Timur dan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
 - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat sehingga mempermudah informasi pembangunan bagi masyarakat.
 - c) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media massa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya langganan surat kabar dengan 2 SKH guna mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
 - d) Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan seperti baliho, spanduk dan stiker untuk penyebarluasan informasi.
 - e) Pengolahan dan produksi informasi audio visual tentang Kabupaten Manggarai Timur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: pengolahan dan produksi informasi audio visual tentang Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk materi film dokumenter.
 - f) Penyebarluasan informasi tentang Pemerintah Daerah melalui Film Dokumenter, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersebarnya informasi tentang Pemerintah Daerah melalui pemutaran Film Dokumenter tentang pembangunan Daerah.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 18 orang
 - b) Diploma : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
2. Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 14 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
3. Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 4 orang
 - c) Eselon IV : 10 orang
4. Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.772.013.421	1.758.114.854	99,21
Belanja Langsung	1.445.664.800	1.428.916.322	98,46
Belanja Pegawai	563.750.800	563.140.500	99,89
Belanja Barang dan Jasa	829.114.000	812.975.822	98,05
Belanja Modal	52.800.000	52.800.000	100
Jumlah	3.217.678.221	3.187.031.176	99,04

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum maksimalnya LPPL Radio KMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyebarluasan informasi ke seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini disebabkan kondisi pemancar di Tangkul, Desa Rende Nao masih mengalami kerusakan yang disebabkan kondisi perangkat yang sudah lama dan sering terjadinya pemadaman listrik yang sangat berpengaruh pada kondisi perangkat pemancar yang sangat sensitive dan sangat tergantung pada suplay listrik.
- b) Rasionalisasi anggaran yang terjadi di TA.2019 berkontribusi terhadap berkurangnya kinerja dan kualitas pelayanan publik untuk Urusan Komunikasi dan Informatika;

- c) Terbatasnya tenaga profesional di bidang Komunikasi dan Informatika khususnya IT untuk pengembangan aplikasi dan jaringan internet.

2) Solusi:

- a) Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran perbaikan perangkat pemancar yang diharapkan bisa berfungsi secara normal kembali hingga akhir tahun.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika tetap dilaksanakan namun disesuaikan dengan minimnya anggaran.
- c) Keterbatasan anggaran menyebabkan dipangkasnya kegiatan dan alokasi anggaran untuk Bimbingan Teknis (BIMTEK)/ atau DIKLAT bagi PNS Dinas KOMINFO ke luar daerah.

22. Urusan Pertanahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.573.883.400,- dan realisasi Rp.563.293.000,- atau 98,15%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.98.977.000,- dan realisasi Rp.94.432.000,- atau 95,41%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.
- 3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan dan capaian keuangan, dialokasikan dana Rp.6.648.000,- dan realisasi Rp.5.048.000,- atau 93,27%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

- 4) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dialokasikan dana Rp.521.208.000,- dan realisasi Rp.486.133.340,- atau 93,27%, digunakan untuk mendukung kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- 5) Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan, dialokasikan dana Rp.189.584.000,- dan realisasi Rp.188.289.000,- atau 99,32%, digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan meterai perangko dan benda pos lainnya guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama tahun 2019.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya sistem pengelolaan administrasi keuangan kantor yang akuntabel dan disiplin.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan guna menciptakan lingkungan kantor yang asri dan nyaman.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, tidak dilaksanakan karena komputer dan laptop milik kantor belum ada.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat tulis kantor guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetak dan penggandaan guna memperlancar kegiatan perkantoran.
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung pelayanan administrasi perkantoran.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas harian kantor.

- j) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan berkala kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang siap pakai guna menunjang mobilitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan selama tahun 2019 guna meningkatkan kinerja aparatur.
- 4) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penataan kepemilikan tanah Pemerintah Daerah guna meningkatkan jumlah tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat.
- 5) Program penyelesaian konflik pertanahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terselenggaranya penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 3 masalah, guna menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tenteram di masyarakat.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 10 orang
 - c) Sarjana Muda : 2 orang
 - d) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 10 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 3 orang
 - c) Eselon IV : 10 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	1.723.004.833	1.719.046.558	99,77
Belanja langsung	1.390.300.400	1.337.105.740	96,17
Belanja pegawai	421.864.600	416.110.700	98,64
Belanja barang dan jasa	879.295.800	831.855.040	94,60
Belanja Modal	89.140.000	89.140.000	100
Jumlah	3.113.305.233	3.056.152.298	98,16

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masih terdapat beberapa bidang tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.

2) Solusi

Dilakukan pensertifikatan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui proses pengukuhan kembali, untuk mendapatkan bukti penyerahan tanah yang asli atau penelusuran kembali dokumen penyerahan tanah.

23. Urusan Perpustakaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.475.262.900,- dan realisasi Rp.468.867.770,- atau 98,65%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Pelayanan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f) Penyediaan alat tulis kantor
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- i) Penyediaan makan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Penyediaan alat kebersihan kantor
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.95.727.000,- dan realisasi Rp.76.215.347,- atau 79,62%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.625.500,- dan realisasi Rp.2.619.500,- atau 99,77%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan OPD.
- 4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dialokasikan dana Rp.719.269.850,- dan realisasi Rp.713.345.860,- atau 99,18%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - b) Pengolahan bahan pustaka
 - c) Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
 - d) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
 - e) Perpustakaan digital

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
- a) Pelayanan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perangko dan meterai untuk memperlancar pengiriman surat dinas dan administrasi perkantoran lainnya.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya jasa listrik dan air sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang maksimal.
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor (printer) yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket alat tulis kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya belanja fotocopy dan penjilidan sehingga tersedianya dokumen kantor.
 - a) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan wawasan aparatur.
 - b) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian kantor.
 - c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
 - d) Penyediaan alat kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- a) Pengadaan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya sewa gedung kantor sebagai gedung baca berjumlah 1 unit selama 1 tahun.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat terukur dan terevaluasinya pelaksanaan program/kegiatan OPD.
- 4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan kepustakaan, dengan kegiatan:
- a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan khusus untuk pengadaan buku di desa - desa.

- b) Pengolahan bahan pustaka, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbayarnya honor panitia kegiatan pengolahan buku serta honor PNS.
- c) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan layanan perpustakaan keliling di sekolah dan di tempat umum lainnya.
- d) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bahan pustaka
- e) Perpustakaan digital, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perpustakaan digital guna meningkatkan budaya baca.

d. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 11 orang
 - b) Sarjana Muda : 2 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 5 orang
 - b) Golongan III : 9 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 5 orang
- 4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.225.718.522	1.195.630.626	97,55
Belanja pegawai	1.225.718.522	1.195.630.626	97,55
Belanja Langsung	1.292.885.250	1.261.048.477	97,54
Belanja Pegawai	471.349.400	461.154.500	97,84
Belanja Barang dan Jasa	486.880.850	480.438.977	99,68
Belanja Modal	334.655.000	319.455.000	95,46
Jumlah	2.518.603.772	2.456.679.103	97,54

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan masih rendahnya kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur bidang perpustakaan dan kearsipan.

2) Solusi

Memaksimalkan pembagian tugas harian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor.

24. Urusan Kearsipan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, dialokasikan dana Rp.211.783.259,- dan realisasi Rp.211.161.850,- atau 99,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip :

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Realisasi pelaksanaan program / kegiatan sebagai berikut:

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, dengan kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penataan dokumen arsip pada OPD.

d. Jumlah Pegawai

Pelaksanaan urusan kearsipan didukung oleh SDM sebanyak 2 orang, dengan rincian:

1) Kualifikasi Pendidikan

Sarjana (S1) : 2 orang

2) Pangkat/Golongan

Golongan IV : 1 orang

Golongan III : 1 orang

3) Jabatan Struktural

Eselon III : 1 orang

Eselon IV : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	211.783.259	211.161.850	99,71
Belanja Pegawai	84.474.500	84.474.500	100
Belanja Barang dan Jasa	127.308.759	126.687.350	99,51
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	211.783.259	211.161.850	99,71

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang digambarkan pada Urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sama seperti yang digambarkan pada Urusan Perpustakaan

h. Permasalahan dan Solusi

Seperti yang digambarkan pada Urusan Perpustakaan

b. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.864.869.000,- dan realisasi Rp.847.317.147,- atau 97,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.130.141.000,- dan realisasi Rp.127.446.000,- atau 97,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program pengembangan budidaya perikanan dialokasikan dana Rp.1.465.246.664,- dan realisasi Rp.1.463.646.164,- atau 99,89%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan sistem budidaya intensif melalui kolam percontohan

- b) Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan
- c) Pengadaan paket percontohan budidaya ikan
- 5) Program pengembangan perikanan tangkap, dialokasikan dana Rp.437.942.400,- dan realisasi Rp.433.042.400,- atau 99,88%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan.
- 6) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dialokasikan dana Rp.672.484.000,- dan realisasi Rp.672.323.000,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2.

b. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya kelancaran penyampaian informasi melalui surat menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik guna memperlancar aktivitas perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya sistem pengelolaan administrasi keuangan kantor yang transparan dan akuntabel.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor guna menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman
 - e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor guna memperlancar administrasi perkantoran.
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang memperlancar kegiatan perkantoran.
 - g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna sinkronisasi program dan kegiatan di daerah, provinsi dan pusat.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kantor berupa laptop 3 unit, LCD, dan printer 5 unit guna meningkatkan sarana perkantoran.

- b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sehingga terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna memperlancar aktivitas perkantoran.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen LAKIP dan laporan realisasi kinerja OPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja OPD.
- 4) Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan:
- a) Pengembangan sistem budidaya intensif melalui kolam percontohan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya kolam percontohan sebanyak 4 unit guna pengembangan budidaya perikanan.
 - b) Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelatihan kelompok pembudidaya ikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelatihan kelompok guna meningkatkan pengetahuan POKDAKAN.
 - c) Pengadaan paket percontohan budidaya ikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: teredianya 1 paket percontohan budidaya ikan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- 5) Program pengembangan perikanan tangkap, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan hasil/manfaat: tersedianya sarana penangkapan ikan guna meningkatkan produksi perikanan.
- 6) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 dengan hasil/manfaat: tersedianya 23 unit sarana pemasaran bergerak roda 2 guna meningkatkan mutu produk perikanan.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda : 2 orang
 - c) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 10 orang
 - c) Golongan II : 3 orang

- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 3 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	1.537.125.207	1.359.814.558	88,46
2	Belanja langsung	3.574.183.064	3.547.274.711	99,24
	Belanja pegawai	660.490.700	642.016.200	97,20
	Belanja barang dan jasa	2.869.692.364	2.861.308.511	99,70
	Belanja modal	44.000.000	43.950.000	99,88
Jumlah		5.111.308.271	4.907.089.269	96,00

f. Proses Perencanaan Pembangunan

- 1) Setiap tahun OPD menyusun rencana kebutuhan dalam rencana kerja berdasarkan Renstra OPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang dan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD
- 2) Selanjutnya OPD menyusun Renja mengacu kepada RKPD dan Renstra OPD;
- 3) Pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS
- 4) OPD menyusun RKA mengacu kepada KUA PPAS
- 5) Pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran berjalan
- 6) Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- 7) Berdasarkan APBD dan Penjabarannya, OPD membuat DPA sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan OPD.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasar ikan
 - b) Masih kurangnya minat masyarakat untuk konsumsi ikan
 - c) Rendahnya frekuensi pembinaan kepada kelompok-kelompok nelayan
 - d) Ketersediaan benih ikan yang masih terbatas.
- 2) Solusi
 - a) Pemberian stimulant untuk usaha

- b) Penyebarluasan/ kampanye/ sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat
- c) Mengagendakan kegiatan pelatihan beserta anggaran kegiatan pelatihan.
- d) Mengagendakan kegiatan pengadaan benih dan induk serta calon induk ikan beserta anggarannya

2 Urusan Pertanian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.674.491.250,- dan realisasi Rp.651.722.033,- atau 96,62%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan makan dan minum kantor
 - h) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.615.076.250,- dan realisasi Rp.576.505.500,- atau 93,73%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - c) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program peningkatan kesejahteraan petani, dialokasikan dana Rp. 1.163.931.000,- dan realisasi Rp.630.398.100,- atau 54,16%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan petani (IPDMIP)
- 5) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan), dialokasikan dana Rp.1.307.178.000,- dan realisasi Rp.1.264.664.190,- atau 96,75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan perbenihan/pembibitan

- b) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - c) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan (ekstensifikasi)
 - d) Penyusunan data base potensi produk pertanian dan peternakan
 - e) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan
 - f) Laporan produksi pertanian daerah
 - g) Pengembangan hortikultura
- 6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.367.269.750,- dan realisasi Rp.360.588.450,- atau 98,18%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - b) Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- 7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.12.848.929.123,- dan realisasi Rp.12.732.144.970,- atau 99,64%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - b) Pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan
- 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dialokasikan dana Rp.2.022.920.750,- dan realisasi Rp.1.980.314.716,- atau 97,89%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/peternakan.
- 9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dialokasikan dana Rp.530.125.250,- dan realisasi Rp.512.039.970,- atau 96,59%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik (vaksin dan eliminasi hewan penular rabies)
 - b) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
- 10) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dialokasikan dana Rp.1.408.233.750,- dan realisasi Rp.1.364.340.663,- atau 96,88%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
 - b) Pengembangan agribisnis peternakan
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana peternakan
- 11) Program peningkatan kualitas bahan baku, dialokasikan dana Rp.272.938.516,- dan realisasi Rp.262.987.584,- atau 96,35%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penanganan panen dan pasca panen tembakau
- b) Standarisasi kualitas bahan baku
- c) Penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyampaian informasi melalui surat menyurat guna peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air serta bahan bacaan guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tertibnya administrasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya kebersihan kantor sehingga terciptanya tempat kerja yang bersih, asri dan nyaman.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, guna mendukung pelayanan administrasi perkantoran.
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya barang cetak dan penggandaan guna mendukung pelayanan perkantoran.
 - g) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat rutin dan berkala bagi staf dinas dan petugas lapangan guna meningkatkan pelayanan perkantoran.
 - h) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat: terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan selama tahun 2019.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya gedung kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan kantor.

- b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya kendaraan dinas/operasional sebanyak 94 unit guna mendukung kelancaran mobilitas perkantoran.
 - c) Rehabilitasi sedang berat gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berfungsinya gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya buku LAKIP, LPPD dan LKPJ tahun 2019 sebanyak 4 dokumen sehingga dapat terukurnya kinerja tahunan.
- 4) Program peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan peningkatan kemampuan lembaga tani (IPDMIP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlatihnya 7 kelompok tani, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan:
- a) Pengembangan perbenihan/pembibitan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya stok bibit tanaman jagung sejumlah 3 ton/Ha, padi 3 ton/Ha, bawang merah 5 ton/ha.
 - b) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkendalinya serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 90%.
 - c) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan (ekstensifikasi) telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya perluasan areal tanaman cengkeh dengan target total luas 20 Ha.
 - d) Penyusunan database potensi produk pertanian dan peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pendataan database potensi produk pertanian dan peternakan dengan target 1 dokumen.
 - e) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya luas areal rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan seluas 14 ha.
 - f) Laporan produksi pertanian daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya dokumen data produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - g) Pengembangan hortikultura telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengembangan pembenihan bawang merah seluas 2,5 ha dan kelor seluas 1 ha.
- 6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan:

- a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya mutu pengolahan hasil komoditi pertanian dan perkebunan.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pemeliharaan kebun dinas Kalang Maghit 330 Ha dan kebun dinas Mano 3,7 Ha.
- 7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dengan kegiatan:
- a) Penyediaan sarana produksi pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan produksi untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian, tersedianya damparit dan salurannya serta embung untuk mengairi sawah.
 - b) Pengendalian hama dan penyakit pada komoditi pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan seluas 60 Ha.
- 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelatihan pengetahuan dan keterampilan PPL sebanyak 191 orang.
- 9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan kegiatan:
- a) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tertibnya pemeliharaan HPR di 176 desa/kelurahan.
 - b) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terkendalinya lalu lintas ternak dengan target kerja terlaksananya monitoring sebanyak 4 kali.
- 10) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan:
- a) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya penyebaran ternak pemerintah di 9 kecamatan dengan jumlah ternak yang di sebar sebanyak 44 ekor ternak (sapi 22 ekor dan kambing 22 ekor).
 - b) Pengembangan agribisnis peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: meningkatnya jumlah ternak dan luas lahan yang diolah di UPTD pembibitan ternak.
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya sarana peternakan yang memadai, pembangunan kantor, pembibitan ternak dan rehabilitasi rumah dinas di UPT.
- 11) Program peningkatan kualitas bahan baku, dengan kegiatan:

- a) Penanganan panen dan pasca panen tembakau, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya panen dan pasca panen tembakau pada 2 kelompok tani.
- b) Standarisasi kualitas bahan baku, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana produksi pada 2 kelompok tani.
- c) Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kualitas SDM petani tembakau pada 4 kelompok tani.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 105 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S2) : 1 orang
- b) Sarjana (S1) : 53 orang
- c) Sarjana Muda : 18 orang
- d) SLTA : 29 orang
- e) SLTP : 1 orang
- f) SD : 3 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 4 orang
- b) Golongan III : 66 orang
- c) Golongan II : 30 orang
- d) Golongan I : 4 orang

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 6 orang
- c) Eselon IV : 18 orang

4) Jabatan Fungsional : 54 orang

5) Staf : 26 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	7.719.788.883	7.655.024.985	99,16
Belanja langsung	21.214.593.639	20.407.113.926	96,19
Belanja pegawai	3.707.014.800	3.622.654.300	97,72
Belanja barang dan jasa	8.405.893.339	7.688.851.626	91,47
Belanja Modal	9.101.685.500	9.095.608.000	99,93
Jumlah	28.934.382.522	28.062.138.911	96,99

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Kelautan dan Perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Cukup menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.

- a) Produktifitas komoditi pertanian masih rendah diakibatkan masih terbatasnya pemanfaatan bibit unggul
- b) Masih rendahnya cakupan vaksinasi untuk penyakit menular strategis (antraks dan Se) diakibatkan masih minimnya jumlah petugas poskeswan
- c) Belum adanya masterplan pembangunan pertanian Manggarai Timur menyebabkan pola pembangunan pertanian belum berbasis kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan dan komoditi

2) Solusi.

- a) Pengembangan perbenihan padi, jagung dan bawang merah yang di lahan petani
- b) Menambah jumlah petugas vaksinasi dengan menambah tenaga sukarela di beberapa poskeswan
- c) Menyusun dokumen action plan pengembangan kawasan pertanian untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

3 Urusan Pariwisata

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dialokasikan dana Rp.441.750.000,- dan realisasi Rp.419.565.750,- atau 94,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
 - b) Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 - c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata, dialokasikan dana Rp.1.254.829.000,- dan realisasi Rp.852.047.800,- atau 67,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - b) Pengembangan daerah tujuan wisata
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 3) Program pengembangan kemitraan, dialokasikan dana Rp.627.638.000,- dan realisasi Rp.592.833.000,- atau 94,45%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
 - b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan:
 - a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pelatihan pemandu wisata budaya di kalangan pelaku pariwisata guna promosi pariwisata.
 - b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya website Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, tersedianya barang cetakan media promosi, brosur, leaflet, peta, banner, dan terselenggaranya festival caci guna promosi pariwisata.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan di 9 kecamatan.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan:
 - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, dengan hasil/manfaat: terlaksananya perbaikan tembok penahan abrasi di obyek wisata Cepi Watu dan terlaksananya pelatihan tata kelola destinasi pariwisata guna meningkatkan potensi wisata.
 - b) Pengembangan daerah tujuan wisata, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan survey dan pengambilan data master plan dan DED obyek wisata.
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terwujudnya monitoring kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang dilaksanakan selama tahun 2019 di 9 kecamatan.
- 3) Program pengembangan kemitraan, dengan kegiatan:
 - a) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan pelatihan

ekowisata, manajemen desa wisata, pelatihan balawisata dan pelatihan selama 1 tahun.

- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen home stay.
- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang dilaksanakan selama tahun 2019.

d. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 10 orang
 - c) Sarjana Muda : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 11 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 3 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang
- 4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	1.004.550.567	997.001.207	99,25
Belanja Langsung	2.141.891.000	2.009.552.217	93,82
Belanja Pegawai	570.677.600	557.436.000	97,68
Belanja Barang dan Jasa	1.521.213.400	1.452.116.217	95,46
Belanja Modal	50.000.000	0	0,00
Jumlah 1+3	3.146.441.567	3.006.553.424	95,55

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar urusan Kelautan dan Perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sama seperti yang tergambar pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan.

- a) Banyak obyek dan daya tarik wisata yang belum terdata dan dinilai potensinya.
 - b) Obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Manggarai Timur yang belum di kenal secara luas baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c) Belum optimalnya penataan obyek wisata andalan Kabupaten Manggarai Timur baik dari segi fasilitas pendukung maupun infrastruktur.
- 2) Solusi
- a) Kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai upaya untuk mendata dan menilai potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada dan tersebar di Kabupaten Manggarai Timur.
 - b) Untuk memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga membuat website dan menyediakan media cetak promosi pariwisata melalui leaflet, brosur, banner dan peta pariwisata.
 - c) Pada tahun 2019, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata melakukan penataan obyek kawasan pariwisata dengan melakukan perbaikan/rehab tembok pengaman di obyek wisata Cepi Watu.

4 Urusan Perdagangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dialokasikan dana Rp.1.238.602.000,- dan realisasi Rp.1.063.362.866,84,- atau 86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pengembangan pasar dan distribusi barang produk
 - b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- 2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dialokasikan dana Rp.120.775.000,- dan realisasi Rp.110.850.000,- atau 92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - b) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah
 - c) Registrasi tempat penjualan minuman beralkohol

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri, digunakan untuk:

- a) Pengembangan pasar dan distribusi barang produk, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbangunnya pelataran pasar Borong dan pembangunan tembok penahan Pasar Wae Rana.
 - b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya informasi harga sembako bagi masyarakat.
- 2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan kegiatan:
- a) Peningkatan pengawasan peredaran kedaluwarsa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang kadaluwarsa (BDKT) guna keamanan barang perdagangan.
 - b) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah dan informasi harga sembako bagi masyarakat.
 - c) Registrasi tempat penjualan minuman beralkohol, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terdatanya tempat-tempat minuman beralkohol yang ada di desa-desa serta pengawasan peredarannya.

d. Jumlah pegawai

Pelaksanaan urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 8 orang pegawai dengan kualifikasi:

1. Kualifikasi Pendidikan:
 - a) Sarjana (S1) : 6 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SMA : 1 orang
2. Pangkat/Golongan
 - a) Golongan III : 6 orang
 - b) Golongan II : 2 orang
3. Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 5 orang
4. Staf : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk urusan perdagangan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	-	-	-
Belanja langsung	1.359.377.000	1.174.212.866,84	86,37
Belanja pegawai	323.162.800	297.612.600	92,09
Belanja barang dan jasa	230.214.200	224.163.700	97,37
Belanja modal	806.000.000	652.436.566,84	80,94

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Kelautan dan Perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya kesadaran para pedagang dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
- b) Keterbatasan tempat berjualan di pasar, yang diakibatkan karena keterbatasan sarana pendukung yang disiapkan (lapak dan los pasar)

2) Solusi

- a) Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan (polisi dan Pol PP) dalam menertibkan pedagang yang menjual di luar kawasan pasar.
- b) Melakukan pembangunan pasar yang baru, sehingga setiap pedagang memiliki lapak

5 Urusan Perindustrian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, dialokasikan dana Rp.447.759.000,- dan realisasi Rp.446.535.000,- atau 99,72%, digunakan untuk mendukung kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
- 2) Program pengembangan industri kecil menengah, dialokasikan dana Rp.183.400.000,- dan realisasi Rp.181.400.000,- atau 99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama industri mikro kecil dan menengah dengan swasta.
- 3) Program penataan struktur industri, dialokasikan dana Rp.405.447.000,- dan realisasi Rp.399.222.384,77,- atau 98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana klaster industri.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya bantuan/hibah bagi kelompok masyarakat, diantaranya berupa benang tenun, peralatan bengkel motor,

peralatan bengkel kayu, peralatan bengkel las, peralatan tenun, bengkel kendaraan roda 4 dan salon kecantikan.

- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pameran produk industri kecil Manggarai Timur di tingkat nasional.
- 3) Program penataan struktur industri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terbangunnya pelataran parker sentral/pusat industri kecil Manggarai Timur.

d. Jumlah pegawai

Pelaksanaan Urusan Perindustrian pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 5 orang pegawai dengan kualifikasi:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
Sarjana (S1) : 5 orang
- 2) Pangkat/Golongan
Golongan III : 5 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan perindustrian tahun anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	-	-	-
2	Belanja langsung	1.036.606.000	1.027.157.384,77	99,08
	Belanja pegawai	342.974.400	340.389.600	99,2
	Belanja barang dan jasa	523.631.600	517.607.400	99,8
	Belanja modal	170.000.000	169.160.384,77	99,50

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada urusan Kelautan dan Perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kondisi industri kecil berupa industri rumah tangga belum mampu mengakses pasar.
- b) Rendahnya semangat dan jiwa kewirausahaan dalam pengembangan usaha
- c) Struktur permodalan sangat terbatas dan kurang akses terhadap sumber-sumber pembiayaan;

- d) Rendahnya SDM pelaku usaha IKM yang dibina
- e) Kelompok IKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produk atau hasil usaha kelompok

2. Solusi

- a. Perlu adanya pendidik dan pelatihan peningkatan kemampuan teknologi industri melalui pembinaan kemampuan teknologi industri dari manual ke mesinal;
- b. Perlu adanya pembinaan bagi aparat Pembina IKM dalam pengelolaan manajemen usaha;
- c. Perbaiki teknologi produksi dan manajemen usaha bagi industri kecil dan industri rumah tangga;
- d. Pelatihan dan pembinaan kelompok IKM terus dilakukan;
- e. Untuk pemasaran, Dinas Koperindag diharapkan membantu mempromosikan dalam bentuk pameran.

6 Urusan Transmigrasi

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan kegiatan

Program yang dilaksanakan pada urusan Transmigrasi yaitu program pengembangan wilayah transmigrasi, dialokasikan dana Rp.170.289.000,- dan realisasi Rp.168.490.600,- atau 98,94%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana teknik unit pemukiman transmigrasi.

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Program pengembangan wilayah transmigrasi telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyusunan rencana teknik unit pemukiman transmigrasi dengan hasil/manfaat: tersedianya lokasi pengembangan transmigrasi.

d. Jumlah pegawai

Pelaksanaan urusan Transmigrasi didukung oleh 3 orang pegawai dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana : 2 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang

b) Eselon IV : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	170.289.000	168.490.600	98,94
Pegawai	129.015.600	128.584.800	99,67
Barang dan Jasa	41.273.400	39.905.800	96,69
Modal	-	-	0.00

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada Urusan Kelautan dan Perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

Masih rendahnya infrastruktur sarana dan prasarana umum di wilayah transmigrasi.

2) Solusi:

Mengupayakan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum di wilayah transmigrasi.

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya).

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.839.039.999,- dan realisasi Rp.815.790.431,- atau 97,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g) Penyediaan alat tulis kantor
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- i) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k) Penyediaan makanan dan minuman
 - l) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.225.035.000,- dan realisasi Rp.211.511.000,- atau 93,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b) Pengadaan mebeleur
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.6.000.100,- dan realisasi Rp.6.000.000,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program pengembangan data/informasi, dialokasikan dana Rp.714.200.000,- dan realisasi Rp.216.146.000,- atau 30,26%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan dokumen perencanaan.
- 5) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, dialokasikan dana Rp.202.650.000,- dan realisasi Rp.196.675.958,- atau 97,05%, digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
- 6) Program perencanaan pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.1.647.412.901,- dan realisasi Rp.1.574.282.513,- atau 95,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Penyusunan rancangan RPJMD
 - b) Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
 - c) Penetapan RPJMD
 - d) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - f) Penyusunan dokumen KUA-PPAS induk dan perubahan
 - g) Koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan
 - h) Penyusunan Rancangan RKPD Induk dan RKPD Perubahan

- i) Penetapan RKPD
 - j) Pelaksanaan forum OPD
 - k) Fasilitasi penyusunan Renstra OPD
- 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi, dialokasikan dana Rp.309.539.000,- dan realisasi Rp.272.801.966,- atau 88,13%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c) Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan KPDT di Kabupaten Manggarai Timur
 - d) Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - 8) Program perencanaan sosial dan budaya, dialokasikan dana Rp.328.664.000,- dan realisasi Rp.324.864.686,- atau 98,84%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi dan program sekolah bahagia KIAT (Kinerja dan Akuntabilitas) guru di Kabupaten Manggarai Timur.
 - 9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.405.234.000,- dan realisasi Rp.398.521.354,- atau 98,34%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air (IPDMIP).
 - 10) Program pengembangan penelitian pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.322.701.000,- dan realisasi Rp.258.492.821,- atau 80,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Koordinasi penyusunan pengembangan penelitian daerah
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c) Penyusunan dokumen KLHS RPJMD dan KLHS RTRW
 - d) Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan dokumen perencanaan.

c. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 17 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 2 orang
 - b) Sarjana (S1) : 13 orang
 - c) Sarjana Muda : 1 orang
 - d) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 14 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 4 orang
- c) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 5 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	1.463.422.517	1.453.626.093	99,33
2	Belanja langsung	5.000.476.000	4.275.086.729	85,49
	Belanja pegawai	1.125.649.200	1.021.696.300	90,76
	Belanja barang dan jasa	3.668.791.800	3.048.337.429	83,08
	Belanja modal	206.035.000	205.053.000	99,52
	Jumlah	6.463.898.517	5.728.712.822	88,63

e. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Terbatasnya SDM dan sarana prasarana
- b) Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan
- c) Kurangnya data base yang akurat dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
- d) Keterbatasan perpaduan perencanaan program/kegiatan dari setiap OPD belum optimal.
- e) Belum maksimalnya pembentukan POKJA dalam mengawali program dan kegiatan setiap sektor
- f) Fungsi pengendalian dalam kaitan dengan program yang dijalankan belum maksimal.

2. Solusi

- a) Diklat teknis /fungsional bagi aparatur perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- b) Peningkatan fungsi koordinasi antar instansi
- c) Pada setiap instansi mestinya ada petugas khusus untuk mengelola dan update data.

- d) Maksimalkan koordinasi program ke bidang dan OPD.
- e) Pembentukan POKJA segera dilakukan agar pengendalian terhadap program OPD terus diikuti.
- f) Program perencanaan berbasis E-Planning harus dijalankan agar fungsi pengendalian terhadap program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

2. Urusan Administrasi Keuangan Daerah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.3.279.199.150,- dan realisasi Rp.3.148.412.053,- atau 96,01% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k) Penyediaan makanan dan minuman
 - l) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.206.654.000,- dan realisasi Rp. 194.890.056,- atau 94,31%,digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengadaan mebel
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.185.600.000,- dan realisasi Rp.170.593.440,- atau 91,91%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.74.549.000,- dan realisasi Rp.74.450.000,- atau 99,87%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dialokasikan dana Rp.3.576.606.250,- dan realisasi Rp.3.487.172.432,- atau 97,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penatausahaan keuangan dan pelayanan keuangan daerah
 - b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - d) Penyusunan standar satuan harga
 - e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD pertanggungjawaban
 - f) Peningkatan manajemen aset/barang daerah
 - g) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - h) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Obyek Pajak Khusus NJOP
 - i) Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data SISMIOP PBB
 - j) Pencetakan massal SPPT PBB
 - k) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 3 orang
 - b) Sarjana (S1) : 23 orang
 - c) Sarjana Muda : 6 orang
 - d) SLTA : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 30 orang
 - c) Golongan II : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 6 orang
 - c) Eselon IV : 17 orang
- 4) Staf : 11 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan Urusan Administrasi Keuangan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.436.041.443,06	3.348.885.108,00	61,61
2	Belanja Pegawai	5.436.041.443,06	3.348.885.108,00	61,61
3	Belanja Langsung	7.322.608.400,00	7.075.517.981,00	96,63
4	Belanja Pegawai	3.856.818.300,00	3.712.811.800,00	96,27
5	Belanja Barang dan Jasa	3.315.458.100,00	3.213.216.181,00	96,92
6	Belanja Modal	150.332.000,00	149.490.000,00	99,44
Jumlah (1+3)		12.758.649.843,06	10.424.403.089,00	81,70

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah fasilitas pendukung dan pelaksanaan tugas di kantor maupun di lapangan
- b) Terbatasnya jumlah aparatur pengelola administrasi keuangan
- c) Sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kurang menunjang.

2) Solusi

- a) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.
- b) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas.
- c) Memotivasi staf dengan meningkatkan profesionalisme aparat pengelola pendapatan, keuangan daerah dan asset daerah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga

3. Urusan Kepegawaian dan Persandian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.885.978.200,- dan realisasi Rp.838.983.123,- atau 94,70%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - l) Monitoring dan evaluasi
 - m) Penyediaan kelengkapan administrasi PNS
- 2) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, dialokasikan dana Rp.178.444.500,- dan realisasi Rp.156.656.050,- atau 87,79%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi urusan pensiun/purna tugas.
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.1.563.451.789,- dan realisasi Rp.1.562.358.089,- atau 99,93% digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNSD
 - b) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD
 - 4) Program pendidikan kedinasan, dialokasikan dana Rp.188.537.500,- dan realisasi Rp.159.512.007,- atau 84,60%, digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis.
 - 5) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dialokasikan dana Rp.2.087.645.011,- realisasi Rp.1.817.788.510,- atau 87,07%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
 - b) Seleksi penerimaan CPNS
 - c) Orientasi CPNSD
 - d) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
 - e) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
 - f) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
 - g) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
 - h) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat reguler PNS
 - i) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 2 orang
 - b) Sarjana (S1) : 14 orang
 - c) Sarjana Muda : 3 orang
 - d) SLTA : 3 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 18 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 3 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang
- 4) Staf : 15 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1,496,168,784	1,423,497,671	95.14
Belanja Langsung	3,915,545,000	3,454,878,279	88.23
Belanja Pegawai	900,517,000	842,451,400	93.55
Belanja Barang dan Jasa	2,924,728,000	2,524,405,879	86.31
Belanja Modal	111,650,000	111,325,500	99.71
Jumlah	5,411,713,784	4,878,375,950	90.14

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya anggaran untuk mengintervensi pejabat structural yang belum mengikuti Diklat PIM
- b) Alokasi anggaran untuk Diklat Teknis dan Fungsional sangat terbatas sehingga kegiatan tersebut masih tersebar pada OPD masing-masing
- c) Ada kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti seleksi penerimaan CPNSD yang waktunya ditentukan oleh panitia pusat sehingga sulit dalam penganggaran

2) Solusi

- a) Mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan gedung cat, Diklat dan assesment center

- b) Selalu berkoordinasi dengan OPD lain untuk pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional terkait anggaran diklat.
- c) Meningkatkan intensitas koordinasi

4. Inspektorat Daerah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.762.043.000,- dan realisasi Rp.743.372.480,- atau 97,55%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
 - h) Penyediaan makan dan minum
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.190.980.000,- dan realisasi Rp.173.438.840,- atau 90,82%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pengadaan mebeulair
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.345.000,- dan realisasi Rp.345.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, dialokasikan dana Rp.2.124.450.800,- dan realisasi Rp.2.067.200.126,- atau 97,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b) Penanganan khusus pengaduan lingkup pemerintah daerah
 - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah

- d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
 - e) Inventarisasi temuan pengawasan
 - f) Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
 - g) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - h) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- 5) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dialokasikan dana Rp.39.424.000,- dan realisasi Rp.35.525.140,- atau 90,11%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
 - b) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

c. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 27 orang
 - b) Diploma : 2 orang
 - c) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 26 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 4 orang
 - c) Eselon IV : 3 orang
- 4) Jabatan Fungsional
 - a) Auditor : 17 orang
 - b) P2UPD : 1 orang
- 5) Staf : 5 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	2.358.725.727	2,343.893.097	99,37
Belanja langsung	3.117.242.800	3.019.879.586	96,88
Belanja pegawai	442.431.200	407.658.000	92,14
Belanja barang dan jasa	2.606.611.600	2.544.021.586	97,60
Belanja modal	68,200,000	68.200.000	100
Jumlah	5,475,968,527	5.363.772.683	97,95

e. Proses Perencanaan Pembangunan

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan keadaan tanggal 31 Desember 2019 sebagian besar berada dalam kondisi baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang sudah dalam kondisi rusak berat.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi khusus di bidang pengawasan sehingga menyebabkan tidak efektifnya pembinaan dan pengawasan inspektorat Daerah, hal ini terlihat dari tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan.
- b) Terbatasnya alokasi anggaran Diklat bagi Auditor dan Non Auditor dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan, sehingga hasil-hasil pengawasan belum dikaji secara maksimal.
- c) Masih terdapat banyak obyek pemeriksaan yang belum terjangkau oleh tugas pengawasan karena banyaknya jumlah obyek pemeriksaan di Kabupaten Manggarai Timur sesuai Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP) Inspektorat Daerah 2019–2023 sehingga mengakibatkan banyaknya obyek pemeriksaan/auditi/aparatur pemerintah yang belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsung oleh Inspektorat Daerah.
- d) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari para pengelola keuangan di tingkat OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah-sekolah tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan Negara/Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran dari obyek pemeriksaan baik di tingkat OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas, sekolah-sekolah dan pihak ketiga (rekanan) dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.

2) Solusi

- a) Untuk memenuhi kualifikasi PNS yang berkualifikasi khusus di bidang pengawasan (Auditor) maka pada tahun 2020 disediakan anggaran untuk pelaksanaan diklat teknis sesuai dengan jadwal diklat dari BPKP.
- b) Melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Auditor dan perjuangkan anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan Auditor dan tenaga pengawas di luar Auditor sehingga anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan setiap tahun selalu tersedia dan terserap.

- c) Permintaan penambahan Auditor untuk bisa menjangkau Obyek Pemeriksaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
- d) Perkuatkan peran OPD dalam pengelolaan keuangan dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin melalui forum tindaklanjut temuan baik temuan BPK maupun temuan APIP dan melibatkan OPD dalam Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- e) Menyelenggarakan Rapat evaluasi tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan dan monitoring/ evaluasi penyelesaian tindaklanjut temuan APIP dan BPK secara berkala bersama OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas, Sekolah-sekolah dan pihak ketiga (rekanan) untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya tindaklanjut temuan.

5. Sekretariat KORPRI

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.215.632.540,- dan realisasi Rp.215.572.540,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Penyediaan makan dan minum rapat kantor
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.18.428.000,- dan realisasi Rp.18.428.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.668.000,- dan realisasi Rp.2.668.000,- atau 100%, digunakan untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

4) Program pembinaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan KORPRI, dialokasikan dana Rp.114.032.260,- dan realisasi Rp.101.436.100,- atau 89,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Pemutakhiran data anggota Korpri
- b) Rapat kerja dan rapat evaluasi Korpri

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 1 orang
 - b) Sarjana Muda : 2 orang
 - c) SMA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - Golongan III : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - Eselon IV : 2 orang
 - Eselon III : 1 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan Sekretariat KORPRI pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	-	-	-
Belanja langsung	350.760.800	338.104.640	96,39
Belanja pegawai	114.410.400	114.410.400	100
Belanja barang dan jasa	236.350.400	223.694.240	94,65
Belanja modal	-	-	0,0

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Rendahnya alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan KORPRI
 - b) Data anggota KORPRI yang diberikan oleh kecamatan atau unit kerja/UPTD belum valid dan akurat.
- 2) Solusi
 - a) Mengalokasikan anggaran yang proposional sehingga program dan kegiatan KORPRI dapat dilaksanakan.

- b) Menyiapkan operator data anggota KORPRI di setiap kecamatan atau unit kerja/UPTD sekaligus melakukan update data sebulan sekali.

6. Bagian Administrasi Pemerintahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana sebesar Rp.573.840.000,- dan realisasi Rp.529.644.870,- atau 92,29% untuk mendukung kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor bupati.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah, dialokasikan dana Rp.274.853.000,- dan realisasi Rp. 231.740.000,- atau 84,31% untuk mendukung kegiatan :
 - a) Pengadaan PDUB Camat
 - b) Pengadaan PDUB Bupati dan Wakil Bupati
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan rutin dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 3) Program peningkatan sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.529.831.383,- dan realisasi Rp.528.961.308,- atau 99,83%, dengan kegiatan:
 - a) Rapat koordinasi lintas OPD
 - b) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
 - c) Rapat kerja Sekretaris Desa dan Sekretaris Lurah
 - d) Fasilitasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
- 4) Program pengembangan sistem laporan dan pencapaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.403.738.960,- dan realisasi Rp.383.406.030,- atau 94,96% dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan LKPJ Bupati

- b) Fasilitasi data dukung Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c) Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ OPD
 - d) Penyusunan laporan rutin dan laporan khusus bupati
 - e) Penyusunan LPPD dan ILPPD
- 5) Program penataan daerah otonomi baru, dialokasikan dana Rp.78.735.552,- dan realisasi Rp.69.393.752,- atau 88,13%, dengan kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah.
 - 6) Program pengembangan wilayah perbatasan, dialokasikan dana Rp. 215.438.705 dan realisasi Rp.203.876.243,- atau 94,63% dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah kamtrantibmas di perbatasan kabupaten.
 - 7) Program peningkatan kerjasama antar daerah, dialokasikan dana Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.25.000.000,- atau 100%, dengan kegiatan iuran anggota APKASI.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 10 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 2 orang
- 4) Staf : 9 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	2.101.437.600	1.972.022.203	93,84
Belanja Pegawai	227.696.400	222.046.400	97,51
Belanja Barang dan Jasa	1.869.491.200	1.680.582.051	89,89
Belanja Modal	4.250.000	-	0
Total	2.101.437.600		93,84

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor khususnya kendaraan dinas roda empat.

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Belum maksimalnya respon dari OPD dalam penyusunan laporan
 - b) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
- 2) Solusi
 - a) Meningkatkan fungsi koordinasi dengan OPD terkait.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran yang ada.

7. Bagian Administrasi Pembangunan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.253.504.700,- dan realisasi Rp.245.892.337,- atau 9,69%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Penyediaan makan minum kantor
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.88.369.248,- dan realisasi Rp.79.833.000,- atau 90,34%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.38.204.000,- dan realisasi Rp.37.077.000,- atau 97,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, dialokasikan dana Rp.249.316.052,- dan realisasi Rp.238.615.882,- atau 95,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- b) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 3 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 3 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	629.394.000	601.418.219	95,56
Belanja pegawai	197.715.600	192.432.200	99,65
Belanja barang dan jasa	431.678.400	408.986.019	84,51
Belanja modal	-	-	0

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Penyampaian laporan RFK dan realisasi belanja langsung dari OPD sering terlambat
 - b) Penyampaian data program kegiatan barang/jasa dari OPD sering tidak disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan sehingga menghambat proses perekapan dan pelaporan

- c) Terbatasnya staf pelaksana yang memback up program dan kegiatan di tiga Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
- 2) Solusi
- a) Jika terdapat OPD yang terlambat menyampaikan laporan RFK dan laporan realisasi belanja langsung akan dijemput langsung oleh staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Timur
 - b) Diperlukan rapat khusus terhadap OPD yang tidak mengirimkan laporan
 - c) Pada Bagian Administrasi Pembangunan ditambahkan PNS yang berkualifikasi sarjana.

8. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.251.648.000,- dan realisasi Rp.250.360.356,- atau 99,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makan dan minum
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.55.483.200,- dan realisasi Rp.54.908.200,- atau 98,96%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.39.959.000,- dan realisasi Rp.39.959.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Pelaksanaan forum pengadaan barang/jasa
 - b) Pelaksanaan Bimtek system aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.500.000,- dan realisasi Rp.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 5) Program pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa, dialokasikan dana Rp.554.433.000,- dan realisasi Rp.546.933.000,- atau 98,65%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Fasilitasi proses tender pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - b) Fasilitasi pengadaan barang /jasa pemerintah

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - Sarjana (S1) : 5 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	902.023.200,00	892.660.556,00	98,96
Belanja pegawai	601.584.800,00	594.084.800,00	98,75
Belanja barang dan jasa	285.198.400,00	283.335.756,00	99,35
Belanja modal	15.240.000,00	15.240.000,00	100

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan
 - b) Keterbatasan SDM yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - c) Kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah bagi para pelaku pengadaan jika terkena persoalan hukum pada saat menjalankan tugas.

- 2) Solusi
 - a) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran yang ada
 - b) Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melakukan pelatihan/diklat.
 - c) Menjalin kerja sama antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum (APH) dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum yang terjadi pada ASN dalam pelaksanaan tugasnya serta lebih terjamin kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan mendapat perlindungan hukum.

9. Bagian Hukum

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.275.961.800,- dan realisasi Rp.275.961.800,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.53.259.500,- realisasi Rp.35.321.000,- atau 66,30%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah, dialokasikan dana Rp.59.260.000,- dan realisasi Rp.59.202.000,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a) Koordinasi dan konsultasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - b) Koordinasi percepatan pemberantasan KKN melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004
- 4) Program penataan peraturan perundang-undangan, dialokasikan dana Rp.642.195.500,- dan realisasi Rp.622.695.500,- atau 96,96%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
 - b) Legislasi rancangan peraturan perundangan
 - c) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

- d) Publikasi peraturan perundang-undangan
- e) Asistensi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- f) Pembinaan desa sadar hukum.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S2) : 1 orang
- b) Sarjana (S1) : 3 orang
- c) SLTA : 1 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 1 orang
- b) Golongan III : 4 orang

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon III : 1 orang
- b) Eselon IV : 2 orang

4) Staf : 2 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Hukum Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja langsung	1.030.676.800	993.124.300	96,35
	Belanja pegawai	161.404.200	161.404.200	100
	belanja Barang dan jasa	869.272.600	831.720.100	95,68
	Belanja Modal	-	-	0

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja seperti computer/laptop untuk menunjang pekerjaan dalam kantor.
- b) Masih kurangnya bahan bacaan berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Solusi

- a) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana berupa computer/ laptop untuk menunjang pekerjaan kantor.

- b) Untuk mengatasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan anggaran untuk membeli bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk dijadikan referensi baik bagi Bagian Hukum maupun bagi perangkat daerah yang membutuhkan.

10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp. 202.094.200,- dan realisasi Rp.201.528.200,- atau 99,72%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa dan surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik
 - h) Penyediaan makanan dan minuman
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.78.649.100,- dan realisasi Rp.78.649.100,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.165.000,- dan realisasi Rp. 3.165.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dialokasikan dana Rp.62.551.500,- dan realisasi Rp.61.401.500,- atau 98,16%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan pemberian bantuan sosial.
- 5) Program koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dialokasikan dana Rp.104.717.000,- dan realisasi Rp.104.367.000,- atau 99,67%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pendidikan dan kesehatan.

- b) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah tenaga kerja dan transmigrasi.
- 6) Program peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama, dialokasikan dana Rp.169.500.000,- dan realisasi Rp.164.149.400,- atau 96,84%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
 - b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 7 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 6 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 5 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 3 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019 dengan rincian :

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja langsung	620.676.800	613.260.200	98,81
Belanja pegawai	102.823.200	102.823.200	100
Belanja barang dan jasa	517.853.600	510.437.000	98,57
Belanja modal	-	-	-

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Pada kegiatan koordinasi bantuan sosial dan hibah masih terdapat proposal yang belum merincikan secara detail penggunaan dana dengan item pekerjaan.

- b) Peralatan dan perlengkapan kantor (laptop dan printer) dan kendaraan dinas operasional yang telah memasuki usia pemakaian yang cukup lama (5 tahun).

2) Solusi

- a) Selalu mengarahkan dan melakukan koreksi untuk perbaikan terhadap setiap proposal bantuan sosial dan hibah yang diajukan pemohon kepada Pemerintah Daerah sehingga maksud penyampaian proposal tersebut dapat dipahami dengan baik sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- b) Diperlukan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas/operasional yang baru untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

11. Bagian Umum

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Umum Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.877.095.500,- dan realisasi Rp.1.859.778.606,- atau 99,08%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - i) Penyediaan bahan logistik kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.3.631.862.100,- dan realisasi Rp.3.428.734.152,- atau 94,41%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - b) Pengadaan mobil jabatan
 - c) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

- g) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - h) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - i) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - j) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
- 3) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.3.454.385.000,- dan realisasi Rp.3.323.365.614,- atau 96,21 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
 - b) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
 - c) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
 - d) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
 - e) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
 - f) Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - g) Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 11 orang
 - c) Sarjana Muda : 2 orang
 - d) SLTA : 2 orang
 - e) SMP : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 7 orang
 - b) Golongan III : 6 orang
 - c) Golongan II : 5 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 6 orang
 - b) Eselon III : 1 orang
 - c) Eselon IV : 1 orang
- 4) Staf : 10 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Umum tahun anggaran 2019, dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	5.700.857.108	5,698.641.548	99,96
Belanja Langsung	8.963.342.600	8.611.878.372	96,08
Belanja Pegawai	1,291.774.800	1,237.580.300	95,80
Belanja Barang dan Jasa	5.977.453.800	5.681.371.672	95,05
Belanja Modal	1.694.114.000	1.692.926.400	99,93
Jumlah	14.664.199.708	14.310.519.920	97,58

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kurangnya staf PNS di Sub Bagian Tata Usaha untuk mendukung penyelesaian pekerjaan ketatusahaan.
- b) Kurangnya staf PNS di Sub Bagian Rumah Tangga untuk mendukung penyelesaian pekerjaan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati.

2) Solusi

- a) Sudah diajukan untuk pengisian staf Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum.
- b) Sudah diajukan untuk pengisian staf Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum.

12. Bagian Administrasi Perekonomian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.311.752.700,- dan realisasi Rp.311.179.522,- atau 99,82%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Penyediaan makanan dan minuman

- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.54.782.000,- dan realisasi Rp.54.085.128,- atau 98,73%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.080.700,- dan realisasi Rp.3.080.700,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 4) Program fasilitasi kebijakan dan program pemerintah, dialokasikan dana Rp.59.788.400,- dan realisasi Rp.52.737.400,- atau 88,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan tugas percepatan berusaha.
- 5) Program koordinasi dan pembinaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.306.697.800,- dan realisasi Rp.298.017.000,- atau 97,17%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a) Koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (PID)
 - b) Koordinasi peningkatan produksi dan produktifitas SDA dan ketahanan pangan Daerah

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - Sarjana (S1) : 5 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - Golongan III : 4 orang
 - Golongan IV : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 4 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2019, dengan rincian :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	736.101.600	719.099.750	97,69
2	Belanja Pegawai	297.029.000	284.598.200	95,81
3	Belanja Barang dan Jasa	439.072.600	434.501.500	98,95
4	Belanja Modal	-	-	-

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sudah menunjang untuk mendukung pelaksanaan kantor

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Terbatasnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengakibatkan masih terdapat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang merangkap sehingga penyelesaian tugas tidak tepat waktu.

2) Solusi

Perlu diadakannya penambahan jumlah pegawai, sehingga tidak terjadi perangkapan tugas.

13. Bagian Organisasi

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.327.985.200,- dan realisasi Rp.310.197.200,- atau 94,57%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e) Penyediaan alat tulis kantor
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h) Penyediaan makanan dan minuman kantor
- i) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.65.667.000,- dan realisasi Rp.61.531.00,- atau 93,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.362.379.000,- dan realisasi Rp.333.524.500,- atau 92,03%, digunakan untuk mendukung kegiatan:

- a) Bimbingan teknis e-SAKIP
- b) Bimbingan teknis dan penyusunan evaluasi jabatan
- c) Pengembangan dan evaluasi aparatur

- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.124.449.500,- dan realisasi Rp.104.932.500,- atau 84,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b) Evaluasi LAKIP oleh tim KEMENPAN-RB
- 5) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dialokasikan dana Rp.242.537.500,- dan realisasi Rp.218.185.500,- atau 89,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Peraturan Daerah No 7 tahun 2019
 - b) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019
 - c) Penyusunan evaluasi jabatan
- 6) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dialokasikan dana Rp.32.165.000,- dan realisasi RP.22.920.000,- atau 71,25 %, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA)

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 10 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 8 orang
 - b) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 7 orang
 - c) Golongan II : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 1 orang
- 4) Staf : 8 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Langsung	1.146.183.200	1.051.290.700	90,17
Belanja Pegawai	201.146.400	198.584.800	98,72
Belanja Barang dan Jasa	945.036.800	852.705.900	90,22
Belanja Modal	-	-	0

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada Urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kondisi ruangan kerja yang sempit dengan jumlah pegawai yang cukup banyak.
- b) Tugas pelayanan belum maksimal karena kurangnya staf fungsional umum berjumlah 6 orang.

2) Solusi

- a) Untuk mengatasi ruangan kerja yang sempit, perlu adanya inovasi dalam menata ruang, barang-barang kantor. Misalnya dengan merapatnya furniture (berupa alat/perabotan yang kecil dan sedang) ke dinding sehingga ruang lebih tampak luas dan aktivitas/mobilitas dalam ruangan dapat berjalan dengan lancar.
- b) Untuk mengisi atau melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang kosong, maka merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian.

14. Bagian Humas dan Protokol

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan danaRp.320.587.400,- dan realisasi Rp.318.657.400,- atau 99,40%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan alat tulis kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.128.902.000,- dan realisasi Rp.126.473.400,- atau 98,12%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c) Pengadaan alat-alat studio
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.1.655.000,- dan realisasi Rp.1.655.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi lintas OPD.
- 4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.140.750.000,- dan realisasi Rp.139.700.000,- atau 99,25%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 5) Program kerjasama informasi dengan mass media, dialokasikan dana Rp.194.458.000,- dan realisasi Rp.192408.000,- atau 98,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
 - b) Penyediaan barang dan jasa iklan pada media cetak/elektronik..

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 3 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 3 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 2 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	786.352.400	778.893.800	9,90 %
	Belanja pegawai	223.997.200	222.811.300	99,47%
	Belanja Barang dan Jasa	518.375.200	512.102.500	98,79%
	Belanja Modal	43.980.000	43.980.000	100

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran.
- b) Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki spesifikasi/keahlian teknis di bidang kehumasan dan keprotokolan.
- c) Kegiatan kehumasan dan keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
- d) Kurangnya pemahaman dari semua OPD tentang pentingnya peran Bagian Humas dan Protokol dalam menentukan kelancaran dan kesuksesan kegiatan pimpinan daerah.

2) Solusi

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kehumasaan dan keprotokolan.
- b) Melibatkan pegawai/staf dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian.
- c) Meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung kegiatan pimpinan daerah dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah.
- d) Menyusun pedoman/aturan yang mendukung kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna memperlancaran tugas pimpinan daerah.

15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan.

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.4.115.809.880,- dan realisasi Rp.4.020.197.384,- atau 97,68%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor

- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.1.227.231.000,- dan realisasi Rp.1.191.673.773,- atau 97,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pengadaan mebeleur
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - d) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 - e) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur, dialokasikan dana Rp.352.000.000,- dan realisasi Rp.336.443.790,- atau 95,58%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.1.999.750,- dan realisasi Rp.399.000,- atau 19,95%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan OPD.
- 5) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dialokasikan dana Rp.5.938.983.000,- dan realisasi Rp.5.447.958.020,- atau 91,73%,digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
 - c) Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
 - d) Kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD
 - e) Kegiatan reses
 - f) Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
 - g) Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
 - h) Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - i) Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 11 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 9 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 9 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan pada Sekretariat Dewan tahun anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung/belanja pegawai DPR	10.767.240.000	10.536.322.310	97,85
Belanja pegawai ASN	1.145.556.842	1.063.449.457	92,83
Belanja Langsung	11.636.023.630	10.996.671.967	94,51
Belanja Pegawai	1.037.073.600	994.641.800	95,90
Belanja Barang dan Jasa	9.431.730.030	8.864.074.394	93,98
Belanja Modal	1.167.220.000	1.137.955.773	97,49
Jumlah	23.548.820.472	22.596.443.734	95,95

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Cukup mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan:
 - a) Masih dibutuhkan staf PNS untuk mendukung tugas-tugas Sub Bagian
 - b) Belum optimalnya pelayanan pada sekretariat DPRD karena masih rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi setiap bagian
- 2) Solusi
 - a) Diusulkan agar menambahkan staf PNS untuk membantu dan mendukung tugas-tugas terutama terkait data-data penting pada setiap sub bagian.
 - b) Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi setiap bagian dengan mengikutsertakan setiap orang pada sekretariat DPRD mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitasnya.

16. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur

b. Program dan Kegiatan

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.767.019.550,- dan realisasi Rp.709.106.764,- atau 92,45 %, dengan kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i) Penyediaan Makanan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dialokasikan dana Rp.368.955.800,- dan realisasi Rp.309.070.405,- atau 83,77 %, dengan kegiatan:
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.500.000 dan realisasi Rp.2.500.000,- atau 100%. Pada program ini meliputi kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Pencegahan dini dan penanggulangan bencana, dialokasikan dana Rp. 3.592.140.500,- dan realisasi Rp. 3.224.030.037,- atau 89,75%, untuk mendukung kegiatan:
 - a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
 - b) Pembuatan rambu peringatan bencana
 - c) Pengadaan bahan bantuan bangunan perumahan bagi korban bencana
 - d) Penanganan pasca bencana
 - e) Pengurangan risiko bencana
 - f) Pembentukan dan operasional posko siaga bencana
 - g) Pengadaan kebutuhan logistik untuk korban bencana
 - h) Pembentukan dan pelatihan tim reaksi cepat

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S1) :14 orang
- b) Sarjana Muda : 5 orang
- c) SLTA : 2 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 2 orang
- b) Golongan III :16 orang
- c) Golongan II : 3 orang

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 4 orang
- c) Eselon IV : 9 orang

4) Staf : 7 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.592.422.858	1.580.961.588	99,28
2	Belanja Langsung	4.730.615.850	4.244.707.206	89,73
2.a	Belanja Pegawai	1.431.344.400	1.365.864.600	95,43
2.b	Belanja Barang dan Jasa	1.479.471.450	1.331.892.606	90,02
2.c	Belanja Modal	1.819.800.000	1.546.950.000	85,01
Jumlah		6.323.038.708	5.825.668.794	92,13

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan
- b) Terbatasnya jumlah peralatan kantor
- c) Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan

2) Solusi

- a) Membuat skala prioritas untuk penanganan bencana
- b) Mengoptimalkan penggunaan peralatan yang sudah tersedia
- c) Memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada aparatur agar memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana.

17. Kecamatan-Kecamatan

➤ Kecamatan Borong

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.320.043.536,- dan realisasi Rp.307.840.500,- atau 96,19%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - i) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k) Penyediaan makanan dan minuman
 - l) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m) Koordinasi, monitoring dan evaluasi
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.108.826.664,- dan realisasi Rp.107.185.900,- atau 98,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.357.500,- dan realisasi Rp.357.500,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.2.070.333.800,- dan realisasi Rp.2.023.998.195,- atau 97,76%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM

- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.53.870.000,- dan realisasi Rp.53.870.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
- 6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.25.834.500,- dan realisasi Rp.25.809.500,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di tingkat desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik di masyarakat, dialokasikan dana Rp.179.582.000,- dan realisasi Rp.179.557.000,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat.
 - a) Fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat
 - b) Pembinaan dan perlindungan masyarakat

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 45 orang (termasuk Desa/Kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 16 orang
 - b) Sarjana Muda (Diploma I,II,III) : 9 orang
 - c) SLTA : 20 orang
- 2) Pangkat/ Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 25 orang
 - c) Golongan II : 17 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 19 orang
- 4) Staf : 24 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Borong Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	2,959.427.905	2,822.628.189	95,3
Belanja Langsung	2.758.848.000	2.698.619.095	97,82
Belanja Pegawai	634.527.800	621.996.200	98,03
Belanja Barang dan Jasa	698.450.200	650.752.895	93,17
Belanja Modal	1.425.870.000	1.425.870.000	100
Jumlah	5.718.195.905	5.521.167.285	96,50

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja seperti Komputer, dan kendaraan dinas operasional, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada kantor Kecamatan Borong.

b) Kurangnya dana yang menyebabkan banyak program dan kegiatan yang menjadi urusan Kecamatan Borong tidak terakomodir.

2) Solusi

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan kegiatan kantor.

b) Mengajukan rencana penambahan anggaran bagi kantor kecamatan Borong.

➤ **Kecamatan Kota Komba**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.296.712.400,- dan realisasi Rp.291.720.550,- atau 98,32%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l) Rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan

m) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.62.840.000,- dan realisasi Rp.62.017.300,- atau 98,69%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.2.250.000,- dan realisasi Rp.2.250.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.1.923.873.900,- dan realisasi Rp.1.916.693.250,- atau 99,63%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.33.875.000,- dan realisasi Rp.33.700.000,- atau 99,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan.
- 6) Program peningkatan peran perempuan dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.19.140.000,- dan realisasi Rp.19.115.000,- atau 99,87%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.32.013.500,- dan realisasi Rp.31.450.000,- atau 98,24%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 42 orang (termasuk desa/kelurahan), dengan kualifikasi :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda ` : 1 orang
 - c) SLTA : 26 orang
 - d) SMP : 5 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 15 orang
 - c) Golongan II : 23 orang
 - d) Golongan I : 2 orang

- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon IV : 10orang
 - b) Eselon III : 2 orang
- 4) Staf : 30 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Kota Komba Tahun Anggaran 2019 dengan rincian :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.629.727.061	2.612.198.317	99,33
2	Belanja Langsung	2.370.704.800	2.356.946.100	99,42
	Belanja Pegawai	431.954.400	426.259.400	98,68
	Belanja Barang dan Jasa	734.250.400	730.051.700	99,43
	Belanja Modal	1.204.500.000	1.200.635.000	99,68
	Total (1+2)	5.000.431.861	4.969.144.417	99,37

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan

Terbatasnya jumlah pegawai pengelola kegiatan.
- 2) Solusi

Penambahan jumlah pegawai untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan

➤ **Kecamatan Lamba Leda**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.213.762.000,- dan realisasi Rp.190.223.050,- atau 88,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.108.196.400,- dan realisasi Rp.106.546.800,- atau 98,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Pengadaan meubeler
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - f) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.434.802.000,- dan realisasi Rp.431.792.150,- atau 99,30%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
- a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 4) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dialokasikan dana Rp.19.500.000,- dan realisasi Rp.19.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan.
- 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.15.026.000,- dan realisasi Rp.15.026.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat desa.
- 6) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.6.062.000,- dan realisasi Rp.5.962.000,- atau 98,35%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 21 orang (termasuk Sekretaris Desa), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 3 orang
 - b) SLTA : 11 orang
 - c) SLTP : 7 orang
- 2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 5 orang
 - c) Golongan II : 9 orang
 - d) Golongan I : 6 orang
- 3) Jabatan Struktural
- a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 2 orang
- 4) Staf :17 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Lamba Leda Tahun Anggaran 2019, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1,379,137,422	1,373,694,237	99.61
2	Belanja Langsung	797,348,400	764,985,200	95.94
	Belanja Pegawai	319,601,900	309,904,800	96.97
	Belanja Modal	31,800,000	31,800,000	100
	Belanja Barang dan Jasa	445,946,500	423,280,400	94.92
	Total	2.176.485.822	2,138.679.437	98,26

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana perkantoran.

2) Solusi

Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

➤ **Kecamatan Poco Ranaka**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.437.628.000,- dan realisasi Rp.432.502.860,- atau 98,83%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Koordinasi, monitoring dan evaluasi
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.9.950.000,- dan realisasi Rp.9.950.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.162.140.000,- dan realisasi Rp.161.039.000,- atau 99,32%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c) Penyediaan jasa operator komputer
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.1.526.950.000,- dan realisasi Rp.1.524.910.000,- atau 99,87%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.22.027.000,- dan realisasi Rp.22.027.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan.
- 6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.16.225.000,- dan realisasi Rp.16.225.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di tingkat desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik di masyarakat, dialokasikan dana Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 57 orang (termasuk desa/kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 25 orang
 - b) Sarjana Muda : 7 orang
 - c) SLTA : 24 orang
 - d) SLTP : 1 orang
- 2) Pangkat/ Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 27 orang
 - c) Golongan II : 26 orang
 - d) Golongan I : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 3 orang
 - b) Eselon IV : 18 orang
- 4) Staf : 36 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Poco Ranaka Tahun Anggaran 2019, dengan rincian :

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.722.601.549	3.684.939.642	98,98
Belanja Langsung	2.184.920.000	2.176.653.860	99,62
Belanja Pegawai	322.928.400	320.448.000	99,23
Belanja Barang dan Jasa	719.471.600	713.685.860	99,19
Belanja Modal	1.142.520.000	1.142.520.000	100
Jumlah	5.907.521.549	5.861.593.302	99,22

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan.
- b) Kondisi infrastruktur di beberapa wilayah desa yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan.

2) Solusi

- a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
- b) Mengajukan usulan kepada dinas terkait untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di wilayah Kecamatan Poco Ranaka.

➤ **Kecamatan Elar**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.192.738.000,- dan realisasi Rp.191.636.000,- atau 99,43%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.91.877.000,- dan realisasi Rp.89.394.350,- atau 97,30%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.000.000,- dan realisasi Rp.3.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.897.745.000,- dan realisasi Rp.897.732.100,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.30.000.000,- dan realisasi

Rp.30.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat musrenbang tingkat kecamatan.

- 6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.10.500.000,- dan realisasi Rp.10.450.000,- atau 99,52%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat selama 1 tahun (12 bulan).

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 28 orang (termasuk desa/kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 5 orang
 - b) Sarjana Muda : 2 orang
 - c) SLTA : 19 orang
 - d) SLTP : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan III : 10 orang
 - b) Golongan II : 16 orang
 - c) Golongan I : 2 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang
- 4) Staf : 20 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib pada Kecamatan Elar Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.698.339.223	1.692.061.852	99,63
	Belanja pegawai	1.698.339.223	1.692.061.852	99,63
2	Belanja Langsung	1.235.860.000	1.232.212.450	99,70
	Belanja pegawai	273.359.600	273.352.900	99,99
	Belanja barang dan jasa	916.480.400	913.359.550	99,66
	Belanja modal	46.020.000	45.500.000	99,98
	Total	2.934.199.223	2.924.274.302	99,66

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok pada kantor Kecamatan Elar masih dikatakan kurang terutama sarana yang diperlukan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari seperti masih terbatasnya fasilitas terutama listrik yang berasal dari PLN sehingga proses pelayanan pemerintahan pada kantor Camat Elar masih menggunakan genset.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masih terbatasnya jumlah personil serta peralatan kerja.

2) Solusi

Memaksimalkan pembagian tugas kepada semua pegawai serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

➤ **Kecamatan Sambu Rampas**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.514.101.000,- dan realisasi Rp.513.572.000,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g) Penyediaan alat tulis kantor
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i) Penyediaan makanan dan minuman kantor
- j) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.59.000.000,- dan realisasi Rp.57.181.000,- atau 96,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.2.000.000,- dan realisasi

Rp.2.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan OPD.

- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.3.284.976.000,- dan realisasi Rp.3.276.401.000,- atau 99,74%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan.
- 6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan (PKK), dialokasikan dana Rp.9.467.000,- dan realisasi Rp.9.467.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.15.000.000,- dan realisasi Rp.15.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 42 orang (termasuk Desa/kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda : 5 orang
 - c) SLTA : 25 orang
 - d) SLTP : 1 orang
 - e) SD : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 19 orang
 - c) Golongan II : 20 orang
 - d) Golongan I : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 19 orang
- 4) Staf : 21 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Sambu Rampas Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.915.379.726	2.890.589.938	99,15
	Belanja Pegawai	2.915.379.726	2.890.589.938	99,15
2	Belanja Langsung	3.894.544.000	3.883.621.680	99,72
	Belanja Pegawai	512.446.800	509.166.000	99,36
	Belanja Barang dan Jasa	1.058.097.200	1.050.455.680	99,28
	Belanja Modal	2.324.000.000	2.324.000.000	100
Total		6.809.923.726	6.774.211.618	99,48

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kantor Kecamatan Sambu Rampas sangat sempit dan kondisi rusak.
- b) Kondisi kantor Kelurahan Pota, Ulung Baras, Golo Wangkung Utara, dan Golo Wangkung Barat belum memadai.
- c) Masih banyak tanah-tanah Pemerintah Daerah dan tanah-tanah masyarakat yang belum bersertifikat

2) Solusi

- a) Mohon bantuan pembangunan kantor Camat Sambu Rampas.
- b) Mohon pemagaran kantor-kantor lurah yang ada di Kecamatan Sambu Rampas.
- c) Mohon pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah dan milik masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Sambu Rampas.

➤ **Kecamatan Poco Ranaka Timur**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.205.131.200,- dan realisasi Rp.186.765.200,- atau 91,04%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.74.669.000,- dan realisasi Rp.65.791.200,- atau 88,12%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.000.000,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%.
 - 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.355.262.000,- dan realisasi Rp.355.262.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
 - 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.12.735.000,- dan realisasi Rp.12.735.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan.
 - 6) Program peningkatn peran perempuan di pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.15.373.000,- dan realisasi Rp.15.373.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di tingkat desa/kelurahan.
 - 7) Program penyelesaian konflik di masyarakat, dialokasikan dana Rp.10.523.000,- dan realisasi Rp.10.523.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang (termasuk Sekretaris Desa), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 7 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 8 orang
 - d) SLTP : 4 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang

- b) Golongan III : 7 orang
- c) Golongan II :12 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 1 orang
 - b) Eselon IV : 4 orang
- 4) Staf : 15 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Poco Ranaka Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.249.428.456	1.226.044.629	98,13
	Belanja Pegawai	1.249.428.456	1.226.044.629	98,13
2	Belanja Langsung	676.693.200	646.448.900	95.53
	Belanja Pegawai	485.056.600	482.056.600	99.38
	Belanja Barang dan Jasa	188.820.600	164.392.300	87.06
	Belanja Modal	2.816.000	-	-
	Total	1.926.121.656	1.872.493.529	97,22

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Terbatasnya jumlah personil sehingga mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan.

2) Solusi

Menambah jumlah personil untuk mengisi jabatan yang lowong.

➤ **Kecamatan Rana Mese**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.413.226.100,- dan realisasi Rp.409.396.355,- atau 99,07%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan

- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.8.700.000,- dan realisasi Rp.8.700.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Pengadaan mebeleur
 - b) Honorarium pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.1.359.000,- dan realisasi Rp.1.359.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.173.930.000,- dan realisasi Rp.173.880.000,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat pedesaan /kelurahan
 - b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - c) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - d) Monitoring dan evaluasi
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.17.163.500,- dan realisasi Rp.17.163.500,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan.
- 6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.6.000.000,- dan realisasi Rp.5.970.000,- atau 99,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di tingkat desa/kelurahan.
- 7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.35.975.000,- dan realisasi Rp.35.935.000,- atau 99,89%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
- a) Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat
 - b) Pembinaan dan perlindungan masyarakat

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 23 orang (termasuk sekretaris desa), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 6 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 14 orang
 - d) SLTP : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 5 orang
 - c) Golongan II : 16 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a. Eselon III : 2 orang
 - b. Eselon IV : 4 orang
- 4) Staf : 17 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Rana Mese Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	1.613.633.772	1.603.705.988	99,38
2	Belanja langsung	656.353.600	652.403.855	99,40
	Belanja pegawai	206.096.400	205.293.100	99,61
	Belanja barang dan jasa	442.257.200	439.110.755	99,28
	Belanja modal	8.000.000	8.000.000	100
	Jumlah	2.269.987.372	2.256.109.843	99,39

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan masih lowong jabatan struktural di kantor Kecamatan Rana Mese.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran

2) Solusi

- a. Memaksimalkan pembagian tugas harian serta pembagian tugas yang baik di kantor Kecamatan Rana Mese.
- b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada

➤ **Kecamatan Elar Selatan**

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.274.877.100,- dan realisasi Rp.251.971.950,- atau 91,67%, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - i) Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - j) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.197.648.600,- dan realisasi Rp.186.278.976,- atau 94,25%, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan berkala gedung kantor
 - c) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
- 3) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.682.320.500,- dan realisasi Rp.680.322.000,- atau 99,68 %, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
 - b) Pembinaan dan pengembangan STBM
 - c) Monitoring dan evaluasi
- 4) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.18.918.000,- dan realisasi Rp.18.918.000,- atau 100%, digunakan untuk membiayai kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
- 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.19.192.600,- dan realisasi Rp.19.192.600,- atau 100%, digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan PKK tingkat desa/kelurahan

6) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.17.650.000,- dan realisasi Rp.8.300.000,- atau 60,71%, digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat
- b) Pembinaan perindungan masyarakat.

c. Jumlah Pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 18 orang (termasuk desa/kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 7 orang
 - b) Diploma : 1 orang
 - c) SLTA : 10 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Golongan III : 7 orang
 - c) Golongan II : 9 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 5 orang
- 4) Staf :11 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan urusan wajib pada Kecamatan Elar Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	1.127.203.339	1.121.087.175	96,16
2	Belanja Langsung	1.210.606.800	1.164.983.526	88,90
	Belanja pegawai	240.362.200	239.680.200	99,87
	Belanja barang dan jasa	861.688.600	819.955.850	93,36
	Belanja Modal	108.556.000	105.307.476	97,62
	Total	2.337.810.139	2.286.070.701	97,78

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

g. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a) Terbatasnya jumlah pegawai
 - b) Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan program kerja
 - c) Akses transportasi yang sulit (jalan raya)

- 2) Solusi
 - a) Memaksimalkan pembagian tugas kepada personil yang ada yang dibantu oleh tenaga harian lepas.
 - b) Perlu adanya tenaga yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemerintahan
 - c) Memanfaatkan sarana yang ada untuk mengatasi jalan raya yang rusak.

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.350.039.509,- dan realisasi Rp.350.037.709,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g) Penyediaan alat tulis kantor
 - h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j) Penyediaan makanan dan minuman
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l) Monitoring dan evaluasi dalam daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.85.081.000,- dan realisasi Rp.84.855.000,- atau 99,73%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dialokasikan dana Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.50.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan unsur pimpinan daerah (FORKOPIMDA)

- 4) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal, dialokasikan dana Rp.279.000.000,- dan realisasi Rp.274.768.741,- atau 98,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - b) Pengendalian dan penanganan isu-isu yang aktual di masyarakat
 - c) Fasilitasi dan monitoring masalah perbatasan antar kabupaten
- 5) Program pengembangan wawasan kebangsaan, dialokasikan dana Rp.242.786.000,- dan realisasi Rp.242.786.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama.
- 6) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dialokasikan dana Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.40.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- 7) Program pendidikan politik masyarakat, dialokasikan dana Rp.6.000.000,- dan realisasi Rp.6.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada PARPOL.
- 8) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, dialokasikan dana sebesar Rp.35.000.000,- dan realisasi Rp.35.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

c. Jumlah pegawai

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 12 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 11 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 2 orang
 - c) Eselon IV : 10 orang
- 4) Staf : 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak langsung	1,006,404,403	1,002,543,175	99.62
	Belanja pegawai	1,006,404,403	1,002,543,175	99.62
2	Belanja Langsung	1,089,906,509	1,083,447,450	99.41
	Belanja pegawai	383,380,600	381,380,600	99.48
	Belanja barang dan jasa	657,875,909	653,642,850	99.36
	Belanja Modal	48,650,000	48,424,000	99.54
	Jumlah	2,096,310,912	2,085,990,625	99.51

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama seperti yang tergambar pada urusan Pendidikan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Terbatasnya jumlah personil dan SDM dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
- b) Terbatasnya anggaran untuk mendukung capaian kinerja sesuai target renstra dan RKT
- c) Topografi wilayah kabupaten Manggarai Timur serta akses pelayanan yang sulit terjangkau.

2) Solusi

- a) Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM serta perlu adanya penambahan personil pada Badan Kesbangpol dan Linmas
- b) Perlu adanya tambahan anggaran sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur keamanan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

1) Peraturan tentang Ketertiban Umum

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah tentang RT/RW yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031. Data jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 240 unit.

Dan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penertiban Penanggulangan dan Pemberantasan Hewan Penular Rabies, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan.

2) Peraturan tentang Kependudukan

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kependudukan yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis) serta jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - el sebanyak 168.685 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP-el sebanyak 193.650 orang atau 87,10%.

Dan anak yang telah mengurus KIA sebanyak 1.475 orang dari total 81.433 anak atau 1,81%.

3) Ketersediaan Aparat Satpol PP

Jumlah Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019, sebanyak 20 orang dari perbandingan jumlah penduduk sebanyak 269.686 jiwa atau 0,0074 per 10.000 penduduk.

4) Kebijakan Bidang Penanganan Bencana

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

5) Kebersihan Kabupaten

Peraturan tentang kebersihan Kabupaten telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang pembentukan UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.

b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

1) Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah

Penyampaian LPPD tahun anggaran 2018 dilaksanakan tepat waktu, dengan bukti pengiriman pada tanggal 25 Maret tahun 2019, sesuai surat pengantar Nomor : Pem.130/108/III/2019.

2) Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja

Penyampaian Laporan Keuangan telah dilaksanakan dengan bukti pengiriman laporan keuangan Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 23 April 2019 dengan surat pengantar Nomor : BK.900/264/IV/2019 dan Laporan Kinerja tahun 2017 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan surat pengantar Nomor : ORGAN.060/149/III/2017, tanggal 19 Maret 2018.

3) Implementasi SPM

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki Keputusan Bupati yakni Keputusan Bupati Nomor 231.a Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Penerapan SPM Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 6(enam) urusan, yang terdiri dari :

- Urusan Pendidikan
- Urusan Kesehatan
- Urusan PU dan Penataan Ruang
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Urusan Trantibum dan Linmas
- Urusan Sosial

4) Hubungan Antar Daerah

Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan akhir tahun 2019 telah memiliki 7 (tujuh) buah MOU, yaitu :

- a) HK.MOU/1 /Tahun 2019 MOU dengan Kementerian Pertanian tentang kerjasama antar Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur
- b) HK.MOU/2/Tahun 2019 tentang addendum atas perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende
- c) HK.MOU/3 /Tahun 2019 tentang Nota Kesepahaman antara pemerintah kabupaten Manggarai Timur, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai tentang supply (pemasokan) produk hortikultura dari Kabupaten surplus ke kabupaten deficit lingkup kabupaten Manggarai timur, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah kabupaten Manggarai.
- d) HK.MOU/5/Tahun 2019 tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
- e) HK.MOU/5.a/tahun 2019 tentang penyaluran dana transfer ke daerah dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa

- f) HK.MOU/6/Tahun 2019 tentang addendum perjanjian kerjasama anatar pemerintah kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende tentang kepesertaan program Jamkesmas bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
- g) HK.MOU/8/Tahun 2019 tentang kepesertaan Program jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftar oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

5) Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur sangat sinkron dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini diukur berdasarkan indikator bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan 11 (sebelas) program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung 5 (lima) program pembangunan nasional atau 2,2%.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.

a) Kewenangan Daerah

Semua urusan wajib yang dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan 100%, dengan jumlah urusan wajib yang dilaksanakan sebanyak 24 Urusan.

b) Keuangan

Penetapan Peraturan Daerah APBD 2018 dilaksanakan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2019, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018. Sedangkan keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Belanja pelayanan dasar APBD tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan Rp.292.329.182.849,-
 - 2) Urusan Kesehatan Rp.157.829.865.126,75
 - 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.174.885.552.182,70,-
 - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.3.935.390.598,-
 - 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 6.042.565.018,-
 - 6) Urusan Sosial Rp.3.135.599.609,-
- Total Belanja pelayanan dasar Rp.638.158.155.383,45,-
Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,-.

Dengan demikian capaian kinerja belanja pelayanan dasar sebesar 57,58%.

Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan APBD tahun 2019:

- Urusan Pendidikan Rp. 292.329.182.849,-
- Urusan Kesehatan Rp. 157.829.865.126,75,-

Total Belanja Pendidikan & Kesehatan Rp. 450.159.047.975,75,- dengan capaian kinerja sebesar 40,62%.

c) Pelayanan Publik

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin trayek
- 3) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
- 4) Peraturan Daerah Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

d) Kepegawaian

Jumlah PNS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019, sebanyak 3.825 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019, sebanyak 269.686 orang atau 1,42%. Dan Rasio PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga Kesehatan) yakni 1.108 orang dibandingkan total PNS 3.825 orang atau 28,97%. Sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sudah menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD).

e) Kelembagaan

Jumlah OPD Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 46 OPD, dengan rincian: Bagian (Setda) 9 unit, Dinas 20 unit, Badan 3 unit, Inspektorat Daerah 1 unit, Kantor 0 unit, Rumah Sakit 0 unit, Lembaga teknis lainnya 2 unit, Sekretariat DPRD 1 unit, Sekretariat KORPRI 1 unit, Kecamatan/Distrik 9 unit.

d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD

1) Produk Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 Peraturan Daerah.

2) Ranperda yang Diajukan Tahun Berjalan

RANPERDA yang diajukan pada tahun 2019 sebanyak 12 buah dan 13 buah RANPERDA yang disetujui DPRD untuk menjadi PERDA atau 92,30%.

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

Jumlah keputusan DPRD pada tahun 2019 sebanyak 15 Keputusan dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

1) Keputusan Bupati

Keputusan Bupati Manggarai Timur tahun 2019 sebanyak 281 keputusan dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

2) Peraturan Bupati

Jumlah Peraturan Bupati Manggarai Timur pada tahun 2019 sebanyak 83 buah dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah yang dikirim kepada Pemerintah pada Tahun 2019 sebanyak 12 Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Daerah yang dibatalkan tidak ada atau 0%.

h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang strategis dan relevan untuk Daerah.

Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki Peraturan Daerah tentang konsultasi pelayanan publik. Dari sisi penyebaran informasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur (RKMT), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur (RKMT).

i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK Dan Bagi Hasil.

1) Serapan Dana Perimbangan

Serapan dana perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp.786.724.967.841,- dan dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2019 sebesar Rp.788.240.681.626,- atau 99,81%.

2) Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Realisasi belanja publik APBD tahun 2019 sebesar Rp.447.171.405.242,10,- dan realisasi DAU tahun 2019 sebesar Rp.533.974.640.000,- dengan capaian kinerja 8374%.

3) Alokasi Belanja pada APBD

Total realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.447.171.405.242,10,- dan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp.1.108.353.674.057,10 atau 40,35%.

j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp.54.434.713.623,57,- dan total pendapatan dalam APBD (realisasi) tahun 2019 sebesar Rp.1.114.412.388.087,57,- atau 4,88%.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan APBD.

1) Kewajaran Laporan Keuangan

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017 dengan opini WDP dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018 dengan opini WTP.

2) Besaran SILPA

SILPA tahun 2019 sebesar Rp.36.673.994.136,30,- dan realisasi pendapatan dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp.1.114.412.388.087,57,- atau 3,29%.

3) Realisasi Belanja

Realisasi belanja tahun 2019 Rp.1.108.353.674.057,10,- dari total anggaran belanja dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp.1.162.228.417.978,72,- atau 95,36%.

4) Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2019 sebanyak 387 temuan (tidak termasuk temuan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2019) sedangkan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 477 temuan atau 81,13%.

l. Pengelolaan Potensi Daerah

1) Peta Potensi Daerah

Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp.54.434.713.623,57,- dari Potensi PAD pada RPJMD atau RKPD tahun 2019 APBD Rp.61.755.394.345,- atau 88,14%.

2) Peningkatan PAD

Total PAD pada tahun 2019 Rp.54.434.713.623,57,- dan total PAD tahun 2018 sebesar Rp.44.007.083.306,37,- atau 23,69 %.

m. Terobosan/Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1) Penghargaan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerima 1 (satu) penghargaan.

2) Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan E-procurement mulai beroperasi pada bulan Januari tahun 2017.

3) Daya Saing Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2019 Kabupaten Manggarai Timur memiliki 51 ijin investasi.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja pada Tataran Pengambil Kebijakan terdapat pada lampiran III.2 (terlampir).

b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Data dan informasi hasil pengukuran kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan pada Lampiran III.2 dan III.3 Yakni pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yakni:

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Badan Keuangan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Inspektorat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Sekretariat KORPRI
- Bagian Umum
- Bagian Perekonomian
- Bagian Hukum
- Bagian Humas dan Protokol
- Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Administrasi Pemerintahan
- Bagian Organisasi
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian layanan Pengadaan Barang/Jasa
- Kecamatan Borong
- Kecamatan Rana Mese
- Kecamatan Kota Komba
- Kecamatan Poco Ranaka
- Kecamatan Poco Ranaka Timur
- Kecamatan Lamba Leda
- Kecamatan Sambu Rampas
- Kecamatan Elar
- Kecamatan Elar Selatan

c. Urusan Pemerintahan Umum

a) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum terdapat pada Tataran Pelaksana Kebijakan (terlampir).

b) Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yakni Kesbangpol

d. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Wajib Dan Pilihan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja pada tataran Pelaksana Kebijakan untuk Urusan Wajib dan Pilihan terdapat pada lampiran III.3 (terlampir).

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019

Pelaksanaan program nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, sebagai berikut :

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Program Nasional	RKPD
1.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
		Program pendidikan menengah	-
		Program pendidikan tinggi	-
		Program pendidikan non formal	Program pendidikan non formal
		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
		Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan
		Program pengelolaan keragaman budaya	Program pengelolaan keragaman budaya
		Program pengembangan nilai budaya	Program pengembangan nilai budaya
		Program pengelolaan kekayaan budaya	-
		Program pengembangan kemitraan	-
2.	Dinas Kesehatan	Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat	-
		Program lingkungan sehat	-

		Program upaya kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat
		Program upaya kesehatan perorangan	-
		Program pencegahan & pemberantasan penyakit	Program pencegahan & pemberantasan penyakit menular
		Program perbaikan gizi masyarakat	Program perbaikan gizi masyarakat
		Program sumber daya kesehatan	Program peningkatan sumber daya aparatur
		Program obat dan perbekalan kesehatan	Program obat dan perbekalan kesehatan
		Program kebijakan manajemen kesehatan masyarakat	-
		Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa /rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
		Program pengawasan obat dan makanan	-
		Program pengembangan obat asli Indonesia	-
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
		Program peningkatan	Program Pengelolaan ruang

		kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	terbuka hijau
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
			Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	-
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
		Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	-
		Program penyediaan dan pengelolaan air baku	-
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan
		Program pembangunan ekonomi local	-
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Program penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
5	Badan Perencanaan,	Program Penataan Ruang	Program perencanaan tata ruang

	Penelitian dan Pengembangan		-
6.	Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-
		Program peningkatan kinerja, pengelolaan persampahan dan drainase	Program lingkungan sehat perumahan
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata
		Program pengembangan kemitraan pariwisata	Program pengembangan kemitraan
		Program pengembangan keserasihan kebijakan pemuda	-
		Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan iklim investasi, dan realisasi investasi	Program Peningkatan iklim investasi, dan realisasi investasi
		Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi
		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Program peningkatan kualitas pelayanan publik
9.	Dinas Koperasi, Perindustrian,	Program Penciptaan iklim usaha bagi UMKM	Program Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah

	Perdagangan dan UKM		yang kondusif
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	-
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
		Program pemberdayaan usaha skala mikro	-
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)	Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
		Program peningkatan kemampuan teknologi industry	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
			Program peningkatan kemampuan teknologi industry
			Program penataan struktur industry
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	-
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
		Program persaingan usaha	-
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Program keserasian kebijakan kependudukan	-
		Program penataan	Program penataan

	Sipil	administrasi kependudukan	administrasi kependudukan Program penataan sistem administrasi kependudukan
11.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
		Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Program pengembangan wilayah tertinggal	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Tenaga Kelistrikan,
12.	Dinas Pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-
		Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	-
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-
		Program keluarga berencana	Program keluarga berencana
			Program pelayanan kontrasepsi
		Program kesehatan reproduksi remaja	-
		Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga	-
Program penguatan	-		

		pelebagaan keluarga kecil Berkualitas	
14.	Dinas Perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-
		Program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ	-
		Program peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ	Program peningkatan pelayanan angkutan
		Program restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ	-
		Program rehabilitasi prasarana dermaga, sungai, danau dan penyebrangan	-
		Program pembangunan prasarana dan sarana ASDP	-
		Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi public	-
		Program penyempurnaan dan pengembangan statistik	Program pengembangan data/informasi statistik daerah
		Program pemberdayaan potensi keamanan	-
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Program pemeliharaan Kantibmas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan

			criminal
17.	Badan Keuangan Daerah	Program peningkatan kapasitas keuangan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
18.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	Program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Program pendidikan kedinasan
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur
19.	Bagian Administrasi Pemerintahan	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	-
		Program pengembangan ekonomi local	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
		Program peningkatan sarana dan prasarana pedesaan	-
21.	Dinas Sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
		Program peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial	-
		Program bantuan dan	-

		jaminan kesejahteraan sosial	
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
		Program pengembangan nilai budaya	-
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program pengembangan sumber daya perikanan	Program pengembangan budi daya perikanan
			Program pengembangan perikanan tangkap
		Program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
24.	Dinas Pertanian	Program pengembangan agribisnis	-
		Program peningkatan kesejahteraan petani	Program peningkatan kesejahteraan petani

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Dasar hukum

Nomor SP DIPA – 033.05.1.504420/2019 tanggal 04 Juli 2019

b. Instansi pemberi tugas pembantuan

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. Program dan kegiatan

Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman melalui pembangunan infrastruktur permukiman Kabupaten Manggarai Timur

d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

Realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kebijakan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Total Pagu	Progres Keuangan		Progres %	
			RM	Total	Keuangan	Fisik
	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Manggarai Timur					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman					
1	Desa Lento Kec. Poco Ranaka Jenis Kontruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	245.000.000	245.000.000	245.000.000	100	100
2	Desa Wangkar Weli Kec. Poco Ranaka Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	262.000.000	262.000.000	262.000.000	100	100
3	Desa Lalang Kec. Rana Mese Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	245.000.000	245.000.000	245.000.000	100	100
4	Desa Benteng Riwu Kec. Borong Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100	100
5	Desa Waling Kec. Borong Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	215.500.000	215.500.000	215.500.000	100	100
6	Desa Bangka Masa Kec. Rana Mese Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	245.000.000	245.000.000	245.000.000	100	100
7	Desa Tengku Leda Kec.	245.000.000	245.000.000	245.000.000	100	100

	Lamba Leda Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum					
8	Desa Colol Kec. Poco Ranaka Timur Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	255.000.000	255.000.000	255.000.000	100	100
9	Desa Golo Loni Kec. Rana Mese Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	245.000.000	245.000.000	245.000.000	100	100
10	Desa Benteng Raja Kec. Borong Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100	100
11	Desa Mosi Ngaran Kec. Elar Selatan Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	272.500.000	272.500.000	272.500.000	100	100
12	Desa Nanga Mbaling Kec. Sambu Rampas Jenis Konstruksi: Pembangunan Jaringan Air Minum	230.000.000	230.000.000	230.000.000	100	100
	Total	2.940.000.000	2.940.000.000	2.940.000.000	100	100

e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

Sumber dana : APBN
 Anggaran : Rp. 2.940.000.000,-
 Realisasi : Rp. 2.940.000.000,-

f. OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

g. Jumlah pegawai

Jumlah PNS : 3 orang yang terdiri dari:

No	Jumlah Pegawai	Pendidikan	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Tugas
1	1	S1	Penata Tk. I, III/d	Kasatker/KPA/PPK
2	1	S1	Penata, III/c	Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM
3	1	SMA	Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran

h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana pendukung kurang memadai terutama laptop untuk aplikasi SAKPA

i. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- DIPA terlambat keluar

- Terbatasnya jumlah pegawai sehingga petugas SAKPA ditangani oleh Pejabat Penguji SPM
- Tebatasnya sarana dan prasana pendukung, terutama labtop dan printer
- Jangkauan konsultasi proses pengajuan keuangan dan sampai pada tahap pencairan dana cukup jauh

2) Solusi

- DIPA diusahakan cepat diproses sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target yang direncanakan
- Penambahan jumlah pegawai untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan
- Penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama laptop dan printer
- Petugas aplikasi terus diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan aplikasi.

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (249165) 018.08.4

a. Dasar Hukum

- DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SP DIPA-018.08.4.249165/2019 tanggal 5 Desember 2018; DIPA Revisi ke 06 tanggal 24 Juli 2019.
- Petunjuk Operasional Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 521.900/747/KEU-PSP/II/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Staf Pengelola dan staf Pembantu/Penyusun Laporan Keuangan dan Pelaporan Online Dana Tugas Pembantuan (249165-08-TP) lingkup Dinas Pertanian Kabupaten yang membidangi prasarana dan sarana pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019, tanggal 28 Februari 2019.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08).

c. Program dan Kegiatan

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan kegiatan:

- 1) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian:
 - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier
 - Pengembangan sumber air (Irigasi perpompaan)

- 2) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
- 3) Fasilitasi teknis dan dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Base Line)
- 4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen prasarana dan sarana pertanian
- 5) Pembinaan dan pendampingan kegiatan mendukung UPSUS (TNI)
- 6) Fasilitasi pupuk dan pestisida
- 7) Fasilitasi pembiayaan pertanian

d. Realisasi pelaksanaan kegiatan

❖ Pengelolaan air irigasi untuk pertanian:

➤ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 3 unit

Jumlah dana : Rp. 270.000.000,- (Belanja Bahan)

Realisasi keuangan Rp. 270.000.000 (100 %)

Realisasi fisik (100%)

Data penerima dan lokasi bantuan pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Lokasi		Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan /Nilai/Volume		Nama Penerima Bantuan	
1	Desa/ Kelurahan	: Watu Mori	Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Tani	: Arjuna 1
	Kecamatan	: Rana Mese	Bentuk bantuan	: Tranfer uang	Ketua	: Valentinus Tanto
	Kabupaten	: Manggarai Timur	Nilai/ Volume	: Rp 94.500.000	UPKK	: Valentinus Edor
2	Desa/ Kelurahan	: Waling	Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Tani	: Empo Rebo
	Kecamatan	: Borong	Bentuk bantuan	: Tranfer uang	Ketua	: Bonafantura Umba
	Kabupaten	: Manggarai Timur	Nilai/ Volume	: Rp 94.500.000	UPKK	: Rosalia Jaya
3	Desa/ Kelurahan	: Poco Ri'i	Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kelompok Tani	: Perintis
	Kecamatan	: Borong	Bentuk bantuan	: Tranfer uang	Ketua	: Ivan Jangu
	Kabupaten	: Manggarai Timur	Nilai/ Volume	: Rp 81.000.000	UPKK	: Yasinta Durmenti

➤ Pengembangan Sumber Air Irigasi Perpompaan Besar :

Anggaran : Rp.165.000.000,- (Belanja Bahan)

Realisasi keuangan : Rp.150.000.000,- (91 %), terdiri dari :

- Konstruksi : Rp. 141.000.000,-
- SID : Rp. 15.000.000,-
- Operasional : Rp. 9.000.000,-

Data penerima dan lokasi bantuan pemerintah kegiatan pengembangan irigasi perpompaan besar tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Lokasi		Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan /Nilai/Volume		Nama Penerima Bantuan	
	Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten	Satar Padut Lamba Leda Manggarai Timur	Kegiatan Bentuk Bantuan Nilai/ Volume	Irigasi Perpompaan Besar Tranfer uang Rp 108.300.000	Kelompok Tani Ketua UPKK	Watu Guling Petrus Jumat Fabianus Kabun
1						

❖ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Jumlah dana : Rp. 354.515.000,- (belanja bahan)

Realisasi : Rp. 354.515.000,- (100 %)

Data penerima dan lokasi bantuan pemerintah alat mesin pertanian tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Traktor Roda Dua (TR 2)

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi		Volume (unit)
			Desa/Kel	Kecamatan	
1	Golo Tenda	Hendrikus Abor	Bangka Leleng	Poco Ranaka	1
2	Lembu Mulu	Kristina Malon	Gising	Elar Selatan	1
3	Suka Maju	Hubertus	Golo Lijun	Elar	1
4	Porong Kasa	Fransiskus Naftali	Golo Lijun	Elar	1
5	Pada Rambu 2	Paulus Ropa	Watu Nggene	Kota Komba	1
	Total				5

2. Pompa air

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi		Volume
			Desa /Kel.	Kecamatan	
1	Lemba Rae	Hendrikus Abor	Bangka Leleng	Poco Ranaka	1
2	Kwt Sarinah	Kristina Malon	Gising	Elar Selatan	1
3	Baeng Koe	Alexius Jeheot	Nanga Labang	Borong	1
4	St. Andreas	AldolfusJadu	Rana Loba	Borong	1
5	Mbijar	Viktor Daho Aha	Satar Kampas	Lamba Leda	1
6	St. Paulus Dampek	Salestinus Hasman	Satar Padut	Lamba Leda	1
7	Sambi	Maksimus Wanai	Satar Padut	Lamba Leda	1
8	Popong Sumba 2	Mansyur	Nanga Mbaur	Sambi Rampas	1
9	Popong Sumba 1	Rusdin	Nanga Mbaur	Sambi Rampas	1
10	Golo Pau	Samsudin Yunus	Nanga Mbaur	Sambi Rampas	1
11	Nasaret	Yosef S. Anggaroni	Nampar Sepang	Sambi Rampas	1
12	Bantang Cama	Ferdinandus Marung	Golo Ros	Rana Mese	1
	Total				12

- ❖ Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Base Line)
 - Jumlah dana : Rp. 35.000.000,- (belanja bahan)
 - Realisasi : Rp. 35.000.000 (100%)
- ❖ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (UPSUS PAJALE)
 - Jumlah Dana : Rp.96.800.000,- (Belanja honor output kegiatan)
 - Realisasi : Rp.96.800.000,- (100%)
- Pengelolaan Keuangan (Operasional Satker)
 - Jumlah Dana : Rp. 150.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 140.099.000,- (93,40%)
- ❖ Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - Operasional Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - Jumlah dana : Rp. 146.200.000,-
 - Realisasi : Rp. 140.957.300,- (96 %)
- ❖ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - Operasional Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - Jumlah Dana : Rp. 76.790.000,-
 - Realisasi : Rp. 72.790.000,- (94,79 %)

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber dana : berasal dari APBN
 Total pagu : Rp. 1.294.305.000,-

f. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

g. Jumlah Pegawai

Terdiri dari 6 orang yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 521.900/1491/KEU-PSP/IV/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), staf pengelola dan staf pembantu/penyusun laporan keuangan dan pelaporan online dana tugas pembantuan (249165-08-TP) lingkup Dinas Pertanian Kabupaten yang membidangi prasarana dan sarana Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Februari 2019, dengan rincian:

- PPK : 1 orang, Kualifikasi Pendidikan S1
- Bendahara Pengeluaran Pembantu : 1 orang, Kualifikasi Pendidikan S1
- Staf Pembantu Keuangan dan pelaporan : 1 orang, Kualifikasi Pendidikan S1
- Staf Pengelola : 2 orang, Kualifikasi Pendidikan S1

- Staf Penyusun Laporan Online : 1 orang, Kualifikasi Pendidikan D3

h. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Cukup menunjang kegiatan perkantoran.

i. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Pada bulan Mei – Juni ada revisi kelompok penerima bantuan pemerintah sehingga proses pembangunan fisik kegiatan bantuan pemerintah baru dilaksanakan pada bulan Juli.

2) Solusi

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terkait dengan perubahan kegiatan dan pagu dana yang direvisi.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Tidak ada

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 telah melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain, khususnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang walaupun secara formal belum memiliki MoU, yaitu :

1. Daerah yang diajak kerjasama

Mengoptimalkan kerja sama antar daerah, dengan program/kegiatan menjalin kerjasama antar daerah kabupaten seluruh Indonesia melalui wadah APKASI, berupa penyediaan iuran APKASI.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Apkasi Nomor: 02/Kpts/DP-Apkasi/X/2007 tentang Penetapan Iuran Tahunan Apkasi.
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Apkasi Nomor: 45/Kpts/DP-Apkasi/X/2011 tentang Penetapan Iuran Tahunan Apkasi.
- Surat Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia IV tahun 2015 Nomor: 08/Munas-Apkasi/V/2015 tentang Penetapan Iuran Tahunan Anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

3. Bidang Kerja sama

Bidang Pemerintahan.

4. Nama Kegiatan

Penyediaan Iuran Apkasi.

5. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana/Penyelenggara Kerjasama antar Daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

6. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai sebanyak 12 orang terdiri dari:

- Kualifikasi pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- Pangkat/Golongan
 - 1) Golongan IV : 1 orang
 - 2) Golongan III : 10 orang
 - 3) Golongan II : 1 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber iuran Apkasi dari APBD dengan alokasi dana Rp.25.000.000.-.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Apkasi dilaksanakan setiap tahun.

9. Hasil (Output) dari Kerjasama

Dapat meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga pembangunan di daerah semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

10. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1) Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Mitra yang diajak kerja sama

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur

b. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- MoU Nomor : DP2RKP.310/80/II/2017 dan MoU-41/500.8/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 (3 tahun) tentang Kerjasama Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

c. Bidang Kerjasama

Bidang Tata Guna Tanah

d. Nama Kegiatan

Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dimana Pada tahun anggaran 2019, telah dilakukan proses sertifikat tanah pemerintah daerah sebanyak 29 bidang yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni :

No	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Ket
1	SDI Pel	Poco Ri'i	Borong	Sertifikat masih di proses di kantor BPN Kabupaten Manggarai Timur
2	SDI Pel	Poco Ri'i		
3	Poskesdes Pel	Poco Ri'i		
4	Terminal Kembur	Satar Peot		
5	SMPN 15 Borong	Rana Masak		
6	SMPN 1 Borong	Rana Loba		
7	SDI Mbong Pawo	Benteng Raja		
8	Objek Wisata Cepi Watu	Nanga Labang		

9	SDN Perang Wunis	Ngampang Mas		
10	Poskesdes Ngampang Mas	Ngampang Mas		
11	SMPN Satap Perang Wunis	Ngampang Mas		
12	SDI Nunur	Mbengan	Kota Komba	Sertifikat masih di proses di kantor BPN Kabupaten Manggarai Timur
13	Kebun SDI Nunur	Mbengan		
14	Poskesdes Waekekik	Rana Kolong		
15	SDI Sambu Koe	Watu Nggene		
16	SDN Wae Kikong	Gunung		
17	Nanga Rawa 1	Bamo		
18	Nanga Rawa 2	Bamo		
19	SDI Moncok	Satar Tesem		
20	Lapangan Bola Voli SDI Moncok	Satar Tesem		
21	Lapangan Bola Sepak SDI Moncok	Satar Tesem		
22	SMPN Satap Moncok	Satar Tesem		
23	SMPN Satap Moncok	Satar Tesem		
24	SMPN Satap Moncok	Satar Tesem		
25	Polindes Moncok	Satar Tesem		
26	SDI Wae Buka	Golo Rengket		
27	SMPN Satap Wae Buka	Golo Rengket		
28	Kebun Sekolah Wae Buka	Golo Rengket		
29	Puskesmas Dampek	Satar Padut	Lamba Leda	Sertifikat masih di proses di kantor BPN Kabupaten Manggarai Timur

e. OPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur.

f. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai untuk tugas pembantuan sebanyak 4 orang dengan rincian:

- 1) Kualifikasi pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 3 orang
 - b) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat /Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 3 orang

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBD

Jumlah anggaran : Rp 521.208.000,-.

h. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.

2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur

a. Mitra Yang Diajak Kerjasama

- 1) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian KOMINFO RI Tahun 2019.
- 2) PT.Telkom Indonesia
- 3) Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian KOMINFO RI
- 4) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Nusa Tenggara Timur
- 5) Balai Monitor (BALMON) Klas II A Kupang AFB Tv

b. Dasar Hukum

- 1) MoU dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian KOMINFO RI berupa bantuan 5 unit Menara BTS di area *blank spot* khusus wilayah-wilayah prioritas infrastruktur Telekomunikasi dari Pemerintah Pusat Tahun 2019.
- 2) Kerja sama (*MoU*) Pemerintah Kab. Manggarai Timur dengan PT. Telkom Indonesia, Nomor: K.TEL.082/HK.820/R5W-5L100000/2019, Tanggal 3 Juli 2019 tentang Perpanjangan Kontrak Berlangganan Internet.
- 3) Kerja sama Pemerintah Manggarai Timur dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian KOMINFO RI Nomor: 1703/KOMINFO/DJPPI/HK.03.02/10/2015 dan Nomor: Kominfo.480/273/X/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang penyediaan akses internet bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dengan jangka waktu kerja sama selama 4 (Empat) Tahun.
- 4) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah, Nusa Tenggara Timur, sebagai pengawas penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio KMT yang telah mendapat izin operasional resmi yakni Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap dari Kementerian KOMINFO RI Nomor: 724 Tahun 2016, pada tanggal 18 April 2016 dengan masa berlaku ijin selama 5 (Lima)Tahun.
- 5) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Balai Monitor (BALMON) Klas II A Kupang berkaitan dengan penggunaan frekwensi Radio pada LPPL Radio KMT. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembayaran Ijin

Siaran Radio (ISR) 2 (Dua) kali dalam satu Tahun Anggaran selama kurun waktu 5 Tahun.

c. Bidang Kerjasama

Bidang Komunikasi dan Informatika

d. Nama Kegiatan

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan media baru
2. Program kerja sama informasi dengan mass media melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2) OPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur

3) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai untuk tugas pembantuan sebanyak 20 orang dengan rincian :

- 1) Kualifikasi pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 18 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat /Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 14 orang
 - c) Golongan II : 2 orang

4) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBD

Jumlah anggaran : Rp.598.750.000,-.

- 1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan media baru, dialokasikan dana Rp.224.396.000,-.
- 2) Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dialokasikan dana Rp 374.354.000,-.

5) Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama untuk masing-masing MoU adalah :

- 1) MoU dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian KOMINFO RI dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
- 2) MoU dengan PT.Telkom Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
- 3) MoU dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian KOMINFO RI dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
- 4) MoU dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Nusa Tenggara Timur dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

- 5) MoU dengan Balai Monitor (BALMON) Klas II A Kupang berkaitan dengan penggunaan frekwensi radio pada LPPL Radio Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

a. Mitra yang diajak kerja sama

1. Lembaga Peneliti Uneversitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang
2. DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPMPTSP Kabupatyeen Manggarai Barat

b. Dasar Hukum

1. Nota Kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana Kupang dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 85/UN15.1/KL/2018 dan Nomor: HK.Mou/III/Tahun 2018 tentang Peningkatan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pengabdian Masyarakat pada tanggal 30 Mei 2018. Sebagaimana tertuang pada Pasal 5
2. DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur mengundang DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi OSS melalui Surat Tanggal 13 Mei 2019 Nomor: DPMPTSP.576/45/V/2019 Perihal: Permintaan Narasumber Aplikasi OSS. Aplikasi OSS merupakan sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara online (Online Single Submission). DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat telah lebih dahulu menerapkan aplikasi ini.

c. Bidang Kerjasama

- Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Bidang Analisis dan Pelayanan Terpadu

d. Nama Kegiatan

Pada tahun 2019, DPMPTSP melaksanakan koordinasi dan kerjasam dengan beberapa pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas penanaman modal dan perijinan.

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah pada DPA DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur (kegiatan ini tidak dilakanakan di tahun 2019).
2. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari (16-17 Mei 2019) di DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur. Anggaran untuk kegiatan ini diambil dari anggaran kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada DPA DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sedangkan untuk biaya perjalanan dinas para narasumber difasilitasi oleh DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat Koordinasi

dengan DPMPTSP Propinsi Nusa Tenggara Timur dan DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat.

e. OPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur.

f. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai untuk tugas pembantuan sebanyak 4 orang dengan rincian:

- 1) Kualifikasi pendidikan
 - a) (S2) : 2 orang
 - b) S1 : 14 orang
 - c) D3 : 3 orang
- 2) Pangkat /Golongan
 - c) Golongan IV : 6 orang
 - d) Golongan III : 13 orang

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBD

Jumlah anggaran : Rp. 1.000.000,-.

h. Jangka Waktu Kerjasama

1. Kerjasama dengan UNDANA dilaksanakan selama 4 (empat) tahun.
2. Kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat selama 1(satu) tahun

i. Kerjasama antara dua lembaga ini telah menghasilkan:

1. Buku serta video hasil kajian potensi unggulan dan peluang investasi di Kabupaten Manggarai Timur yang telah dimuat dalam Pusat Informasi Data Investasi Indonesia (PIDII) dan mulai tahun 2020 akan diekspos melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) agar dapat menjadi informasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Manggarai Timur.
2. DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur telah menerapkan sistem pelayanan perizinan secara online (OSS) yang banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat namun tetap tidak mengabaikan regulasi yang berlaku.

4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

A. Mitra Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Manggarai Timur menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Pemerintah dan Swasta antara lain :

- a) Lembaga Administrasi Negara
- b) Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri
- c) Badan Diklat Propinsi Nusa Tenggara Timur
- d) BKN Pusat dan BKN Regional X Denpasar
- e) PT. TASPEN Cabang Ende
- f) Kejaksaan Negeri Ruteng.
- g) Pengadilan Negeri Ruteng.
- h) Bank BPD NTT
- i) CV. TRI PUTRA JAYA

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional .
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS.
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.

- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- l) Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara No. 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik.
- m) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Pelayanan Kepegawaian .
- n) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
- o) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
- p) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II.
- q) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2016 tentang Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil.
- r) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

C. Bidang Kerjasama

Bidang Kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga adalah antara lain :

- a) Penerbitan Kartu TASPEN, Karsu/Karsi, SK Pensiun, dan Kartu Pegawai.
- b) Pemberhentian PNS
- c) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
- d) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS
- e) Sidang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober.
- f) Ujian Dinas.
- g) Pengadaan ASN.
- h) Penghargaan Satya Lencana.
- i) Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
- j) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

D. Nama Kegiatan

- Penyediaan Kelengkapan Administrasi PNS.
- Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun Normal/Janda/Duda/Yatim PNS.
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD.
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD.
- Penataan Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS
- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat Reguler PNS
- Seleksi Penerimaan CPNSD

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
- Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi
- Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS

E. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur

F. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dikerjasamakan untuk membiayai seluruh kegiatan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3,956,209,630,-.

G. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga adalah selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 31 Desember 2019.

H. Hasil (Output) dari kerjasama

Output dari pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya adalah :

- a) Terselenggaranya pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 11 orang.
- b) Terselenggaranya pelaksanaan Diklat Prajabatan sebanyak 70 Orang
- c) Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Periode April sebanyak 386 Orang dan SK kenaikan pangkat periode oktober sebanyak 454 orang.
- d) Terbitnya Kartu Taspen PNS Daerah sebanyak 2.562 Orang.
- e) Terbitnya Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 76 Orang
- f) Terbitnya Karsi/Karsu sebanyak 44 Orang
- g) Terbitnya SK Pensiun BUP sebanyak 93 orang, pensiun janda/duda sebanyak 9 orang, pensiun dini sebanyak 2 orang
- h) Terselenggaranya Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemda Manggarai Timur dengan jumlah jabatan yang dilelang sebanyak 12 Jabatan dan pejabat yang mengikuti seleksi tersebut sebanyak 42 orang peserta.
- i) Kasus-kasus pelanggaran disiplin sebanyak 10 kasus
- j) Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pembelian Laptop 15 (lima belas) unit.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi

Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai Timur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam urusan pelaksanaan program/kegiatan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI yang dinyatakan dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

- 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan peningkatan toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 2) Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan PARPOL.
- 3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan sosialisasi pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

2. Materi Koordinasi

Berdasarkan kebijakan dan program tersebut di atas, maka pada tahun 2019, Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan semua instansi vertikal yang ada di Kabupaten Manggarai/Manggarai Timur sesuai bidang tugas dan kewenangannya, khususnya dalam hal :

- a. Penanganan masalah pertanahan dan masalah batas administrasi pemerintahan selalu berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Manggarai Timur, Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai maupun dengan Pengadilan Negeri Ruteng dan Kejaksaan Negeri Manggarai;
- b. Pengolahan dan pemutakhiran data serta perencanaan pembangunan selalu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Manggarai Timur;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLANTAS, UPTD Perijinan Wilayah III DISHUB Provinsi NTT dan Kantor SAMSAT dalam rangka penertiban lalu lintas.

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

- a) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur
- b) Polres Manggarai,
- c) Kodim 1612 Manggarai
- d) Pengadilan Negeri Ruteng
- e) Kejaksaan Negeri Manggarai;
- f) BPS Kabupaten Manggarai Timur;
- g) POLANTAS, UPTD Perijinan Wilayah III DISHUB Provinsi NTT dan Kantor SAMSAT

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana : APBD

Jumlah anggaran masing-masing kegiatan antara lain:

- 1) Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan peningkatan toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialokasikan dana Rp.242.786.000,-
- 2) Program pendidikan politik masyarakat, dengan kegiatan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan PARPOL, dialokasikan dana Rp.6.000.000,-
- 3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan, dialokasikan dana Rp.40.000.000,-

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

6. Jumlah Pegawai

Kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 11 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 10 orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan semua instansi vertikal yang ada di Kabupaten Manggarai/Manggarai Timur sesuai bidang tugas dan kewenangannya, khususnya dalam hal :

- a) Penanganan masalah pertanahan dan masalah batas administrasi pemerintahan selalu berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Manggarai Timur, Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai maupun dengan Pengadilan Negeri Ruteng dan Kejaksaan Negeri Manggarai dengan hasil/manfaat : terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penanganan masalah pertanahan dan batas administrasi pemerintahan.

- b) Pengolahan dan pemutakhiran data serta perencanaan pembangunan selalu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Manggarai Timur dengan hasil/manfaat: tersedianya data yang akurat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLANTAS, UPTD Perizinan Wilayah III DISHUB Provinsi NTT dan Kantor SAMSAT dalam rangka penertiban lalu lintas.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Telah dilaksanakan pada tahun 2019 melalui kegiatan FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1) Sengketa Batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Konflik yang terjadi pada Tahun Anggaran 2019 yakni bukan konflik terkait perbatasan namun berkaitan dengan sengketa lahan antar warga atau perdata. Sedangkan masalah perbatasan Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada selama tahun 2019 telah dilaksanakan penanaman tugu atau prasasti yang telah ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Bupati Manggarai Timur dan Bupati Ngada.

2) Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

Solusi yang dilakukan sudah beberapa kali pemerintah fasilitasi melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah sampai pada Kemendagri. Selanjutnya Tapal Batas antar Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.

3) Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.
- Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manggarai Timur
- Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur

4) Jumlah Pegawai

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S1) : 10 orang
 - b) Sarjana Muda : 1 orang
 - c) SLTA : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 10 orang

- c) Golongan II : 1 orang

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

- 1) Bencana yang terjadi pada tahun 2019 adalah:
 - a. Runtuhnya saluran irigasi sepanjang \pm 50 meter dan tinggi \pm 9 meter yang terjadi di Kelurahan Nanga Baras
 - b. Angin topan menyebabkan rusaknya rumah milik masyarakat di 4 kecamatan
 - c. Banjir menyebabkan deuker Wae Gonggang mengalami kerusakan
 - d. Bencana kebakaran rumah masyarakat yang terjadi hampir di semua kecamatan
 - e. Banjir menyebabkan patahnya saluran primer sepanjang 2 meter sehingga sawah terancam gagal panen di Desa Satar Padut.
- 2) Penanggulangannya
 - a) Pra bencana meliputi : pencegahan dini dan perluasan informasi mengenai potensi terjadinya bencana kepada masyarakat
 - b) Saat bencana meliputi : tanggap darurat pada saat terjadinya kejadian bencana dan pemberian logistik pada korban bencana
 - c) Pasca bencana meliputi : rehabilitasi dan rekonstruksi pada lokasi kejadian bencana.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi berstatus lokal Kabupaten Manggarai Timur

3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam fungsinya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Timur dengan total anggaran sebesar Rp. 6.323.038.708,-.

4. Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana

- a. Menempatkan petugas BPBD pada setiap kecamatan berdasarkan potensi rawan bencana
- b. Pemasangan rambu – rambu peringatan bencana
- c. Pembuatan roll banner informasi mengenai kebencanaan
- d. Pembentukan tim reaksi cepat
- e. Pembentukan forum pengurangan resiko bencana sebagai wadah diskusi mengenai penanggulangan bencana
- f. Sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana

5. OPD yang menangani bencana

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

3. Dinas Sosial

6. Jumlah pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S1) :15 orang
- b) Sarjana Muda : 4 orang
- c) SLTA : 2 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 2 orang
- b) Golongan III :17 orang
- c) Golongan II : 2orang

7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

Tidak ada

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Berdasarkan kondisi geografis, topografi, geologi, keadaan iklim dan hidrologi, maka potensi kejadian bencana yang diperkirakan terjadi adalah :

- a) Banjir
- b) Tanah longsor
- c) Angin topan/putting beliung
- d) Kekeringan
- e) Banjir bandang
- f) Gempa bumi
- g) Kebakaran hutan dan lahan
- h) Cuaca ekstrim
- i) Gelombang ekstrim dan abrasi
- j) Letusan gunung api

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Tidak ada kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Kamtrantibmas Yang Terjadi Selama Tahun 2019

Uraian kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2019 seperti pada tabel berikut :

No	Tanggal	Jenis Gangguan	Jumlah	KET.
1.	15 Januari 2019	Penemuan mayat dan pembongkaran kuburan korban di lokasi Bhara-Kisol Kel. Tanah Rata, Kec. Kota Komba. Sebelum dikuburkan korban tidak memiliki identitas & di duga memiliki kelainan jiwa. Setelah diberitakan melalui media massa, keluarga korban mengaku mengenal ciri-ciri korban yg sama dengan anggota keluarga mereka yg hilang selama ini. Identitas korban, sbb : Nama : Wilhemina Manus, 48 tahun Perempuan, Tani, Katolik, suku Laking Manggarai, alamat, Woa, ds. Koak, Kec. Satar Mese, Kabupaten Manggarai.	1	Keluarga korban menerima musibah ini. Pelaksanaan pembongkaran kuburan melalui ritual adat kampung Woa, atas nama Markus Goar.
2.	19 Januari 2019	Kasus penembakan di duga menggunakan senapan angin di gedung Kevikepan Borong. Kerugian yg terjadi adalah seekor anjing dewasa milik kevikepan & peluru senjata menembus kaca jendela kamar pastor.	1	Kanit Intel bersama anggota Polsek Borong sudah melakukan identifikasi & investigasi.
3.	20 Januari 2019	Dugaan penyebaran paham radikal & ormas keagamaan di Jeremboro, Kel. Watu Nggene, Kec. Kota Komba. Pelaku bernama Muhamad Abdullah, sebelumnya beragama Katolik dgn nama Wihelmus Fridus Serang, kemudian pindah agama Muslim, setelah pelaku merantau ke Jawa & mengikuti pendidikan di Ponpes Nizhomdin. Informasi lapangan & hasil investigasi pelaku merekrut beberapa pemuda untuk masuk ormas keagamaan.	1	Sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikan oleh Kepolisian Sektor Kota Komba.
4.	22 Januari 2019	Penyelesaian sengketa pembangunan menara SUTT PLN 150 Kv Ruteng-Bajawa di ds. Lembur, Kec. Kota Komba. Masyarakat ds. Berjumlah 15 orang yg tergabung dgn komunitas pemanfaatan hutan mata air wae Sele menolak pembangunan menara SUTT di kawasan hutan karena berpotensi mengurangi debit air.	1	Berhasil memfasilitasi penyelesaian dengan mempertemukan masyarakat & pihak PLN. Para pihak sepakat untuk melanjutkan pembangunan jaringan listrik dgn mewajibkan PLN utk memberikan kompensasi dlm bentuk uang, utk menanam kembali pohon yg

				rusak.
5.	28 Januari 2019	Dugaan intimidasi terhadap pengikut saksi Yehowa di Keros, Kel. Rongga Koe, Kec. Kota Komba. Rumah korban dirusak & indikasi dibakar oleh orang yg tidak dikenal, korban bernama Yuliana Endu , tinggal bersama ibu kandung bernama Maria Ojing & adiknya Hermelinda Saroni.	1	Kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Kota Komba.
6.	5 Februari 2019	Penemuan kapal motor nelayan No. 843 GT 10 bersama penumpang di pantai Ronting, ds. Satar Kampas, Kec. Lamba Leda. KM tersebut diduga hanyut terbawa arus dari kampung Banyuwangi Jawa Timur, jumlah penumpang 3 orang dlm keadaan selamat.	1	Penumpang KM kembali ke kampung halaman setelah gelombang dan angin laut mulai redah.

Sumber : Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Manggarai Timur.

2. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Adapun tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebanyak 8 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	
1.	Borong	-		-	1	1
2.	Poco Ranaka	-				-
3.	Lamba Leda					
4.	Sambi Rampas			-		-
5.	Elar					
6.	Kota Komba	1		4	-	5
7.	Rana Mese					1
8.	Poco Ranaka Timur	1			1	2
9.	Elar Selatan					
Jumlah		2		4	2	8

3. OPD Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan instansi terkait yaitu POLRI, TNI dan Badan Narkotika.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD II Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp.1.087.906.509,- dan realisasi sebesar Rp.1.083.447.450,-.

5. Kendala dan Penanggulangannya

Dalam menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai Timur melakukan sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan pelajar untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan hidup dengan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Setia dan taat untuk mempertahankan nilai-nilai empat pilar bangsa yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentu tidak terpisah dari berbagai kendala yaitu nilai adat istiadat yang majemuk, tingkat kesejahteraan yang beragam, sarana dan fasilitas pembangunan infrastruktur yang belum memadai, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sering memahami secara keliru terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

POLRI dan TNI di wilayah Kabupaten Manggarai Timur tentu sangat berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dengan melakukan pemantauan, penanganan konflik dan penanggulangan secara terus menerus dan aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

7.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat:

a. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dalam pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kebudayaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan, antara lain :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

b. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik Pendidikan Dasar Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan mencapai 100%.

Tabel 7.1.1
Target Pencapaian SPM

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan: pembangunan gedung sekolah	6.042.809.000
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	%	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan: pengadaan mebeleur sekolah	1.951.350.000
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	Unit	1	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	1.732.450.000
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia	Unit	1	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pengadaan mebeleur sekolah	1.951.350.000

	ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.				
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 orang peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	%	75	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan /kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	12.233.830.100
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	%	75		
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	%	80		3.500.000
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh di antaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %.	%	80		
9	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	%	80	a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik	
10	Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	80		
11	Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	80	b) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	245.765.000
12	Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	80		
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	245.765.000
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan dilakukan selama 3 jam untuk	%	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan monitoring, evaluasi	74.000.000

	melakukan supervisi dan pembinaan			dan pelaporan	
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	%	70	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.413.427.908
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	%	70		
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	%	80	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan: a. Pengadaan peralatan laboratorium IPA FISIKA	
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	%	100	b. Pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi	1.413.427.908
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15.000.000
	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a. Kelas I - II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	12.233.830.100
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15.000.000
22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15.000.000
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan literasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian angka kredit	171.600.000

24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester.	%	100		
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	%	100	Program manajemen pelayanan pendidikan/kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	1.454.232.800
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten / Kota pada setiap akhir semester.	%	100	Program manajemen pelayanan pendidikan/kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	1.454.232.800
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	15.000.000

c. Realisasi

Beberapa indikator tingkat pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 7.1.2
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Program/ kegiatan	Satuan	Target DPA	Realisasi	%
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pembangunan gedung sekolah	ruang	32	32	100
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	%	100	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pengadaan mebeleur sekolah	pasang	2949	2689	91.18

3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	%	60	60	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Unit	6	6	100
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	%	60	60	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pengadaan mebeleur sekolah	pasang	2949	2689	91.18
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 orang peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	%	75	75	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pembangunan gedung sekolah	Ruang	32	32	100
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.								
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	%	80	79.10	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/ kegiatan: a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Orang	30	30	100
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh di antaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %.			93.20	b) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		180	180	100

9	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	%	80	80	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik	Orang	30	30	100
10	Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	80	80	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik	Orang	30	30	100
11	Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	80	80	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik	Orang	30	30	100
12	Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik								
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran	%	100	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	180	180	100
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	%	100	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kali	10	10	100
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	%	70	70	Program: Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun/Kegiatan : Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	paket	28	28	100

16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.								
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	%	60	40	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan: a. Pengadaan peralatan laboratorium IPA Fisika	paket	9	9	100
					b. Pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi	paket	5	5	100
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	%	100	100	Program wajib belajar Dikdas 9 tahun/kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	paket	28	28	100
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	%	100	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Orang	180	180	100
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a. Kelas I - II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	%	100	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Orang	1110	1110	100
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan	Orang	180	180	100

22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya				bagi pendidik dan tenaga kependidikan				
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	%	100	100	Program manajemen pelayanan pendidikan/kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	%	100	100	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester.								
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.								
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten / Kota pada setiap akhir semester.	%	100	100	Program manajemen pelayanan pendidikan/kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	%	100	100	100
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	100	100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan/kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	180	180	100

d. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dengan sumber dana dari APBD dan APBN sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	202.085.003.300	198.613.433.278	98.28
Belanja langsung	98.638.427.615	44.008.745.109	44.62
Belanja pegawai	20.794.368.286	14.826.963.100	71.30
Belanja barang dan jasa	32.808.366.824	7.734.597.688	23.58
Belanja Modal	45.035.692.505	21.447.184.321	47.62
Jumlah	300.723.430.915	242.622.178.387	80.68

e. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal, kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur adalah sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S2) : 1 orang
- b) Sarjana (S1) : 22 orang
- c) DIII : 10 orang
- d) SLTA : 7 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 7 orang
- b) Golongan III : 26 orang
- c) Golongan II : 7 orang

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 16 orang

4) Staf : 18 orang

f. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Kekurangan dana untuk pengadaan lata peraga IPA
- b) Guru tidak selalu membuat dan menerapkan rencana program pembelajaran (RPP)
- c) Komite sekolah kurang berkontribusi

2. Solusi

- a) Membuat skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana
- b) Guru diwajibkan membuat RPP dari sebelum/awal semester
- c) Komite sekolah dan pengelola sekolah harus lebih efektif dan efisien

7.2 Urusan Kesehatan

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa jenis pelayanan dasar pada Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan penderita dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

b. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah berdasarkan RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.4
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian (Tahun)	Anggaran	Satuan Kerja/ lembaga Penanggungjawab
	Indikator	Nilai (%)			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2019	1,550,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2019	1,367,865,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2019	1,150,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
4	Pelayanan kesehatan balita	100	2019	1,750,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2019	650,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	2019	585,750,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	2019	465,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	2019	1,287,810,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	2019	1,000,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur
10	Pelayanan kesehatan penderita dengan gangguan jiwa berat	100	2019	500,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	2019	1,500,000,000	Dinas Kesehatan Kab. Kesehatan Kab. Manggarai Timur
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	2019	-	Dinas Kesehatan Kab. Kesehatan Kab. Manggarai Timur

c. Realisasi

Realisasi terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2.5
Realisasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan TA 2019

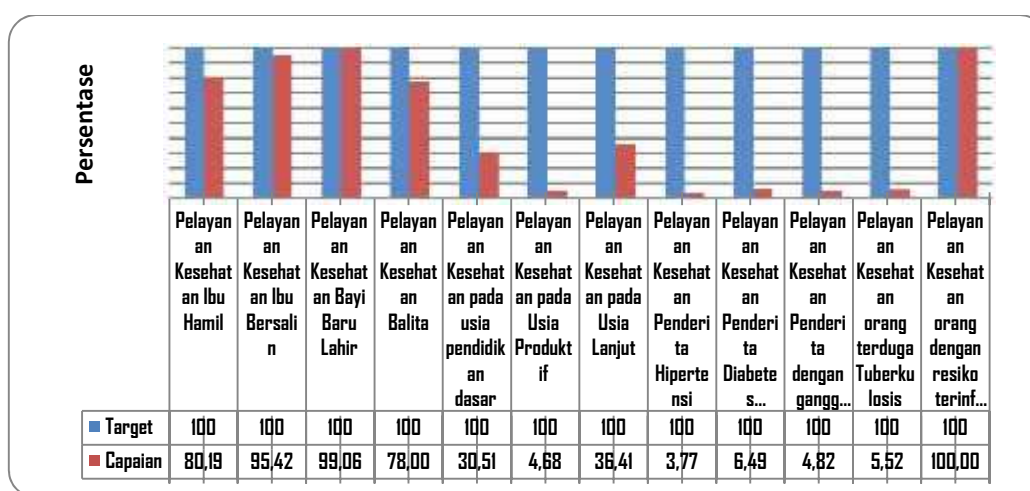
NO	Indikator		Sasaran dalam tahun	Jumlah yang dilayani	%
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta) / (Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100	7,240	5,806	80.19
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan) / (Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun) X 100	5,409	5,161	95.42
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar) / (Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun) X 100	5,331	5,281	99.06
4	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) / (jumlah balita usia 0-59 bulan yang ada dalam wilayah kerja dalam 1 tahun) X 100	25,981	20,265	78.00
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan screening kesehatan di satuan pendidikan dasar) / (jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran) X 100	45,037	13,743	30.51
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100	160,053	7,493	4.68

7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun) / (Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu 1 tahun) X 100	13,023	4,742	36.41
8	Jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) / (Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) X 100 (<i>estimasi hipertensi sesuai hasil riskesdas 2018 setiap daerah</i>)	57,105	2,153	3.77
9	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) / (Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) X 100	2,251	146	6.49
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	(Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun) / (Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) X 100	415	20	4.82
11	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah penderita TBC yang diobati sesuai standar disuatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun) / (Jumlah seluruh penderita TBC yang disuatu wilayah pada kurun Waktu 1 tahun) X 100	3,608	199	5.52
12	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	(Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun) / (Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) X 100	19	19	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terhadap Standar Pelayanan Minimal yang yang telah mencapai target adalah indikator jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 100%, ini artinya bahwa semua orang yang berisiko terinfeksi HIV telah dilakukan pemeriksaan. Yang menduduki urutan kedua dan ketiga adalah SPM adalah indikator jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,6 % dan indikator pelayanan ibu bersalin sebesar 95,42%.

Dari 12 indikator yang ada, hanya 5 indikator saja yang memperoleh persentasi diatas 50%, sedangkan 7 indikator lainnya masih dibawah 50%, adapun 3 indikator terbawah yang dicapai adalah indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 3,77%, indikator pelayanan pada usia produktif sebesar 4,68% dan indikator pelayanan pada penderita gangguan jiwa (ODGJ) sebesar 4,82% sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik7.2.1
Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019



d. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019, dengan rincian:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	41.157.412.209	41.073.196.089	99.80
Belanja langsung	112.316.215.481	105.385.735.793	93.83
Pegawai	13.883.433.050	13.661.964.850	98.40
Barang dan jasa	43.770.178.760	39.349.344.993	89.90
Modal	54.662.603.671	52.374.425.950	95.81
Total	153.473.627.690	146.458.931.882	95.43

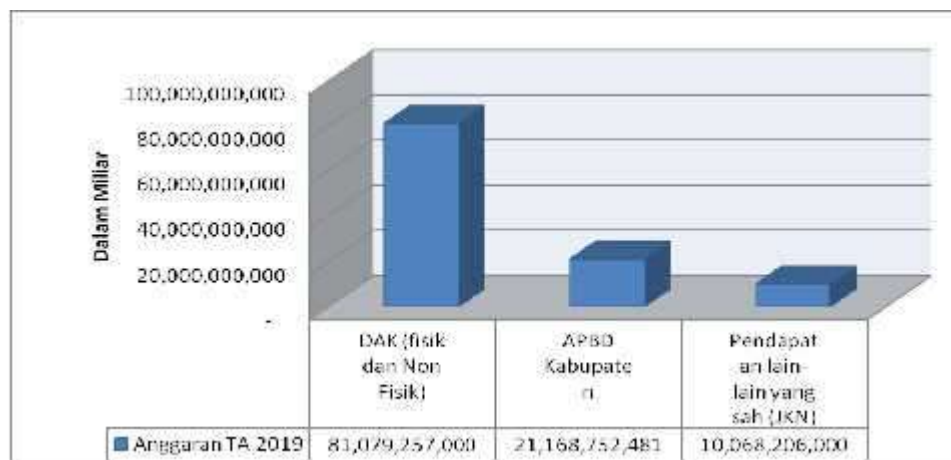
Sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2.6
Sumber Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	Sumber	Anggaran
1	DAK Fisik	50,184,307,000
2	DAK Non Fisik	30,894,950,000
3	APBD Kabupaten	21,168,752,481
4	Pendapatan lain-lain yang sah (JKN)	10,068,206,000
Total		Rp. 112.316.215,481

Dari tabel diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa sumber anggaran terbesar adalah dari Dana Alokasi Khusus (72,19%), dana APBD Kabupaten Manggarai Timur termasuk Dana Bagi Hasil Cuka tembakau sebesar 18,85% serta dana Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 8,96%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik7.2.2
Sumber Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur
Tahun Anggaran 2019



e. Dukungan personil

Sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2019 sebanyak 708 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Adapun rincian berdasarkan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta berdasarkan jabatan struktural.

1.	Berdasarkan jenis pendidikan	:	708	Orang	
	a.	Tenaga Dokter	:	17	Orang
	a.1	Dokter spesialis	:	1	Orang
	a.2	Dokter umum	:	13	Orang
	a.3	Dokter gigi	:	3	Orang
	b.	paramedis perawatan	:	540	Orang
	b.1	Perawat SPK/AKPER/S1 Keperawatan	:	346	Orang
	b.2	Perawat gigi/ AKPER gigi	:	32	Orang
	b.3	Bidan/ Akademi Kebidanan	:	162	Orang
	c.	Paramedis Non Perawatan	:	151	Orang
	c.1	S2 Kesehatan	:		Orang
	c.2	Sarjana kesehatan Masyarakat	:	15	Orang
	c.3	Farmasi	:	22	Orang
	c.4	Analisis medis	:	15	Orang
	c.5	Fisioterapis	:	2	Orang
	c.6	Refraksi optisi	:	1	Orang
	c.7	Anasthesy	:	0	Orang
	c.8	Sanitarian	:	29	Orang

	c.9	Radiologist	:	1	Orang
	c.10	Rekam Medis	:	3	Orang
	c.11	Elektromedik	:	3	Orang
	c.12	Apoteker	:	11	Orang
	c.13	Gizi	:	27	Orang
	c.14	Umum	:	22	Orang
2.	Berdasarkan jenjang pendidikan		:	708	Orang
	1	S2	:	0	Orang
	2	S1	:	105	Orang
	3	D3	:	460	Orang
	4	SMA & D-I	:	142	Orang
	5	SMP	:	1	Orang
3	Berdasarkan Pangkat golongan		:	708	Orang
	1	Gol IV	:	6	Orang
	2	Gol III	:	566	Orang
	3	Gol II	:	136	Orang
4	Berdasarkan Jabatan Struktural		:	18	Orang
	1	Eselon II	:	1	Orang
	2	Eselon III/a	:	1	Orang
	3	Eselon III/b	:	4	Orang
	4	Eselon IV/a	:	12	Orang

f. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan.

Secara umum permasalahan yang terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun anggaran 2019 adalah masih rendahnya capaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100% setiap tahun.

Indikator-indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Indikator jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 30,51%
- b. Indikator jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 4,68%.
- c. Indikator jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 36,41%,
- d. Indikator jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan sebesar 3,77%,
- e. Indikator jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 6,49%,
- f. Indikator jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan sebesar 4,82%,

g. Indikator jumlah warga negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 5,52%.

2) Solusi.

- a) Optimalisasi program dan kegiatan dalam mendukung SPM dimaksud dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan, prasarana dalam mendukung SPM, anggaran yang harus memadai serta sumber daya manusia kesehatan yang handal melalui pendidikan dan pelatihan.
- b) Perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait upaya percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- c) Perlu melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap UPTD Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan.

7.3 Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum yakni:

- a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

b. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Tabel 7.3.6
Target Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Anggaran
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	4.217.600.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	5.716.560.000

c. Realisasi

Tabel 7.3.7
Realisasi SPM tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	56,09%	2019
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	33,20%	2019

d. Alokasi Anggaran

Sumber dana : APBD dan APBN

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.581.101.122	3.131.717.807	87,45
Belanja Langsung	193.792.727.602	169.436.979.615	87,43
Belanja Pegawai	6.286.568.800	5.498.170.546	87,46
Belanja Barang dan Jasa	14.031.490.554,75	10.795.084.597	76,93
Belanja Modal	173.474.668.247,25	153.143.724.472	88
Jumlah	197.373.828.724	172.568.697.422	87,43

e. Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang mendukung pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 56 orang dengan rincian:

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S1) : 26 orang
- b) Sarjana Muda : 8 orang
- c) SLTA : 18 orang
- d) SD : 4 orang

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 4 orang
- b) Golongan III : 28 orang
- c) Golongan II : 20 orang
- d) Golongan I : 4 orang

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 6 orang
- c) Eselon IV : 11 orang

4) Staf : 36 orang

f. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Terdapat 2 (dua) jabatan yang lowong.
- Jumlah ASN sangatlah kurang dibandingkan dengan volume dan beban kerja yang cukup tinggi.
- Terbatasnya tenaga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan yang mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Solusi

- Eselon IV untuk segera diisi
- Penambahan jumlah ASN
- Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dirangkap oleh pejabat yang menduduki Eselon III.

7.4 Urusan Perumahan Rakyat

a) Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif dibidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat. Standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Manggarai Timur mencakup 2 (dua) jenis pelayanan yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah/provinsi.

b) Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh daerah pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2019 seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.4.8
Target Capaian SPM pada Urusan Perumahan Tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Anggaran
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.250 jiwa	-
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah/provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	500 jiwa	-

c) Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.9
Realisasi SPM pada Urusan Perumahan tahun 2019

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi	%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.250 jiwa	0	0
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi	500 jiwa	0	0

terkena relokasi program pemerintah daerah/provinsi	yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
---	--	--	--	--

d) Alokasi Anggaran

Sumber dana : APBD

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	-	-	
Belanja langsung	903.976.100	879.238.300	97,26
Belanja pegawai	500.752.500	477.791.400	95,41
Belanja barang dan jasa	403.223.600	401.446.900	99,56
Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah	903.976.100	879.238.300	97,26

e) Dukungan Personil

Jumlah pegawai untuk urusan Perumahan tahun 2019 berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 6 orang
 - c) Sarjana Muda : 1 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 2 orang
 - b) Gongan III : 6 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 3 orang
- 4) Staf : 3 orang

f) Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Produk perencanaan atau konstruksi dalam perencanaan (KDP) bidang kawasan permukiman tahun 2018 tidak dapat ditindaklanjuti karena anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur.

2) Solusi

Produk perencanaan atau konstruksi dalam perencanaan (KDP) bidang kawasan permukiman diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur karena urusan bidang kawasan permukiman telah dialihkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur.

7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Kamtrantibmas sebagai berikut :

- 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.
- 2) Cakupan jumlah patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 3) Jumlah tingkat penyelesaian (K3) (Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten.
- 4) Jumlah petugas satuan perlindungan masyarakat.
- 5) Jumlah petugas pemadam kebakaran
- 6) Penegakan Perda

b) Target Pencapaian SPM Kabupaten Manggarai Timur

Satpol Polisi Pamong Kabupaten Manggarai Timur telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.10
Target SPM pada Urusan Trantibumlinmas Tahun 2019

No	Program	Indikator	Target	Anggaran
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 Penduduk	3,72	1.770.273.500
		Cakupan Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan & Kenyaman Lingkungan	60 kali	114.000.000
		Jumlah Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten	20	99.075.000
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.159	-
		Jumlah Petugas Pemadam kebakaran	2	33.000.000
2.	Mendorong Peningkatan potensi daerah melalui	Penegakan Perda		75.200.000

	pengawasan & Penegakan Perda dan Perbup			
--	--	--	--	--

c) Realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.5.11
Realisasi pencapaian SPM tahun 2019**

No	Program	Indikator	Realisasi	Anggaran
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 Penduduk	0,11	1.770.273.500
		Cakupan Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan & Kenyaman Lingkungan	60 kali	114.000.000
		Jumlah Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten	20	99.075.000
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.159	0
		Jumlah Petugas Pemadam kebakaran	2	33.000.000
2.	Mendorong Peningkatan potensi daerah melalui pengawasan & Penegakan Perda dan Perbup	Penegakan Perda		75.200.000

**Tabel 7.5.12
Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019**

No	Program	Indikator	Target	Perhitungan		Target Nasional
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 Penduduk	Jumlah Banpol	$\frac{\text{Jumlah banpol}}{10.000 \text{ penduduk}}$	101/10.000	0,11%
		Cakupan Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan & Kenyaman Lingkungan	60 kali (9 Kecamatan)	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Patroli} \times \text{Jumlah Kecamatan}}{3}$	$\frac{60 \times 3}{9} = 60$	60 kali

		Jumlah Tingkat Penyelesaian K3 di Kabupaten	Jumlah penyelesaian K3	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 9$	$\frac{20 \times 9 = 180}{9}$	20
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.159 Orang tibumtranmas tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}}$	$1.159 \times 100\%$	100%
		Jumlah Petugas Pemadam kebakaran	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	$\frac{\text{Satgas damkar memiliki sertifikasi sesuai kualifikasi}}{\text{Satgas damkar}} \times 100\%$	$2 \times 100\% = 100$	100%
2.	Mendorong Peningkatan potensi daerah melalui pengawasan & Penegakan Perda dan Perbup	Penegakan Perda	15 kasus pelanggaran yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang di tangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran}}$	$15 \times 100\%$ 15	100%

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota :

Pada tahun 2019 telah terjadi pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 15 kasus.

Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan dibagi pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau dikali 100% :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$$

$$15$$

$$15$$

b. Cakupan rasio petugas LINMAS;

Rasio Jumlah Linmas Per-10.000 penduduk

Menghitung rasio Linmas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{1.159}{269.686} = 0,004$$

$$\text{Jumlah Penduduk } 269.686$$

c. Rasio jumlah polpp per 10.000 penduduk

Jumlah bantuan polisi (banpol) untuk mengendalikan keamanan lingkungan adalah 101 orang :

$$\frac{\text{Jumlah Banpol}}{10.000 \text{ penduduk}} = \frac{101}{10.000} = 0,01 \text{ per } 10.000 \text{ penduduk}$$

- d. Cakupan rasio persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kulaifikasi.

Berdasarkan sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam Negeri capaiannya adalah 100% atau baru ada 2 aparat dari 29 aparat pemadam kebakaran Kabupaten Manggarai Timur yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2019.

d) Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol. PP Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2019 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	1.361.187.697	1.301.880.193	95,64
Belanja Langsung	2.818.217.309	2.654.694.200	94,19
Belanja Pegawai	1.826.541.800	1.693.700.200	92,72
Belanja Barang dan Jasa	839.266.100	814.236.000	97,01
Belanja Modal	152.409.409	146.758.000	96,29
Jumlah	4.179.405.006	3.956.574.393	94,66

e) Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2019 didukung oleh personil sebanyak 121 orang.

Jumlah pegawai Satpol PP Januari s.d Desember 2019 adalah 121 Orang dengan status sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil : 20 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 101 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	2
2.	S1	8
4.	D3	3
5.	SLTA	7

- Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	6
3.	III	11
4.	IV	3
	Jumlah Keseluruhan	20

- Jabatan Struktural :

a) Eseon II : 1 orang

b) Eselon III : 5 orang

c) Eselon IV : 9 orang

- Staf : 5 orang

f) Permasalahan dan Solusi.

1) Permasalahan

- Kurangnya anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se- Kabupaten Manggarai Timur;
- PPNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada.

2) Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran yang cukup;
- Merencanakan penambahan anggaran untuk mengikuti pendidikan PPNS.

7.6 Urusan Sosial

a. Jenis pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar anak lanjut usia terlantar di luar panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

b. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM Pusat.

Tabel 7.6.11
Target SPM bidang sosial Tahun 2019

No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Terwujudnya peningkatan petugas dan penyelenggara pendamping sosial KAT dan PMKS lainnya melalui PKH yang efektif dan efisien pada tahun anggaran 2019	100%	634.740.000
	a. Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat yang mendapat pelatihan	-	
	b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Tersalurnya RASTRA kepada RTSPM	100%	
	c. Koordinasi pengelolaan beras sejahtera			
2	Program pelayanan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial dengan kegiatan :			177.990.000
	a) Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	100%	
	b) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanganinya korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	100%	
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan pemberian jaminan hidup bagi	Meningkatnya jaminan hidup bagi penyandang cacat dan lansia	36 orang	160.726.275

	penyandang cacat dan lansia terlantar			
4	Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial			54.765.700
	a. Pembentukan dan pelantikan pengurus kelompok Karang Taruna	Terbentuknya kelompok Karang Taruna Kabupaten Manggarai Timur	Kelompok	
	b. Pendataan dan inventarisasi lembaga-lembaga sosial	Terdapat data lembaga sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur	1 Dokumen	

c. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Dinas Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.6.12

Realisasi tahun 2019

No	Indikator	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	
				Fisik	Keuangan
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan pemberian jaminan hidup untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB)	18 orang	100	52.000.000
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan pemberian jaminan hidup untuk orang dengan kecacatan berat (ODKB)	25 orang	100	50.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya lainnya	0	0	Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya lainnya	0	0	Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1 paket	100	127.585.000

d. Alokasi anggaran

Berdasarkan hasil relisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2019, maka diperoleh data sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.549.636.534	1.535.849.459	99,11
	Pegawai	1.549.636.534	1.535.849.459	99,11
2	Belanja Langsung	1.650.130.800	1.599.750.150	96,94
	Pegawai	426.554.400	404.943.500	94,93
	Barang dan Jasa	1.223.576.400	1.194.806.650	97,64
	Modal	-	-	0
	Jumlah 1 + 2	3.199.767.334	3.135.599.609	97,99

e. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, Dinas Sosial dalam penerapan SPM didukung 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 8 orang
 - c) Sarjana Muda : 5 orang
 - d) SLTA : 2 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 11 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 9 orang
- 4) Staf : 1 orang

f. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Rendahnya perlindungan sosial bagi PMKS dalam bentuk pemberian bantuan sosial yaitu sebesar 13,73% dari target 80%

2) Solusi

Menyelenggarakan urusan sosial melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi secara konsisten yang mengacu pada pencapaian IKU.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah dari masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja tahun 2019 pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	1. Jumlah arus penumpang tahun 2019	orang	22.750
	2. Tersedia angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	65
	3. Ratio ijin trayek	40	ijin
	4. Jumlah uji KIR angkutan umum	550	kali
	5. Kepemilikan KIR angkutan umum	250	unit
	6. Lama pengujian kendaraan bermotor	3	Jam/kend
	7. Jumlah kegiatan pengendalian dan penertiban kendaraan di jalan raya	12	kali
	8. Jumlah lampu penerangan jalan terpasang	20	unit

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana	1. Jumlah arus penumpang tahun 2019	Orang	22.750	31.060	136,53
	2. Tersedia angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	65	43	66,15

transportasi publik yang nyaman dan lancar	Indikator yang mendukung IKU				
	3. Ratio ijin trayek	40	ijin	82	205,00
4. Jumlah uji KIR angkutan umum	550	kali	790	137,52	
5. Kepemilikan KIR angkutan umum	250	unit	578	231,20	
6. Lama pengujian kendaraan bermotor	3	Jam/kend	3	100	
7. Jumlah kegiatan pengendalian dan pnertibn kendaraan di jalan raya	12	kali	12	100	
8. Jumlah lampu penerangan jalan terpasang	20	unit	0	0	

Indikator jumlah arus penumpang tahun 2019 dengan target jumlah penumpang 22.750 orang Realisasi capaian tahun 2019 mencapai 31.060 orang atau 136,53%. Jumlah penumpang ini dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang masuk/keluar terminal Borong. Pencapaian ini merupakan upaya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui pemberian ijin trayek baru untuk peningkatan jumlah penumpang di Kabupaten Manggarai Timur.

Indikator tersedia angkutan umum untuk melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dengan target tahun 2019 65%, realisasi pencapaiannya baru mencapai 43% atau 66,15%. Kurang realisasi pencapaian indikator ini disebabkan oleh karena kurang mantapnya infrastruktur jalan, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat/dunia usaha untuk berusaha dibidang jasa angkutan. Dari 71 jaringan trayek yang ada di Kabupaten Manggarai Timur baru terlayani di 33 jaringan trayek atau 66,15%.

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran "Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar "dengan 2 indikator kinerja utama adalah sebesar 101.33 % *atau* dikategorikan *berhasil*.

Indikator kinerja yang mendukung indikator kinerja utama terdiri dari :

- Ratio ijin trayek

Target tahun 2019 sebanyak 40 ijin trayek tercapai 82 ijin (205%), yang merupakan perpanjangan ijin trayek dan ijin trayek baru. Pada tahun 2019 terdapat 17 ijin trayek baru yang dikeluarkan.

- Jumlah uji KIR angkutan umum

Target kinerja tahun 2019 sebanyak 550 kali, terealisasi sebanyak 790 kali (137,52%). Pengujian ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jasa angkutan. Uji KIR lakukan untuk kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan orang.

- Kepemilikan KIR angkutan umum

Target kepemilikan KIR angkutan tahun 2019 sebanyak 250 unit kendaraan. tercapai sebanyak 578 unit kendaraan (231,20%). Ini dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan buku KIR masing-masing kendaraan, yang dikeluarkan sebagai tanda bahwa kendaraannya telah dilakukan pengujian layak jalan.

- Lama pengujian kendaraan bermotor

Lama pengujian kendaraan rata-rata 3 jam/kendaraan tercapai 100%

- Jumlah kegiatan pengendalian dan penertiban kendaraan di jalan raya

Dari target 12 kali tercapai sebanyak 12 kali (100%). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dengan tujuan untuk pengendalian ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya. Yang dilakukan di 9 kecamatan dengan melibatkan pihak kepolisian.

- Jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang

Target tahun 2019 sebanyak 20 unit, realisasi 0 unit (0%). Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh pada proses pengadaan barang/jasa/porses tender tidak ada pihak ketiga yang memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan dimaksud.

Secara umum indikator yang mendukung IKU mencapai 128.83 % atau dikategorikan berhasil.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2017 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2019		
				Target	Realisasi	%
Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	1. Jumlah arus penumpang	107,07	139,50	22.750 orang	31.060 orang	136,53
	2. Tersedia angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	63,64	70,90	65 %	43 %	66,15
	Indikator Kinerja yang mendukung IKU					
	Ratio iji trayek	160	112	40 ijin	82 ijin	205
	Jumlah uji KIR angkutan umum	126,55	137,52	550 kali	790 kali	137,52
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	139,20	231,20	250 unit	578 unit	231,20
	Lama pengujian kendaraan bermotor	100	100	3 jam	3 jam	100
	Jumlah kegiatan pengendalian dan pneraturan kendaraan di jalan raya	100	100	12 kali	12 kali	100
	Jumlah lampu penerangan jalan terpasang	80	170	20	0	0

Indikator jumlah arus penumpang tahun 2019 dengan target jumlah penumpang 22.750 orang Realisasi capaian tahun 2019 mencapai 31.060 orang atau 136,53%. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 139,50% dan lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 107,07%. Secara umum capaian tahun 2017-2019 dikategorikan berhasil.

Indikator tersedia angkutan umum untuk melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dengan target tahun 2019 sebesar 65%, realisasi pencapaiannya baru mencapai 43% atau 66,15%. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 70,90% dan lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 63,64%. Kurang realisasi pencapaian indikator ini disebabkan oleh karena kurang mantapnya infrastruktur jalan, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat/dunia usaha untuk berusaha dibidang jasa

angkutan. Dari 71 jaringan trayek yang ada di Kabupaten Manggarai Timur baru terlayani di 33 jaringan trayek atau 66,15%. Upaya peningkatan capaian indikator ini dilakukan dengan peningkatan infrastruktur jalan dan penataan jaringan trayek-trayek baru guna peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan berdampak pada peningkatan jumlah penumpang.

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran tahun 2019 "Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar "dengan 2 indikator kinerja utama adalah sebesar 101,33%. Lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 105,2% dan lebih tinggi dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 85,36%. Secara umum pencapaian tahun 2017-2019 sebesar 97,29%.

Indikator kinerja yang mendukung indikator kinerja utama terdiri dari :

- Ratio ijin trayek

Target tahun 2019 sebanyak 40 ijin trayek tercapai 82 ijin (205%), lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 112 % dan 160 % capaian pada tahun 2017. Capaian tahun 2019 cukup signifikan seiring dengan peningkatan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan. Pada tahun 2019 terdapat 17 ijin trayek baru yang dikeluarkan.

- Jumlah uji KIR angkutan umum

Target kinerja tahun 2019 sebanyak 550 kali, terealisasi sebanyak 790 kali (137,52%). Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018 dan lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 126,55%. Pengujian ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jasa angkutan. Uji KIR lakukan untuk kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan orang. Capaian tiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Manggarai Timur.

- Kepemilikan KIR angkutan umum

Target kepemilikan KIR angkutan tahun 2019 sebanyak 250 unit kendaraan. Tercapai sebanyak 578 unit kendaraan (231,20%). Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018 dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 139,20%. Ini dihitung

berdasarkan jumlah kepemilikan buku KIR masing-masing kendaraan, yang dikeluarkan sebagai tanda bahwa kendaraannya telah dilakukan pengujian layak jalan.

- Lama pengujian kendaraan bermotor

Lama pengujian kendaraan rata-rata 3 jam/kendaraan tercapai 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, rata-rata capaian tahun 2017-2019 mencapai 100%.

- Jumlah kegiatan pengendalian dan penertiban kendaraan di jalan raya

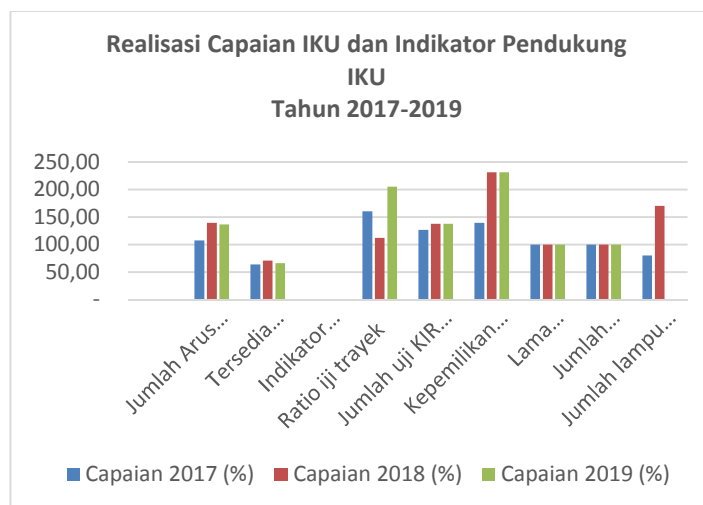
Dari target 12 kali tercapai sebanyak 12 kali (100%). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dengan tujuan untuk pengendalian ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya. Yang dilakukan di 9 kecamatan dengan melibatkan pihak kepolisian. Capaian tahun 2017-2019 mencapai 100%.

- Jumlah lampu penerangan jalan umum terpasang

Target tahun 2019 sebanyak 20 unit, realisasi 0 unit (0%). Capaian tahun 2018 mencapai 170%, lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 80%. Tidak tercapainya target ini tahun 2019 disebabkan oleh tidak adanya pihak ketiga yang memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan dimaksud.

Secara umum indikator yang mendukung IKU tahun 2019 mencapai 128.83 %, lebih rendah dari capaian tahun 2018 sebesar 167,9% dan lebih tinggi dari capaian tahun 2017 sebesar 79,48%. Rata – rata capaian tahun 2017-2019 mencapai 125,13%.

Berdasarkan tabel dan data perbandingan di atas maka capaian kinerja tiap tahun mengalami perubahan, baik pada indikator kinerja utama maupun pada indikator yang mendukung IKU, hal ini disebabkan oleh perubahan pagu anggaran pada masing-masing program. Secara keseluruhan sasaran tahun 2017-2019 "Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar"dengan 2 indikator kinerja utama dan indikator yang mendukung IKU dikategorikan *berhasil*. Grafik capaian indikator tergambar dalam grafik berikut :



d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target RPJMD	
Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	1. Jumlah Arus Penumpang Tahun 2019	orang	22.750	31.060	100	
	2. Tersedia angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	65	43	100	
	Indikator yang mendukung IKU					
	3. Ratio ijin trayek	40	ijin	82	100	
	4. Jumlah uji KIR angkutan umum	550	kali	790	100	
	5. Kepemilikan KIR angkutan umum	250	unit	578	100	
	6. Lama pengujian kendaraan bermotor	3	Jam/kend	3	100	
	7. Jumlah kegiatan pengendalian dan pnertibn kendaraan di jalan raya	12	kali	12	100	
8. Jumlah lampu penerangan jalan terpasang	20	unit	0	0		

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

Di samping dukungan dana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur, didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 16 orang dan non PNS sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), dengan rincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Pangkat dan Golongan:

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 13 orang
- Golongan II : 1 orang

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- S2 : 1 orang
- S1 : 11 orang
- D-3/SM : 1 orang
- SLTA : 2 orang
- SLTP : 1 orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 3 orang
- Eselon IV : 8 orang
- Staf : 4 orang

f) **Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya IKU adalah:

No	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar	Indikator Kinerja Utama	Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan	700.884.000	671.732.650	95,84
		1. Jumlah Arus Penumpang Tahun 2019	Kegiatan : Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan raya	700.884.000	671.732.650	95,84
		2.Tersedia Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan		127.001.602	109.368.000	86,12
		Indikator Kinerja yg mendukung IKU	Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
		1. Ratio iji trayek	Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	127.001.602	109.368.000	86,12
		2. Jumlah uji				

		KIR angkutan umum 3. Kepemilikan KIR angkutan umum 4. Lama pengujian kendaraan bermotor 5. Jumlah kegiatan pengendalian dan penertiban kendaraan di jalan raya 6. Jumlah lampu penerangan jalan terpasang				
			Jumlah	827.885.602	781.100.650	94.34

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV yang terdiri dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja turunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

Target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata kepada masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	%	98.40
Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK S-1	orang	1.530
Sasaran Strategis	Indikator Turunan	Satuan	Target
Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini,	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.5
	Angka Partisipasi Kasar	%	94.65

Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata kepada masyarakat	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100
	Angka Partasipasi Kasar TK/RA	%	6.25
	Angka Partisipasi Kasar SD/Mi	%	99.82
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	95.45
	Angka Partisipasi Murni SD/Mi	%	90.15
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	80.25
	Angka Partisipasi Sekolah	%	100
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SMP)	%	1/125
	Rasio Guru/Murid	%	1:31
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD)	%	1/162
	Sekolah SD/Mi kondisi bangunan baik	ruang	1666
	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	ruang	320
	Jumlah kelompok belajar PAUD	kelompok	150
	Angka Putus Sekolah SD	%	0.25
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0.20
	Angka Kelulusan SD	%	100
	Angka Kelulusan SMP	%	100
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	100
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	%	100
	Pembangunan Perpustakaan	unit	30
	Jumlah ruang kelas SD layak pakai	ruang	90
	Jumlah ruang kelas SMP layak pakai	ruang	55
	Penyelegaraan Festival Seni Budaya	kegiatan	1
	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Unit	1
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Situs	2

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja yang dicapai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata kepada masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	%	97.15	99.91
Meningkatkan Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK S-1	%	1.530	2.913
Sasaran Strategis	Indikator Turunan	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya akses pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang merata kepada masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.5	6.5
	Angka Partisipasi Kasar	%	94.65	101.54
	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	99.48
	Angka Partasipasi Kasar TK/RA	%	6.25	28.19
	Angka Partisipasi Kasar SD/Mi	%	99.82	101.63
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	95.45	101.37
	Angka Partisipasi Murni SD/Mi	%	90.15	90.33
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	80.25	99.16
	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	93.34
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP	%	1/125	1/97
	Rasio Guru/Murid	%	1:31	1:29
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD)	%	1/162	1/88
	Sekolah SD/Mi kondisi bangunan baik	Ruang	1666	1656
	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	Ruang	320	321
	Jumlah kelompok belajar PAUD	Kelompok	150	139
	Angka Putus Sekolah SD	%	0.25	0.20
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0.20	0.19
	Angka Kelulusan SD	%	100	99.45
	Angka Kelulusan SMP	%	100	99.52
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	100	94.35
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	%	100	72.54
	Pembangunan Perpustakaan	Unit	3	3
	Jumlah ruang kelas SD layak pakai	Ruang	90	74
Jumlah ruang kelas SMP layak pakai	Ruang	5	5	
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Kegiatan	1	1	
Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Unit	1	19	
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Situs	2	2	

***Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya dilaksanakan dengan Kegiatan pembentukan kelompok seni*

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Turunan	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019
Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata kepada masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.5	6.5	6.5	6.5
	Angka Partisipasi Kasar	%	94.60	98.92	122,06	101.54
	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	99.47	99,77	99.48
	Angka Partasipasi Kasar TK/RA	%	6.20	6.05	17.85	28.19
	Angka Partisipasi Kasar SD/Mi	%	99.80	99.93	138	101.63
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	95.40	96.87	108	101.37
	Angka Partisipasi Murni SD/Mi	%	90	97.23	98,38	90.33
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	80	83.84	84,69	99.16
	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	90.82	93.34
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SMP)	%	1/125	1/125	1/92	1/97
	Rasio Guru/Murid	%	1:31	1:7.75	1:7,44	1:29
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD)	%	1/162	1/129	1/103	1/88
	Sekolah SD/Mi kondisi bangunan baik	ruang	1646	1566	1646	1656
	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	ruang	300	269	300	321
	Jumlah kelompok belajar PAUD	kelompok	140	132	133	139
	Angka Putus Sekolah SD	%	0.25	0.25	0.25	0.20
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0.20	0.22	0.19	0.19
	Angka Kelulusan SD	%	100	99.51	99.90	99.45
	Angka Kelulusan SMP	%	100	99.44	99.63	99.52
	Angka Melanjutkan SD ke SMP	%	100	92.33	90,57	94.35
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA	%	100	76.56	74,64	72.54
	Pembangunan Perpustakaan	unit	3	1	21	3
	Jumlah ruang kelas SD layak pakai	ruang	80	82	80	74
Jumlah ruang kelas SMP layak pakai	ruang	5	29	34	5	
Penyelegaraan Festival Seni Budaya	Penyelegaraan Festival Seni Budaya	kegiatan	1	1	1	1
	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Unit	1	19	-	19
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Situs	2	2	-	2

***Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya dilaksanakan dengan Kegiatan Pembentukan Kelompok Seni*

d) **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Capaian kinerja dibandingkan dengan RPJMD adalah sebagai berikut:

No	Indikator RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar			
	a. Angka Partisipasi Sekolah	100%	93.34%	93.34%
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1/125	1/97	77.60%
	c. Rasio Guru/Murid	1/31	1/29	93.54%
	d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD)	1/162	1/88	54.32%
2	Pendidikan Menengah			
	a. Angka Partisipasi Sekolah	-	-	-
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	-	-	-
	c. Rasio Guru/Murid	-	-	-
	d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata	-	-	-
e. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf	99.40%	99.91%	100.51%	
3	Fasilitas Pendidikan			
	a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	1.465	1.656	113%
	b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	397	321	80.85%
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	150	139	92.66
5	Angka Putus Sekolah			
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.20%	0.20%	100%
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.35%	0.19%	54.28%
	c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.88%	-	-
6	Angka Kelulusan			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	99.45%	99.45%
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	99.52%	99.52%
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-	-	-
	d. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	94.35%	94.35%
	e. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100%	72.54%	72.54%
	f. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	1.530	2.976	194%
7	Kebudayaan			
	a. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	1 kali	1 kali	100%

	b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1 unit	19 unit	190%
	c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2 situs	2 situs	100%

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

1) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang	Keterangan
1.	SD	-	
2.	SMP	-	
3.	SMA	7	
4.	DIPLOMA	10	
5.	S1	22	
6.	S2	1	
J U M L A H		40	

2) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah orang	Keterangan
1.	I	-	
2.	II	7	
3.	III	26	
4.	IV	7	

3) Menurut Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah orang	Keterangan
1.	II/a	-	
2.	II/b	1	
3.	III/a	1	
4.	III/b	4	
5.	IV/a	8	
6.	IV/b	3	

4) Menurut Jabatan

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang

a.	Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	: -
b.	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	: 1 orang
c.	Sub. Bagian Keuangan	: -
3.	Kepala Bidang Pendidikan SD	: 1 orang
a.	Kepala Seksi Kurikulum	: -
b.	Kepala Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana	: 1 orang
c.	Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter	: 1 orang
4.	Kepala Bidang SMP	: 1 orang
a.	Kepala Seksi Kurikulum	: -
b.	Kepala Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana	: 1 orang
c.	Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter	: 1 orang
5.	Kepala Bidang PTK	: 1 Orang
a.	Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF	: 1 orang
b.	Kepala Seksi PTK Dikdas	: 1 orang
c.	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	: 1 orang
6.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal	: 1 orang
a.	Kepala Seksi Kurikulum	: 1 orang
b.	Kepala Seksi Kelembagaan	: -
c.	Kepala Seksi Peserta Didik & Pembangunan Karakter	: 1 orang
7.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	: 1 orang
a.	Kepala Seksi Cagar Budaya	: 1 orang
b.	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	: 1 orang
c.	Kepala Seksi Kesenian	: 1 orang
8.	Staf	: 20 orang
	Jumlah	: 40 orang

Berdasarkan tabel aspek kepegawaian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 40 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 7 (tujuh) orang, Diploma I, II dan III

sebanyak 10 (sepuluh) orang, Sarjana (S1) sebanyak 22 (dua puluh dua), dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 orang. Menurut tingkat golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, Golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang. Berdasarkan tingkat Eselon, jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon IV/a sebanyak 8 (delapan) orang dan Eselon IV/b sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan jabatan yang ada, semua seksi sudah terisi oleh pejabat struktural. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kekurangan staf. Jika dibuat analisis kebutuhan berdasarkan perbandingan 1 seksi terdiri dari 4 staf, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur masih mengalami kekurangan 56 orang staf.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan anggaran. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut didukung dengan dana sebesar Rp.12.288.930.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.262.630.100,- atau 99.79% seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini:

No.	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang merata kepada masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun:	36.600.000	29.750.000	81.28
			a. Penyelenggaraan Paket A setara SD	18.300.000	14.075.000	76.91
			b. Penyelenggaraan Paket B setara SMP	18.300.000	15.675.000	85.66
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK S-1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.252.330.100	12.232.880.100	99.84
			a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	3.500.000	2.900.000	82.86
			b. Literasi Pendidik dan Tenaga	171.600.000	170.040.000	99.09

			Kependidikan dan Penilaian Angka Kredit			
			c. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	12.233.830.100	12.229.980.100	99.97

Sedangkan akuntabilitas keuangan program lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.525.227.702	3.292.966.546	93.41
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	705.300.000	456.468.256	64.72
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	231.020.000	169.691.560	73.45
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	631.100.000	620.074.900	98.25
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	24.451.694.448	23.899.107.991	97.74
6	Program Pendidikan Non Formal	1.407.574.630	1.232.032.630	87.53
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.924.695.100	12.795.246.114	99.00
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.804.982.800	1.543.157.112	85.49
9	Program BOS	52.956.832.935		
10	Program Pengembangan Nilai Budaya	175.465.000	147.782.926	84.22
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	110.000.000	34.625.000	31.48

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 sebesar Rp.98.923.892.615,- dengan realisasi sebesar Rp.44.191.153.035,- atau 44.67%. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran serta pelaksanaan program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 dikategorikan baik.

3. Dinas Kesehatan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Manggarai Timur untuk mewujudkan target kinerja.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<i>Angka Usia Harapan Hidup</i>	68,2 Tahun
		*Angka Kelangsungan Hidup Bayi	994
		*Rasio Posyandu per Satuan Balita	100%
		* Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10%
		* Cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000penduduk <15 tahun	100%
		*Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	100%
		*Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
		*Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
		* Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%
		*Cakupan pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	10%
		*Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,004 ‰
		*Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Poskesdes, per Satuan Penduduk (1000 penduduk)	0,57 ‰ (170 Faskes)
		*Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,16‰ (49 dokter, 1 dok: 5.942 pddk)
		*Rasio tenaga Kesehatan per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	5,4‰
		*Cakupan puskesmas per kecamatan	100%
		*Cakupan pembantu puskesmas per desa	27%
		*Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
		*Persentase Warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	75%

		*Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80%
		*Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70%
		*Persentase ODGJ(Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70%
		*Persentase Orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	80%
		<i>Persentase Balita Gizi Buruk</i>	0,22%
		*Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
		*Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%
		*Rasio Posyandu per Satuan Balita	22%
		*Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia Balita	100%
		*Cakupan Balita Gizi Kurang	14%
2	Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak	<i>Angka Kematian ibu per 100.000 KH</i>	162/100.000 KH
		*Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%
		*Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	95%
		*Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%
		*Cakupan pelayanan ibu nifas	100%
		*Cakupan Komplikasi kebidanan	80%
		* Cakupan peserta KB aktif	70%
		<i>Angka kematian Bayi per 1.000 KH</i>	9,2/1.000 KH
		*Cakupan neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	80%
		*Persentase Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		<i>Angka Kemataian Balita per 1.000 KH</i>	0,64/1.000 KH
		*Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	100%
		*Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita	90%

		sesuai standar	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	*cakupan Desa Siaga yang terbentuk	50%
		*Cakupan Desa Siaga Aktif	100%
		*Persentase Sampel Air yang diperiksa dan memenuhi syarat	100%
		*Cakupan Inspeksi Rumah Sehat yang memenuhi syarat lingkungan	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan 8 (Delapan) program utama dengan 32 kegiatan serta 3 (Tiga) program pendukung dengan 9 kegiatan yang didukung dengan anggaran APBD Kabupaten yaitu DAU (Belanja Langsung) sebesar Rp.26.011.997.853,- dan DAK sebesar Rp.86.304.217.628,-.

b) Pengukuran Pencapaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja adalah capaian realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan. Tergambar bahwa capaian realisasi terhadap target sebesar 102,17%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<i>Angka Usia Harapan Hidup</i>	Tahun	68.2		0
		Angka kelangsungan hidup bayi		994	953	95.88
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	26.26	26.26
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	4.36	43.6
		Cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 Tahun	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	100	100	100

		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
		Persentase Orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai Standar	%	100	100	100
		Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	10	0	0
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	‰	0,004	0	0
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu, poskesdes per satuan penduduk (1.000 pddk)	‰	0.57	0.56	98.25
		Rasio Tenaga medis persatuan penduduk (per 1.000)	‰	0.16	0.05	31.25
		Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk (1.000 Penduduk)	‰	5.4	4.95	91.67
		Cakupan Puskesmas Per Kecamatan	%	100	322	322
		Cakupan puskesmas pembantu per desa	‰	27	23.29	86.26
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	96.22	96.22
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	75	4.8	6.4
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	80	32.32	40.4
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70	3.77	5.39
		Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	70	6.48	9.26
		Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	70	4.81	6.87
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	80	80	100
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.22	0.3	73.33
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100

		Cakupan pemberian makanan Pendamping ASI pada bayi Usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
		Rasio Posyandu per satuan Balita	‰	22	21.5	97.73
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	%	100	100	100
		Cakupan Balita Gizi Kurang	%	14	1.52	921.05
2	Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir	Angka kematian ibu per 100.000 KH	Rasio	162	186	87.1
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	97	95.28	98.23
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	%	95	80.19	84.41
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	95.4	95.4
		Cakupan pelayanan ibu nifas	%	100	95.41	95.41
		Cakupan Komplikasi Kebidanan	%	80	87.69	109.61
		Cakupan peserta KB Aktif	%	70	66.27	94.67
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Rasio	9.2	9.53	96.54
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	80	58	72.5
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	99.06	99.06
		Angka kematia Balita per 1.000 KH	Rasio	0.64	0.18	355.56
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child immunization	%	100	88.63	88.63
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	90	77.99	86.66
3		Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyehatan lingkungan	Cakupan Desa Siaga yang terbentuk	%	50	39.62
	Cakupan Desa Siaga Aktif		%	100	100	100
	Persentase Sampel Air yang diperiksa dan memenuhi syarat		%	100	67.21	67.21
	Cakupan Inspeksi Rumah Sehat yang memenuhi syarat lingkungan		%	100	38.01	38.01
Rata-rata Capaian Kinerja						102.17

c) **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya**

Pengukuran pencapaian kinerja adalah capaian realisasi kinerja tahun berjalan terhadap realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Tergambar bahwa capaian realisasi tahun 2019 meningkat dibanding pada tahun 2018 dengan capaiannya 102,78%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Realisasi perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2018	Realisasi tahun 2019	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<i>Angka Usia Harapan Hidup</i>	Tahun	67,62		0
		Angka kelangsungan hidup bayi		813	953	117.22
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	26.26	26.26	100
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	4.36	4.36	100
		Cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 Tahun	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
		Persentase Orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai Standar	%	100	100	100
		Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	0	0	0
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	‰	0	0	0
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu,poskesdes per satuan penduduk (1.000 pddk)	‰	0.56	0.56	100
		Rasio Tenaga medis persatuan penduduk (per 1.000)	‰	0.07	0.05	71.43
		Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk (1.000 Penduduk)	‰	4.93	4.95	100.41

		Cakupan Puskesmas Per Kecamatan	%	322	322	100
		Cakupan puskesmas pembantu per desa	‰	22.72	23.29	102.51
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55.01	96.22	174.91
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	0	4.8	0
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	0	32.32	0
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1.7	3.77	221.76
		Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	4.5	6.48	144
		Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	5.1	4.81	94.31
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	80	80	100
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.32	0.3	93.75
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
		Cakupan pemberian makanan Pendamping ASI pada bayi Usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
		Rasio Posyandu per satuan Balita	‰	21.07	21.5	102.04
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	%	100	100	100
		Cakupan Balita Gizi Kurang	%	1.23	1.52	123.58
2	Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir	Angka kematian ibu per 100.000 KH	Rasio	186	186	100
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94	95.28	101.36
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	%	58.34	80.19	137.45
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93.3	95.4	102.25
		Cakupan pelayanan ibu nifas	%	97.93	95.41	97.43
		Cakupan Komplikasi Kebidanan	%	90.4	87.69	97.00
		Cakupan peserta KB Aktif	%	74.59	66.27	88.85
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Rasio	8.1	9.53	117.65
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	10.16	58	570.87

		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96.6	99.06	102.55
		Angka kematian Balita per 1.000 KH	Rasio	0.65	0.18	27.69
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child immunization	%	86.83	80.11	92.26
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	67.94	77.99	114.79
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyehatan lingkungan	Cakupan Desa Siaga yang terbentuk	%	39.62	39.62	100
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100
		Persentase Sampel Air yang diperiksa dan memenuhi syarat	%	85.5	67.21	78.61
		Cakupan Inspeksi Rumah Sehat yang memenuhi syarat lingkungan	%	71.3	38.01	53.31
Rata-rata Capaian Kinerja						102.78

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.

Pengukuran capaian kinerja pada bagian ini adalah bagaimana capaian realisasi kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah. Tergambar bahwa capaian realisasi tahun 2019 terhadap target akhir masa RPJMD tercatat baru mencapai 99,74 %. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.3.4.
Pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir RPJMD 2019	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun		68	
		Angka kelangsungan hidup bayi		953	993	95.97
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	26.26	100	26.26
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	4.36	60	7.27

		Cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 Tahun	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
		Persentase Orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai Standar	%	100	100	100
		Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	0	100	0
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	‰	0	1	0
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu,poskesdes per satuan penduduk (1.000 pddk)	‰	0.56	0.57	98.25
		Rasio Tenaga medis persatuan penduduk (per 1.000)	‰	0.05	0.16	31.25
		Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk (1.000 Penduduk)	‰	4.95	5.3	93.40
		Cakupan Puskesmas Per Kecamatan	%	322	100	322
		Cakupan puskesmas pembantu per desa	‰	23.29	25.1	92.79
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96.22	100	96.22
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	4.8	0	0
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	32.32	0	0
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	3.77	0	0
		Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	6.48	0	0
		Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	4.81	0	0

		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	80	80	100
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.3	0.22	73.33
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
		Cakupan pemberian makanan Pendamping ASI pada bayi Usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100
		Rasio Posyandu per satuan Balita	‰	21.5	20.8	103.37
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	%	100	100	100
		Cakupan Balita Gizi Kurang	%	1.52	14	921.05
2	Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir	Angka kematian ibu per 100.000 KH	Rasio	186	160	86.02
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95.28	97	98.23
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	%	80.19	95	84.41
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95.4	100	95.4
		Cakupan pelayanan ibu nifas	%	95.41	100	95.41
		Cakupan Komplikasi Kebidanan	%	87.69	85	103.16
		Cakupan peserta KB Aktif	%	66.27	70	94.67
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Rasio	9.53	9.5	99.69
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	58	80	72.5
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99.06	100	99.06
		Angka kematian Balita per 1.000 KH	Rasio	0.18	0.65	361.11
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child immunization	%	88.63	100	88.63
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77.99	90	86.66
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan,	Cakupan Desa Siaga yang terbentuk	%	39.62	70	56.6
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100

	dan penyehatan lingkungan	Persentase Sampel Air yang diperiksa dan memenuhi syarat	%	67.21	100	67.21
		Cakupan Inspeksi Rumah Sehat yang memenuhi syarat lingkungan	%	38.01	100	38.01
Rata-rata Capaian Kinerja						99.74

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.

Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi, Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur telah dilengkapi dengan sejumlah pegawai. Jumlah pegawai kesehatan dan pegawai non kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019.

1) Berdasarkan latar belakang pendidikan

Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Tenaga Medis
1	Dokter Spesialis	1 Orang
2	Dokter Umum	13 Orang
3	Dokter Gigi	3 Orang
4	SPK Perawat	80 Orang
5	DIII Perawat	218 Orang
6	S1 Perawat/Ners	48 Orang
7	SPRG Perawat Gigi	5 Orang
8	DIII Perawat Gigi	27 Orang
9	DI Bidan	38 Orang
10	DIII Bidan	115 Orang
11	D1V/S1 Kebidanan	9 Orang
12	S2 Kesehatan	0 Orang
13	SKM	15 Orang
14	Apoteker	13 Orang
15	SM Farmasi	3 Orang
16	DIII Farmasi	11 Orang
17	S1 Farmasi	8 Orang
18	Analisis Medis (SMK)	1 Orang

19	DIII Analisis Medis	14 Orang
20	S1 Analisis Medis	0 Orang
21	Fisioterapi	2 Orang
22	Refraksi Optisi	1 Orang
23	Anastesy	0 Orang
24	Sanitarian (SSPH)	3 Orang
25	DIII Sanitaian	25 Orang
26	SI Sanitarian	1 Orang
27	Radiologi	1 Orang
28	Nutrisionis (SPAG)	2 Orang
29	DIII Nutrisionis	21 Orang
30	SI Nutrisionis	6 Orang
31	Rekam Medik	3 Orang
32	Sarjana Umum	6 Orang
33	Diploma Umum	2 Orang
34	SMA/SMK	11 Orang
35	SMP	1 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

2) Berdasarkan pangkat/golongan.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	566
3.	Golongan II	136
4.	Golongan I	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya IKU sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat yang Bermutu, MeratadanTerjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	68,2 Tahun	Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.180.277.913	2.091.379.348	95,92		
				Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	29.770.375.712	27.855.569.978	93,57		
				Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	18.265.609.502	17.844.836.391	97,7		
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (kegiatan :Penyemprotan sarang nyamukdan Pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan pengendalian pencegahan PTM)	361.720.000	360.423.000	99,64		
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,22%	Perbaikan Gizi Masyarakat	2.746.999.000	2.740.798.850	99,77		
2.	MenurunnyaKematian Ibu baru melahirkan dan anak baru Lahir	Angka Kematian Ibu	162/10 0.000 KH	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
		Angka Kematian Bayi	9,2/1.0 00 KH					4.343.169.756	2.571.416.000
						Upaya Kesehatan Masyarakat	51.486.617.000	49.397.217.481	95,94
						Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (kegiatan : Pengandaan Vaksin Menular dan Peningkatan Imunisasi)	199.000.000	189.183.607	95,06
Jumlah					109.353.768.883	103.050.824.655	94,23		

4. Dinas Lingkungan Hidup

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Dengan sasaran strategis :“Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau, yang bersih, sehat dan ramah lingkungan”, dengan Sasaran IKU tahun 2019 :

- a. Persentase penanganan sampah, dengan target (8,24%),
- b. Pemantauan status mutu air, dengan target 100%,
- c. Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah kota, dengan target 42,74 % dari luas wilayah kota.

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

- 1) Persentase penanganan sampah, dengan target 8,24%, realisasi target sebesar 5,30%, diketahui capaian kinerja 64,32%, melalui program pengembangan kinerja pengolahan persampahan, kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan dana sebesar Rp.1.331.688.000,-;
- 2) Pemantauan status mutu air, dengan target 100%, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 113,6%, melalui program pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kegiatan pengkajian dampak lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup fasilitasi izin pemakaian kawasan hutan negara fasilitasi izin pemakaian kawasan hutan negara dengan dana sebesar Rp.322.504.000,-. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan dana sebesar Rp.1.0348.290.000,-.
- 3) Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah kota, dengan target 42,74%. realisasi RTH tahun 2019 seluas 3,5 km²/350 Ha atau 61,35 %, sehingga didapat capaian kinerja sebesar 143,54%, melalui program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) dengan kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pembangunan taman kota dan pembangunan turap/tembok penahan, anggaran sebesar Rp.1.143.152.473,66.

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019 mencapai 107,15 % masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

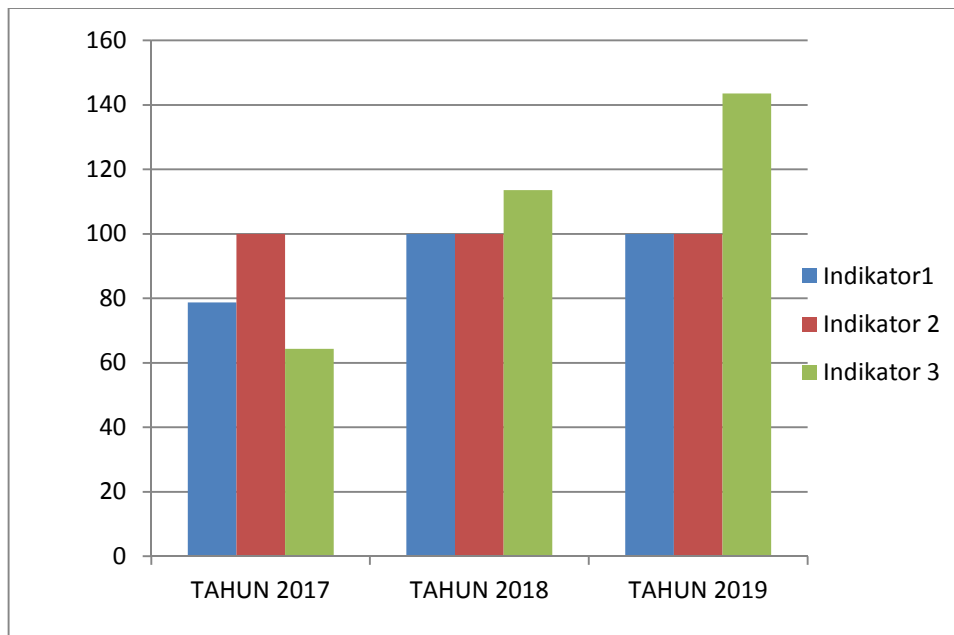
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan pengukuran capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017 %	2018 %	2019		
				Target	Realisasi	%
Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau, bersih, sehat dan ramah lingkungan	➤ Persentasi penanganan sampah	78,76%	100%	8,2%	5,30 %	64,32%
	➤ Pemantauan Status Mutu Air	100%	100 %	100 %	113,6%	113,6%
	➤ Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah kota	100%	100%	42,74%	61,35 %	143,54%

Grafik Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017-2019



Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi Tahun 2019 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis : Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau, yang bersih, sehat dan ramah lingkungan.

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup yang baik di Kabupaten Manggarai Timur. Indikator dari sasaran ini adalah:

- 1) Persentase penanganan sampah, dengan target tahun 2019 sebesar 8,24%, realisasi target sebesar 5,30%, diketahui Capaian Kinerja 64,32%. Perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017 dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 14,44%, Sementara dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 35,68% .
- 2) Pemantauan status mutu air dengan target 100%, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 113,6 %. Perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017 dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,6%, sementara dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 13,6%.

- 3) Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah kota, dengan target 42,74%. realisasi RTH tahun 2019 seluas 3,5 km²/350 Ha atau 61,35 %, sehingga didapat capaian kinerja sebesar 143,54%. Perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017 dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 43,54%, Sementara dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 43,54%.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja dengan RPJMD adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017 %	2018 %	2019			RPJMD
				Target	Realisasi	%	
Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau, bersih, sehat dan ramah lingkungan	➤ Persentase penanganan sampah	78,76%	100%	8,2%	5,30 %	64,32	
	➤ Pemantauan Status Mutu Air	100%	100 %	100 %	113,6%	113,6	
	➤ Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah kota	100%	100%	42,74%	61,35 %	143,54	

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja dan target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran strategis : Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau, bersih, sehat dan ramah lingkungan untuk mengetahui capaian sasaran strategis dengan target Indikator Kunci Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kinerja indikator persentase penanganan sampah, dengan target **8,24%**, dengan menghitung Volume sampah yang ditangani dibagi volume sampah yang dihasilkan, dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur : **280.118** Jiwa (sumber : Proyeksi penduduk 2010-2020, Kabupaten Manggarai Timur dalam Angka 2018).

Potensi timbulan sampah per hari dari jumlah penduduk Manggarai Timur sebesar 112,5 ton, dari perhitungan tersebut di atas diketahui timbulan sampah sebesar 40.897,22 ton/tahun. Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup melayani pengangkutan sampah di wilayah kota Borong dengan lokasi pelayanan di 3 kelurahan dan 2 desa. Estimasi sampah dihasilkan perjiwa per hari sebesar 0,4kg, dengan jumlah penduduk Kota Borong 39.701 Jiwa (Disdukcapil Manggarai Timur 2018), maka sampah yang dihasilkan sebanyak 15.880 kg/hari atau 15,88 ton/hari, dalam satu tahun produksi sampah sebanyak 5.796.346 kg atau 5.796,346 ton. Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 berdasarkan analisis timbunan sampah yang diangkut ke TPA Mbo Lopi, volume sampah kota yang diangkut perhari sebesar 5,94 ton, sehingga diketahui jumlah timbunan sampah yang terangkut selama 1 tahun sebanyak 2.168,1 ton. Capaian kinerja penanganan sampah di Kota Borong sebesar 37,40%, maka dari perhitungan diatas diketahui realisasi target sebesar 5,30%, sehingga diketahui Capaian Kinerja sebesar 64,32%, yang masuk dalam kategori “Cukup Baik”, dengan anggaran sebesar Rp.1.331.688.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.327.956.225,- atau 99,72%.

- 2) Kinerja indikator pemantauan status mutu air, dengan target 100%. Dengan anggaran Rp.322.504.000,- realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.270.363.450,- atau 83,83%. Kinerja pemantauan status mutu air melalui pemantauan mutu airnya dari target di 44 sumur dan sungai realisasi sumur dan sungai yang dipantau mutu airnya mencapai 50 sumur dan sungai nilai realisasi capaian kinerja sebesar 113,6%, masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Dengan perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja maka diketahui tingkat capaian efisiensi dari penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai target pada indikator capaian dilaksanakan secara efektif dan efisien, tingkat capaian tersebut sebesar **+26,22%**.
- 3) Kinerja Indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah kota, dengan target 42,74%. Capaian kinerja ini dengan menghitung target luas RTH publik sebesar 20 % atau seluas 5,70 Ha dari luas wilayah kota untuk RTH publik, luas wilayah kota sesuai data BPN dari 3 kelurahan dan 3 desa 66,79 Km² atau 667,9 Ha, realisasi RTH tahun 2019 seluas 3,5 km²/3,50 Ha atau 61,35 %, sehingga

didapat capaian kinerja sebesar 143,54%, masuk dalam kategori “Sangat Baik” Dengan anggaran Rp.1.143.152.473,66,- realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.040.716.230,66,- atau 91,04 %.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Di samping dukungan dana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, didukung oleh sejumlah Pegawai (PNS dan Tenaga Harian Lepas) dengan berbagai kompetensi serta jenjang pendidikan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan Struktural Keadaan 2019

No	Tingkat Eselon	Jumlah			Ket.
		L	P	Jlh	
1	Eselon II/b	1		1	Kaban
2	Eselon III/a	1		1	Sekretaris
3	Eselon III/b	2	1	3	Kabid
4	Eselon IV/a	4	4	8	Kasubbag/Kasi
5	Non Eselon	5	2	7	
Total		11	6	17	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pendidikan dan Golongan Keadaan 2019

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	-	3	3
2	S1	-	-	10	2	12
3	D3/D2/D1	-	1	1	-	2
4	SMA	-	-	1	-	1
5	SMP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
TOTAL		-	1	12	5	18

Sumber : Arsip data Kepegawaian DLH 2019

Data Tenaga Harian Lepas DLH 2019

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Tenaga Kebersihan Kantor	3	orang
2	Tenaga Administrasi/Keuangan	3	orang
3	Penyuluh Lingkungan/Pendata Lingkungan Hidup	26	orang
4	PKL	40	orang
5	Petugas Retribusi	5	orang
6	Sopir	4	orang
7	Administrasi Lab. Bidang Pengawasan	4	orang
8	Adm/Operator Komputer bidang tata lingkungan	2	orang
9	Adm/Operator Komputer persampahan	2	orang
10	Adm/Operator Komputer konservasi	1	orang
11	Petugas pemeliharaan RTH	13	orang
12	Petugas TPA	9	orang
13	Penjaga malam	2	orang
Jumlah		114	Orang

Sumber: Arsip data Kepegawaian DLH 2019

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Selain Program wajib lingkungan hidup diatas ada Program-program yang mendukung sasaran yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran : jumlah anggaran sebesar Rp.550.616.100,-, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat, total anggaran Rp.1.800.000,- .
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp.5.148.000,-.
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan, anggaran Rp.133.311.000,-.
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor, anggaran sebesar Rp.96.246.000,-.
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, anggaran Rp.1.375.000,-.
 - f. Penyediaan alat tulis kantor, anggaran sebesar Rp.44.252.000,-.

- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, anggaran Rp.12.000.000,- digunakan untuk belanja foto copy sebanyak 35.000 lembar Rp.10.500.000,- dan biaya penjilidan sebanyak 150 jilidan sebesar Rp.1.500.000,-
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, anggaran Rp.636.000,- yang digunakan untuk belanja komponen alat listrik.
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, anggaran sebesar Rp.1.740.000,- dengan rincian belanja langganan harian 2 surat kabar (Flores Pos & Pos Kupang) selama 12 bulan,-
 - j. Penyediaan makanan dan minuman, anggaran sebesar Rp.10.336.000,-
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, anggaran Rp.243.772.100,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, jumlah anggaran sebesar Rp.317.401.000.-, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran sebesar Rp.25.600.000,- digunakan untuk :
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp.291.801.000,-.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatan pendidikan dan pelatihan formal anggaran sebesar Rp.47.500.000,-.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, jumlah anggaran sebesar Rp.1.255.000,-.

5. Dinas Pertanian dan Peternakan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan)	1. Produktifitas Tanaman Pangan : '- Padi sawah '- Jagung '- Padi lading '- Kedelai '- Kacang Hijau	Ton/ha	Produktifitas Tanaman Pangan : '- Padi sawah : 5 ton/ha '- Jagung :5 ton/ha '- Padi ladang : 1,28 ton/ha '- Kedelai : 1,95 ton/ha '- Kacang Hijau:1,19 ton/ha

		'- Ubi Kayu		'- Ubi Kayu: 9 ton/ha
		'- Ubi Jalar		'- Ubi Jalar: 8,4 ton/ha
		2. Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang ditingkatkan : '- Cengkeh Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan (Intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan) : '- Kopi '- Cengkeh	Ha Ha	'- Cengkeh : 20 ha '- Kopi : 1 ha '- Cengkeh: 10 ha
		3. Populasi ternak : a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Kambing e. Babi	Ekor	Populasi ternak : a. Sapi : 17.736 b. Kerbau: 12.877 c. Kuda : 6.722 d. Kambing :34.630 e. Babi: 71.105
B.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	4. Nilai Tukar Petani		100,24

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan target tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
A.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan)	1. Produktifitas Tanaman Pangan : - Padi sawah - Jagung - Padi lading - Kedelai - Kacang Hijau - Ubi Kayu	Ton/ha	Produktifitas Tanaman Pangan : - Padi sawah : 5 ton/ha - Jagung :5 ton/ha - Padi ladang : 1,28 ton/ha - Kedelai : 1,95 ton/ha - Kacang Hijau:1,19 ton/ha - Ubi Kayu: 9 ton/ha	Produktifitas Tanaman Pangan : - Padi sawah : 4 ton/ha - Jagung :4,1 ton/ha - Padi ladang : 1,3 ton/ha - Kedelai : 0,4 ton/ha - Kacang Hijau:0,7 ton/ha - Ubi Kayu: 5,5 ton/ha	Produktifitas Tanaman Pangan : - Padi sawah : 80% - Jagung :80% - Padi ladang : 101,56% - Kedelai : 31,25% - Kacang Hijau:58,82% - Ubi Kayu:61,11%

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2017-2019 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017 (%)	2018 (%)	2019			
					Target	Realisasi	(%)	
A	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan)	1. Produktifitas Tanaman Pangan : '- Padi sawah '- Jagung - Padi ladang '- Kedelai '- Kacang Hijau	98%	78%	Produktifitas Tanaman Pangan : '- Padi sawah : 5 ton/ha	Produktifitas Tanaman Pangan : '- Padi sawah : 4 ton/ha	80	
			71%	84%	'- Jagung :5 ton/ha	'- Jagung :4,1 ton/ha	80	
			100,80 %	101,56%	'- Padi ladang : 1,28 ton/ha	'- Padi ladang : 1,3 ton/ha	101,56	
			39,47%	38,46%	'- Kedelai : 1,95 ton/ha	'- Kedelai : 0,4 ton/ha	31,25	
			71,30%	72,27%	'- Kacang Hijau:1,19 ton/ha	'- Kacang Hijau:0,7 ton/ha	58,82	
			53,44%	57,78%	'- Ubi Kayu: 9 ton/ha	'- Ubi Kayu: 5,5 ton/ha	61,11	
			58,66%	57,14%	'- Ubi Jalar: 8,4 ton/ha	'- Ubi Jalar: 3,8 ton/ha	45,24	
		2.	Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang ditingkatkan :	50%	100%	'- Cengkeh : 20 ha	'- Cengkeh : 20 ha	100
		a.	Ekstensifikasi : Cengkeh					
		b.	Rehabilitasi dan Intensifikasi '- Kopi '- Cengkeh	100%	100%	'- Kopi : 1 ha '- Cengkeh: 10 ha	'- Kopi : 0 '- Cengkeh: 10 ha	50
3.	Populasi ternak :			Populasi ternak :	Populasi ternak :			
	a. Sapi	84,93%	90,70%	a. Sapi : 17.736	a. Sapi : 12.827	72,32		

			b. Kerbau	60,63%	69,82%	b. Kerbau: 12.877	b. Kerbau: 8.117	63,03
			c. Kuda	49,03%	54,12%	c. Kuda : 6.722	c. Kuda : 3.196	47,55
			d. Kambing	150,84 %	101,55%	d. Kambing :34.630	d. Kambing :29.383	84,85
			e. Babi	41,11%	73,04%	e. Babi: 71.105	e. Babi: 59.827	84,14
B	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)	4.	Nilai Tukar Petani	104,55%	106,76%	100,24	106,26	106,01

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

1) Produktifitas Tanaman Pangan.

Indikator kinerja ini diintervensi melalui kegiatan laporan produksi pertanian daerah. Melalui kegiatan ini akan diperoleh data produktifitas komoditi tanaman pangan. Targetnya adalah sebagai berikut padi sawah target 5 ton/ ha realisasi 4 ton/ha, jagung 5 ton/ha realisasi 4,1 ton/ha, padi ladang 1,28 ton/ha realisasi 1,2 ton/ha, kedelai 1,95 ton/ha realisasi 0,2 ton/ha, kacang hijau 1,19 ton/ha realisasi 0,7 ton/ha, ubi kayu 9 ton/ha realisasi 5,5 ton/ha, ubi jalar 8,4 ton/ha realisasi 3,8 ton/ha. Untuk capaian fisik indikator produktifitas tanaman pangan pada tahun 2019 tidak mencapai 100% dari target RPJMD. Namun angka riil produktifitas komoditi tanaman pangan pada tahun 2019 justru mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 terutama untuk padi sawah dan ubi kayu. Angka produktifitas padi sawah tahun 2019 mencapai 4 ton/ha lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya mencapai 3,9 ton/ha, begitu pula untuk ubi kayu angka produktifitas meningkat dari 5,2 ton/ha di tahun 2018 menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2019.

2) **Luas Areal Tanaman Perkebunan Unggulan yang ditingkatkan.**

Indikator ini diintervensi melalui kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan (ektensifikasi). Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan perluasan areal tanam petani yang mendapat bantuan perluasan areal (ekstensifikasi). Target perluasan areal perkebunan pada lahan petani adalah: cengkeh (20 Ha) dengan persentase realisasi fisik kegiatan adalah 100%. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.197.421.250 dengan realisasi sebesar Rp.192.745.450 atau 97,63% dari anggaran yang disediakan. Pada tahun 2019 Kabupaten Manggarai Timur juga memperoleh tambahan bantuan yang bersumber dari dana APBD I untuk kegiatan perluasan/peremajaan kopi arabika seluas 10 Ha. Selain itu juga Kabupaten Manggarai Timur memperoleh bantuan dari APBN untuk kegiatan perluasan areal pengembangan tanaman cengkeh seluas 200 Ha dan perluasan areal kopi arabika seluas 200 Ha, realisasi capaian bantuan baik APBD I maupun APBN adalah sebesar 100%.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan). Indikator ini diintervensi melalui kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan luas areal tanam rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan. Target perluasan areal perkebunan pada lahan petani adalah: kopi (1 Ha) dan cengkeh (10 Ha). Persentase capaian terhadap target sebesar 50 %. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.53.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.32.500.000,- atau 60,86% dari anggaran yang disediakan. Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh tidak direalisasikannya kegiatan rehabilitasi kopi seluas 1 ha yang disebabkan oleh barang yang disediakan oleh penyedia tidak sesuai spesifikasi teknis. Pada tahun 2019 Kabupaten Manggarai Timur juga memperoleh tambahan bantuan yang bersumber dari dana APBN untuk kegiatan rehabilitasi cengkeh (300 Ha). Realisasi capaian bantuan APBN adalah sebesar 100%.

3) **Target Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019** adalah sebagai berikut: sapi 17.736 ekor realisasi 12.827 ekor, kerbau 12.877 ekor realisasi 8.117 ekor, kuda 6.722 ekor realisasi 3.196 ekor, kambing 34.630 ekor realisasi

29.383 ekor dan babi 71.105 ekor realisasi 59.827 ekor. Populasi ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 tidak mencapai target RPJMD, hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi iklim yang ekstrim di tahun 2019 dimana musim kemarau sangat panjang, sehingga berdampak pada ketersediaan pakan ternak. Populasi ternak tahun 2019 mengalami pertumbuhan negatif untuk semua komoditi bila dibandingkan dengan populasi tahun 2018, kecuali ternak kambing yang mengalami pertumbuhan positif walaupun nilainya kecil.

Pada tahun 2019 jumlah ternak yang diantarpulaukan dari Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut : Sapi (800 ekor), Kerbau (250 ekor), Kuda (200 ekor), sedangkan jumlah ternak yang diantarpulaukan pada tahun 2018 adalah: Sapi (800 ekor), Kerbau (250 ekor), dan Kuda (200 ekor).

- 4) **Nilai Tukar Petani** : 100,24. Indikator ini bertujuan untuk mengukur Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2019. Perhitungan NTP dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Pusat. Angka realisasi yang dicantumkan dalam laporan ini merupakan angka kutipan yang bersumber dari publikasi resmi Biro Pusat Statistik Pusat. Data-data yang dicantumkan merupakan data kondisi bulan Desember 2019 untuk Provinsi NTT. Adapun realisasi NTP untuk Provinsi NTT bulan Desember 2019 sebesar 106,26 dari target 100,24. Pada tahun 2018 ditargetkan NTP sebesar 100.24 realisasinya 107,02. Dengan demikian Capaian NTP tahun 2019 keadaan bulan Desember lebih rendah dibanding keadaan bulan Desember tahun 2018.

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

1) Berdasarkan Pendidikan

Sarjana (S2)	: 1 orang
Sarjana (S1)	: 49 orang
Sarjana Muda	: 22 orang
SLTA	: 29 orang
SLTP	: 1 orang
SD	: 4 orang

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan IV	: 4 orang
Golongan III	: 67 orang
Golongan II	: 30 orang
Golongan I	: 4 orang

3) Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional

Eselon II	: 1 orang
Eselon III	: 6 orang
Eselon IV	: 18 orang
Staf	: 28 orang
Jabatan Fungsional	: 52 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program /kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah:

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	55.000	27,50
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.300.000	10.665.000	80,19
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	213.270.250	205.123.500	96,18
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.560.000	38.446.300	99,71
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	60.000.000	100,00
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.411.000	45.408.000	99,99
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	5.000.000	100,00
Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah	298.750.000	287.024.233	96,08
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	322.393.000	305.273.000	94,69
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional	112.368.250	106.167.500	94,48
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	180.315.000	165.065.000	91,54
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3.500.000	3.040.000	86,86

6. Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target yang harus dicapai tahun 2019 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	60
	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	95

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan target yang dicapai adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	60	60	100
	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	95	95	100

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018			Capaian Kinerja 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	15	15	100	60	60	100
	Jumlah Koperasi Aktif	88	88	100	95	95	100

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator RPJMD	Target RPJMD tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capaian %
1	Pengembangan kewirausahaan Pelatihan agrobisnis dan pelatihan pencelupan dan pewarna alami	60	60	100
2	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pembinaan pengawasan dan penghargaan bagi koperasi aktif	95	95	100

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Melihat capaian indikator kinerja utama pada tahun 2019 yaitu mencapai 100%, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah memanfaatkan semua sumber daya yang ada demi meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan serta pelayanan kepada masyarakat dengan total PNS 31 orang dengan rincian:

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	31
2.	THL Dinas PERKOP dan UKM	109
JUMLAH		140

Susunan Pegawai Berdasarkan :

a. Golongan

No.	Golongan	PNS	Jumlah
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	3	Orang
2.	Golongan III	25	Orang
3.	Golongan IV	3	Orang
Jumlah		31	Orang

b. Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II B	1
2.	Eselon III A	1
3.	Eselon III B	4
4.	Eselon IV	17
Total		23 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dari indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan tingkat capaiannya 100% melalui program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu :

- 1) Program : Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Kegiatan: Pelatihan agrobisnis dan pelatihan pencelupan dan pewarna alami
- 2) Program : Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Kegiatan : Pembinaan pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi

Program /kegiatan yang mendukung IKU diatas adalah:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN	Rp.1.012.475.400	Rp.987.127.500	97,4%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 14.940.000	Rp.8.635.500	57,8%
	3. Penyediaan jasa PemeliharaanPerijinan, kendaraan DinasOperasional	Rp. 5.000.000	Rp.2.750.000	55%
	4. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Rp.290.847.000	Rp.284.616.000	97,8%
	5. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Rp. 195.020.000	Rp.189.660.750	97,2%
	6. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 212.772.000	Rp.209.810.250	98,6%
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 36.421.200	Rp. 36.421.200	100%
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 20.000.000	Rp.19.999.800	99,9%
	9. Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	100%
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.000.000	Rp.2.040.000	68%
	11. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 19.000.000	Rp.17.720.000	93,2%
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 141.100.000	Rp.141.099.000	99,9%
	13. Monitoring dan Evaluasi	Rp.70.375.000	Rp.70.375.000	100%
B.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 79.077.000	Rp.78.179.500	98,8%
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Rp.79.077.000	Rp.78.179.500	98,8%

7. Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan indikator sebagai berikut :

No	Sasaran program	Indikator kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat yang layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	DAK	120 Unit
			DAU	36 Unit
		Meningkatnya Jumlah Tanah Pemda yang Bersertifikat	DAU	21 Bidang
		Persentase pengaduan Masyarakat yang terselesaikan /Terfasilitasi	DAU	90%

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja dibandingkan dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Kategori
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	120 (DAK)	120	100	Sangat Berhasil
			36 (DAU)	36	100	
		Total	156	156	100	Sangat berhasil
	2	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan /terfasilitasi	90%	90%	100	Sangat Berhasil
	3	Meningkatnya jumlah tanah Pemda yang bersertifikat	21 Bidang	29 Bidang	138,09	Sangat Berhasil

c) **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	2018 (%)	2019		
			Target	Realisasi	%
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	100	120 (DAK) 36 DAU)	120 Unit	100
				36 Unit	100
		118,98	156 Unit	156 unit	100
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	90	90	100
	Meningkatnya jumlah tanah PEMDA yang bersertifikat	113,33	21	29	138,09

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa pada tabel perbandingan target dan realisasi IKU Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 menunjukkan bahwa antara capaian kinerja target dan realisasi mencapai 112,69%, sedangkan pada tabel realisasi perbandingan capaian tahun 2017-2018 dibandingkan dengan target realisasi IKU 2019, perlu dijelaskan bahwa:

- Pada IKU terpenuhinya kebutuhan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, target IKU Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2019 total 156 Unit dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2018 capaian target IKU bantuan perumahan sejumlah 385 unit dari target 362 Unit dengan capaian 118,98%, perbedaan capaian dikarenakan pada tahun 2018 Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan alokasi Dana DAK/ DAU sebesar Rp.5.847.124.500, sedangkan pada Tahun 2019 mendapatkan alokasi dan DAK/DAU sebesar Rp.4.337.500.000.- penurunan alokasi anggaran ini berpengaruh pada persentase capaian target tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

- Pada IKU Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan, capaian target IKU Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 mencapai 100%. Realisasi capaian pada tahun 2018 juga mencapai 100%, hal ini dikarenakan setiap tahun persentase pengaduan yang terselesaikan atau terfasilitasi memenuhi target.
- Pada IKU meningkatnya jumlah tanah Pemda yang bersertifikat, persentase capaian target pada tahun 2019 mencapai 138,09 % tingginya persentase capaian IKU pada indikator tersebut dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 dikarenakan adanya penambahan target 9 sertifikat tanah PEMDA pada anggaran perubahan di Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019. 9 (Sembilan) sertifikat ini terdiri 2 sertifikat tanah Nangarawa, 2 tanah pendidikan dan 5 untuk tanah kesehatan. Adanya penambahan target pada anggaran perubahan ini merupakan prioritas dan bersifat mendesak serta penting, karena sertifikat merupakan salah satu syarat penting dalam pembangunan 3 unit Puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Timur sedangkan untuk tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Nangarawa dan tanah pendidikan pengsertifikatan ini sebagai bagian dari bentuk pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Adapun capaian kinerja dibandingkan dengan RPJMD adalah:

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target dalam RPJMD	2019	
				Realisasi	%
1	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	156 Unit	156 unit	100
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	90%	90	100
		Meningkatnya jumlah tanah PEMDA yang bersertifikat	24 bidang	29	138,09

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah realisasinya mencapai target:

- Pada indikator terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2019 realisasinya mencapai 100%
- Pada indikator meningkatnya jumlah tanah pemda yang bersertifikat realisasi tahun 2019 realisasi mencapai 138,09%. Pengsertifikatan tanah tiap tahunnya ditarget 60 dokumen pertahun sesuai dengan MoU dengan instansi vertikal di dalam daerah dalam hal ini Kantor Pertanahan Nasional, namun pada tahun 2019 pengsertifikatan hanya 29 bidang karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Pada indikator penyelesaian konflik mencapai 100%. Penyelesaian konflik mencapai 100 persen dengan jumlah kasus yang dimediasi berjumlah 4 kasus pada tahun 2019.

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya yang ada pada Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Sumber Daya Manusia/ ketersediaan SDM :

- Ketersediaan SDM di Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 berjumlah 21 PNS dan 1 CPNS dengan total 22 orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 25 orang. Dengan ketersediaan SDM yang memadai program/kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Ketersediaan sumber daya pendukung /sarana prasarana
Sumber daya pendukung/ sarana prasarana yang ada pada Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari jumlah meja biro 23 meja, kursi 50 unit, laptop 8 unit, printer 9 unit, sepeda motor 7 unit dan 1 unit roda 4. Ketersediaan sumber daya sarana prasarana tersebut sangat mendukung dalam pencapaian kinerja walaupun masih kekurangan sarana laptop yang masih terbatas namun tidak mengurangi efektifitas dan efisiensi kerja dalam mencapai target.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun program /kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yakni:

KETERANGAN	:		
PROGRAM	:	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	573.883.400
KEGIATAN		Penyediaan jasa surat menyurat	7.787.900,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.	3.000.000,00
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	200.118.500
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	41.057.100
		Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.900.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.436.900
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.200.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.792.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000
		Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	232.591.000
PROGRAM	:	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	98.977.000
KEGIATAN		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	98.977.000
PROGRAM	:	Pelaporan dan capain Kinerja dan Keuangan	6.648.000
KEGIATAN		Penyusunan Laporan capaian Kinerja, dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.648.000
PROGRAM	:	Lingkungan Sehat Perumahan	175.335.000
		Penataan Kawasan Permukiman	175.335.000
PROGRAM	:	Pengembangan Perumahan	728.640.800
KEGIATAN		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	728.640.800
PROGRAM	:	Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	189.584.000
KEGIATAN		Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	189.584.000
PROGRAM	:	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	521.208.000
KEGIATAN		Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	521.208.000
TOTAL PAGU			2.294.276.200

- Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran tahun 2019 Dinas Pertanahan,Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019 sebesar Rp.2.294.276.200,-. Anggaran tersebut merupakan faktor pendukung dalam pencapaian target kegiatan. Dengan adanya penambahan anggaran pada DPA Perubahan Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019, sasaran strategis yang akan dicapai realisasinya telah mencapai target sesuai yang diharapkan.
- Target program dan kegiatan Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja program pembangunan perumahan layak huni mencapai 100% dengan target dan realisasi 156 unit. Faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah adanya dukungan personil SDM dalam memonitoring proses pelaksanaan pembangunan

rumah bantuan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya dukungan penambahan anggaran monitoring pada DPA Perubahan Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019, selain itu dibentuk tim teknis pelaksana kegiatan pembangunan rumah layak huni yang melibatkan lintas sektor dari pemerintah desa/kelurahan serta aparat keamanan dalam hal ini melibatkan TNI yakni para Babinsa dari setiap desa penerima bantuan.

- Pada Program dan Kegiatan Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan/terfasilitasi, target Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian indikator IKU mencapai 100% dengan target dan realisasi 90% masalah yang telah terselesaikan atau terfasilitasi. Faktor pendukungnya pencapaian target tersebut adalah adanya dukungan personil SDM dalam memonitoring, memfasilitasi dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat. Dalam upaya melakukan penyelesaian dan fasilitasi proses pengaduan masyarakat dilakukan koordinasi lintas sektoral baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan pihak aparat keamanan. Koordinasi lintas sektoral ini dilakukan dalam upaya mediasi setiap penyelesaian sengketa pengaduan masyarakat.
- Pada program dan kegiatan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah realisasi target mencapai 138,09% dengan target 21 sertifikat dan realisasi 29 sertifikat. Faktor pendukungnya pencapaian target tersebut adalah adanya dukungan personil SDM dalam memfasilitasi dan menyelesaikan setiap usulan pembuatan sertifikat Tanah Pemerintah Daerah.

Adanya penambahan anggaran perubahan pada Dinas Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 juga merupakan faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut. Dalam upaya melakukan sertifikat tanah Pemerintah Daerah dilakukan kerja sama bersama Kantor Pertanahan Kabubapten Manggarai Timur dengan membuat MoU tahunan penyelesaian sertifikat tanah Pemerintah Daerah dan juga dilakukan koordinasi lintas sektoral lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam proses pengukuhan kembali untuk mendapatkan bukti penyerahan tanah yang asli.

8. Dinas Perikanan dan Kelautan

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

- ❖ Indikator jumlah produksi perikanan dengan target yang ingin dicapai sebesar 4.500 ton.
- ❖ Indikator cakupan bina kelompok nelayan dengan target yang ingin dicapai sebanyak 10 kelompok.
- ❖ Indikator jumlah konsumsi ikan dengan target yang ingin dicapai sebesar 20 kg/kap/thn.
- ❖ Indikator jumlah produksi perikanan kelompok nelayan dengan target yang ingin dicapai 3.375 ton.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja dibandingkan perjanjian kinerja atau target adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan)	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	4.500	4.318,13	95,95%
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	10	14	140,00 %
	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	20	20,27	101,35%
	Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	3.375	3.238,59	95,95 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata – rata realisasi pencapaian 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019 adalah 108,31%.

c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:

Sasaran	Indikator	2017 (%)	2018 (%)	2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan)	Jumlah Produksi Perikanan	136,46 %	122,64 %	4.500 Ton	4.318,13 Ton	95,95 %
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	174,00 %	56,00%	10 Klpk	14 Kelompok	101,35%
	Jumlah Konsumsi Ikan	134,64 %	122,33%	20 kg/kap/thn	20,27 kg/kap/thn	140,00%
	Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	135,14 %	124,29%	3.375 Ton	3.238,59 Ton	95,95%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi pencapaian 4 (empat) indikator tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 maka pencapaian tahun 2019 mengalami kenaikan.

d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pada dasarnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019.

Karena visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur yang dapat menjawab visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur yang sesuai dengan tupoksi DKP adalah terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, cerdas, sehat, dan ramah lingkungan melalui Optimalisasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah produksi perikanan, jumlah produksi perikanan kelompok nelayan, cakupan bina kelompok nelayan dan jumlah konsumsi ikan. Berikut adalah IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 :

Daftar IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	2.620,5	2.480,6	3.010,4	3.230,3	3.500
2	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	11	12	13	14	15
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	50	50	50	50	50
4	Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	1.834,35	1.736,42	2.107,21	2.261,21	2.450

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

No	IKU	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Produksi Perikanan	4.500 Ton	4.318,13 Ton	95,95 %
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	10 Kelompok	14 Kelompok	140,00 %
3	Jumlah Konsumsi Ikan	20 kg/kap/thn	20,27 kg/kap/thn	101,35%
4	Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	3.375 Ton	3.238,59 Ton	95,95%

e) **Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.**

Capaian kinerja keseluruhan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 adalah 108,31 % dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 99,24% dengan kategori Sangat Berhasil. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh faktor pengalokasian anggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja serta memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan terutama peran para pendamping kelompok nelayan dan pembudidayaan ikan.

Adapun Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	33

f) **Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian target 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan maka Tahun 2019 juga Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 4 (empat) program pendukung dan 12 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.670.994.000 dan direalisasikan sebesar Rp.1.650.586.147 (98,77%). Berikut ini realisasi anggaran tiap Program dan Kegiatan pendukung :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 1.803.500,- (90,17%)

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 9.600.000

Realisasi Anggaran : Rp. 9.600.000,- (100,00%)

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp. 620.371.500

- Realisasi Anggaran : Rp. 605.425.000,- (97,59%)
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 17.097.500
Realisasi Anggaran : Rp. 17.097.500,- (100,00%)
5. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 30.000.000,- (100%)
6. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 17.500.000
Realisasi Anggaran : Rp. 16.938.250,- (96,79%)
7. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 168.300.000
Realisasi Anggaran : Rp. 166.452.897,- (98,90%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 44.900.000
Realisasi Anggaran : Rp. 44.850.000,- (99,88%)
2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 4.600.000,- (92,00%)
3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 80.241.000
Realisasi Anggaran : Rp. 77.996.000,- (97,20%)
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 3.500.000
Realisasi Anggaran : Rp. 3.500.000,- (100,00%)

d) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1. Kegiatan : Pengadaan Sarana Pemasaran Bergerak Roda 2

Alokasi Anggaran : Rp. 672.484.000

Realisasi Anggaran : Rp. 672.323.000,- (99,99%)

9. Dinas Sosial

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas Pemerintah Daerah memuat:

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja IKU Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	80

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan target 80%.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	80	61,11	76,38

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya adalah 61,11% dari target 80%.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2017- 2019

No	Sasaran	Indikator	2017 (%)	2018 (%)	2019		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.	Persentase PMKS skala kabupaten/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	25	72,57	80	61,11	76,38

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi capaian IKU pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 76,38% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 25% dan tahun 2018 sebesar 72,57%.

Penyebab dari meningkatnya capaian pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah suksesnya advokasi anggaran Dinas Sosial melalui APBD I dalam pendanaan KUBE.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Hasil pengukuran kinerja periode RPJMD 2014- 2019 terhadap IKU diketahui bahwa persentase PMKS skala kabupaten/ kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya adalah 76,38% atau 3,62% lebih rendah dibandingkan target akhir RPJMD 80%.

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai**

Pada tahun anggaran 2019 pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 18 orang serta 18 orang THL dengan berbagai kompetensi serta jenjang pendidikan sebagai berikut :

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial pada tahun 2019 diketahui bahwa kebutuhan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur adalah 59 pegawai. Jumlah pegawai yang sudah terisi sebanyak 18 pegawai atau 30,5%. Hal ini dapat menimbulkan beban tersendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menyelenggarakan urusan wajib di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

f) **Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

1. **Sasaran meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin**

Terkait dengan sasaran di atas, ada 1 (Satu) IKU yang menjadi komponen utama yang menentukan capaian kinerja dari sasaran ini.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	620.058.925	604.653.425	98%
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.820.000	2.820.000	100%
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	112.037.000	111.912.050	100%
	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan	241.830.000	229.213.250	95%
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.394.000	17.140.100	88%
	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.300.000	2.300.000	100%
	g. Penyediaan alat tulis kantor	36.789.925	36.786.525	100%
	h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.060.000	6.060.000	100%
	i. Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	15.000.000	100%
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	138.678.000	138.471.500	100%

	k. Monitoring dan evaluasi	44.150.000	43.950.000	100%
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan	1.849.900	1.849.900	100%
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	1.849.900	1.849.900	100%
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya lainnya	634.740.000	622.171.850	98%
	a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	444.926.000	433.476.850	97%
	b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	59.615.000	59.615.000	100%
	c. Koordinasi pengelolaan beras sejahtera	130.199.000	129.080.000	99%
4	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	177.990.000	155.690.000	87%
	a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	28.130.000	28.105.000	100%
	b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	149.860.000	127.585.000	85%
5	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	160.726.275	160.644.275	100%
	Pembinaan jaminan hidup bagi penyandang cacat dan lansia terlantar .	160.726.275	160.644.275	100%
6	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	54.765.700	54.765.700	100%
	a. Pembentukan dan pelantikan pengurus kelompok Karang Taruna	34.317.700	34.317.700	100%
	b. Pendataan dan inventarisasi lembaga- lembaga sosial	20.448.000	20.423.000	100%

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja merupakan persentase capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 yang dianalisis dan dievaluasi berdasarkan penetapan kinerja. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah : “Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan”. Untuk urusan kearsipan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “Mewujudkan Pengelolaan Tata Kearsipan” Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Target kinerja (kualitas)	Indikator kinerja	Target Kuantitas
1	Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Umum	8,61%
2.	Terwujudnya Tata Kearsipan yang Akuntabel	Jumlah OPD yang Arsipnya didata dan ditata	2 OPD

Untuk mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan” yang telah direncanakan, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan perpustakaan.
3. Meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan.

Indikator utama pelaksanaan urusan perpustakaan adalah persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum yang dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan rencana target tahun 2019 target yang direncanakan 8,61% atau 18.500 orang. Realisasi capaian jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan

umum adalah 14.037 orang. Dengan demikian persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum tahun 2019 adalah 6,54% dengan persentase capaian kinerja terhadap target kinerja 75,96%.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tata kearsipan yang akuntabel dilaksanakan melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip. Target Rencana Kerja Tahunan program 2019 adalah 2 (dua) OPD. Realisasi capaian pelaksanaan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 2 (dua) OPD. Persentase capaian terhadap target kinerja 100%. Pada tahun 2019 capaian kinerja dari program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 100% . Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang arsipnya didata dan ditata pada tahun anggaran 2019 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dan Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Target kinerja (kualitas)	Indikator kinerja	Target Kuantitas	Realisasi Capaian	% capaian
1	Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Umum	8,61%	6,54 %	75,96
2.	Terwujudnya Tata Kearsipan yang Akuntabel	Jumlah OPD yang Arsipnya didata dan ditata	2 OPD	2 OPD	100%

Untuk mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan” yang telah direncanakan, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan perpustakaan.
3. Meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan.

Indikator utama pelaksanaan urusan perpustakaan adalah persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum yang dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan rencana target tahun 2019 8,61% atau 18.500 orang. Realisasi capaian jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum adalah 14.037 orang. Dengan demikian persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum tahun 2019 adalah 6,54% dengan persentase capaian kinerja terhadap target kinerja 75,96%.

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tata kearsipan yang akuntabel dilaksanakan melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip. Target Rencana Kerja Tahunan program 2019 adalah 2 (dua) OPD. Realisasi capaian pelaksanaan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 2 (dua) OPD. Persentase capaian terhadap target kinerja 100%. Pada tahun 2019 capaian kinerja dari program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip 100% . Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang arsipnya didata dan ditata pada tahun anggaran 2019 adalah:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

c) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah:

No	Sasaran	Indikator kinerja	2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Umum	8,61%	2,63 %	30,55	8,61%	6,54 %	75,96
2.	Terwujudnya Tata Kearsipan yang Akuntabel	Jumlah OPD yang Arsipnya didata dan ditata	6 OPD	6 OPD	100	2 OPD	2 OPD	100 %

Tahun 2018 target kinerja persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum 8,61%, realisasi capaian kinerja 2,63% dengan persentase capaian kinerja terhadap target kinerja 30,55%. Sedangkan persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum pada tahun 2019 adalah 6,54% dari target yang ditetapkan mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Capaian kinerja indikator terwujudnya tata kearsipan yang akuntabel tahun 2019 adalah 2 OPD dari target kinerja yang ditetapkan yakni 2 OPD. Persentase realiasi kinerja terhadap terget kinerja adalah 100%

Untuk mencapai sasaran strategis yang direncanakan kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelola dokumen/ arsip dan pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah.

d) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan RPJMD.

Perbandingan capaian kinerja dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator kinerja	2019			Target akhir RPJMD 2019	Capaian s/d 2019 terhadap RPJMD
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Umum	8,61%	6,54 %	75,96	8,61	89,47%
2.	Terwujudnya Tata Kearsipan yang Akuntabel	Jumlah OPD yang arsipnya didata dan ditata	2 OPD	2 OPD	100%	19 OPD	17 OPD

Target indikator kinerja persentase jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum tahun 2019 adalah 8,61% atau 18.500 orang pertahun dengan realisasi target 6,54% atau 14.037 orang. Jumlah target Renstra periode 2014 s/d 2019 adalah 87.500 pengunjung dengan target rata- rata kunjungan pertahun pada periode adalah 17.500 orang/ tahun.

Sampai dengan tahun 2019 realisasi capaian indikator kinerja persentase jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum 85.566 orang atau rata-rata kunjungan masyarakat pertahun 17.113 atau **7,97%**. Persentase realisasi capaian kinerja indikator terhadap target sampai dengan tahun 2019 adalah **89,47 %**. Target RPJMD indikator kinerja jumlah OPD yang arsipnya didata dan ditata sampai dengan tahun 2019 berjumlah 19 OPD. Realisasi target kinerja terwujudnya tata kearsipan yang akuntabel tahun 2019 berjumlah 2 OPD. Sampai dengan tahun 2019 realisasi target kinerja jumlah OPD yang arsipnya didata dan ditata berjumlah 17 OPD. Persentase realisasi capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap RPJMD adalah **89,47%**.

e) Analisis Efisien Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Capaian Kinerja

Efisiensi yang dievaluasi adalah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada berupa alokasi anggaran untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun Anggaran 2019.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur memiliki sumber daya aparatur sebagai pelaksana tugas untuk merencanakan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2019 jumlah aparatur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil : 19 Orang
- Tenaga Non PNS : 29 Orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Total Realisasi	
			Rp	%
1	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a	Pelayanan jasa surat menyurat	1.500.000	1.500.000	100
B	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	7.656.600	5.578.500	72,86
c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.900.000	1.266.000	43,66
d	Penyediaan jasa administrasi keuangan	235.546.500	234.246.750	99,45

e	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.750.000	1.750.000	100
f	Penyediaan alat tulis kantor	24.5690.700	24.492.200	99,72
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.110.650	6.110.650	100
h	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.770.000	900.000	50,85
I	Penyediaan makanan dan minuman	12.790.000	12.790.000	100
J	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.100.000	160.098.720	99,99
k	Penyediaan alat kebersihan kantor	20.578.450	20.134.950	97,84
2.	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a	Pengadaan Gedung Kantor	46.000.000	26.500.000	57,61
b	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	49.727.000	49.715.347	99,98
3.	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
A	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	2.625.500	2.619.500	99,77
4.	Program: Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.413.000	59.988.000	99,30
	Pengolahan bahan pustaka	251.229.350	247.110.690	98,36
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	50.101.500	50.026.500	99,85
	Penyediaan bahan pustaka dan perpustakaan umum daerah	222.793.000	222.293.000	99,78
	Perpustakaan digital	134.733.000	133.927.670	99,40

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Penetapan kinerja akan menuntun kepala dinas dan seluruh bidang bagian organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menuju capaian kinerja yang diinginkan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Penetapan Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan masih kurang realistis, namun penetapan kinerja ini juga bermanfaat untuk tolak ukur pencapaian kinerja sesuai target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, sasaran kerjanya adalah **Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** yang diterapkan melalui indikator kinerja dengan target dan realisasi pencapaiannya, sebagai berikut :

- 1) Indikator jumlah penerbitan KTP- el dan indikator jumlah penerbitan KK adalah dua buah indikator yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dalam pelaksanaannya kedua indikator ini diimplementasikan melalui program penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan pelaksanaan KTP-el. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.244.075.000,-

Target dan realisasi kegiatan tahun 2019 yang bersumber dari anggaran ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah penerbitan KTP-el ditargetkan 10.000 KTP- el dan terealisasi 14.030 KTP-el;
 - Jumlah penerbitan Kartu Keluarga ditargetkan 8.300 lembar dan terealisasi 11.966 lembar KK.
- 2) Indikator jumlah penerbitan akta kelahiran, jumlah penerbitan akta pengakuan anak, jumlah penerbitan akta perkawinan, jumlah penerbitan akta kematian dan indikator jumlah penerbitan akta perceraian adalah indikator yang saling terkait yang dalam pelaksanaannya dibawah bidang pencatatan sipil. Adapun indikator- indikator ini

diimplementasikan dalam program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu yang didukung anggaran sebesar Rp.291.787.000,-. Realisasi kegiatan tahun 2019 yang bersumber dari anggaran ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah penerbitan akta kelahiran ditargetkan 5.500 lembar terealisasi 10.627 lembar
- Jumlah penerbitan akta pengakuan anak ditargetkan 1 lembar terealisasi 0 lembar.
- Jumlah penerbitan akta perkawinan ditargetkan 150 pasang terealisasi 464 pasang (928 lembar)
- Jumlah penerbitan akta kematian ditargetkan 10 lembar terealisasi 260 lembar
- Jumlah penerbitan akta perceraian ditargetkan 1 pasang terealisasi 2 pasang (4 lembar)

3) Indikator jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi online adalah indikator dari kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dari program penataan administrasi kependudukan yang dalam penerapannya didukung oleh anggaran Rp.171.693.000,-. Telah dilaksanakan di 9 kecamatan dengan sistem mobile.

4) Indikator jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan adalah indikator dari kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dari program SAK terpadu dengan didukung oleh anggaran Rp.60.280.000,-. Telah dilaksanakan untuk 9 kecamatan.

Selain indikator-indikator diatas, tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan program dan kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tupoksinya. Berikut kami tampilkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan dari indikator-indikator yang melekat pada tupoksi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

Program yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai timur adalah :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran dianggarkan sebesar Rp.428.459.700,-
- 2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan sebesar Rp.24.650.000,-

- 3) Program Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dianggarkan Rp.1.700.000,-
- 4) Program penataan administrasi kependudukan dianggarkan Rp.737.505.500,-
- 5) Program penataan sistem administrasi kependudukan (SAK) secara terpadu dianggarkan Rp.1.201.732.000,-.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah Penerbit KTP	Keping	10,000	14,030	140.30
2		Jumlah Kartu Keluarga	Lembar	8,300	11,966	144.17
3		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Lembar	5,500	10,627	193.22
4		Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak	Lembar	-	-	-
5		Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	Pasang	150	464	309.33
6		Jumlah Akte Kematian	Lembar	30	260	866.67
7		Jumlah Akta Perceraian	Pasang	1	2	200
8		Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi kependudukan berbasis online	Kecamatan	9	9	100
9		Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan	Kecamat	9	9	100

c) Pengukuran Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun sebelumnya

Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Satuan	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Penerbit KTP	Keping	10,000	10,433	104.33	10,000	36,007	360	10,000	14,030	140.30
Jumlah Kartu Keluarga	Lembar	8,300	11,850	142.77	8,300	23,128	279	8,300	11,966	144.17
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Lembar	5,500	27,021	491.29	5,500	14,297	0	5,500	10,627	193.22
Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak	Lembar	1	-	0.00	1	-	-	-	-	-
Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	Pasang	150	565	376.67	150	302	201	150	464	309.33
Jumlah Akte Kematian										
Jumlah Akta Perceraian	Lembar	10	91	910.00	20	379	1,895	30	260	866.67
Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi kependudukan	Pasang	1	2	200	1	1	100	1	2	200

berbasis online										
Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan	Kecamatan	9	9	100	9	9	100	9	9	100

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Pelaksanaan	Jumlah Penerbit KTP	Keping	10,000	14,030	140.30
2	Reformasi Birokrasi dan	Jumlah Kartu Keluarga	Lembar	8,300	11,966	144.17
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Lembar	5,500	10,627	193.22
4	Birokrasi	Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak	Lembar	-	-	-
5		Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	Pasang	150	464	309.33
6		Jumlah Akte Kematian	Lembar	30	260	866.67
7		Jumlah Akta Perceraian	Pasang	1	2	200
8		Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi kependudukan berbasis online	Kecamatan	9	9	100
9		Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan	Kecamatan	9	9	100

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Sumber Daya yang Telah dicapai

Fungsi utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah:

- Merumuskan kebijakan teknis lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangnya
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya

- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0
3.	Tenaga Harian Lepas (THL)	26

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada gambaran indikator- indikator yang dibawah ini :

- 1) Indikator jumlah penerbitan KTP- el dan indikator jumlah penerbitan KK adalah dua buah indikator yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dalam pelaksanaannya kedua indikator ini diimplementasikan melalui program penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan pelaksanaan KTP-el dan kegiatan pelayanan dokumen kependudukan. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan total anggaran sebesar Rp.551.729.000,-.
- 2) Indikator jumlah penerbitan akta kelahiran, jumlah penerbitan akta pengakuan anak, jumlah penerbitan akta perkawinan, jumlah penerbitan akta kematian, dan indikator jumlah penerbitan akta perceraian adalah indikator yang saling terkait yang dalam pelaksanaannya dibawah bidang pencatatan sipil. Adapun indikator-indikator ini diimplementasikan dalam program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu yang didukung anggaran sebesar Rp.599.411.500,-
- 3) Indikator jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi online menargetkan 9 kecamatan dan sudah tiga tahun terakhir menerapkan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi **offline (pelayanan mobile)** dan pelayanan *online* terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sangat bergantung dari kebijakan pusat dalam hal ini Dirjen Adminduk untuk dapat mengaktifkan kembali fasilitas pelayanan berbasis online di kecamatan-kecamatan sehingga mempercepat pelayanan kependudukan.

Dan indikator ini adalah indikator dari kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dari program penataan administrasi kependudukan yang dalam penerapannya didukung oleh anggaran sebesar Rp.171.693.000,-

4) Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur menargetkan 9 kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun 2019 telah dijalankan di tingkat kabupaten dengan pagu anggaran Rp.60.682.000,-.

Serta akuntabilitas program dan kegiatan lainnya yang mendukung capaian target kinerja tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program / Kegiatan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	425,106,550	3,353,150	99.22
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	-	100.00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22,020,000	1,980,000	91.75
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	82,899,150	159,850	99.81
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57,000,000	-	100.00
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19,393,200	119,600	99.39
f	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1,500,000	-	100.00
g	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,456,200	700	100.00
h	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,070,000	5,000	99.98
i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	1,006,000	-	100.00
j	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	129,200,000	1,050,000	99.19
k	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	42,562,000	38,000	99.91
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	24,000,000	650,000	97.36
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24,000,000	650,000	97.36
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1,700,000	-	100.00
a	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1,700,000	-	100.00
4	Penataan Adminstrasi Kependudukan	729,845,850	7,659,650	98.96
a	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	289,213,600	2,573,900	99.12
b	Pengelolaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	168,228,650	3,464,350	97.98
c	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29,950,000	-	100.00
d	Pelaksanaan e-KTP	242,453,600	1,621,400	99.34

5	Penataan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		1,197,179,110	4,552,890	99.62
	a	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	327,982,110	1,067,890	99.68
	b	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	60,357,000	325,000	99.46
	c	Pelayanan Dokumen Kependudukan	307,369,000	285,000	99.91
	d	Penerbitan Dokumen Kependudukan	419,191,000	2,875,000	99.32
	e	Pengelolaan Sistim Informasin Administrasi Kependudukan	82,280,000	-	100.00
Jumlah			2,377,831,510	16,215,690	99.32

Total anggaran dalam mendukung target kinerja yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni dengan total Rp.2.394.047.200,- dan terealisasi Rp.2.377.831.510,- atau terserap sebesar Rp.99,32%.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun target tahun 2019 yakni:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	2

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	2	2	100%

Dari sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan indikator kinerja utama rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat dengan jumlah yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 2 kelompok dan telah direalisasikan sebanyak 2 kelompok, ini artinya capaian indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur telah mencapai angka 100%.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

asaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		2017		2018		2019		
		Realisasi	%	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2	100%	2	100%	2	2	100%

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ditargetkan pada setiap desa/kelurahan akan terdapat dua kelompok binaan yang dibina dan didampingi secara intensif pada setiap tahun, sehingga akumulasi kelompok yang dibina sampai dengan tahun 2019 berjumlah 1.048 kelompok, jumlah ini merupakan akumulasi dari kelompok yang dibina pada setiap tahun dengan target dua kelompok pada masing-masing desa/kelurahan, sehingga terjadi peningkatan jumlah kelompok yang dibina dari tahun ke tahun yaitu ditetapkan rata-rata sebanyak 353 kelompok setiap tahun pada setiap desa/kelurahan. Pada tahun 2017 target kelompok yang dibina rata-rata 2 kelompok sehingga sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.056 kelompok yang merupakan akumulasi kelompok yang dibina dari tahun –tahun sebelumnya.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Dalam perhitungan pembagian rata-rata, maka kondisi awal RPJMD jumlah kelompok SPKP dan UEP berjumlah 1.465 kelompok, dalam perkembangan sebagai hasil dari

pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang ada maka sampai dengan tahun 2018 terdapat sebanyak 2.334 Kelompok yang terdiri atas 2.207 Kelompok SPKP dan 127 kelompok UEP yang tersebar pada 176 wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur.

Target pada akhir RPJMD terdapat 10 kelompok yang dibina, sehingga diharapkan akan terdapat 10 kelompok dikali 176 desa/kelurahan sehingga berjumlah 1.760 Kelompok, termasuk 295 Kelompok baru dan tidak terhitung bagi 279 kelompok yang dinilai sudah mandiri dari total kelompok sampai dengan kondisi terakhir sebanyak 2.334.

e. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Keberhasilan pencapaian target dalam setiap satuan unit jika mengedepankan pengendalian internal. Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) Sarjana (S2) : 1 orang
 - b) Sarjana (S1) : 18 orang
 - c) D3 : 1 orang
 - d) SLTA : 4 orang
- 2) Pangkat/Golongan
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 16 orang
 - c) Golongan II : 4 orang
- 3) Jabatan Struktural
 - a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 12 orang
- 4) Staf : 6 orang

- ✓ Pada setiap wilayah desa terdapat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan agen Pemberdayaan Masyarakat yang mulai tahun 2015 dikenal dengan sebutan Pendamping Lokal Desa (PLD).
- ✓ Adanya tenaga pendamping dalam memantau pelaksanaan kegiatan bantuan yang bersifat pemberdayaan dan teknis melalui keberadaan Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten dan Pendamping Desa (PD) pada tingkat Kecamatan.

- ✓ Aparat menjadi semakin matang dan kompeten dalam pelaksanaan tugas dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan fasilitator bagi desa dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksanaan yang mengikutinya.

f. Analisa Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran strategis dan pencapaian kinerja tahun 2019 didukung dengan 10 (sepuluh) program dengan kegiatan dan anggaran masing-masing sebagaimana terinci pada tabel penetapan kinerja tahun 2019 dengan indikator utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur.

	Program /Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 467,262,150
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	2,780,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,750,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	221,050,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19,496,300
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,115,850
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,540,000
8	Penyediaan Bahan bacaan	
9	Penyediaan makan minum rapat	15,000,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	81,550,000
11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Dalam Daerah	79,380,000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 35,610,000
1	Pengadaan Peralatan kerja	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35,610,000
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 3,500,000
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD	3,500,000
4.	Pembinaan Dan Fasilitas	Rp 210,908,500
1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Rp 90,087,500
2	Fasilitasi Pembinaan Administrasikeuangan desa	Rp 120,821,000
5.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 103,961,350
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha ekonomi masyarakat	Rp 103,961,350
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp 108,288,000
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa melalui Bulan	108,288,000

	Bakti Gotong Royong.	
2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	-
7.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 33,448,600
	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.	33,448,600
8.	Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Rp 1,000,000,000
	Pelaksanaan 10 Program pokok PKK.	1,000,000,000
9.	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa Dan Kelurahan	Rp 319,315,000
	Jasa Pelayanan Pengelola Administrasi Kelurahan	319,315,000
10	Pemekaran Wilayah Desa Dan Kelurahan	Rp. 88,281,000
	Fasilitasi Pemekaran Wilayah Desa	88.281.000

13. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja tahun 2019 yakni:

No	Sasaran strategis	Indikator	Target 2019
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	90%
2	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan target sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi (Rp)	(%)
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	90%	90%	100%
2	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA	ADA

Dari hasil capaian kinerja tahun 2019 sasaran 1 target indikator ketaatan terhadap RTRW adalah 90% dengan realisasi 90% dan pencapaian presentase capaiannya

adalah 100% dan capaian kinerja pada sasaran 2 target indikator jumlah dokumen perencanaan adalah ada dengan realisasi ada dan pencapaian presentase adalah 100%.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan tahun Sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator	Tahun 2018	Capaian tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	90	90	90	100
2	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA	ADA	ADA

Dari tabel diatas tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja yaitu :

Sasaran I: Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2018 mencapai 90% sedangkan pada tahun 2019 tingkat capaiannya 90% atau sangat baik.

Sasaran II : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dari tahun 2018 dan tahun 2019 tingkat capaiannya mencapai 100% atau sangat baik.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran strategis	Indikator	Tahun 2019			Capaian sampai dengan tahun 2019 (%)
			Target	Realisasi	%	
1	Terwujudnya Perencanaan, dan Pengendalian Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	90	90	100	100
2	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	ADA	ADA	ADA	ADA

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

Aspek Kepegawaian

1. Menurut Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat pendidikan	Jumah
1.	SLTA	1
2.	Diploma	1
3.	S1	16
4.	S2	2

2. Menurut Golongan :

No	Golongan	Jumlah orang
1.	II	1
2.	III	17
3.	IV	2

3. Menurut Eselonering:

No	Tingkat eselonering	Jmlh org
1.	II/a	-
2.	II/b	1
3.	III/a	1
4.	III/b	4
5.	IV/a	5
6.	IV/b	-

4. Menurut Pendidikan Perjenjangan :

No	Jumlah diklat	Jumlah orang
1.	PIM II	1
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	1

5. Menurut Jabatan :

1. **Kepala Badan** : 1 orang
2. **Sekretaris** : 1 orang
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan : 1 orang
 - ❖ Sub Bagian Tata Usaha : -
 - ❖ Sub Bagian Keuangan dan Sarana : -
3. **Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat** : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang Kesehatan, P2KBP3A dan PMD : 1 orang

- ❖ Sub Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Sekretariat Daerah : -
 - 4 Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang PU dan PR : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang Perhubungan & Kominfo :-
 - ❖ Sub Bidang Pertanahan, PR dan KP dan Kecamatan :-
 - 5 Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang Keuangan, PM,PPO,dan Perpustakaan dan Kearsipan: 1 orang
 - ❖ Sub Bidang LH, Pertanian, Kelautan Perikanan Dan Sekretariat DPRD : -
 - ❖ Sub Bidang Perdagangan Koperasi & UKM dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi : -
 - 6 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1 orang
 - ❖ Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian : -
 - ❖ Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi : -
 - ❖ Sub Bidang Evaluasi Kinerja Penelitian & Pengembangan: -
- Staf : 9 orang

Jumlah : 20 orang

- Sasaran 1, terwujudnya perencanaan tata ruang, ditangani oleh 7 orang pegawai yang terdiri dari 3 orang PNS dan 4 orang Tenaga Harian Lepas.
- Sasaran 2, meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah, ditangani oleh 17 orang PNS dan 16 orang THL.

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun program/kegiatan yang mendukung tercapainya IKU adalah:

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	839.039.999	815.790.431	97.23
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.655.000	2.588.000	97.48
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.700.004	4.290.000	44.23
	3. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.669.396	24.224.200	87.55
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	206.745.000	199.133.450	96.32

	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.229.099	59.030.000	98.01
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	5.000.000	4.850.000	97.00
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.836.500	38.848.000	97.52
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	21.988.000	87.95
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan	1.920.000	1.800.000	93.75
	11. Penyediaan Makan dan Minum Rapat	32.000.000	31.270.000	97.72
	12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	428.285.000	427.768.781	99.88
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.035.000	211.511.000	93.99
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	25.535.000	25.535.000	100
	2. Pengadaan Meubeleur	30.000.000	30.000.000	100
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000	30.621.000	76.55
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120.000.000	115.855.000	96.55
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	4.500.000	4.500.000	100
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.100	6.000.000	100
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD	6.000.100	6.000.000	100
	Jumlah	1.070.075.099	1.033.301.431	96.56

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja tahun 2019 yang dimuat dalam perjanjian kinerja yakni:

Sasaran	Indikator	Target
Tertanggulangnya bencana secara dini dan komprehensif	1. Persentase pengurangan resiko bencana	
	- Jumlah tenaga pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana yang terjadi	39 orang
	- Jumlah rambu peringatan dini akan bahaya bencana	8 rambu

	- Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana	9 kali
	2. Persentase Penanganan korban bencana	
	- Jumlah logistik yang disalurkan kepada korban bencana	30 paket
	- Jumlah Posko Bencana dan SDM yang Menangani siaga bencana BPBD	1 posko
	- Jumlah Tim Reaksi Cepat	45 orang
	3. Persentase Penanganan pasca bencana	
	- Jumlah bahan bantuan bangunan perumahan bagi korban bencana	1 paket
	- Jumlah koordinasi dan fasilitasi diwilayah pasca bencana	100%

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan target sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Tertanggulangnya bencana secara dini dan komprehensif	1. Persentase pengurangan resiko bencana		
	- Jumlah tenaga pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana yang Terjadi	39 orang	39 orang
	- Jumlah rambu peringatan dini akan bahaya bencana	8 rambu	8 rambu
	- Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana	9 kali	9 kali
	2. Persentase Penanganan korban bencana		
	- Jumlah logistik yang disalurkan kepada korban bencana	30 paket	30 paket
	- Jumlah Posko Bencana dan SDM yang Menangani siaga bencana BPBD	1 posko	1 posko
	- Jumlah Tim Reaksi Cepat	45 orang	45 orang
	3. Persentase Penanganan pasca bencana		
	- Jumlah bahan bantuan bangunan perumahan bagi korban bencana	1 paket	1 paket
- Jumlah koordinasi dan fasilitasi diwilayah pasca bencana	100%	100%	

c) **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya:

SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Tertanggulangi nya bencana secara dini dan komprehensif	1. Persentase pengurangan resiko bencana		
	- Jumlah tenaga pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana yang terjadi	100%	100%
	- Jumlah rambu peringatan dini akan bahaya bencana	100%	100%
	- Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana	100%	100%
	2. Persentase Penanganan korban bencana		
	- Jumlah logistik yang disalurkan kepada korban bencana	100%	100%
	- Jumlah Posko Bencana dan SDM yang Menangani siaga bencana BPBD	100%	100%
	- Jumlah Tim Reaksi Cepat	100%	100%
	3. Persentase Penanganan pasca bencana		
	- Jumlah bahan bantuan bangunan perumahan bagi korban bencana	100%	100%
- Jumlah koordinasi dan fasilitasi diwilayah pasca bencana	100%	100%	

d) **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah yakni:

Sasaran	Indikator	2019			Target akhir RPJMD 2019	Capaian 2019 terhadap Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	%		
Tertanggulangnya bencana secara dini dan komperhensif	1. Persentase pengurangan resiko bencana					
	▪ Jumlah tenaga pemantau dan penyebarluasan informasi potensi bencana.	39 orang	39 orang	100	195 orang	195 orang
	▪ Jumlah rambu peringatan bencana.	9 rambu	9 rambu	100	117 rambu	107 rambu
	▪ Pengurangan resiko bencana	9 kali	9 kali	100	9 kali	9 kali
	2. Persentase penanganan korban bencana dengan indikator: Jumlah bantuan logistik untuk korban bencana	30 paket	30 paket	100	100 paket	70 paket
	Pembentukan dan pelatihan tim reaksi cepat	45 orang	45 orang	100	45 orang	45 orang
	3. Persentase penanganan pasca bencana					
	▪ jumlah bahan bantuan bangunan perumahan	1 paket	1 paket	100	5 paket	5 paket
	▪ jumlah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana	8 paket	8 paket	100	120 paket	105 paket

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

1) Berdasarkan Pendidikan

- a. Sarjana (S1) : 14 orang
- b. Sarjana Muda : 5 orang
- c. SLTA : 2 orang

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan
 - a. Golongan IV : 2 orang
 - b. Golongan III : 16 orang
 - c. Golongan II : 3 orang
- 3) Berdasarkan Jabatan/Eselonering
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III : 4 orang
 - c. Eselon IV : 9 orang
 - d. Staf : 7 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja yang diharapkan. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Program/kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, meterai, dan benda pos lainnya	135 exemplar
	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan jasa listrik dan air	12 bulan
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 OB
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 OB
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan dan perawatan peralatan kerja	18 Unit
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	65.024 lembar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	2 SKH
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanandan minuman Selama 12 Bulan	600 dos

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan penunjang aktivitas kantor	6 buah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dan oprasional pada kantor BPBD Kab. Manggarai Timur	14 unit
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan BPBD	4 laporan
4.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		
	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi Bencana.	Jumlah Tenaga pemantauan & Penyebarluasan informasi Potensi Bencana	39 orang
	Pembuatan Rambu peringatan Bencana	Jumlah rambu peringatan dini akan bahaya bencana	9 rambu
	Pengadaan Bahan Bantuan Bangunan Perumahan bagi Korban Bencana	Jumlah bahan bantuan bangunan perumahan	1 paket
	Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana	8 paket
	Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah sosialisasi di 9 kecamatan	9 kali
	Pembentukan dan operasional posko siaga bencana	Tersedianya aparatur yang menangani posko siaga bencana	1 posko
	Pengadaan kebutuhan logistic untuk korban bencana	Tersedianya logistik untuk korban bencana	40 paket
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat	Jumlah tim reaksi cepat	45 orang

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2019 yakni:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019
Terbukanya Aksesibilitas bagi warga terhadap Informasi Pembangunan”	Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.	7500 jam
	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	1 Stasiun
	Website milik pemerintah daerah	Ada
	Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 Kali/tahun
	Pameran/expo	1 Kali
	Media baru seperti website (media online)	(365 hari/12 bln)
	Cakupan kerja sama dan kemitraan antara Pemda dengan Media Massa	-
	Media Interpersonal Seperti Pertunjukan Rakyat	1 Kali
	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin Spanduk dan Baliho	1 Kali
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	9 Kelompok

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yakni:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi	%
“Terbukanya Aksesibilitas bagi warga terhadap Informasi Pembangunan”	Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.	7500 jam	7500 jam	100
	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	1 Stasiun	1 Stasiun	100
	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	100
	Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali/tahun	12 Kali/tahun	100

Pameran/expo	1 Kali	1 Kali	100
Media baru seperti website (media online)	(365 hari/12 bln)	(329 hari/12 bln)	90
Cakupan kerja sama dan kemitraan antara Pemda dengan Media Massa	-	-	-
Media Interpersonal Seperti Pertunjukan Rakyat	1 Kali	1 Kali	100
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin Spanduk dan Baliho	1 Kali	1 Kali	100
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	9 Kelompok	2 kelompok	22,2

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yakni:

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2018			Capaian Kinerja Tahun 2019		
		Target Tahun 2018	Realisasi	%	Target Tahun 2019	Realisasi	%
“Terbukanya Aksesibilitas bagi warga terhadap Informasi Pembangunan”	Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.	7500 jam	7500 jam	100	7500 Jam	7500 jam	100
	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	1Stasiun	1 Stasiun	100	1Stasiun	1 Stasiun	100
	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
	Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 Kali/tahun	12 Kali/tahun	100	12 Kali/tahun	12 Kali/tahun	100

Pameran/expo	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
Media baru seperti website (media online)	(setiap hari/12 bln)	(setiap hari/12 bln)	90	(365 hari/12 bln)	(329 hari/12 bln)	90
Cakupan kerja sama dan kemitraan antara Pemda dengan Media Massa	1 Kali	1 kali	100	-	-	-
Media Interpersonal Seperti Pertunjukan Rakyat	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin Spanduk dan Baliho	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	2 Kelompok	2 Kelompok	100	9 Kelompok	2 Kelompok	22,2

d) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam pembangunan jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2019			Target RPJMD	Realisasi s/d 2019
		Target Tahun 2019	Realisasi	%		
"Terbukanya Aksesibilitas bagi warga terhadap Informasi Pembangunan"	Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.	7500 Jam	7500 jam	100	7500 Jam	100
	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	1 Stasiun	1 Stasiun	100	1 Stasiun	100
	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	100	Ada	100

Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 Kali/tahun	12 Kali/tahun	100	48	100
Pameran/expo	1 Kali	1Kali	100	5	80
Media baru seperti website (media online)	(365 hari/12 bln)	(329 hari/12 bln)	90	1825	53
Cakupan kerja sama dan kemitraan antara Pemda dengan Media Massa	-	-	-	5 Kali	40
Media Interpersonal Seperti Pertunjukan Rakyat	1 Kali	1 Kali	100	3 kali	100
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruangan Seperti Buletin Spanduk dan Baliho	1 Kali	1 Kali	100	5 kali	40
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	9 Kelompok	2 Kelompok	22,2	9 Kelompok	66,6

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran "**Terbukanya Aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan**" dengan 10 indikator kinerja utama mengalami peningkatan yang sangat baik yaitu mencapai kinerja sebesar **81,22 %** atau dikategorikan **Berhasil** pada tahun 2019. Sedangkan capaian kinerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019 hanya 10 (Sembilan) indikator yang ditetapkan dan dijalankan dan mencapai kinerja sebesar **77,96%** atau dikategorikan **Cukup Berhasil**.

Dari indikator capaian kinerja yang ditetapkan dan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Durasi penyiaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Indikator ini tidak ada dalam RPJMD, namun ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.

Pencapaian dari Indikator Kinerja ini adalah 100% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 7.500 jam. Kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah belum meratanya jangkauan siaran radio di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Langkah yang akan diambil untuk Tahun 2019 adalah dengan menambah kekuatan daya pemancar agar jangkauan siaran menjadi lebih luas dan merata. Indikator Kinerja ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2015 dengan target yang sama seperti pada tahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Jumlah penyiaran Radio/ TV lokal

Capaian kinerja untuk Indikator ini adalah sebesar 100% yaitu dengan adanya 1 Stasiun Radio (LPPL Radio Kab. Manggarai Timur). Salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yaitu masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi. Sehubungan hal tersebut, salah satu metode pelayanan yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur adalah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, antara lain melalui siaran LPPL Radio Kabupaten Manggarai Timur.

3. *Website* milik pemerintah daerah

Tingkat capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90 %. Akun website resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sejak Tahun 2015 dengan nama domain www.manggaraitimurkab.go.id. Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 *Website* ini masih beroperasi dengan menyajikan data-data/profil Pemda serta informasi terbaru tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kab. Manggarai Timur. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD sebesar 53 %.

4. Media massa seperti majalah, radio dan televisi

Capaian Kinerja pada Indikator ini sebesar 100 %. Pada Indikator ini hampir sama sifat kegiatannya yakni mencakup tersedianya informasi melalui media massa seperti Radio dan surat kabar atau media elektronik lainnya selama 12 bulan/1, sedangkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 mencapai 100%.

5. Pameran/Expo

Indikator ini sudah berjalan selama 4 kali terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, capaian tahun ini sebesar 100 %. Pelaksanaan Pameran Pembangunan tahun 2019 berlangsung sederhana karena keterbatasan anggaran. Kegiatan ini dipadukan dengan HUT Kabupaten Manggarai Timur dengan menampilkan atraksi, perlombaan – perlombaan antar pelajar dan umum. Capaian Target kinerja RPJMD mencapai 80%.

6. Media baru seperti *website (media online)*

Target indikator ini adalah Setiap Hari (12 bulan) dan target yang terealisasi 329 Hari (12 bulan) sehingga capaian indikator kinerja adalah 90 %, capaian ini sama dengan tahun 2018, belum mencapai 100% karena beberapa faktor diantaranya hari libur dan gangguan jaringan FO (*Fiber Optik*) yang menyebabkan *website* mati /*off*. *Website* Pemda Manggarai Timur ini tampil dengan menu-menu yang memuat informasi dasar tentang Pemda atau memuat Profil Pemda serta berbagai macam berita dan ulasan menarik tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur. *Website* menjadi sebuah ‘Rumah Informasi’ atau pusat data pembangunan yang tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat Manggarai Timur tetapi semua orang tanpa kecuali. Dengan alamat *website* www.manggaraitimurkab.go.id, Media ini hadir sebagai media publikasi Pemda Manggarai Timur dengan menyajikan berita dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan program/kegiatan strategis dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), meskipun harus diakui bahwa konten dasar sebuah *website* milik Pemda belum maksimal dimuat karena lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah. Selain *website* Dinas Kominfo juga memiliki akun-akun medsos resmi sebagai media publikasi dan *update* informasi diantaranya Manggarai Timur TV (youtube), *media centre* & *Facebook*. Capaian kinerja RPJMD adalah sebesar 53 %.

7. Cakupan kerja sama dan kemitraan antara Pemda dengan Media Massa.

Indikator ini dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan target indikator berjumlah 2 SKH, sedangkan tahun 2019 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran. Kerjasama dan kemitraan dengan Media Massa merupakan strategi bermedia untuk menyebarluaskan informasi, untuk mensosialisasikan serta mempromosikan berbagai agenda, kebijakan dan keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk advertorial.

Kerjasama dan kemitraan ini berdampak sangat strategis, sebab advetorial Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, mampu menjangkau segmentasi pembaca SKH Pos Kupang dan Flores Pos.

Dengan demikian agenda, kebijakan dan keberhasilan pembangunan, diharapkan tidak hanya menjadi informasi tetapi juga menjadi pengetahuan, bagi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, daratan Flores hingga berskala Propinsi NTT. Keuntungan lainnya adalah, Advetorial Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, menjadi bagian dari agenda media 2 SKH. Dengan demikian materi Advetorial, dipersepsikan positif oleh khalayak pembaca. Karena itu kegiatan ini tidak hanya memenuhi instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi juga mempromosikan serta membangun kepercayaan publik kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Capaian Kinerja RPJMD sebesar 40%.

8. Media Interpersonal Seperti Pertunjukan Rakyat

Indikator ini mempunyai target 1 kali /tahun dan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan ‘Pameran Pembangunan’ Kabupaten Manggarai Timur TA. 2019. Kegiatan Pertunjukan Rakyat berupa festival kebudayaan ‘Sanda dan Mbata’ adalah warisan kebudayaan Manggarai di Kabupaten Manggarai Timur. Festival Sanda dan Mbata diharapkan, mampu melestarikan seni tradisi kepada generasi muda. Sebagai kearifan lokal, Sanda dan Mbata memiliki efektivitas komunikasi yang sangat luar biasa, sebab segala informasi, disampaikan dalam bentuk yang diplomatis, intim, memiliki makna yang mendalam dan menghibur.

Sanda dan Mbata, diharapkan menjadi pola komunikasi pembangunan yang efektif. Serta bisa direplikasi oleh masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan.

Target indikator ini adalah 1 kali/tahun dengan capaian indikator kinerja mencapai 100%.Indikator telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sehingga mencapai kinerja RPJMD 100%.

9. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin Spanduk dan Baliho

Target indikator 1 kali dengan realisasi 100%. Media luar ruangan pada tahun 2019 menggunakan media komunikasi baliho untuk mengkampanyekan Pelaksanaan Pemilu presiden damai. Pemasangan media luar ruangan ini didistribusikan di sembilan

Kecamatan.

Isu politik damai dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2019, menjadi isu sentral dalam pelaksanaan kegiatan Media Luar Ruangan. Target RPJMD sebanyak 3 kali namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan Renstra Kominfo baru dilaksanakan pada tahun 2018 karena pada tahun sebelumnya tidak ditargetkan sehingga hanya mencapai 40 %.

10. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan

Target Indikator KIM adalah 9 kelompok dan terealisasi 2 kelompok KIM atau 22,2 %. Indikator ini menjadi target indikator kinerja Dinas Kominfo Tahun 2019 untuk menjawab salah satu indikator yang menjadi Standar Pelayanan Minimal dalam RPJMD. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dirasa strategis sebagai partner pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dalam konteks informasi pembangunan Manggarai Timur. Capaian target kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2019 adalah 66,6 %.

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sebaran pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Strata I dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	20	22 PNS
2	Diploma	1	
3	SLTA	1	

2) Data Pegawai menurut Golongan :

	Golongan / Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV :		4 PNS
	Golongan IV/c		
	Golongan IV/b	2	
	Golongan IV/a	2	
2	Golongan III :		16 PNS
	Golongan III / d	2	
	Golongan III / c	11	

	Golongan III / b	1	
	Golongan III / a	2	
3	Golongan II :		2 PNS
	Golongan II / d	-	
	Golongan II / c	1	
	Golongan II / b	-	
	Golongan II / a	1	

3) Komposisi Jabatan menurut Eselonering

No	Tingkat Eselon	Jumlah	Keterangan
I	Eselon II :		
	Eselon II/b	1	
II	Eselon III :		
	Eselon III/a	1	
	Eselon III/b	4	
III	Eselon IV :		
	Eselon IV/a	11	
	Eselon IV/b	-	

b) Komposisi menurut Diklat Fungsional

- PNS yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang & Jasa berjumlah: 3 orang
- PNS yang memiliki sertifikat Diklat Sandi Man berjumlah: 1 Orang.

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1	2		4	5
1	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata		%	66,87
		Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota baik dan sedang	%	66,87
2	Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata		%	75.22
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	55,24
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,19

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1	2		4	5
3	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal		%	304.62
		Rasio Jaringan Irigasi	%	304.62

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target		Realisasi	Capaian (%)
			Satuan	Jumlah		
1	2		4	5	6	7
1	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata		%	66,87	88.33	132.09
		Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota baik dan sedang	%	66,87	88.33	132.09
2	Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata		%	75.22	80.95	117.70
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	55,24	85.97	155.63
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,19	75.93	79.77
3	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal		%	304.62	91.13	29.92
		Rasio Jaringan Irigasi	%	304.62	91.13	29.92

Capaian yang meliputi keberhasilan dan kegagalan dari tiap-tiap indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis : Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata

IKU : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan kabupaten/kota. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.

Total panjang jalan Kabupaten Manggarai Timur adalah 1.281,29 KM. Dari target pencapaian tahun 2019 sebesar 66.87% telah dilakukan peningkatan jalan sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang menjadi 88.33% dengan capaian 132.09%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat **tinggi**.

b. Sasaran Strategis : Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata

IKU :

1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

Indikator Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum secara berkelanjutan yang dapat diakses masyarakat setempat. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah ketersediaan air baku dari instalasi pengolah air dibagi dengan kebutuhan air baku seluruh Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.

Pada tahun 2019 jumlah ketersediaan air baku di Kabupaten Manggarai Timur sejumlah 395.853,45 M³/tahun dari kebutuhan 460.447,50 M³/tahun, dengan persentase pemenuhan 85.97%. Dari target yang ditetapkan 55.24% pada tahun 2019, dilakukan pembangunan air Air minum bersih sehingga pencapaian pemenuhan air minum bersih 155,63%.Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat **tinggi**.

2. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi digunakan untuk mengukur rumah akses rumah tangga terhadap sanitasi yang sehat. Namun demikian pada indikator ini sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, maka akses sanitasi yang dimaksud adalah Rumah tinggal bersanitasi dalam hal ini pemenuhan Toilet. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tinggal bersanitasi (bertolilet) dibagi dengan jumlah rumah tinggal di Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.

Pada tahun 2019 jumlah rumah tinggal di Kabupaten Manggarai Timur 57.638 rumah tinggal. Dari target yang ditetapkan 95.19% pada tahun 2019, dilakukan pembangunan sanitasi sehingga persentase pemenuhan 75.93% atau pencapaian 79.77%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat **tinggi**.

c. **Sasaran Strategis : Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal**

IKU : Rasio Panjang Jaringan Irigasi

Indikator rasio panjang jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian di Kabupaten Manggarai Timur. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang saluran irigasi dibagi dengan luas lahan budidaya pertanian seluruh Kabupaten Manggarai Timur dikali dengan 100%.

Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2019 adalah 9240,06 Ha. Pada tahun 2019 panjang saluran irigasi di Kabupaten Manggarai Timur 8420.31 Meter. Rasio jaringan irigasi tahun 2019 adalah 312.48 %. Dari target yang ditetapkan 304.62 % pada tahun 2019, dilakukan pembangunan saluran irigasi dan pemeliharaan sehingga panjang saluran irigasi bertambah dan pencapaian 102.158%. Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan kinerja yang baik dengan predikat **Sangat Baik**.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017 (%)	TAHUN 2018 (%)	2019		
					Target	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7
1	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	76.89	55,79	66,87	95.07	142.17
2	Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	55.24	55,24	55,24	85.97	155.63
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	84.68	91,73	95,19	75.93	79.77
3	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	81.94	221,35	304,62	312.48	102.158

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

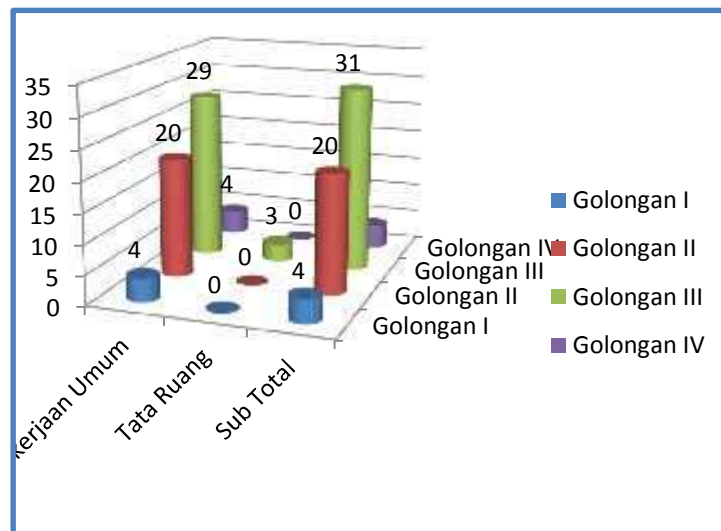
No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target		Realisasi	Capaian (%)
			Satuan	Jumlah		
1	2		4	5	6	7
1	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota baik dan sedang	%	66,87	88.33	132.09
2	Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata		%	75.22	80.95	117.70
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	55,24	85.97	155.63
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,19	75.93	79.77
3	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal	Rasio Jaringan Irigasi	%	304.62	91.13	29.92

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai**

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh pegawai dengan klasifikasi, yaitu :

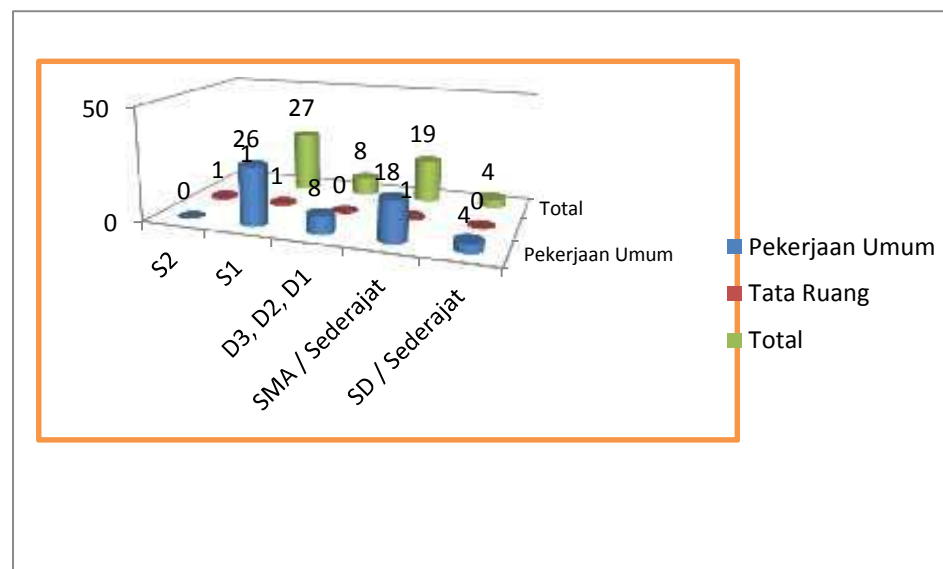
a. Berdasarkan Golongan

Grafik I.1
Data ASN berdasarkan golongan



b. Berdasarkan Pendidikan

Grafik I.2
Data ASN berdasarkan pendidikan



f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	%
1	2	3		10	11		10
1	Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten / kota baik dan sedang	66,87	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	144.912.331.853,50	133.920.918.383	92.42
				Pembangunan Jalan (DAU)	76.509.226.366,50	68.758.936.041	89.87
				Pembangunan Jembatan	6.506.142.000	5.582.695.020	85.81
				Pembangunan Jalan (DAK)	61.896.963.487	59.579.287.322	96.26
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	600.000.000	600.000	0.10
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	600.000.000	600.000	0.10
2	Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	55,24	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	23.988.477.584,50	20.904.153.633	74.74
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,19	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5.716.560.000	5.416.660.000	94.75
				Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.217.600.000	2.727.051.720	64.66
				Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAU)	7.337.316.669,50	6.737.444.296	91.82
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75.000.000	59.248.000	79
				Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SANIMAS)/Pendamping	61.200.000	40.754.461	66.59
				Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)/Pendamping	326.525.000	204.351.574	62.58
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	2.633.328.000	2.633.328.000	100
				Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasaarana Air Limbah	949.967.000	611.776.280	64.40
				Peningkatan Pelayanan BLUD SPAM	2.670.980.915	2.473.539.302	92.61
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	420.976.470	420.976.470	100
				Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	420.976.470	420.976.470	100

3	Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal	Rasio Jaringan Irigasi	75,24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	17.379.714.159	10.773.367.150	79.62
				Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	433.606.000	394.544.000	90.99
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)	6.637.184.700	321.923.727	4.85
				Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air dan Irigasi Secara Partisipatif (DAU)	898.803.000	859.142.104	95.59
				Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	4.280.280.200	4.258.608.415	99.49
				Pembangunan Jaringan Irigasi (DAU)	5.129.840.259	4.939.148.904	96.28
JUMLAH					187.301.500.067	166.020.015.636	88.64

17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif 65%	%	55
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Satu Petugas di Setiap Desa/Kelurahan	petugas/desa	1
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan di Setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	%	100
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	%	3,5
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	%	10
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	%	70
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	87
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	Desa/ Petugas	2
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	%	100

		Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	77
		Rata-Rata anak per Keluarga	orang	2
		Ratio Akseptor KB	%	50
		Cakupan Peserta KB Aktif	%	65
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 100%	%	100
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 50%	%	50
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	%	100
		Ratio KDRT	%	0,06
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	97,56
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	38
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	76
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	%	7,25

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	5	
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif 65%	55%	76%	138
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Satu Petugas di Setiap Desa/Kelurahan	1 ptg/ds	1 ptg/ds	100
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan di Setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	3,5%	3,77%	86
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	10%	10,3%	99
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70%	76%	109
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87%	97%	111

		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	2 desa/petugas	2 desa/petugas	100
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100
		Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	77%	86%	90
		Rata-Rata anak per Keluarga	2	3	80
		Ratio Akseptor KB	55%	76%	138
		Cakupan Peserta KB Aktif	65%	76%	116
2	Meningkatnya PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 100%	100%	100%	100%
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	100%	100%	100
		Ratio KDRT	0,06%	0,05%	120

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
		Jumlah Peserta KB Aktif	65%	79%	122	65%	75%	115%
		INDIKATOR TURUNAN DARI IKU						
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif 65%	60%	79%	132	60%	75%	125%
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Satu Petugas di Setiap Desa/Kelurahan	1 petugas/desa	1 ds/ptgs	100	1 petgs/desa	1 ds/ptgs	100
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan di Setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100	100%	100%	100
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	3.50%	3.77%	92	3.50%	3.77%	92
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	10%	10.30%	99	10%	10.30%	99

		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70%	76%	108	70%	76%	108
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87%	97%	111	87%	97%	111
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	2 Desa/Petugas	2 ds/ptgs	100	2 Desa/Petugas	2 ds/ptgs	100
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100	100%	100%	100
		Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	76%	86%	89	76%	86%	89
		Rata-Rata anak per Keluarga	2 orang	2,48 orang	80	2 orang	2,48 orang	80
		Ratio Akseptor KB	60%	79%	138	60%	75%	125
		Cakupan Peserta KB Aktif	65%	79%	116	65%	75%	115
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		Jumlah Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	0.06%	0.06%	### ##	0.06%	0.06%	#####
		INDIKATOR TURUNAN DARI IKU						
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	100%	100%	100	100%	100%	100
	Ratio KDRT	0.06%	0.015%	300	0.06%	0.015%	300	

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan RPJMD

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2018			2019			Target Akhir RPJMD	Capaian sd. 2019 thdp RPJMD
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Indikator Kinerja Utama								
		Jumlah Peserta KB Aktif	65%	79%	122	65%	75%	115%	65%	115%
		Indikator Turunan dari IKU								
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif 65%	60%	79%	132	60%	75%	125%	60%	125%
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Satu Petugas di Setiap Desa/Kelurahan	1 petugas/desa	1 ds/ptgs	100	1 petugas/desa	1 ds/ptgs	100	1 ds/ptgs	100%
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan di Setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5%	3.50%	3.77%	92	3.50%	3.77%	92	3.50%	92%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	10%	10.30%	99	10%	10.30%	99	9%	90%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70%	76%	108	70%	76%	108	70%	108%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87%	97%	111	87%	97%	111	87%	111%
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	2 Desa/Petugas	2 ds/ptgs	100	2 Desa/Petugas	2 ds/ptgs	100	2 ds/ptgs	100%
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%
		Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	76%	86%	89	76%	86%	89	76%	89%
		Rata-Rata anak per Keluarga	2 orang	2,48 orang	80	2 orang	2,48 orang	80	2 orang	80%
		Ratio Akseptor KB	60%	79%	138	60%	75%	125	60%	125%
		Cakupan Peserta KB Aktif	65%	79%	116	65%	75%	115	65%	115%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	INDIKATOR KINERJA UTAMA								
		Jumlah Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	0.06%	0.06%	### ##	0.06%	0.06%	#### #	0.06%	0.06%
		INDIKATOR TURUNAN DARI IKU								
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 100%	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	

	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%
	Ratio KDRT	0.06%	0.015%	300	0.06%	0.015%	300	#####	300%

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup memadai. Jumlah PNS menurut Golongan, antara lain :

No	Golongan	Jumlah(Orang)	Persentase(%)	Ket.
1.	I	-	-	
2.	II	1	5	
3.	III	13	72	
4.	IV	4	23	

1. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah(Orang)	Persentase(%)	Ket.
1.	SD	-	-	
2.	SLTP	-	-	
3.	SLTA	1	5	
4.	DIPLOMA	4	23	
5.	S1	12	62	
6.	S2	2	10	
7.	S3	-	-	

2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/Eselon

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Ket.
1	II B	1	6	
2	III A	0	0	
3	III B	4	20	
4	IV A	9	45	
5	IV B	0	0	

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 8.981.757.341 dengan realisasi sebesar 8.806.112.158 atau sebesar 98 %. Rincian lengkap mengenai total belanja tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.499.375.107	1.463.557.479	97
2	Belanja Langsung	7.482.382.234	7.342.554.679	98
	a. Belanja Pegawai	3.075.850.400	3.033.403.900	98
		4.227.071.834	4.129.690.770	97
	b. Belanja barang dan Jasa	179.460.000	179.460.000	100
	c. Belanja Modal			
Total		8.981.757.341	8.806.112.158	98

Program /kegiatan yang mendukung tercapainya IKU adalah:

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%					
1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
		Jumlah Peserta KB Aktif		6,864,260,234	6,742,649,220	98.23					
		INDIKATOR TURUNAN DARI IKU									
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif 65%	Program Keluarga Berencana	3,786,288,100	3,702,282,110	96.82					
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Satu Petugas di Setiap Desa/Kelurahan									
		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan di Setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun									
		Rata-Rata anak per Keluarga									
		Ratio Akseptor KB									
		Kegiatan									
		Jumlah Kegiatan Pelayanan KIE					Pelayanan KIE	3,786,288,100.00	3,702,282,110.00	97.78	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	Program pelayanan Kontrasepsi	3,077,972,134	3,040,367,110	98.78					
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan									
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat									

	Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun				
	Cakupan Peserta KB Aktif				
Kegiatan					
	Jumlah PLKB/PKB	Pelayanan Konseling KB	2,699,991,500.00	2,685,383,750.00	99.46
	Jumlah Pengadaan alat dan Obat Side Efek KB	Pengadaan Alat dan Obat KB	377,980,634.00	354,983,360.00	93.92
Total			6,864,260,234	6,742,649,220	98.23

18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	1:100

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Persentase (%)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	1:100	1:2,16	46,36

Pada tahun 2019 dalam rangka memenuhi sasaran strategis tersebut di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur menetapkan IKU dengan target ratio daya serap tenaga kerja sebesar 1 : 100. Hal ini berarti perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan asing dan/ perusahaan dalam negeri sebanyak 100 orang untuk 1 perusahaan asing dan/ perusahaan dalam negeri. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan intervensi melalui program dan kegiatan yang menunjang IKU, diperoleh besaran ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 yaitu 1 : 2,16. Hal ini berarti jumlah tenaga kerja asal Kabupaten Manggarai Timur yang dapat diserap oleh perusahaan asing dan/ perusahaan dalam negeri pada tahun 2019 hanya sebesar 2 orang oleh 1 perusahaan asing dan/ perusahaan dalam negeri, atau persentase realisasi sebesar 46,29 %.

Hal ini disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Rendahnya mutu sumber daya manusia tenaga kerja;
2. Kurangnya informasi pasar kerja;
3. Kondisi lapangan kerja yang terbatas;
4. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja.

Lebih lanjut melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, belum dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap besaran daya serap tenaga kerja oleh karena keterbatasan ketersediaan anggaran, kondisi sosial dan geografis di Kabupaten Manggarai Timur.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	2017 (%)	2018 (%)	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	Persentasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	902,91	29,40	1:100	1:2,16	46,36

Jika diperhatikan trend capaian IKU dalam tiga tahun terakhir diperoleh gambaran bahwa tingkat capaian IKU tertinggi diperoleh pada tahun 2017, selanjutnya terjadi penurunan drastis pada tahun 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh faktor persebaran anggaran pada program utama dan kegiatan utama pendukung IKU tiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 anggaran di fokuskan pada 1 program utama dengan 3 kegiatan utama, sedangkan pada tahun 2018 anggaran difokuskan pada 1 program utama dengan 4 kegiatan utama dan 2019 anggaran difokuskan pada 2 program utama dengan 4 kegiatan utama.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

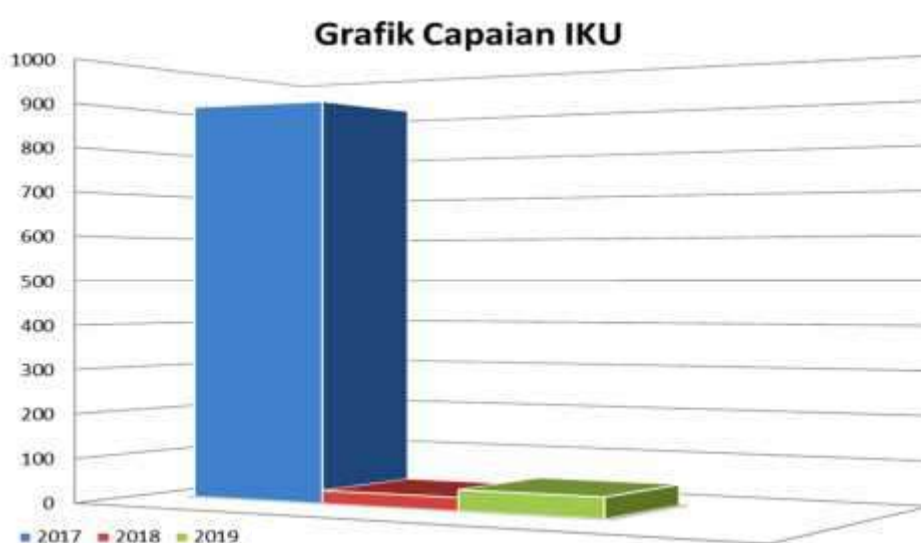
Indikator kinerja utama	2018 (%)	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Persentasi (%)
Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	29,40	1:100	1:2,16	46,36

Untuk mengukur kesuksesan sasaran tersebut dapat dilihat dari besaran nilai capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2019 dan beberapa aspek pendukung sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 fokus pelaksanaan program utama dan kegiatan utama yang mendukung IKU difokuskan menjawab permasalahan dasar tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Timur yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia tenaga kerja. Untuk menjawab permasalahan ini Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi melaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 kegiatan yaitu : Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi, Fasilitasi Pelayanan Bagi Pencari Kerja, Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan 1 kegiatan yaitu : Perluasan Kesempatan Kerja. Adapun pada tahun 2019 struktur anggaran yang difokuskan untuk menunjang IKU mengalami penurunan bila dibandingkan dengan struktur anggaran di tahun 2018, namun oleh karena adanya koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder bidang ketenagakerjaan seperti BLK – BLK Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sehingga target capaian program dan kegiatan dapat terealisasi dan tercapai.

Grafik I : Indikator Ratio Daya Serap Tenaga Kerja



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Adapun Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	29

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	10
3	Golongan II	3

Jumlah PNS dan CPNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	
2	SLTP	0	
3	SLTA	4	
4	Diploma	2	
5	S1	10	
6	S2	0	

Jumlah Pegawai Menurut Eselonering

No	Tingkat Eselonering	Jumlah	Keterangan
1	II B	0	
2	III A	1	
3	III B	4	
4	IV A	7	
5	IV B	0	

Jumlah PNS Menurut Pendidikan Penjurangan

No	Jenis Diklat Penjurangan	Jumlah	Keterangan
1	Pimp II	0	
2	Pimp III	1	
3	Pimp IV	1	

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.435.423,-	643.023.101,-	98,56
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,-	1.200.000,-	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,-	8.322.500,-	99,08
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	98.776.400,-	93.595.698,-	94,76
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	247.293.000,-	246.216.000,-	99,56
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.451.000,-	19.451.000,-	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.000.000,-	2.000.000,-	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.931.173,-	30.930.100,-	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.713.850,-	5.713.500,-	99,99
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang – Undangan	1.920.000,-	840.000,-	43,75
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000,-	21.000.000,-	100
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	215.750.000,-	213.754.303,-	99,07
B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.749.900,-	1.749.900,-	100

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1.749.900,-	1.749.900,-	100
C.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	614.134.677,-	569.978.587,-	92,81
1	Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi	341.320.650,-	302.854.400,-	88,73
2	Fasilitasi Pelayanan Bagi Pencari Kerja	183.758.000,-	182.406.000,-	99,26
3	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	89.056.027,-	84.718.187,-	95,13
D.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	524.447.500,-	521.803.500,-	99,50
1.	Perluasan Kesempatan Kerja	524.447.500,-	521.803.500,-	99,50
E.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketengakerjaan	254.258.500,-	229.038.329,-	90,08
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industiral	35.153.500,-	16.378.500,-	46,59
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	62.170.000,-	56.470.000,-	90,83
3	Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	156.935.000,-	156.189.829,-	99,53
F.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	170.289.000,-	168.490.600,-	98,94
1.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknik Unit Pemukiman Transmigrasi	170.289.000,-	168.490.600,-	98,94
G.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	94.865.000,-	43.958.800,-	46,34
1.	Pendataan, Pemantauan serta Pembinaan Lokasi Potensi Energi	6.965.000,-	6.075.000,-	87,22
2.	Pemeliharaan Solar Home System (SHS)	0,-	0,-	0
3.	Rehabilitasi PLTMH	87.900.000,-	37.883.800,-	43,10
Total		2.312.180.000,-	2.178.042.817,-	94,20

19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Target Kinerja dalam perjajian Kerja

Berikut ini tabel target yang telah ditetapkan untuk menggambarkan kinerja DPMPTSP Tahun 2019.

Sasaran, Target dan Realisasi IKU & Indikator Turunan IKU DPMPTSP Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Target 2019
1.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	20 M
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	5 investor
		Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5%
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1:88

b) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjajian Kinerja

Berikut ini tabel capaian IKU dan Indikator Turunan Pendukung IKU berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk menggambarkan kinerja DPMPTSP Tahun 2019.

Sasaran, Target dan Realisasi IKU & Indikator Turunan IKU DPMPTSP Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Target 2019	Realisasi 2019	%
1.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	20 M	78,7 M	393,5
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	5 investor	135 investor	2.700
		Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5%	170%	3.400
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1:88	1:4	4,5

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk IKU Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), capaian di Tahun 2019 sebesar 78,7 M jauh melebihi target yang telah ditetapkan yakni 20 M. Hal ini berkaitan dengan peningkatan Jumlah investor (PMDN/PMA) yang tentu berimbas pada nilai investasi. Pada Tahun 2019 sebanyak 135 investor (PMDN/PMA) yang melakukan kegiatan investasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni 5 investor. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018), nilai realisasi investasi di tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 total realisasi investasi sebesar Rp.32,3 M sedangkan total realisasi

investasi di tahun 2019 sebesar 78,7 M sehingga Nilai Realisasi PMDN/PMA mengalami kenaikan sebesar 170% melebihi target 5% yang telah ditetapkan. Jika indikator lainnya melebihi target, tidak demikian halnya dengan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja. Di tahun 2019, 1 perusahaan mempekerjakan rata-rata 4 orang tenaga kerja lokal sehingga rasionya 1:4 jauh di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 1:88. Mengenai hal ini, DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur menyadari bahwa penetapan target untuk indikator rasio daya serap tenaga kerja tahun 2019 terlalu tinggi karena melihat trend dari 2 tahun terakhir (2017 dan 2018) capaian untuk indikator ini sebesar 1:3 dan 1:2

c) **Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

Berikut ini tabel perbandingan realisasi dan kinerja DPMPTSP tahun 2019 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (2017 dan 2018)

Sasaran, Target dan Realisasi IKU & Indikator Turunan IKU DPMPTSP
Tahun 2017, 2018 & Tahun 2019

No	Sasaran	IKU	2017	2018	2019		%
					Target	Realisasi	
1.	Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	39,1 M	32,3 M	20 M	78,7 M	393,5
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	439 investor	122 investor	5 investor	135 investor	2.700
		Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	4%	5%	5%	170%	3.400
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1:3	1:2	1:88	1:4	4,5

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) mengalami penurunan di tahun 2018 yakni sebesar 32,3 M dari 39,1 M di tahun 2017; namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 sebesar 78,7 M. Hal ini dipengaruhi oleh dari total Investor (PMDN/PMA) yang berinvestasi di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2017 sebanyak 439 investor yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Manggarai Timur sedangkan pada tahun 2018 menurun jumlahnya menjadi 122 investor dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 135 investor. Pada tabel 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah investor pada tahun 2017 dan 2019 berbanding terbalik dengan nilai realisasi investasinya. Hal ini karena pada tahun 2017 kegiatan penanaman modal didominasi

oleh usaha mikro dengan kisaran modal 0-50 Juta sedangkan di tahun 2019 kegiatan penanaman modal didominasi oleh usaha kecil dengan kisaran modal >50-500 juta dan usaha menengah dengan kisaran modal >500 juta-10 M; sehingga meskipun jumlah investor di tahun 2017 banyak, tidak secara otomatis menjamin besaran nilai investasinya. Begitupun sebaliknya untuk tahun 2019.

Untuk indikator **Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA**, berdasarkan nilai realisasi investasi dari tahun 2017-2019 pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 nilai realisasi investasi mengalami penurunan sebesar 4% begitupun pada tahun 2018 penurunan sebesar 5%. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 170%. Begitupun dengan **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**. Pada tahun 2019, rata-rata 1 perusahaan mempekerjakan 4 orang sehingga rasionya 1:4. Capaian ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 1:3 dan pada tahun 2018 sebesar 1:2.

d) Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengukuran capaian kinerja DPMPTSP pada tahun 2019 berdasarkan target yang telah ditetapkan beserta analisis terhadap akuntabilitas kinerja.

Pertama, IKU Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA). Indikator ini berkaitan erat dengan dua indikator lainnya yakni Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA. Pengukuran indikator ini didasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Untuk dapat mengetahui kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi pada tahun 2019 perlu terlebih dahulu menghitung total nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) dari masing-masing investor PMDN/PMA di Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian untuk ketiga indikator ini mengalami peningkatan cukup drastis jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2017 dan 2018) seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada tahun 2019 sebanyak 135 investor yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Manggarai Timur dengan total nilai investasi sebesar 78,7 M dan kenaikan 170% jika dibandingkan dengan capaian nilai investasi pada tahun 2018.

Capaian ini tentunya merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP pada tahun 2019 yang dapat mendukung terealisasinya target yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikator seperti **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** (kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis

antara usaha besar dan usaha kecil menengah, kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, kegiatan penyelenggaraan pameran investasi), Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan PTSP) dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (kegiatan pengembangan pelayanan perijinan, kegiatan peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan).

Yang paling membedakan tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pada tahun ini DPMPTSP mulai menggunakan aplikasi perizinan yang terintegrasi secara online OSS (Online Single Submission). Melalui aplikasi ini, investor/pelaku usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha dengan menginput sendiri data-data serta mengupload dokumen yang menjadi syarat dalam mendapatkan izin yang diperlukan tentunya setelah melalui proses verifikasi dari petugas DPMPTSP.

Hal ini bisa menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap tingginya capaian indikator jumlah investor PMDN/PMA yang juga berimbas pada kenaikan nilai realisasi investasinya pada tahun 2019.

Kedua, IKU Rasio Daya Serap Tenaga Kerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2019 ada peningkatan rasio daya serap tenaga kerja (1:4) jika dibandingkan dengan tahun 2017 (1:3) dan tahun 2018 (1:2). Hal ini masih berkaitan dengan indikator jumlah investor PMDN/PMA karena logikanya semakin banyak/semakin besar skala kegiatan investasi maka dibutuhkan semakin banyak tenaga kerja.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Ket
1.	SD	-	-	
2.	SLTP	-	-	
3.	SLTA	-	-	
4.	DIPLOMA	3	15,78	
5.	S1	14	73,68	
6.	S2	2	10,52	
7.	S3	-	-	
	JUMLAH	19	100	

Jumlah PNS Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Presentase (%)	Ket
1.	I.	-	-	
2.	II.	-	-	
3.	III.	13	68,42	

No	Golongan	Jumlah (orang)	Presentase (%)	Ket
4.	IV.	6	31,57	
	JUMLAH	19	100	

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Rutin DPMPTSP Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	438.483.200	432.806.115	98,71
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.636.000	2.628.000	99,70
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	9.255.500	92,56
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	110.252.000	108.503.200	98,41
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.260.200	45.183.025	97,67
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	9.714.000	97,14
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.700.000	60.700.000	100
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.271.000	32.271.000	100
h.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.700.000	1.700.000	100
i.	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.664.000	11.664.000	100
j.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	150.000.000	148.187.390	98,79
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.084.000	68.913.500	93,02
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74.084.000	68.913.500	93,02
3	Program peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	5.000.000	100
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3.500.000	3.500.000	100
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.500.000	1.500.000	100
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	169.000.000	143.749.947	85,05
a.	Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Rp.35.000.000	Rp.35.000.000	100
b.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Rp.40.000.000	Rp.35.484.100	89
c.	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp.64.000.000	Rp.43.265.847	68
d.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp.30.000.000	Rp.30.000.000	100
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 83.300.000	83.300.000	100
a.	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000	100
b.	Kegiatan Optimalisasi/sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp.76.300.000	Rp.76.300.000	100
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 287.840.000	277.247.600	96,32
a.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Rp.7.000.000	7.000.000	100
b.	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan	Rp.280.840.000	270.247.600	96
7.	Program Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Data Informasi	Rp.105.000.000	102.704.500	98
a.	Kegiatan Pendataan Jenis Usaha	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000	100
b.	Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan PTSP	Rp.10.000.000	Rp.8.379.500	84
c.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp.75.000.000	Rp.74.325.000	99

20. Inspektorat

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

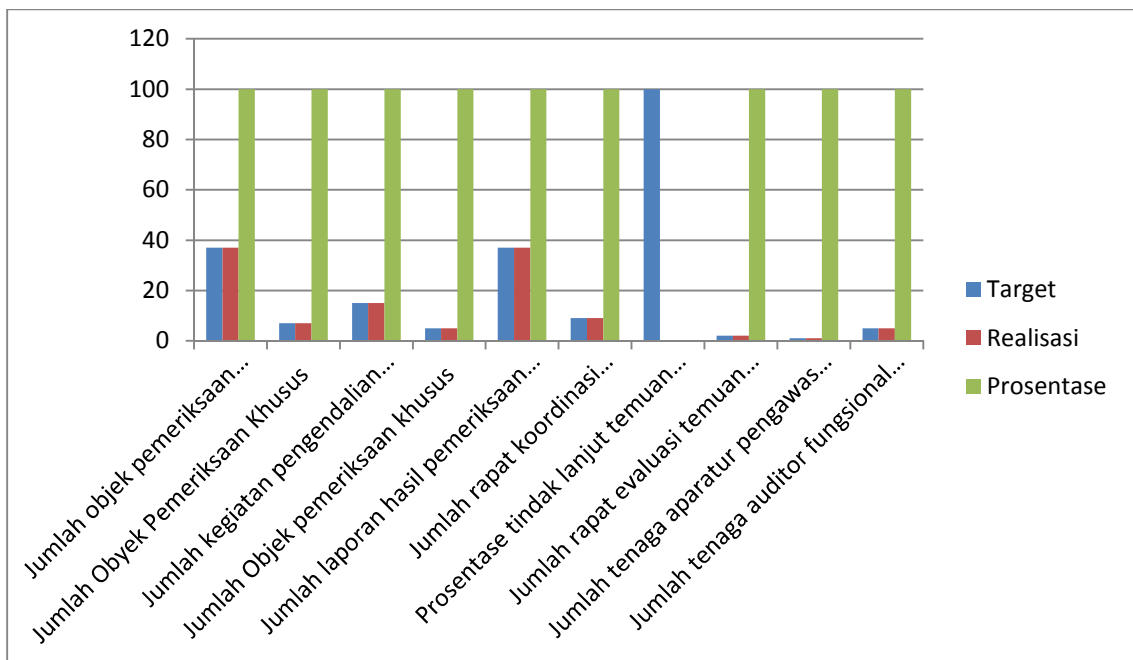
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala	Jumlah	37 OP
		Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus	Jumlah	7 OP
		Jumlah kegiatan pengendalian managemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah	15 Keg.
		Jumlah Objek pemeriksaan khusus	Jumlah	5 OP
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang didistribusikan ke OP	Jumlah	37 LHP
		Jumlah rapat koordinasi pengawasan inspektorat yang lebih komprehensif	Jumlah	9 rapat
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase	100 %
		Jumlah rapat evaluasi temuan pengawasan	Jumlah	2 rapat
		Jumlah tenaga aparatur pengawas terlatih	Jumlah	1 paket
		Jumlah tenaga auditor fungsional terlatih	Jumlah	5 orang

b) Perjanjian Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala	Jumlah	37 OP	37 OP	100
		Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus	Jumlah	7 OP	7 OP	100
		Jumlah kegiatan pengendalian managemen pelaksanaan	Jumlah	15 Keg.	15 Keg.	100

	kebijakan KDH				
	Jumlah Objek pemeriksaan khusus	Jumlah	5 OP	5 OP	100
	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang didistribusikan ke OP	Jumlah	37 LHP	37 LHP	100
	Jumlah rapat koordinasi pengawasan inspektorat yang lebih komprehensif	Jumlah	9 rapat	9 rapat	100
	Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase	100 %	81,13 %	81,13
	Jumlah rapat evaluasi temuan pengawasan	Jumlah	2 rapat	2 rapat	100
	Jumlah tenaga aparatur pengawas terlatih	Jumlah	1 paket	1 paket	100
	Jumlah tenaga auditor fungsional terlatih	Jumlah	5 orang	5 orang	100

Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019



Dari tabel dan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 didasarkan pada sasaran setretegis Peningkatan Pelaksanaan

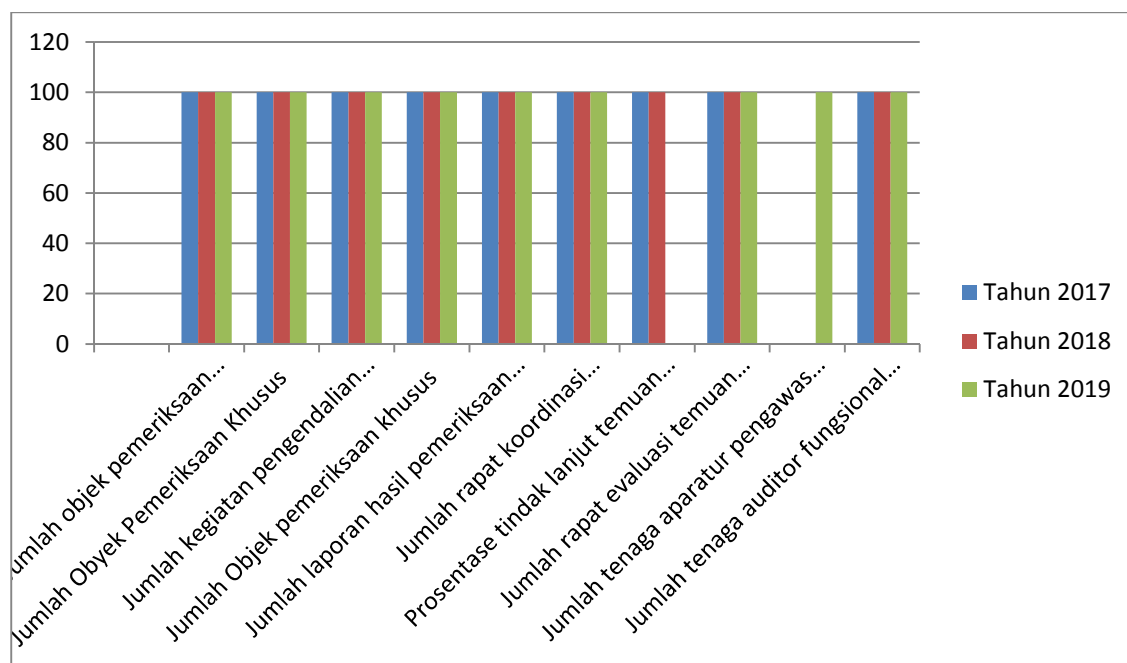
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Dari sasaran tersebut di atas terdapat indikator utama dengan capaian dan realisasi sebagai berikut:

1. Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala ditetapkan target pada tahun 2019 sebanyak 37 Objek dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2019 juga 37 objek pemeriksaan sehingga persentase yang dicapai adalah 100 %.
2. Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus sebanyak 7 Objek Pemeriksaan dan pada tahun 2019 direalisasikan 7 OP sehingga persentase pelaksanaan pemeriksaan khusus adalah 100 %.
3. Jumlah kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH adalah 15 kegiatan dan realisasi 15 kegiatan sehingga persentase pelaksanaan kegiatan 100 %.
4. Jumlah Objek pemeriksaan khusus ditargetkan 5 objek dan realisasi 5 objek sehingga tercapai 100 % pemeriksaan khusus.
5. Jumlah rapat koordinasi pengawasan inspektorat yang lebih komprehensif sebanyak 9 rapat dan terealisasi 9 rapat sehingga tercapai 100 % capaian pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.
6. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang didistribusikan ke OP sebanyak 37 OP dan terealisasi 37 OP atau mencapai target 100 %.
7. Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan diharapkan 100 % dan terealisasi 81,13 %.
8. Jumlah rapat evaluasi temuan pengawasan sebanyak 2 kali rapat, terealisasi 2 kali rapat atau 100 %.
9. Jumlah tenaga aparatur pengawas terlatih dilaksanakan dalam bentuk 1 paket dan terlaksana 1 paket atau 100 %.
10. Jumlah tenaga auditor fungsional terlatih yang mengikuti diklat ditargetkan pada tahun 2019 adalah 5 orang, tercapai 5 orang sehingga kalau dipersentasekan adalah 100 %.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator	2017 %	2018 %	2019		
					Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah obyek pemeriksaan internal secara berkala	100%	100%	37 OP	37 OP	100 %
2.		Jumlah obyek pemeriksaan khusus	100%	100%	7 OP	7 OP	100 %
3.		Jumlah kegiatan pengendalian manajemen	100%	100%	15 Keg.	15 Keg.	100 %

		pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah					
4.		Jumlah obyek pemeriksaan kasus	100%	100%	5 OP	5 OP	100%
5.		Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang didistribusikan ke OP	100%	100%	37 LHP	37 LHP	100 %
6.		Porsentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	81,13%	81,13 %
7.		Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat yang lebih Komprehensif	100%	100%	9 Rapat	9 Rapat	100%
8.		Jumlah Rapat Evaluasi Temuan Pengawasan	100%	100%	2 Rapat	2 Rapat	100%
9.		Jumlah Tenaga Aparatur Pengawasan Terlatih	93,33%	93,33%	1 paket	1 paket	100%
10.		Jumlah Tenaga Auditor Fungsional Terlatih	100%	100%	5 Org	5 Org	100%



Grafik Perbandingan Realisasi Capaian IKU Inspektorat Tahun 2017 – 2019

Sesuai tabel dan grafik tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja selama tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan demikian pun dengan beberapa indikator pada tahun 2019. Yang mengalami perubahan adalah capaian indikator kinerja persentase capaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yaitu pada tahun 2017 dan 2018 adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2019 adalah 81,13 %. Demikian pun dengan indikator jumlah tenaga aparatur pengawasan terlatih pada tahun 2017 dan 2018 adalah

93,33 % mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu 100 %. Permasalahan yang terjadi terkait dengan 2 (dua) indikator tersebut di atas adalah :

- Rendahnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.
- Kurangnya anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala	Jumlah	37 OP	37 OP
		Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus	Jumlah	7 OP	7 OP
		Jumlah kegiatan pengendalian managemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah	15 Keg.	15 Keg.
		Jumlah Objek pemeriksaan khusus	Jumlah	5 OP	5 OP
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang didistribusikan ke OP	Jumlah	37 LHP	37 LHP
		Jumlah rapat koordinasi pengawasan inspektorat yang lebih komprehensif	Jumlah	9 rapat	9 rapat
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persentase	100 %	81,13 %
		Jumlah rapat evaluasi temuan pengawasan	Jumlah	2 rapat	2 rapat
		Jumlah tenaga aparatur pengawas terlatih	Jumlah	1 paket	1 paket
		Jumlah tenaga auditor fungsional terlatih	Jumlah	5 orang	5 orang

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

➤ Sumber Daya Manusia

1. PNS menurut kualifikasi pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah PNS/CPNSD	Ket
1.	SMA	2 orang	
2.	DIII/Sarjana Muda	2 orang	
3.	S1	25 orang	
	JUMLAH	29 Orang	

2. Pangkat / Golongan

PNS menurut pangkat/golongan :

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah PNS / CPNSD	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda IV/c	1 orang	
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	3 orang	
3.	Pembina, IV/a	1 orang	
4.	Penata Tingkat I, III/d	3 orang	
5.	Penata, III/c	8 orang	
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	11 orang	
7.	Penata Muda, III/a	1 orang	
8.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1 orang	
	JUMLAH	29 Orang	

3. Jabatan Struktural / Eselonering

PNS menurut jabatan struktural/eselonering :

No.	Jabatan/ Eselonering	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III/a	5 orang
3.	Eselon IV/a	3 orang
	JUMLAH	9 orang

4. PNS menurut Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Auditor Muda	11 orang	
2.	Auditor Pertama	6 orang	
3.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	1 orang	
	JUMLAH	17 orang	

5. Pegawai Non PNS (Tenaga Harian Lepas)

Pegawai Non PNS (Tenaga Harian Lepas/THL) berjumlah 14 orang, dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- S2 : 1 orang
- S1 : 7 orang
- D3 : 2 orang
- SMA : 3 orang
- SLTP : 1 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KEUANGAN		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	762.043.000	743.372.480	97,55
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	13.462.000	86,29
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	251.463.000	238.289.800	94,76
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.160.000	38.460.000	98,21
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	55.000.000	54.915.000	99,85
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000	16.960.000	99,76
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000	1.740.000	90,63
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	38.000.000	95,00
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	339.900.000	339.545.680	99,90
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	190.980.000	173.438.840	90,82
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	40.900.000	40.900.000	100
2	Kegiatan Pengadaan Meubeler	28.200.000	28.200.000	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	117.380.000	99.988.840	85,18
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	4.500.000	4.350.000	96,67
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	345.000	345.000	100
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Pencapaian Kineja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	345.000	345.000	100

21. Badan Keuangan

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP

2	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	30.000.000.000
---	--	-------------------------------	--------	----------------

b) Perjanjian Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP	Hasil diperoleh setelah Audit oleh BPKRI pada Tahun Anggaran 2020	-
2	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	30.000.000.000	40.152.816.777.37	133,84

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Renstra 2014 – 2019, RKT 2019, LRA Desember 2019

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019 memperlihatkan keberhasilannya yang cukup baik terkait dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp.40.152.816.777.37 dari target Rp.30.000.000.000,00 atau 133,84%, sedangkan terhadap Realisasi Kinerja dengan Indikator Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan hasilnya akan diperoleh setelah dilakukan Audit oleh BPKRI pada Tahun Anggaran 2020.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019		
					Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WDP	WTP	WTP	Hasil diperoleh setelah Audit oleh BPKRI pada Tahun Anggaran 2020	-
2	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	85.117.394.766,71 (354,66%)	34.429.885.133,37 (127,52%)	30.000.000.000	40.152.816.777.37	133,84

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Renstra 2014 – 2019, RKT 2019, LRA Desember 2019

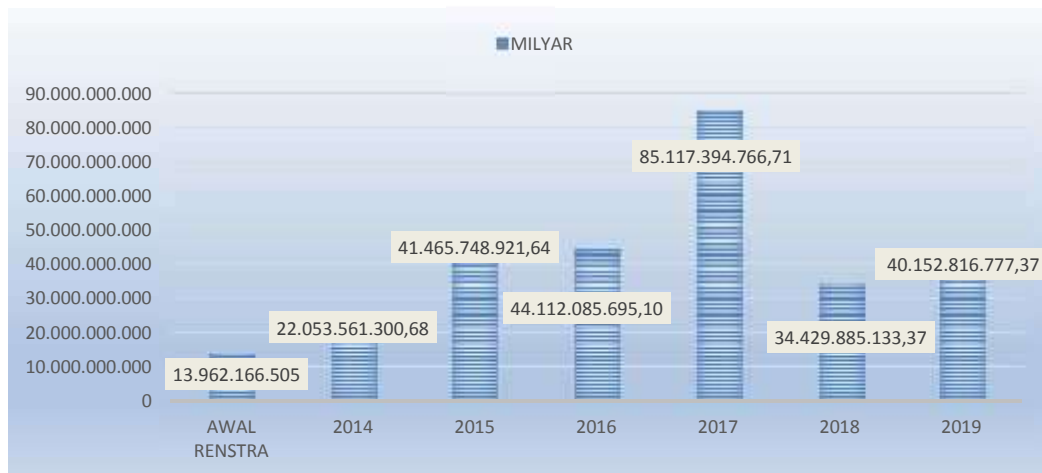
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir RPJMD 2014 – 2019. Tahun ini indikator Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan berada pada Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan dari Indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aspek jumlah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

➤ Terkait dengan Indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Aspek pencapaian

Dari aspek pencapaian realisasi PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan bahkan selalu melebihi Target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2014 – 2019. Secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Realisasi PAD 2014 – 2019

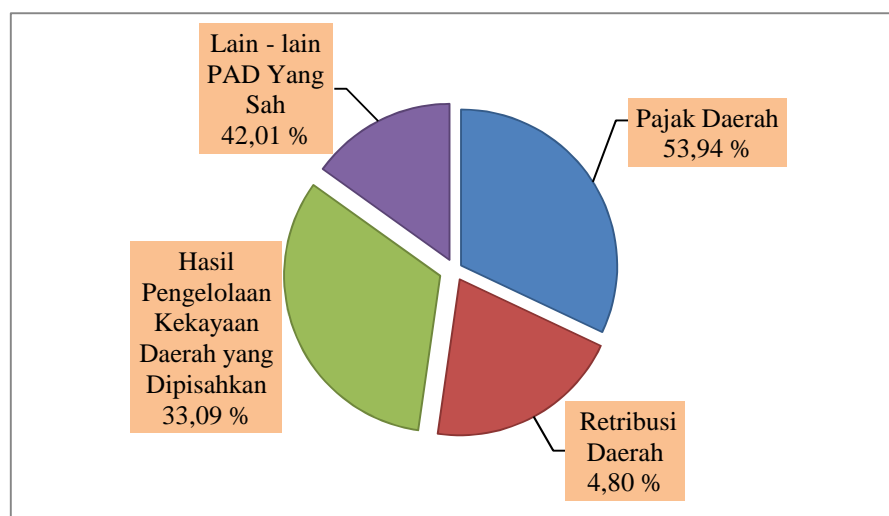


Sumber : Badan Keuangan Daerah, Renstra 2014 – 2019, RKT 2019, LRA Desember 2019

b. Komponen PAD (Realisasi)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Daerah Rp.16.182.275.337.18 atau 53,94 %
- Pendapatan Retribusi Daerah Rp.1.441.471.071,00 atau 4,80 %
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.9.927.249.503,00 atau 33,09 %
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Rp.12.601.820.866.19 atau 42,01 %.



Agar pencapaian PAD tetap optimal dalam pencapaian-nya maka, beberapa solusi yang diambil antara lain sebagai berikut :

- Tetap berupaya maksimal dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber – sumber PAD
- Pembenahan Sumber Daya Manusia baik aspek Kualitas maupun Kwantitas dalam Pengelola Keuangan Daerah melalui kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini BKPSDM, serta Dukungan anggaran dalam meningkatkan kemampuan teknis para ASN melalui BIMTEK secara formal
- Dukungan fasilitas yang optimal dalam pelaksanaan tugas, misalnya Aplikasi Pendapatan Daerah
- Optimal dalam melakukan koordinasi kelembagaan

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP	Hasil diperoleh setelah Audit oleh BPKRI pada Tahun Anggaran 2020
2	Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	30.000.000.000	40.152.816.777.37

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

- 1) Berdasarkan Pendidikan
 - a. Sarjana (S2) : 3 orang
 - b. Sarjana (S1) : 23 orang
 - c. Sarjana Muda : 6 orang
 - d. SLTA : 3 orang
- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan
 - a. Golongan IV : 2 orang
 - b. Golongan III : 30 orang
 - c. Golongan II : 3 orang
- 3) Berdasarkan jabatan struktural
 - a. Eselin II : 1 orang
 - b. Eselon III : 6 orang
 - c. Eselon IV : 11 orang
- 4) Staf : 11 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KURANG/ SISA/LEBIH	(%)	SUMBER DANA
I	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	3,279,199,150.00	3,148,412,053.00	130,863,597.00	96.01	DAU
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12,200,000.00	11,784,600.00	491,900.00	96.60	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,800,000.00	19,672,000.00	128,000.00	99.35	DAU
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2,188,281,750.00	2,059,531,750.00	128,750,000.00	94.12	DAU
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	57,846,600.00	57,276,600.00	570,000.00	99.01	DAU
5	Penyediaan alat tulis kantor	150,398,800.00	150,398,800.00	-	100.00	DAU
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97,000,000.00	97,000,000.00	-	100.00	DAU
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	DAU
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	131,382,000.00	130,540,000.00	842,000.00	99.36	DAU
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00	DAU
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	840,000.00	770,000.00	70,000.00	91.67	DAU
11	Penyediaan makanan dan minuman	57,150,000.00	57,150,000.00	-	100.00	DAU
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	560,950,000.00	560,938,303.00	11,697.00	100.00	DAU
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206,654,000.00	194,890,056.00	11,763,944.00	94.31	DAU
1	Pengadaan mebeleur	22,350,000.00	21,850,000.00	500,000.00	97.76	DAU
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00	DAU
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160,304,000.00	149,040,056.00	11,263,944.00	92.97	DAU
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00	DAU
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185,600,000.00	170,593,440.00	15,006,560.00	91.91	DAU
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	185,600,000.00	170,593,440.00	15,006,560.00	91.91	DAU

22. Bagian Administrasi Pemerintahan

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan. Di dalam penetapan kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 dengan rincian:

Tabel 8.1
Target kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Program/kegiatan	Anggaran
	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat penilaian hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Baik	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan kegiatan fasilitasi data dukung evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	53.139.140,-
		Persentase pemekaran wilayah kecamatan dari 9 kecamatan tahun 2013 menjadi 12 kecamatan pada tahun 2019	100%	Program penataan daerah otonomi baru kegiatan faslitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	78.735.552,
		Penanganan masalah tapal batas	100%	program Pengembangan wilayah perbatasan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah kamtrantibmas di perbatasan kabupaten	215.438.705
		Jumlah kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	1 kali	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	70.575.301
		Penyampaian LPPD kepada pemerintah dan penyampaian LKPJ kepada DPRD tepat waktu melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Tepat waktu	a) Penyusunan LKPJ Bupati b) Penyusunan LPPD dan ILPPD	240.711.180

Dari tabel diatas terdapat 5 (lima) indikator yang ditetapkan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan tahun 2019.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Dari sasaran utama pengukuran keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 8.2
Capaian kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Pelaksanaan	1.Predikat penilaian hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Predikat/ Peringkat	Baik	Baik	100
	Reformasi Birokrasi	2.Persentase pemekaran wilayah kecamatan dari 9 kecamatan tahun	%	100	-	-

dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2013 menjadi 12 kecamatan pada tahun 2019				
	3.Penanganan Masalah Tapal Batas	%	100	94,63	94,63
	4.Jumlah kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	Kali	1	1	100
	5.Persentase penyampaian LPPD kepada pemerintah dan penyampaian LKPJ kepada DPRD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan evaluasi kinerja tahun 2018 -2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.3
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2017 – 2019

No.	Indikator	Target			Realisasi			Porsentase		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Tersedianya Gedung Kantor OPD/Kelurahan	1 unit	3 unit	-	1 unit	3 unit	-	100	100	-
2.	Predikat Penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100
3.	Persentase pemekaran Wilayah Kecamatan dari 9 Kecamatan Tahun 2013 menjadi 12 Kecamatan pada tahun 2019;	100	100	100	-	-	-	-	-	-
4.	Penanganan Masalah Tapal Batas	100	100	100	100	100	94,63	100	80,09	94,63
5.	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Tepat Waktu	1 kali rapat	1 kali rapat	1 kali rapat	1 kali	1 kali rapat	1 kali rapat	100	100	100
6.	Penyampaian LPPD kepada Pemerintah dan Penyampaian LKPJ kepada DPRD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100

Dari tabel diatas capaian kinerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan capaian kinerja sebesar 78,92%. Hal ini didukung oleh

sarana dan prasarana sumber daya yang memadai dan fasilitas kantor yang menunjang kegiatan perkantoran.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Capaian kinerja 2019			Capaian kinerja 2018			Target RPJMD	Capaian s/d 2019
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Predikat Penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100	Baik	100%
		2. Persentase pemekaran Wilayah Kecamatan dari 9 Kecamatan Tahun 2013 menjadi 12 Kecamatan pada Tahun 2019	100	-	-	-	-	-	3 calon kecamatan baru	-
		3. Penanganan masalah tapal batas	100	94,63	94,63	100	80,09	80,09	100	94,63
		4. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu	1 kali	1 kali	100	1 kali	85,69	85,69	4 kali	100
		5. Penyampaian LPPD kepada pemerintah dan penyampaian LKPJ kepada DPRD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	Tepat waktu	99,90	100	100

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Adapun dukungan sumber daya Bagian Administrasi Pemerintahan yakni PNS 12 orang dan THL 9 orang.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S1	10 Orang
2	Sarjana Muda	1 Orang
3	SLTA	1 Orang
Jumlah		12 Orang

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan tahun 2019 yakni:

Program/kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2019

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Ket
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.761.000	DAU
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.754.000	DAU
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.000.000	DAU
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.400.000	DAU
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.200.000	DAU
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.360.000	DAU
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.880.000	DAU
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	2.635.000	DAU
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000	DAU
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	258.850.000	DAU
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah		DAU
1	Pengadaan PDUB Camat	45.000.000	DAU
2	Pengadaan PDUB Bupati dan Wakil Bupati	60.000.000	DAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin dan perizinan kendaraan dinas/operasional	169.853.000	DAU
III	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		DAU
1	Rapat koordinasi lintas OPD	13.624.000	DAU
2	Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	70.575.301	DAU
3	Rapat kerja sekretaris desa dan sekretaris lurah	66.036.850	DAU
4	Fasilitasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	379.595.232	DAU
IV	Program Pengembangan Sistem Laporan dan Pencapaian Kinerja dan Keuangan		DAU
1	Penyusunan LKPJ Bupati	120.656.820	DAU
2	Faslitasi data dukung evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	53.139.140	DAU
3	Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ OPD	5.104.300	DAU
4	Penyusunan laporan rutin dan laporan khusus Bupati	104.784.340	DAU
5	Penyusunan LPPD dan ILPPD	120.054.360	DAU
V	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	78.735.552	DAU
	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	78.735.552	DAU
VI	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	215.438.705	DAU
	Fasilitasi penyelesaian masalah Kamtrantibmas di perbatasan kabupaten	215.438.705	DAU
VII	Program Peningkatan Kerjasama antar daerah	25.000.000	DAU
	Iuran APKASI	25.000.000	DAU
Jumlah		2.101.437.600	

Dari tabel diatas terdapat 7 program dan 27 kegiatan yang mendukung capaian kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur dengan total anggaran Rp.2.101.437.600,- dan realisasi Rp.1.972.022.203,- atau 93,80%.

23. Bagian Umum

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2019		
			Target	Realisasi	%
Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100	96,21	96,21

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Capaian 2018			Capaian 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100	95,62	95,62	100	96,21	96,21

d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Sasaran	Indikator	Capaian 2019			Capaian s/d RPJMD akhir 2019
		Target	Realisasi	%	
Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100	96,21	96,21	96,21

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Dengan penggunaan sumber daya yang ada maka realisasi program dan kegiatan pada Bagian Umum Setda bisa dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik. Dengan jumlah PNS 12 orang dan sarana prasarana yang cukup menunjang kegiatan perkantoran.

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Terdapat program /kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Bagian Umum Setda Kabupaten Manggarai Timur yakni:

Sasaran	Indikator	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan	Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	3.454.385.000	3.323.365.614	96,21
	Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	185.991.000	185.991.000	100
		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	210.000.000	135.000.000	64,52
		Rapat koordinasi unsur MUSIDA	12.500.000	12.480.000	99,84
		Kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	334.205.000	333.985.000	99,93
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.760.650.000	1.760.646.364	99,99
		Pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	25.000.000	25.000.000	100
		Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	926.039.000	869.763.250	93,92

24. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan dalam LPSE	Jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang tepat waktu	paket	135

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
Tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan dalam LPSE	Jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang tepat waktu	Paket	135	119	88,14

Target dan realisasi kinerja tahun 2019 tidak memenuhi target disebabkan:

- Terdapat OPD yang paket tendernya dibatalkan yakni Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Terdapat paket pengadaan yang beralih dari proses tendering ke E-Purchasing

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja 2018			Capaian Kinerja 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan dalam LPSE	Jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang tepat waktu	155	96	61,9	135	119	88,14

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur yang telah disusun dan ditetapkan dengan Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2014 merupakan gambaran visi dan misi Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka menjawab visi dan misi tersebut setiap OPD wajib menyusun Renstra yang juga memuat visi dan misi OPD yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2016 belum menyusun Renstra sendiri sehingga Renstra masih mengacu pada

Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Timur melekat pada Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan Persentase Pengadaan dan Layanan Pengadaan serta kegiatan Jumlah Aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Data Kepegawaian Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019

1) Data Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	0
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	8
	Total	13

2) Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	
2	Golongan III	5
3	Golongan II	0

3) Jumlah PNS dan CPNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	-	
4	Diploma	-	
5	S1	5	
6	S2	0	

4) Jumlah Pegawai Menurut Eselonering

No	Tingkat Eselonering	Jumlah	Keterangan
1	II B	-	
2	III A	1	
3	III B	-	
4	IV A	3	

5) Jumlah PNS Menurut Pendidikan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah	Keterangan
1	Pimp II	-	
2	Pimp III	-	
3	Pimp IV	1	

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tahun 2019 yakni:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program :Penyediaan Jasa Surat Menyurat	354.184.200	353.982.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.977.000	19.977.000	100
2.	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.940.000	15.940.000	100
3.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	50.475.000	49.977.000	99,01
4.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	19.719.000	19.719.000	100
5.	Penyedia Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	975.000	975.000	100
6.	Penyedia Alat Tulis Kantor	25.018.000	25.018.000	100
7.	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	9.074.000	9.074.000	100
8.	Penyedia Komponen Intalasi Listrik/penerangan dan Bangunan Kantor	470.000	470.000	100
9.	Penyedia Makanan dan Minuman	10.000.000	10.000.000	100
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100.000.000	99.212.906	99,21
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.483.200	54.908.200	95,99
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	55.483.200	54.908.200	95,99
C.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39.959.000	39.959.000	97,9
1.	Pelaksanaan Forum Pengadaan Barang/Jasa	21.690.000	21.690.000	100
2.	Pelaksanaan BIMTEK Sitem Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik.	18.269.000	18.269.000	100
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	470.000	470.000	100
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	470.000	470.000	100
E.	Program: Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	554.433.000	546.933.000	97
1.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.	111.088.500	109.588.500	98,65
2.	Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	433.344.500	437.344.500	98,65

25. Bagian Humas dan Protokoler

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja

Penilaian capaian kinerja instansi pemerintah biasanya dimulai dengan perjanjian kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2019, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur menetapkan target dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	%	100
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	%	100

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kerja

Pada Tahun Anggaran 2019 capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dikatakan berhasil sesuai dengan target yaitu 100% dengan realisasi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	%	100	100	100
	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	%	100	100	100

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019 capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Manggarai Timur dikatakan berhasil sesuai dengan target yaitu 100% dengan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja 2019			Capaian Kinerja 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	100	100	100	100	100	100

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Adapun Capaian Kinerja Bagian Humas dan Protokol tahun ajaran 2019 jika dibandingkan dengan tahun RPJMD sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja 2019			Capaian Kinerja 2018			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s.d 20119 terhadap 2019 (%)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Dengan penggunaan sumber daya yang ada maka realisasi program dan kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol bisa dilaksanakan dengan capaian kinerja yang berhasil.

Hal ini didukung oleh personil pada Humas dan Protokol, sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Golongan	Ket.
1.	Drs. Aleksius Rahman NIP.19660906 199401 1 001	Kepala Bagian Humas & Protokol	III	S-1	IV/b	
2.	Edelbertha D. F. Dasti, SE NIP.19840224 200903 2 015	Kepala Sub Bagian Protokol	IV	S-1	III/c	
3.	Agustinus Supratman, S.IP	Kepala Sub Bagian Human	IV	S-1	III/c	
4.	Fransiska Trinita, A. Md	Staf	-	D-3	III/a	

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi & peningkatan	Tingkat akurasi informasi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	194.458.000	192.408.000	98,95
			1. Penyebarluasan	161.958.000	159.908.000	98,73

akuntabilitas kinerja birokrasi	masyarakat		informasi Penyelenggara pemerintah & pembangunan daerah			
		2.	Penyediaan barang & jasa iklan pada media cetak/elektronik	32.500.000	32.500.000	100
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	140.750.000	139.700.000	99,25
	Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah & pejabat pemerintah	1.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	140.750.000	139.700.000	99,25
JUMLAH				335.208.000	332.108.000	99,08

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dalam akuntabilitas keuangan Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari :

- a) Tingkat akurasi informasi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di masyarakat, dialokasikan dana Rp.194.458.000,- dan realisasi Rp.192.408.000,- atau 98,95%
- b) Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah dan pejabat pemerintah,dialokasikan dana Rp. 140.750.000,- dan realisasi Rp. 139.700.000,- atau 99,25%.
- c) Total anggaran untuk indikator kinerja utama Bagian Humas Dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur,dialokasikan dana Rp. 335.208.000,- dan realisasi Rp. 332.108.000,- atau 99,08%.

Adapun program dan kegiatan penunjang IKU antara lain:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	320.587.400	318.657.400	99,40
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88.131.000	86.981.000	98,70
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.535.000	19.535.000	100

	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.792.000	24.792.000	100
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.990.000	6.990.000	100
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000	1.025.000	100
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.620.000	21.840.000	96,55
	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	1.560.000	1.560.000	100
	3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	153.934.400	153.934.400	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.902.000	126.473.400	98,12
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.650.000	13.650.000	100
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.252.000	67.823.400	96,54
	3. Pengadaan Alat – Alat Studio	45.000.000	45.000.000	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.655.000	1.655.000	100
	1. Rapat Koordinasi Lintas SKPD	1.655.000	1.655.000	100

26. Bagian Administrasi Perekonomian

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
1.	Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha tahun 2019	Dokumen	1
		Terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur.		2,5%
		Terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan	Dokumen	1

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha tahun 2019	Dokumen	1	1	100
		Terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian	Dokumen	2,5%	2,45%	100

		Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur.				
		Terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan	Dokumen	1	1	100

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	IKU	2017 (%)	2018 (%)	2019		%
					Target	Realisasi (%)	
01.	Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan	Persentase Penyaluran Bantuan RASKIN kepada RTS-PM sesuai target 6 (enam) tepat yaitu : tepat sasaran Penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.	100%	100%	-	-	-
		Terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur	100%	100%	2,5%	2,45%	100%
		Terlaksananya Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Statistik Ekonomi Daerah Kabupaten Manggarai Timur.	100%	100%	-	-	-
		Terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha tahun 2019	-	-	1	1	100%
		Terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan	-	-	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi capaian koordinasi pengelolaan RASKIN pada tahun 2017 adalah mencapai 100 %. Tahun 2018, realisasi kinerja pengelolaan RASKIN adalah mencapai 100 %. Sedangkan kegiatan koordinasi pengelolaan RASKIN/RASTRA pada tahun 2019 bukan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda lagi sehingga antara target dan realisasi nihil. Sekretariat pengelolaan RASKIN tahun 2019 di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

- b. Capaian target dan realisasi hasil koordinasi terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 mencapai 100%, Tahun 2018 100% dan Tahun 2019 100%. Rekapitulasi angka inflasi tahunan Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk dokumen.
- c. Capaian target pengumpulan, penyusunan dan penyajian data statistik ekonomi daerah Kabupaten Manggarai Timur yang fokus pada data produksi daerah, pada tahun 2017 mencapai 100%, pada tahun 2018 mencapai 100% dan pada tahun 2019 kegiatan pengumpulan, penyusunan dan penyajian data statistik ekonomi daerah Kabupaten Manggarai Timur tidak terakomodir lagi.
- d. Target capaian terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha, pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum terinclude dalam program kegiatan. Sedangkan pada tahun tahun 2019 terinclude dalam kegiatan dan mempunyai target 1 (satu) kali rapat koordinasi dengan realisasi 100%.
- e. Terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan, Pada tahun 2017 dan tahun 2018 koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan belum ada di Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Sedangkan pada tahun 2019 koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangansudah terinclude pada salah satu kegiatan dengan target rapat koordinasinya adalah 100%. Realisasi adalah mencapai 100%.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	IKU	2018 (%)	2019			Target Akhir RPJMD 2019 (%)	Capaian s/d 2019 terhadap Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	%		
01.	Persentase Penyaluran Bantuan RASKIN kepada RTS-PM sesuai target 6 (enam) tepat yaitu : tepat sasaran Penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.	100%	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur	100%	2,5%	2,45%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengumpulan,						

Penyusunan dan Penyajian Data Statistik Ekonomi Daerah Kabupaten Manggarai Timur.	100%	-	-	-	100%	100%
Terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha tahun 2019	-	1	1	100%	100%	100%
Terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan	-	1	1	100%	100%	100%

- a. Persentase Penyaluran Bantuan RASKIN kepada RTS-PM sesuai target 6 (enam) tepat yaitu : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, dari indikator ini pada tahun 2018 realisasi dari target mencapai 100%, Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada target karena sekretariat pengelolaan RASKIN/RASTRA di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.
 - b. Target inflasi tahun 2019 2,5%, capaian inflasi dari target ini adalah 2,45% Indikator kinerja terlaksananya penghitungan inflasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 dan tahun 2019 targetnya capaian kinerjanya 100% dengan kegiatan 2 (dua) kali rapat koordinasi, satu dokumen hasil penghitungan inflasi tahun 2019.
 - c. Indikator kinerja terlaksananya koordinasi satuan tugas percepatan berusaha tahun 2018 dan tahun 2019 targetnya 1 (satu) dokumen, capaiannya kinerjanya 100%.
 - d. Indikator kinerja terlaksananya koordinasi bidang sumber daya alam khususnya pertambangan, indikator kinerja ini pada tahun 2018 belum terinclude pada program kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian. Namun pada tahun 2019 sudah terinclude pada program dan kegiatan. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 1 (satu), dengan capaiannya 100%.
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai**

Data Kepegawaian Bagian Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2019.

No.	Nama / NIP	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Gol
01.	Darung Thomas, S.Sos NIP.19620927 198603 1 011	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda	III - a	S - 1	IV / b
02.	Vitalis Jebarus, SE NIP.19761216 200903 1 005	Kasubag Pembinaan Perekonomian	IV - a	S - 1	III / c

03.	Marianus Suryanto Hinar, SE NIP.19780908 200903 1 004	Kasubag Sarana Perekonomian	IV - a	S - 1	III / c
04.	Teofilus Rahmat, SE NIP.19800611 2010011 1 019	Kasubag Produksi Daerah	IV - a	S - 1	III / c
05.	Julius Kurniawan, SE NIP.19870716 201503 1 005	Fungsional Umum	III - a	S - 1	III / a
06.	Maria Yasinta Jewarut, SE	Staf (THL)	-	S - 1	-
07.	Yuliana Siria Jelamu, SE	Staf (THL)	-	S - 1	-
08.	Yohanes Dion M. Hinar, S.Kom	Staf (THL)	-	S - 1	-
09.	Antonnius Dego	Staf (THL)	-	SLTA	-
10.	Elias Erno	Staf (THL)	-	SLTA	-

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan penunjang IKU antara lain:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagian Administrasi Perekonomian Setda		311.752.700	311.179.522	99,82
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.845.220	234.845.220	100
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240.000	240.000	100
	2. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	49.077.000	49.077.000	100
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.047.250	20.047.250	100
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	500.000	500.000	100
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.698.600	10.698.600	100
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.658.850	11.658.850	100
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	1.740.000	1.740.000	100
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.000.000	3.000.000	100
	9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	214.791.000	214.217.822	99,73
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.782.000	54.085.128	98,73
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	54.782.000	54.085.128	98,73
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.080.700	3.080.700	100
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.080.700	3.080.700	100
IV.	Program Fasilitasi Kebijakan dan Program Pemerintah	59.788.400	52.737.400	88,21
	1. Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha	59.788.400	52.737.400	88,21
V.	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan SDA	306.697.800	298.017.000	97,17
	1. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	274.179.800	265.499.000	96,83
	2. Koordinasi Peningkatan Produksi dan Produktifitas SDA dan Ketahanan Pangan Daerah	32.518.000	32.518.000	100
J U M L A H		736.101.600	719.099.750	97,69

27. Bagian Administrasi Pembangunan

a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
1	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah	Persentase Pekerjaan Pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100% (250 Kegiatan)

b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah	Persentase Pekerjaan Pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100% (250 Keg.)	94% (236 Keg.)	94%

Untuk tahun anggaran 2019, dari IKU yang dicantumkan pada kolom di atas, satuan yang digunakan adalah %, sementara target yang ditetapkan adalah 100% atau 250 kegiatan dan pencapaian atau realisasi pada tahun 2019 adalah 94% atau 236 kegiatan.

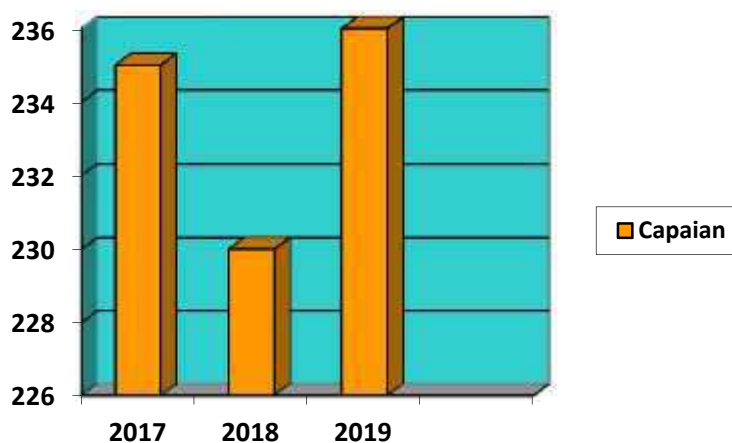
c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator	2017 (%)	2018 (%)	2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah	Persentase Pekerjaan Pembangunan yang selesai tepat waktu	93% (235 (Keg))	92% (230 (Keg))	100% (250 Keg)	94% (236 Keg)	94%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu pada tahun 2019 dengan target 100% (250 Kegiatan) dan realisasi 94,4% (236 kegiatan) atau capaian kinerja 94,4%. Dibandingkan tahun 2017 (93%) dan 2018 (92%) terjadi peningkatan jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu pada tahun 2019.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pada tahun 2019 sasaran yang dipakai adalah meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah dengan indikator Persentase Pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu. target setiap tahun adalah 100% (250 Kegiatan), pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018 persentase pencapaian adalah 92% (230 Kegiatan) sedangkan untuk tahun 2019 capaiannya adalah 94% (236 Kegiatan). Berdasarkan data yang tersaji dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja 2017, 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Data Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019.

NO	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Golo	Ket
1	David Daud, S.Pt 19690319 199403 1 005	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	Pembina Tk I/ IV B	
2	Maksim N. Ndanu 19641231 198703 1 353	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Penata / III C	
3	Maximus Sines, S.Kom 19631231 199403 1 123	Kasubag Pengendalian	Penata / III C	
4	Heronimus Namu, ST 19810417 201001 1 027	Kasubag Program	Penata / III C	
5	Hironimus Gunardi, A.Md 19830110 201001 1 026	Staf/Pelaksana	Penata Muda	

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Prog/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.504.700	245.892.337	97.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	1.760.000	100
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.744.000	32.700.000	99.87
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.100.000	38.023.000	97.25
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.475.000	4.475.000	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	24.025.000	24.025.000	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.480.000	24.480.000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.740.000	1.740.000	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.600.000	4.800.000	50.00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	114.725.000	113.033.887	98.53
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	855.000	855.000	100
II	Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.369.248	79.833.000	90.34
1	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.369.248	79.833.000	90.34

III	Prog : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	249.316.052	238.615.882	95.71
1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	118.502.052	116.525.000	98.33
2	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	130.814.000	122.090.882	98.33
	Jumlah	629.394.000	601.418.219	95.56

28. Bagian Organisasi

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja Bagian Organisasi Setda pada tahun 2019 adalah peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator yang digunakan adalah presentase OPD yang menyampaikan dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu dengan target 100%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	%	100

b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	%	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, penetapan sasaran strategis pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 adalah Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu dengan satuan yang

ditetapkan adalah persen (%) serta target yang ditentukan sebesar 100 %, adapun realisasinya sebesar 100 %.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2017	Tahun 2018	Capaian Tahun 2019		
				Target	Raealisasi	%
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, penetapan sasaran strategis pada bagain Organisasi tahun 2019 Adalah Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator kinerja utama yang digunakan adalah Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 100 %, tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100 %. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 100 % dengan realisasi program yang dijalankan sebesar 100 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja dan pelaksanaan program tahun 2017, 2018, dan tahun 2019 tidak mengalami penurunan dengan dibuktikan realiasasi program yang sama-sama mencapai angka 100 %, serta membuktikan bahwa Bagian Organisasi tetap konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dari tahun ke tahun.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah pada Bagian Organisasi Setda Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2019			Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir RPJMD 2019
		Target	Realisasi	%		
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, penetapan sasaran strategis pada Bagain Organisasi tahun 2019 adalah Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator kinerja utama yang digunakan adalah Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu. Target yang ditetapkan sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100 %. Hal ini sejalan dengan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 % dan realisasi capaian akhir RPJMD 2019 sebesar 100 %.

e) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh satu Kepala Bagian, tiga Subbagian dan Staf, jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) orang Aparatur Sipil Negara. Berikut akan ditampilkan data pegawai pada Bagian Organisasi dengan struktur sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Bagian	1
2	Kasubag Analis Formasi Jabatan & Kelembagaan	1
3	Kasubag Tatalaksana	-
4	Kasubag Kinerja dan Pembinaan Aparatur	-
5	Jabatan Pelaksana	7
6	Jabatan Fungsional Tertentu	1
	Jumlah	10

Sumber : PETA Jabatan Bagian Organisasi Setda 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jabatan yang lowong pada Bagian Organisasi adalah Kasubag Tatalaksana dan Kasubag Kinerja dan Pembinaan Aparatur. Yang mana tugas dari salah satu kasubag yang lowong tersebut adalah menyusun LAKIP yang merupakan indikator kinerja utama pada Bagian Organisasi. Tugas tersebut melekat pada kepala subbagian Kinerja dan Pembinaan Aparatur. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka salah satu staf menjabat sebagai pelaksana tugas harian kepala subbagian Kinerja dan Pembinaan Aparatur yang akan dibantu oleh 8 (delapan) orang staf Tenaga Harian Lepas.

Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan kinerja dalam penyelesaian LAKIP tersebut dilakukan pembagian tugas utama yakni :

- a. Mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan di Subbagian Kinerja dan Pembinaan Aparatur;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan di Subbagian Kinerja dan Pembinaan Aparatur;
- c. Melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Kinerja dan Pembinaan Aparatur;
- d. Mengumpulkan data LAKIP;
- e. Menyajikan data LAKIP;
- f. Mengoreksi dan mengklarifikasi data LAKIP ke setiap Perangkat Daerah;
- g. Menyusun LAKIP final;
- h. Mendata jumlah pegawai;

- i. Mengevaluasi program dan kegiatan di subbagian kinerja dan pembinaan aparatur;
- j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di subbagian kinerja dan pembinaan aparatur;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Dengan demikian pemanfaatan sumber daya (aparatur) pada Bagian Organisasi dengan sistem kerjasama “secara rembuk” dapat berjalan dengan lancar/baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga target kinerja berupa Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu mencapai realisasi sebesar 100%.

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian Kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan anggaran. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut didukung dengan dana sebesar **Rp.486.828.500,-** dan terealisasi sebesar Rp. **438.457.000,-** atau mencapai **90,06 %** seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran	Indikator	Prog/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentasi OPD Yang Menyampaikan LAKIP Yang Terintegrasi dan Tepat Waktu	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	124.449.500	104.932.500	84
			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	362.379.000	333.524.500	92,03
Jumlah				486.828.500	438.457.000	90,06

Sedangkan Akuntabilitas keuangan Program dan Kegiatan Lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Sumber dana
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	327.985.200	310.197.200	94	17.788.000	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100	-	APBD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.171.000	145.317.000	97	3.854.000	APBD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.774.000	19.774.000	100	-	APBD
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000	4.000.000	100	-	APBD
	Penyediaan ATK	18.568.000	18.568.000	100	-	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.247.200	11.247.200	100	-	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang	1.800.000	1.740.000	97	60.000	APBD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.400.000	5.400.000	100	-	APBD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan	116.825.000	102.951.000	88	13.874.000	APBD

	Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah					
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.667.000	61.531.000	94	4.136.000	APBD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.667.000	61.531.000	94	4.136.000	APBD
3	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	242.537.500	218.185.500	90	24.352.000	APBD
	Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur	242.537.500	218.185.500	90	24.352.000	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	23.165.000	22.920.000	98	245.000	APBD
	Pelaksanaan FORKOMPANDA	23.165.000	22.920.000	98	245.000	APBD
	JUMLAH	659.354.700	612.833.700	92,94	46.521.000	APBD

Berdasarkan data pada kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan anggaran pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 sebesar **Rp. 1.146.183.200,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.051.290.700,-** atau **92 %** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 94.892.500** ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran serta pelaksanaan program di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 dikategorikan baik.

29. Bagian Hukum

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penataan produk Hukum Daerah	Jumlah Penanganan Kasus	2 kasus
		Jumlah peraturan Daerah	6 Desa/ kelurahan
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Paham Hukum	3 Desa/ kelurahan
		Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusikan	210 Buku
		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	9 Desa/ kelurahan
		Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan	15 Perbup

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penataan produk Hukum Daerah	Jumlah Penanganan Kasus	2 kasus	1	50
		Jumlah peraturan Daerah	6 Desa/ kelurahan	12	200
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Paham Hukum	3 Desa/ kelurahan	3	100
		Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusikan	210 Buku	210	100
		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	9 Desa/ kelurahan	9	100

	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan	15 Perbup	76	506
		100 SK	289	289

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penanganan Kasus dengan target sebanyak 2 (dua) kasus dengan realisasi 1(satu) kasus atau 50%. Dikatakan satu kasus karena pemerintah daerah menghadapi gugaatan dari PNS yang diberhentikan.
- 2) Jumlah Peraturan Daerah dengan target sebanyak 6 (enam) Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan dalam tahun 2019 sebanyak 12 Produk Hukum Dearah berupa Peraturan Daerah atau 200 %. Dalam kegiatan ini targetnya yakni 6 Peraturan daerah dan realisasinya 12 Peraturan Daerah yang ditetapkan atau 200%.
- 3) Jumlah Desa/Kelurahan yang diberikan Penyuluhan Hukum dengan target sebanyak 3 (tiga) desa/kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan realisasinya 3 (tiga) desa/kelurahan atau 100% terlaksana.
- 4) Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusi dengan target sebanyak 210 buku dan realisasinya 210 buku atau 100 % yang didistribusikan.
- 5) Jumlah Desa /Kelurahan yang dibina menjadi Desa Sadar Hukum dengan target 9 Desa/Kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan. Dengan realisasi 9 desa/kelurahan yang tersebar di 9 Kecamatan yang menjadi Desa Binaan atau 100%.
- 6) Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan target 15 Peraturan Bupati dan menghasilkan 76 Peraturan Bupati dengan realisasi 506%. Sedangkan target 100 Keputusan Bupati dan menghasilkan 289 Keputusan Bupati atau 289%.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017 (%)	2018 (%)	2019		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penanganan Kasus	50	0	2	1	50
	Jumlah Peraturan Daerah	166	150	6	12	200
	Jumlah Desa/ kelurahan yang Paham Hukum	100	100	3	3	100
	Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusikan	100	100	210	210	100
	Jumlah		100	9	9	100

	Desa/Kelurahan yang dibina	100				
	Jumlah peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan	453	347	15	76	506
		223	320	100	289	289

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 pada program meningkatnya penataan produk hukum daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan dengan indikator dan targetnya sebagai berikut:

1. Jumlah penanganan kasus pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 2 (dua) dengan realisasi 1 kasus atau 50%. Pada tahun 2018 tidak memiliki kasus yang melibatkan Pemerintah Daerah. Namun memiliki target sebanyak 2 kasus dengan realisasi 0% karena tidak adanya masalah yang dihadapi atau melibatkan Pemerintah Daerah pada Tahun 2018, sehingga anggaran yang ada dialihkan pada kegiatan lain. Namun demikian Sasaran Target Kinerja Bagian Hukum yang dicapai adalah 100%, dengan asumsi semakin minimnya kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik selalu menjadi pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam bertindak, baik tindakan hukum maupun tindakan nyata, sehingga tidak berpotensi melanggar hukum dan tidak sampai digugat di Pengadilan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan 2 (dua) Kasus dengan realisasi yaitu 1 (satu) Kasus atau 50%. Dikatakan satu kasus karena Pemerintah Daerah menghadapi gugatan dari PNS yang diberhentikan. demikian Indikator Jumlah Penanganan Kasus disini untuk setiap tahunnya adalah pada Jenis kasus yang dihadapi, yaitu Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, bukan dihitung dari banyaknya Kasus, melainkan pada jenis kasusnya sesuai dengan kompetensi peradilan.
2. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan/dihasilkan pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 6 (enam) Perda dan Perda yang berhasil ditetapkan adalah 10 Perda atau 166%. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan/dihasilkan pada Tahun 2018 dengan target sebanyak 6 (enam), dan Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan adalah 9 Peraturan Daerah dengan realisasi sebesar 150%. Sedangkan pada Tahun 2019 memiliki target yaitu sebanyak 6 buah Peraturan Daerah. Namun realisasi kegiatan ini dengan realisasinya yakni 12 Peraturan Daerah, atau 200%.
3. Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberikan Penyuluhan Hukum pada tahun 2017 dengan target sebanyak 5 (lima) desa/kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan)

kecamatan dengan realisasinya 5 (lima) desa/kelurahan atau 100% dan Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberikan Penyuluhan Hukum pada tahun 2018 dengan target sebanyak 5 (lima) Desa/Kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Sedangkan target ditahun 2019 sebanyak 3 (tiga) Desa/Kelurahan dengan realisasinya 3 (tiga) desa/kelurahan yang diberikan penyuluhan Hukum atau 100% terealisasi.

4. Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusi pada tahun 2017 dengan target sebanyak 210 buku dan realisasinya 210 buku atau 100 % yang didistribusikan dan Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusi pada tahun 2018 dengan target sebanyak 210 buku dan realisasinya 210 buku atau 100 % yang didistribusikan. Pada tahun 2019 memiliki target yang Sama yakni 210 buku dan realisasinya 210 atau 100%.
5. Jumlah desa/kelurahan yang dibina, pada Indikator ini target dan realisasi pada tahun 2017 berbeda dengan 2018. Yakni pada tahun 2017 target 7 (tujuh) Desa /Kelurahan yang dibina menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan realisasi 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yang menjadi desa binaan dengan realisasi 100% sedangkan Jumlah desa/Kelurahan yang dibina pada tahun 2018 dengan target 9 Desa/Kelurahan dan realisasinya juga 9 Desa//kelurahan atau 100%. Pada tahun 2019 memiliki target yang yakni target 9 Desa /Kelurahan yang dibina menjadi Desa Sadar Hukum dengan realisasi 9 Desa/Kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yang menjadi Desa Binaan.
6. Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pada tahun2018 Indikator kinerja ini memiliki target 15 Peraturan bupati dan 100 keputusan bupati sama dengan tahun 2017 sedangkan realisasinya berbeda dengan tahun 2018. Pada tahun 2017 peraturan bupati yang dihasilkan sebanyak 68 atau 453%. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan pada tahun 2017 sebanyak 223 atau 223%. Pada tahun 2018 memiliki target 15 Peraturan Bupati dengan realisasi sebanyak 52 Peraturan Bupati yang ditetapkan/dihasilkan atau 347% dan 100 Keputusan bupati realisasinya 320 Keputsan Bupati atau 320%. Sedangkan pada tahun 2019 peraturan bupati memiliki target 15 peraturan bupati yang dihasilkan sebanyak 76 atau 506% . Sedangkan target sebanyak 100 Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan sebanyak 289 dengan realisasinya 289 %.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penataan produk	Jumlah Penanganan Kasus	2 kasus	1	50
	Jumlah peraturan Daerah	6 Desa/	12	200

Hukum Daerah		kelurahan		
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Paham Hukum	3 Desa/kelurahan	3	100
	Jumlah Himpunan Lembaran Daerah yang didistribusikan	210 Buku	210	100
	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	9 Desa/kelurahan	9	100
	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dihasilkan	15 Perbup	76	506
		100 SK	289	289

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Pada Tahun 2019, jumlah Pegawai pada Bagian Hukum sebanyak 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menurut Tingkat Pendidikan.
 - 1) S2 : 1 orang
 - 2) S1 : 3 orang
 - 3) SMA : 1 orang
- b. Menurut Pangkat dan Golongan
 - 1) Golongan IV : 1 orang
 - 2) Golongan III : 4 orang
- c. Menurut Jabatan Struktural
 - 1) Eselon III : 1 orang
 - 2) Eselon IV : 2 orang
- d. Staf : 2 orang.

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	254.729.800	254.729.800	99,98%
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220.000	220.000	100 %
	b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.413.000	26.413.000	100 %
	c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.400.000	18.400.000	100 %
	d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	600.000	600.000	100 %
	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.183.800	23.183.800	100 %
	f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	390.000	390.000	100 %
	g. Penyediaan Bahan Bacaan dan buku Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	100 %
	i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	205.855.000	205.808.000	99,98%
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	53.259.500	35.312.000	66,30%
	a. Pengadaan mebeleur	-	-	-

	b. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional	53.529.500	35.312.000	66,30%-
3.	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	59.260.000	59.202.000	99,90%
	a.Koordinasi Konsultasi yang Lebih Komperensif	413.000	413.000	100%
	b.koordinasi percepatan pemberantasan KKN INPRES Nomor 5 tahun 2004	58.847.000	58.789..000	99,90%
	JUMLAH	388.481.300	370.428.800	95,35%

30. Sekretariat Dewan

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berdemokrasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan Rakyat daerah	Angka	177
		Persentase Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan tepat waktu (pembahasan PERDA, PANSUS)	Persen	100
		Persentase jumlah PERDA yang dibahas tepat waktu	persen	100

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berdemokrasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan Rakyat daerah	Angka	177	Unit	117	Unit	66,10
2.		Persentase Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan tepat waktu (pembahasan PERDA, PANSUS)	Persen	100	Persen	100	persen	100
3.		Persentase jumlah PERDA yang dibahas tepat waktu	persen	100	persen	100	persen	100

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator	2017 (%)	2018 (%)	2019		
					Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berdemokrasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41,24	6,21	177	117	66,10
2.		Persentase kegiatan DPRD yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.		Persentase jumlah Perda yang dibahas tepat waktu	100	100	100	100	

Adapun program dan kegiatan TA. 2019 yang terlaksana berdasarkan rencana terutama program dan kegiatan yang mempengaruhi kinerja:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana DPRD.

- a) Target tahun 2017 sebanyak 177 unit. Dan terealisasi sebanyak 73 unit. Atau sebesar 41,24%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur hanya dianggarkan sebanyak 73 unit berdasarkan prioritas kebutuhan sarana dan prasaran pada tahun 2017.
- b) Target tahun 2018 sebanyak 177 unit. Dan terealisasi sebanyak 11 unit. Atau sebesar 6,21%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur hanya dianggarkan sebanyak 11 unit berdasarkan prioritas kebutuhan sarana dan prasaran pada tahun 2018.
- c) Target tahun 2019 sebanyak 177 unit. Dan terealisasi sebanyak 117 unit. Atau sebesar 66,10%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur hanya dianggarkan sebanyak 141 unit berdasarkan prioritas kebutuhan sarana dan prasaran pada tahun 2019. Pada tahun 2019 masih ada 24 unit yang tidak terealisasi.

Berdasarkan persentase realisasi tahun 2017 dan 2018, maka realisasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan 59,89 %.

2. Persentase Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu. Dalam hal ini kegiatan berupa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus LKPJ dan LHP BPK, Panitia Kerja Perda Inisiatif, Kegiatan Reses, Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta sosialisasi Peraturan Daerah.

Target tahun 2019 : 100 %

Realisasi tahun 2019: 100%

3. Persentase Jumlah Perda yang dibahas tepat waktu.

Dalam hal ini semua Ranperda yang dibahas telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui tahapan-tahapan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Target tahun 2019 : 100%

Realisasi tahun 2019 : 100%

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Target		Realisasi	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan	Angka	177	Unit	117	Unit

	dalam	Rakyat daerah					
2.	pembangunan dan berdemokrasi	Persentase Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan tepat waktu (pembahasan PERDA, PANSUS)	Persen	100	Persen	100	persen
3.		Persentase jumlah PERDA yang dibahas tepat waktu	persen	100	persen	100	persen

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur keadaan per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 12 (Dua belas) orang yang mendukung Program dan Kegiatan pada OPD tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

- a) Sarjana (S2) : 1 orang
- b) Sarjana (S1) : 11 orang
- c) Diploma : -

2) Pangkat/Golongan

- a) Golongan IV : 3 orang
- b) Golongan III : 9 orang
- c) Golongan II : -

3) Jabatan Struktural

- a) Eselon III : 3 orang
- b) Eselon IV : 9 orang

4) Staf : 1 orang

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program pelayanan administrasi perkantoran	4.115.809.880,-	4.202.740.570	97,68
1.	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	5.290.000,-	5.280.000,-	99,81
2.	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	123.500.000,-	117.233.928,-	94,93
3.	Kegiatan penyediaan jasa	297.008.000,-	274.597.120,-	92,,45

	pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			
4.	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	964.626.000,-	924.729.850,-	95,86
5.	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	164.992.000,-	164.642.000,-	99,79
6.	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.700.000,-	18.690.000,-	99,95
7.	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	67.640.630,-	67.627.300,-	99,98
8.	Kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan	75.333.750,-	75.320.750,-	99,98
9.	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.783.500,-	14.346.500,-	97,04
10.	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.960.000,-	6.680.000,-	95,98
11.	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman kantor	524.000.000,-	523.816.600,-	99,97
12.	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.852.976.000,-	1.827.233.336,-	98,61
	Program peningkatan disiplin aparatur	352..000.000,-	336.443.790,-	95,58
13.	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	352..000.000,-	336.443.790,-	95,58
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.999.750,-	399.000,-	19,95
14.	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd	1.999.750,-	399.000,-	19,95

31. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	35.000 orang
2	Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan	Persen	5 kali

b) Perjanjian Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	35.000 orang	15.613 orang
2	Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan	Persen	5 kali	1 kali

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi		Capaian(%) Tahun 2019	Capaian s/d 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Tahun 2018	Tahun 2019		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	35.000 orang	14.895 orang	15.613 orang	107,7 %	222,76 %
2	Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan	Persen	5 kali	1 kali	1 kali	100%	100%

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2019
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	35.000 orang	15.613 orang
2	Jumlah Kompetisi yang diselenggarakan	Persen	5 kali	1 kali

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

1. PNS /ASN 32 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut

a. Tingkat Pendidikan

S 2	: 4 orang
S 1	:17 orang
D III	: 6 orang

SLTA / SMK : 5 orang

b. Diklat Penjurusan

PIM III : 2 orang

PIM IV : 2 orang

c. Tingkat Eselonering

Eselon II : 1 orang

Eselon III : 6 orang

Eselon IV : 13 orang

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 36 Orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Program / kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	538.200.000	535.401.250	99%
1	Pelayanan jasa surat menyurat	3.020.000	3.013.000	99,77%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.200.000	4.738.000	91,12%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.081.000	59.774.050	99,49%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	136.308.000	134.602.750	99%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	79.428.200	79.425.600	99,99%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000	4.000.000	100%
7	Penyediaan alat tulis kantor	51.600.000	51.500.500	99,80%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.432.800	15.297.000	99,12%
9	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.390.000	2.390.000	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.740.000	1.740.000	100%
11	Penyediaan makan dan minum kantor	15.000.000	15.000.000	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164.000.000	163.920.350	99,95%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.000.000	1.000.000	100%
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.000.000	1.000.000	100%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.600.000	7.600.000	100%

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	7.600.000	7.600.000	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

32. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	%
1	2	3	4
Meningkatnya perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah - masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	100%	100%
	Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama	100%	100%
	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%

b) Perjanjian Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3		
Meningkatnya perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah - masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja setiap Sasaran dan Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat

1.	Indikator	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
	Target	100 %
	Realisasi	100 %
	Persentase	100 %

Tindak lanjut dari indikator ini adalah kegiatan

- ✓ Pemantuan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pendidikan dan kesehatan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan OPD terkait di bidang pendidikan dan kesehatan dengan mengikuti berbagai kegiatan pada OPD teknis terkait. Selain itu, juga dilakukan pemantauan dan evaluasi mengenai infrastruktur bangunan sekolah, puskesmas dan pustu yang dibangun baru dan yang direhabilitasi serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Bupati. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi juga dilakukan menyangkut program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Capaian indikator pada kegiatan ini adalah 100%.

- ✓ Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pemberdayaan perempuan dan anak

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di sub bagian pemberdayaan perempuan dan anak dengan mengikuti berbagai kegiatan pada OPD teknis terkait antara lain penyuluhan dan pelayanan KB, memantau pelaksanaan kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK). Capaian indikator pada kegiatan ini adalah 100%.

- ✓ Pemantuan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah tenaga kerja dan transmigrasi

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur untuk mengetahui data usaha di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Timur.
- Pemantauan dan evaluasi kepada biro jasa penyalur tenaga kerja baik tenaga kerja antar Provinsi maupun tenaga kerja antar Negara. Pelaksanaan kegiatan pemantaun dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui legalitas usaha tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah tenaga kerja yang di rekrut melalui biro jasa tenaga kerja tersebut. Dari data tersebut diperoleh informasi mengenai desa-desa potensial penyumbang tenaga kerja yang direkrut. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang memilih melalui proses perekrutan oleh biro jasa tenaga kerja.
- Pengambilan data ketenagakerjaan di beberapa desa potensial yang menurut informasi yang diperoleh bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar daerah antar provinsi jumlahnya cukup signifikan. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja illegal yang tidak memiliki dokumen resmi.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tenaga kerja ilegal yang mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai mekanisme perekrutan dari biro jasa tenaga kerja yang masih aktif. Diharapkan adanya peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja oleh OPD teknis, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses tersebut agar kedepannya dapat menekan angka tenaga kerja ilegal. Capaian indikator pada kegiatan ini adalah 100%.

2.	Indikator		Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama
	Target		100 %
	Realisasi		100 %
	Persentase		100 %

Tindak lanjut dari indikator ini adalah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama.

✓ Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi quota haji asal Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019. Pada umumnya, kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum keberangkatan para Jemaah Calon Haji, terlebih dahulu dilaksanakan Acara Pelepasan Jemaah Calon Haji. Setelah itu dilanjutkan dengan pengantaran Jemaah Calon Haji menuju embarkasi keberangkatan di Surabaya (Asrama Haji Sukolilo Surabaya). Selanjutnya, kegiatan fasilitasi untuk para Jemaah Calon Haji dilaksanakan oleh panitia pusat. Setelah melaksanakan Ibadah Haji di Mekah, para Haji dijemput lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur di Ruteng Kabupaten Manggarai. Pencapaian indikator pada kegiatan ini sebesar 100%.

Kegiatan Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama

✓ Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang agama antara lain melalui kegiatan mengikuti kunjungan kerja bupati dan wakil bupati pada kegiatan-kegiatan keagamaan, pengambilan data-data keagamaan antara lain data rumah ibadah menurut masing-masing agama, data jumlah umat beragama menurut masing-masing agama, data rohaniwan menurut masing-masing agama serta data kasus-kasus yang bernuansa agama selama lima tahun terakhir. Pencapaian indikator pada kegiatan ini sebesar 100%.

	Indikator	:	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Target		100 %
	Realisasi		100 %
	Persentase		100 %

Tindak lanjut dari indikator ini adalah kegiatan Koordinasi penanganan pemberian bantuan sosial. Pada kegiatan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proposal-proposal permohonan bantuan dana baik berupa bantuan sosial maupun bantuan hibah. Untuk bantuan sosial berupa bantuan keuangan yang sebelumnya tidak direncanakan untuk masyarakat tidak mampu misalnya untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit dan Biaya Pemulangan Jenazah dari masyarakat Manggarai Timur yang mengalami musibah dan berada di luar wilayah Manggarai Timur. Sedangkan bantuan hibah terdiri dari hibah tetap dengan hibah yang direncanakan. Hibah diperuntukan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, dan bagi fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ dan Pesparani), serta bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah. Capaian indikator pada kegiatan ini adalah 100%.

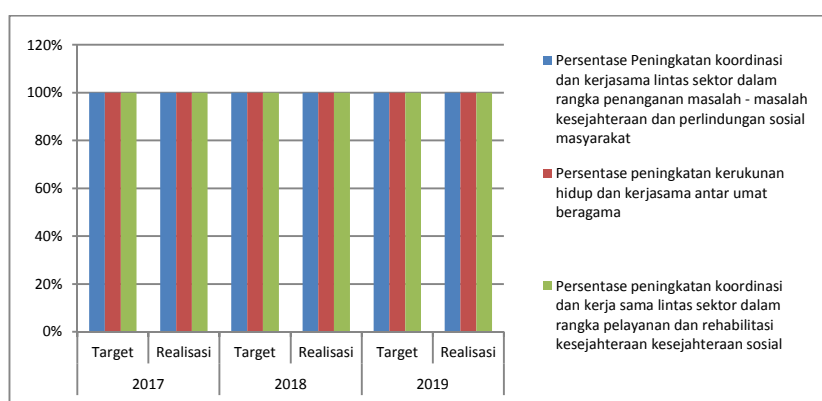
c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Utama	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>			<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Meningkatnya perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah - masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<p> pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan kesejahteraan social </p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang didukung oleh beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran. Perbandingan realisasi kinerja dari setiap Indikator yaitu :

- a) Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah-masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi kinerja 100% selama dua tahun terakhir.
- b) Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama. Target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi kinerja 100% selama dua tahun terakhir.
- c) Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi kinerja 100% selama dua tahun terakhir.



Tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2017 dan 2018 pada Sasaran meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Meningkatnya perlindungan Sosial bagi masyarakat	Persentase Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan masalah - masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	100%	100%
	Persentase peningkatan kerukunan hidup dan kerjasama antar umat beragama	100%	100%

	Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%
--	---	------	------

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Data Pegawai pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :

- a. PNS : 7 orang
- b. THL : 4 orang
- Jumlah : 11 orang

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut tingkat pendidikan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SI	6 Orang
2.	DIII	1 Orang
JUMLAH		7 Orang

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut tingkat Pangkat/ Golongan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk I, IV/b	1 Orang
2.	Penata Tk.I, III/d	1 Orang
3.	Penata, III/c	2 Orang
4.	Penata Muda, III/a	2 Orang
5.	Pengatur Tk. I, II/d	1 Orang
JUMLAH		7 Orang

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bagian	1 Orang
2.	Kasubag Pendidikan dan Kesehatan	1 Orang
3.	Kasubag Pemberdayaan Perempuan dan Agama	1 Orang
4.	Kasubag Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Orang
JUMLAH		4 orang

Data Tenaga Harian Lepas (THL) menurut tingkat pendidikan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SI	2 Orang
2.	SLTA	2 Orang
JUMLAH		4 Orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan umum/ rutin yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.094.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000,-
 - b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.594.000,-
 - c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.787.000,-
 - d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-
 - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.813.000,-
 - f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.287.200,-
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000
 - h) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
 - i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.513.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.649.100,- dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.649.100,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.165.000,- dengan rincian kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.165.000,-

33. Sekretariat KORPRI

a) Target Kinerja Dalam Penetapan Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan Kesadaran Mental, Rohani,	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan	orang	550

	Olahraga, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum	orang	5
Jumlah				

1. Berdasarkan Akuntabilitas Indikator Kinerja Utama Korpri Tahun 2019 sasaran strategis meningkatnya pembinaan kesadaran mental, Rohani, Olahraga, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum bagi anggota Korpri, dengan indikator kinerjanya :
2. Presentase Jumlah anggota Korpri yang mendapat Pembinaan dengan target 550 orang realisasi 0 orang atau 0 %. Hal ini dikarenakan tidak ada pagu anggaran sehingga tidak ada realisasinya.
3. Presentase jumlah anggota Korpri yang mendapat bantuan hukum dengan target 5 orang realisasi 0 capaiannya 0 %. Hal ini di karenakan belum ada perjanjian kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dengan ikatan Advokat Indonesia dan tidak ada pagu anggaran sehingga tidak ada realisasinya.

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pembinaan Kesadaran Mental, Rohani, Olahraga, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan	Orang	550 orang	-	-
		Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum	Orang	5 orang	-	-
Jumlah					-	-

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Pembinaan Kesadaran Mental, Rohani, Olahraga, Kesejahteraan, dan	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan	orang	500	202	40,4	550	-	-

Perindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum	orang	5	-	-	5	-	-
---------------------------------------	--	-------	---	---	---	---	---	---

1. Berdasarkan Akuntabilitas Indikator Kinerja Utama Korpri Tahun 2019 sasaran strategis meningkatnya pembinaan kesadaran mental, Rohani, Olahraga, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum bagi anggota Korpri, dengan indikator kinerjanya :
2. Presentase Jumlah anggota Korpri yang mendapat Pembinaan dengan target 550 orang realisasi 0 orang atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak ada pagu anggaran sehingga tidak ada realisasinya. Capaian kinerja tahun 2018 dengan target 500 orang realisasi 202 orang atau 40,4%. Target tahun 2018 dan 2019 pembinaan dilakukan untuk seluruh ASN yang ada untuk Kabupaten Manggarai Timur.
3. Presentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum dengan target 5 orang realisasi 0 capaiannya 0%. Hal ini di karenakan belum ada perjanjian kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dengan ikatan Advokat Indonesia dan tidak ada pagu anggaran sehingga tidak ada realisasinya.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pembinaan Kesadaran Mental, Rohani, Olahraga, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan	Orang	550 orang	-	-
		Persentase jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum	Orang	5 orang	-	-
Jumlah					-	-

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai

Aspek Kepegawaian KORPRI Tahun 2019
 Data Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan
 Golongan III : 4 orang

Data Pegawai Negeri Sipil menurut Eselonering

No	Eselon	Yang Dibutuhkan	Keadaan 2019
1	II B	-	-
2	III A	-	-
3	III B	-	1 Orang
4	IV B	1 Orang	2 Orang

Data Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Tingkat Pendidikan Formal

S1 : 4 orang

SLTA : 1 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Uraian program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	215.632.540	215.572.540	99,97
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.00	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.000	399.000	100
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.579.000	70.579.000	100
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.599.500	38.599.500	100
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.426.700	11.426.700	100
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.700.000	11.700.000	100
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.740.000	96,67
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.900.000	6.900.000	100
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	74.078.340	74.078.340	100
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	18.428.000	18.428.000	100
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	5.000.000	100
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.428.000	13.428.000	100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.668.000	2.668.000	100
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	2.668.000	2.668.000	100

4	Program Pembinaan Fasilitas Dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	114.032.260	101.436.100	88,95
4.1	Pemutakhiran data anggota korpri	88.093.000	88.093.000	100
4.2	Rapat Kerja dan Rapat Evaluasi korpri	25.939.260	13.343.100	51,44
Jumlah		350.760.800	338.104.640	96,39

34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a) Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Program/Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).	100%	Program : Fasilitas Pindah/Purna Tugas	100%	111,654,000
				Kegiatan : Usul kenaikan pangkat pengabdian/pensiun/ Normal/ Janda/Duda/yatim	90	111,654,000
		Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM).	100%	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1,806,803
				Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	68	1,073,404
				Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	9	733,399,000
		Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.	100%	Program : Pendidikan Kedinasan	100%	12,650,000
				Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknis	2	12,650,000
Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya	100%	Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	233,966,600		
		Kegiatan : Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	51	39,985,600		
Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk	0.02	Kegiatan : Penataan sistim kenaikan pangkat reguler PNS	1000	193,981,000		
		Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	93,802,400		
		Kegiatan : Seleksi Penerimaan CPNSD	68	66,500,000		
				Kegiatan : Orientasi CPNSD	68	17,952,400

				Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	2	9,350,000
	Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana.	60.0%	Program	: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	42,450,000
Kegiatan			: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1	42,450,000	
Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan.		100%	Program	: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	641,784,800
			Kegiatan	: Penyusunan Rencana pembinaan karier PNS	200	641,784,800
Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.		100%	Program	: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	26,875,000
		Kegiatan	: Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	50	26,875,000	
	Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	100%	Program	: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	83,054,000
			Kegiatan	: Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	10	83,054,000
Jumlah						3,053,039,800

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	a	Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).	%	100.0	115.6	116%
			Jumlah PNS yang Pensiun	Orang	90	104	115.6%
		b	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM).	%	100	100	100%
			Jumlah CPNS yang lulus Diklat Prajabatan	Orang	68	70	102.9%
			Jumlah Pejabat yang lulus Diklat PIM	Orang	9	11	122.2%
		c	Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.	%	100	5050	5050%
			Jumlah Aparatur yang Lulus dan Memiliki Sertifikat Diklat Teknis	Orang	2	101	5050.0%
		d	Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya	%	100	100.8	101%

	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	orang	51	60	117.6%
	Jumlah PNS yang mengalami Kenaikan Pangkat secara regular	orang	1,000	840	84.0%
e	Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk	per penduduk	0.02	0.014	70%
	Jumlah Penerimaan CPNSD	Orang	68	0	0.0%
	Jumlah CPNSD yang mengikuti orientasi	Orang	68	68	100.0%
	Jumlah Praja IPDN	orang	2	0	0.0%
f	Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana.	%	60.0	74.6	124%
	Jumlah PNS, Masyarakat/Pihak Ketiga yang mendapat bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	orang	1	13	1300.0%
g	Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan.	%	100.0	88.2	88%
	Jumlah Struktur Jabatan yang terisi	orang	200	615	307.5%
h	Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.	%	100.0	56.0	56%
	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana	orang	50	28	56.0%
i	Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	%	100.0	100.0	100%
	Jumlah kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani	Kasus	10	10	100.0%
Rata-rata Persentase Capaian Kegiatan				573.5%	
Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja					645.0%

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara target target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 dengan 2 tahun sebelumnya.

Sasaran Utama : Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja								
			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).	100%	88.9%	88.9%	100%	87.8%	87.8%	100%	86.7%	86.7%

2	dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM). [Jumlah Kelulusan/Target]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100.0%
3		Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.	100%	69.1%	69.1%	100%	100%	100.0%	100%	101.0%	101.0%
4		Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya	100%	155.0%	155.0%	100%	144.5%	144.5%	100%	100.8%	100.8%
5		Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk (Jumlah PNS/Jumlah Penduduk)	0.020	0.014	70.0%	0.020	0.014	70.0%	0.020	0.014	70.0%
6		Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana).	60.0%	85.9%	143.2%	60.0%	71.2%	118.7%	60.0%	74.6%	124.4%
7		Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan (Jabatan Terisi/Jumlah Jabatan).	100%	76.3%	76.3%	100%	80.3%	80.3%	100%	94.6%	88.2%
8		Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.	100%	130.0%	130.0%	100%	130%	130%	100%	56.0%	56.0%
9		Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	100%	100%	100%	100%	250%	250%	100%	100%	100%
Akumulasi Pencapaian			103.61%			120.14%			91,9%		

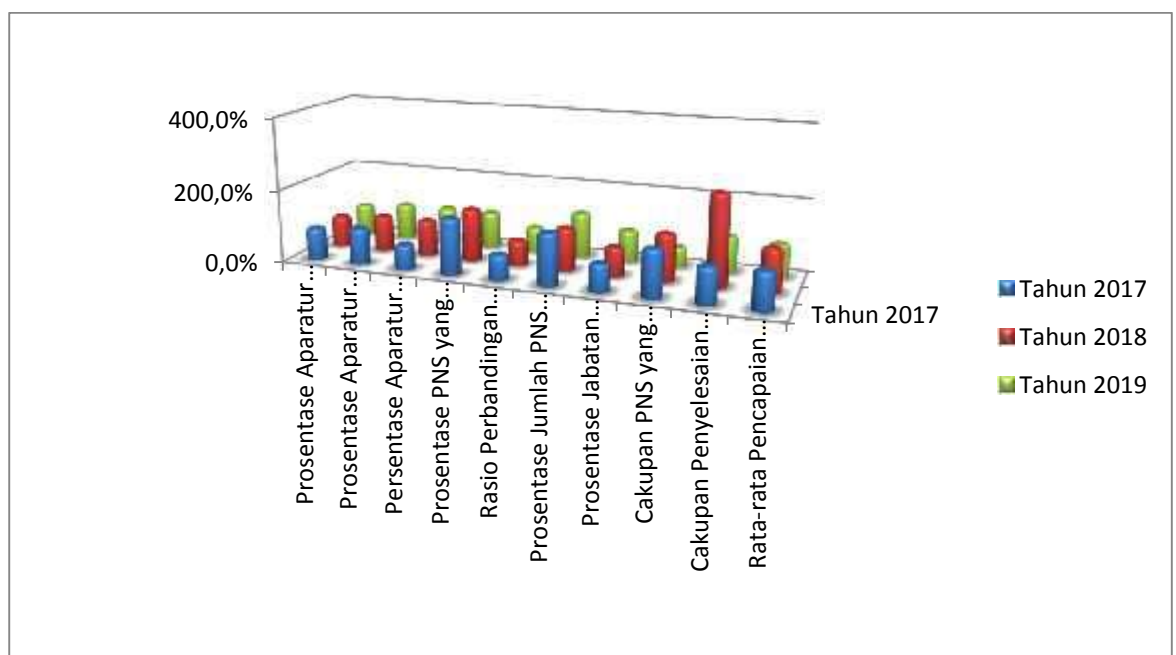
Secara umum, Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019 bisa di katakan berhasil karena mencapai 91,9%, Dibandingkan dengan pencapaian 2 (dua) tahun sebelumnya, pencapaian pada tahun ini mengalami penurunan karena di pengaruhi oleh beberapa

indikator yang tidak mencapai realisasi seperti yang diharapkan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) mengalami penurunan pencapaian di bandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya karena beberapa usulan pensiun pada tahun 2019 akan terrealisasi pada tahun 2020 untuk penerbitan SK Pensiun dan juga karena ada PNS yang mencapai BUP mengalami keterlambatan dalam pengusulan/pemberkasan dan bahkan tidak mengumpulkan berkas.
2. Indikator Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya mengalami penurunan pencapaian di bandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya karena karena Banyak PNS pada saat Periode kenaikan pangkat mengalami keterlambatan dalam pemberkasan dan bahkan tidak mengumpulkan berkas.
3. Indikator Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana mengalami penurunan pencapaian di bandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya karena kurangnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi dalam proses pengusulan penghargaan.
4. Indikator Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS kalau dilihat dari persentase pencapaian target mengalami penurunan dibanding dengan 2 tahun sebelumnya, namun ini juga menjadi indikator meningkatnya tingkat kedisiplinan ASN lingkup Kabupaten Manggarai Timur.

Analisa dari pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

Secara umum, gambaran perbandingan capaian indikator BKPSDM tahun 2019 dengan capaian indikator pada dua tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber Data : DPPA BKPSDM TA 2017, 2018 dan 2019. Laporan Keuangan BKPSDM TA 2017, 2018 dan 2019.

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019

No.	Indikator Sasaran	Kegiatan	Satuan	Target Setelah APBD Perubahan	Realisasi	Target Indikator Menurut RPJMD	Persentase Capaian	capaian Indikator Sasaran 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).	Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun Normal/Janda/Duda Yatim PNS.	Orang	120	104	100.0%	86.7%	86.7%
2	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM). [Jumlah Kelulusan/Target]	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	Orang	11	11	100.0%	100.0%	100.0%
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Orang	70	70			
3	Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Orang	100	101	100.0%	101.0%	101.0%
4	Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Orang	51	60	100.0%	100.8%	100.8%
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler	Orang	1000	840			
5	Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk (Jumlah PNS/Jumlah Penduduk)	Seleksi Penerimaan CPNSD	Orang	120	0	0.02	0.014	70.0%
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Orang	2	0			
		Orientasi CPNSD	Orang	68	68			
6	Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana).	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	1	13	60.0%	74.6%	124.4%
7	Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan (Jabatan Terisi/Jumlah Jabatan).	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jabatan	200	615	100.0%	88.2%	88.2%
8	Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Orang	50	28	100.0%	56.0%	56.0%
9	Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	Proses penanganan pelanggaran kasus- kasus disiplin PNS	Kasus	10	10	100.0%	100.0%	100.0%
Rata-rata Capaian							91.9%	

e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran Efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan capaian Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.

$$E = \frac{\% R \quad K \quad a}{\% R \quad A} \times \%$$

Capaian Realisasi Kinerja sesuai dengan RPJMD 2014-2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Kegiatan	Satuan	Target Setelah APBD Perubahan	Realisasi	Target Indikator Menurut RPJMD	Persentase Capaian	capaian Indikator Sasaran 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).	Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun Normal/Janda/Duda Yatim PNS.	Orang	120	104	100.0%	86.7%	86.7%
2	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM). [Jumlah Kelulusan/Target]	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	Orang	11	11	100.0%	100.0%	100.0%
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Orang	70	70			
3	Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Orang	100	101	100.0%	101.0%	101.0%
4	Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Orang	51	60	100.0%	100.8%	100.8%
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler	Orang	1000	840			
5	Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk (Jumlah PNS/Jumlah Penduduk)	Seleksi Penerimaan CPNSD	Orang	120	0	0.02	0.014	70.0%
		Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Orang	2	0			
		Orientasi CPNSD	Orang	68	68			
6	Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana).	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	1	13	60.0%	74.6%	124.4%
7	Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan (Jabatan Terisi/Jumlah Jabatan).	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jabatan	200	615	100.0%	88.2%	88.2%
8	Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Orang	50	28	100.0%	56.0%	56.0%
9	Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.	Proses penanganan pelanggaran kasus- kasus disiplin PNS	Kasus	10	10	100.0%	100.0%	100.0%
Rata-rata Capaian							91.9%	

Capaian Realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel akuntabilitas Keuangan sebagai berikut

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Program : Fasilitas Pindah/Purna Tugas	178,444,500.00	156,656,050.00	87.79%
Kegiatan : Usul kenaikan pangkat pengabdian/pensiun/Normal/Janda/Duda/yatim	178,444,500	156,656,050	87.79%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,563,451,789.00	1,562,358,089.00	99.93%
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	889,120,000	888,026,300	99.88%
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD	674,331,789	674,331,789	100.00%
Program : Pendidikan Kedinasan	188,537,500.00	159,512,007.00	84.60%
Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknis	188,537,500	159,512,007	84.60%
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	267,532,100.00	249,456,460.00	93.24%
Kegiatan : Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	39,985,600	33,748,510	84.40%
Kegiatan : Penataan sistim kenaikan pangkat reguler PNS	227,546,500	215,707,950	94.8
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	786,305,000.00	577,397,680.00	73.43%
Kegiatan : Seleksi Penerimaan CPNSD	761,612,600	552,705,910	72.57%
Kegiatan : Orientasi CPNSD	17,952,400	17,952,400	100.00%
Kegiatan : Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	6,740,000	6,739,370	99.99%
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	32,498,370.00	32,498,370.00	100.00%
Kegiatan : Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	32,498,370	32,498,370	100.00%
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	865,265,491.00	833,305,200.00	96.31%
Kegiatan : Penyusunan Rencana pembinaan karier PNS	865,265,491	833,305,200	96.31%
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	25,504,200.00	18,054,200.00	70.79%
Kegiatan : Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	25,504,200	18,054,200	70.79%
Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	110,539,850.00	107,076,600.00	96.87%
Kegiatan : Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	110,539,850	107,076,600	96.87%

$$E = \frac{\% R}{\% R} \frac{K}{A} \times \%$$

$$E = \frac{9.9\%}{9.9\%} \times \%$$

$$E = 1 \%$$

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Analisis Realisasi Program dan Kegiatan pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Indikator ini didukung oleh kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun Normal/Janda/Duda Yatim PNS. Kegiatan yang dilakukan adalah mengakomodir segala keperluan bagi pegawai pensiun, yaitu kaitannya memperoleh kepastian hukum tentang keputusan pensiun untuk memproses administrasi yang lebih lanjut. Membagikan SK pensiun lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Pemulangan pegawai yang pensiun menargetkan sebanyak 120 orang. Dengan realisasi sebanyak 104 orang, dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 86,7 %. Pencapaian sangat dipengaruhi oleh seperti Hal ini disebabkan karena beberapa usulan pensiun pada tahun 2019 akan terrealisasi pada tahun 2020 untuk penerbitan SK Pensiun dan juga karena relativitas PNS dalam memahami BUP, sehingga ada PNS yang mencapai BUP mengalami keterlambatan dalam pengusulan/pemberkasan dan bahkan tidak mengumpulkan berkas, serta hambatan lain yang menyangkut kelengkapan data SAPK.dan lain-lain, sehingga pencapaian terlaksana 86.7%.

Total Anggaran pada indikator ini diadakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan Usul kenaikan Pangkat Pengabdian/Pensiun Normal/Janda/Duda/Yatim PNS dengan total anggaran sebesar Rp. 111.654.000,- sebelum perubahan APBD kemudian mendapatkan penambahan dengan total Rp. 178,444,500,- setelah perubahan APBD dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156,656,050, sehingga tingkat penyerapan anggaran pada indikator ini sebesar 87,79% . Anggaran dimaksud di pergunakan untuk memproses 104 SK Pensiun Normal, SK Pensiun Janda/duda dan 104 Orang yang mengurus Tabungan Pensiun serta membiayai tenaga Operator Komputer. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya SK Pensiun Normal/Janda/duda PNS dan Tabungan Pensiun serta biaya operator komputer dapat dibayar.

2. Persentase Aparatur yang Lulus Diklat Perjenjangan (Prajabatan dan PIM). [Jumlah Kelulusan/Target]

Indikator ini didukung oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD serta kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD dengan masing-

masing pencapaian 100%, sehingga pencapaian kinerja indikator ini pada tahun 2019 mencapai 100%.

Total Pagu Anggaran pada indikator ini sebesar Rp. 1.806.803.000,- sebelum perubahan APBD kemudian mendapatkan pengurangan anggaran dengan total Rp. 1.563.451.789,- setelah perubahan APBD dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.562.358.089,-, sehingga tingkat penyerapan anggaran pada indikator ini sebesar 99,93%:

a) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD

Total Anggaran untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 733.399.000,- pada pagu awal dan berkurang hingga Rp. 674.331.789,- pada anggaran perubahan APBD dan realisasinya Rp. 674.331.789,-, sehingga tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini sebesar 100% dengan persentase pencapaian Kinerja sebesar 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Pendidikan dan Pelatihan Pejabat struktural di Kabupaten Manggarai Timur yang berjumlah 11 Orang Pejabat Eselon III dari 11 orang target. Hasil yang dicapai peserta memiliki Sertifikat Diklat PIM sebagai peserta yang LULUS.

b) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD

Total Anggaran untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 1.073.404.000,- pada pagu awal dan berkurang hingga Rp. 889.120.000,- pada anggaran perubahan APBD dan realisasinya Rp. 888.026.300,- sehingga tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini sebesar 99,88% dengan persentase pencapaian Kinerja sebesar 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang berjumlah 70 Orang dari target 70 orang. Hasil yang dicapai peserta memiliki Sertifikat Diklat Latsar sebagai peserta yang LULUS.

3. Persentase Aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional sesuai bidangnya.

Indikator ini pada tahun 2019 di rumuskan oleh kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan total Pagu Anggaran pada sebesar Rp. 12.650.000,- sebelum perubahan APBD kemudian mendapatkan penambahan anggaran dengan total Rp. 188.537.500,- setelah perubahan APBD dengan realisasinya Rp. 159.512.007,- sehingga tingkat penyerapan anggaran pada indikator ini sebesar 84,60%. Kegiatan ini memungkinkan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menyangkut tupoksi, dan teknis administrasi lainnya. Kegiatan terlaksana dengan peserta mencapai 101 orang dari target 100 orang. Sehingga capaian kinerja dari indikator dan kegiatan ini adalah 101%.

Total Anggaran pada Kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis berjumlah Rp. 188.537,500,- dengan realisasinya Rp. 159.512.007,- dan dipergunakan untuk

pengiriman PNS dalam rangka diklat Analis Kepegawaian 1 Orang, dan terlaksananya BIMTEK Ekinerja dengan Peserta sejumlah 100 Orang PNS.

4. Persentase PNS yang terlayani Kenaikan Pangkatnya

Total Pagu Anggaran Indikator ini pada tahun 2019 sebesar Rp.233.966.600,- sebelum perubahan APBD kemudian mendapatkan penambahan anggaran dengan total Rp.267.532.100,- setelah perubahan APBD, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.249.456.460,- sehingga tingkat penyerapan anggaran pada indikator ini sebesar 93.24%. Indikator ini di dukung oleh 2 kegiatan dengan akumulasi pencapaian target sebesar 100,8% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk naik ke golongan yang lebih tinggi. PNS yang lulus ujian dinas diberikan surat tanda lulus ujian dinas. Pada tahun 2019 BKPSDM menargetkan peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 51 orang PNS. Kegiatan ini terlaksana dengan target tercapai 60 orang PNS, hal ini disebabkan oleh meningkatnya animo PNS dalam penyesuaian Ijazah. dengan demikian pencapaian Target 117,6%.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis tidak berubah dari pagu awal hingga perubahan APBD, yakni berjumlah Rp.39.985,600,- dan realisasinya Rp.33.748.510,- sehingga tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini sebesar 84.40% dan digunakan untuk membiayai Ujian Dinas kenaikan pangkat dan Penyesuaian Ijazah untuk 60 Orang PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan untuk membiayai perjalanan dinas team dari Provinsi dan dari BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur, hasil yang dicapai adalah tersedianya 60 sertifikat STILUD bagi PNS yang lulus ujian dinas;

b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler

Kegiatan ini mempunyai maksud untuk memproses indeks Jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat. Pada tahun 2019, kegiatan ini menargetkan 1.000 orang dengan pencapaian 840 orang. Hal ini dipengaruhi oleh karena banyak PNS pada saat periode kenaikan pangkat mengalami keterlambatan dalam pemberkasan dan bahkan tidak mengumpulkan berkas. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini mencapai 84%.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler berjumlah Rp. 193.981.000,- pada pagu awal dan bertambah hingga Rp.227.546.500,- pada anggaran perubahan APBD dan realisasinya Rp.215.707.950,- , sehingga tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini sebesar 94,8%. Anggaran ini digunakan untuk memproses kenaikan pangkat PNS dengan realisasi kenaikan pangkatnya berjumlah

840 PNS dan untuk membiayai tenaga Operator Komputer. Hasil yang dicapai adalah tersedianya SK naik pangkat PNSD;

5. Rasio Perbandingan Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk (Jumlah PNS/Jumlah Penduduk)

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa Besar mutu dan kualitas pelayanan PNS terhadap Masyarakat Umum sebagai stake holder, di lihat dari perbandingan kuantitas personal.

Indikator ini di pengaruhi oleh 3 kegiatan dengan total pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.93.802.400,- sebelum perubahan APBD kemudian mendapatkan penambahan anggaran dengan total Rp.786.305.000,- setelah perubahan APBD, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.577.397.680,- sehingga tingkat penyerapan anggaran pada indikator ini sebesar 73.43%.

Pencapaian kinerja yang telah di upayakan untuk indikator ini sebesar 70% dari target rasio sebesar 0.02 yang pada tahun 2019 tercapai dengan ratio 0.14. Turunnya rasio jumlah PNS terhadap penduduk sebagian besar dipengaruhi oleh pengalihan sebagian status PNSD daerah menjadi PNSD Provinsi dan Vertikal pada tahun 2016, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam menambah jumlah PNSD tidak memberi pengaruh yang signifikan untuk peningkatan rasio PNS terhadap jumlah penduduk. Dalam ruang lingkup kegiatan yang menunjang indikator ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Seleksi Penerimaan CPNSD.

Kegiatan ini di lakukan sebagai rujukan seberapa banyak jumlah aparatur yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur dalam hal pengangkatan menjadi CPNS, penetapan NIP dan lain-lain. Kegiatan ini menargetkan 120 orang CPNS dengan realisasi 0 orang. Sehingga capaian kinerja kegiatan 0%.

Alokasi Anggaran Kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah berjumlah Rp. 66.500.000,- pada pagu awal dan bertambah hingga Rp.761.612.600,- pada anggaran perubahan APBD dan realisasinya Rp.552.705.910,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 72.57 %. Rendahnya pemakaian dana dan realisasi target disebabkan karena Anggaran ini Sejatinya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi penerimaan CPNS tahun 2019, namun karena ada perubahan kebijakan dari pusat, maka pelaksanaan test di lakukan pada januari hingga february 2020. Sehingga pada tahun 2019 dana anggaran secara maksimal di gunakan untuk persiapan dan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi.

b. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah masyarakat yang lulus dan difasilitasi dalam seleksi penerimaan praja IPDN. Pada tahun 2019 kegiatan ini menargetkan 1 orang dengan pencapaian kinerja sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peserta yang lulus seleksi.

Alokasi Anggaran untuk kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN berjumlah Rp.9.350.000,- pada pagu awal dan berkurang hingga Rp.6.740.000,- pada anggaran perubahan APBD dan realisasinya Rp.6.739,370,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99.99 % yang digunakan untuk memfasilitasi dan mendampingi Calon Praja IPDN yang menyelenggarakan testing Praja IPDN di BKD Provinsi NTT

c. Orientasi CPNSD;

Alokasi anggaran kegiatan orientasi CPNSD tidak berubah dari pagu awal hingga perubahan APBD, yakni berjumlah Rp. 17.952.400,- dan realisasinya Rp.17.952.400,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Anggaran ini untuk membiayai instruktur, makan minum dll dalam Pelaksanaan Orientasi CPNSD sebanyak 68 Orang dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan Orientasi CPNSD.

Indikator ini menurun drastis dari target RPJMD karena dipengaruhi oleh adanya dua faktor yaitu :

- Pengalihan status PNS dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam tiga tahun terakhir untuk Beberapa Satuan Kerja dan Unit Kerja tertentu.
- Instruksi Presiden tentang Moratorium PNSD.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, target ratio untuk tahun 2019 adalah sebesar 0,02. Dengan realisasi pencapaian Ratio 0,014.

6. Persentase Jumlah PNS yang di tingkatkan pendidikan terakhir (dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan dari Sarjana ke Pasca Sarjana.

Indikator ini ditunjang oleh kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pengiriman Tugas Belajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Sedangkan sasarannya adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan masyarakat/pihak ketiga. Pada Tahun 2019 pemberian Tugas Belajar bagi PNS dan masyarakat/pihak ketiga sebanyak 13 orang dari target 1 orang, pencapaian kegiatan ini adalah 1300%. Peningkatan Pencapaian ini disebabkan oleh pengukuran realisasi dari beberapa subkegiatan yakni Ijin belajar, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Pencapaian pada kegiatan ini mempengaruhi meningkatnya indikator kualifikasi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai Timur sebesar 74,6%. Sehingga pencapaian pada indikator ini sebesar 124,4% dari target perbandingan kualifikasi Pendidikan terakhir PNS sebesar 60% untuk tahun 2019.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini yang di tunjang oleh kegiatan Pemberian bantuan Tugas Belajar berjumlah Rp.42.450.000,- pada pagu awal dan berkurang hingga Rp. 32.498.370,- pada anggaran APBD perubahan dan realisasinya Rp. 32.498.370,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100% yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Orang Ikatan Dinas dan monitoring Tugas Belajar. Hasil yang dicapai tersedianya SDM Pegawai yang memadai yang siap kerja;

7. Persentase Jabatan structural yang terisi sesuai dengan persyaratan dan standard kebutuhan (Jabatan Terisi/Jumlah Jabatan).

Jabatan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dapat diminta atau dituntut, melainkan merupakan penugasan, maka keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan bukan pula hal yang dapat diminta atau dituntut, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat structural memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien.

Indikator ini di dukung oleh kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Kegiatan ini di lakukan untuk kegiatan pengukuhan Jabatan Eselon II sebanyak 34 Orang, Eselon III sebanyak 151 Orang, dan Eselon IV sebanyak 430 Orang. Hingga desember 2019, jabatan terisi sebanyak 615 dari 697 Jabatan. Sehingga Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS mencapai pelaksanaan realisasi hingga 307,5% dari 200 Orang/jabatan yang ditargetkan, yang berpengaruh pada pencapaian pada indikator ini sebesar 88,2% dari 100% yang di targetkan pada tahun 2019..

Alokasi Anggaran untuk indikator ini yang di tunjang oleh Kegiatan Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS berjumlah Rp. 641.784.800,- pada pagu awal dan bertambah hingga Rp 865,265,491 pada anggaran APBD perubahan dan terrealisasi Rp. 833,305,200 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96.31 %, Realisasi Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelantikan dan pengukuhan Jabatan Eselon II, III dan Eselon IV serta untuk membiayai tenaga Operator Komputer. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pengukuhan dan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural, lelang Jabatan dan Pemetaan.

8. Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana.

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun.

Satyalencana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan OPD mereka masing-masing.

Indikator Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana pada tahun 2019 memiliki target pencapaian 100%, namun dalam pelaksanaannya hanya bisa mencapai realisasi kinerja sebesar 56%. Hal ini dipengaruhi oleh hasil dari kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, yakni ; Kegiatan ini di lakukan memproses piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi 28 Orang PNS yang berprestasi dari 31 orang yang di usulkan dengan target sebanyak 50 Orang, sehingga pencapaian tahun ini hanya mencapai 56% dari target 100%.Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi dalam proses pengusulan penghargaan..

Alokasi Anggaran untuk indikator ini melalui kegiatan Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi berjumlah Rp. 26.875.000,- pada pagu awal dan berkurang menjadi sebesar Rp. 25,504,200 pada anggaran APBD perubahan dan terrealisasi sebesar Rp.18,054,200 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 70.79 %, Anggaran ini untuk membiayai perjalanan dinas untuk memproses piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Hasil yang dicapai tersedianya 28 piagam penghargaan untuk 28 orang;

9. Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Indikator ini mengacu pada kegiatan Proses penanganan pelanggaran kasus- kasus disiplin PNS dengan total anggaran pada tahun 2019 sejumlah Rp. 83.054.000,- pada pagu awal dan bertambah menjadi sebesar Rp. 110.539.850,-pada anggaran APBD perubahan dan terrealisasi sebesar Rp. 107.076.600,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96.87%,

Kasus pelanggaran disiplin diselesaikan dengan mencermati tahapan yang mesti dilewati. Dari tahapan teguran, surat peringatan sampai dengan surat keputusan. Memerlukan proses yang tidak sederhana, banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang memang berlandaskan hukum yang jelas serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019 Kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil menargetkan sebanyak 10 kasus. Dengan terrealisasi sebanyak 10 kasus. Sehingga pencapaian kinerja dan indikator 100% dari target 100%. Pencapaian ini juga mempengaruhi capaian indikator kinerja hingga sebesar 100% dari target 100%.

35. Satuan Polisi Pamong Praja

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Masyarakat memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan harmonis	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 penduduk	0,015
		Cakupan jumlah patroli Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60 Kali
		Jumlah tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan ketenteraman) di Kabupaten Manggarai Timur	60 Kali
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	49 Orang
		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran	2 Orang
2.	Mendorong peningkatan potensi daerah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	Penegakan Perda	15 Perda

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Masyarakat memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan harmonis	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 penduduk	0,015	0,010	66,67
		Cakupan jumlah patroli Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60 Kali	60 Kali	100
		Jumlah tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan ketenteraman) di Kabupaten Manggarai Timur	60 Kali	60 Kali	100
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	49 Orang	49 Orang	100

		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran	2 Orang	2 Orang	100
2.	Mendorong peningkatan potensi daerah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	Penegakan Perda	15 Perda	15 Perda	100

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017	2018	2019		
					Target	Realisasi	%
1.	Masyarakat memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan harmonis	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	0,015	0,015	0,015	0,010	66,67
		Cakupan jumlah patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Petugas Satpol PP	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100
		Tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan keindahan) di Kabupaten Manggarai Timur	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	880 Orang	230 Orang	49 Orang	49 Orang	100
		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran	0	0	2 Orang	2 Orang	100
		2.	Mendorong peningkatan potensi daerah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	Penegakan Peraturan Daerah	15 Perda	15 Perda	15 Perda

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Masyarakat memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib dan	Rasio Jumlah Polpp per 10.000 penduduk	0,015	0,010
		Cakupan jumlah patroli Pengendalian Keamanan	60 Kali	60 Kali

	harmonis	dan Kenyamanan Lingkungan		
		Jumlah tingkat penyelesaian K3 (Keamanan, ketertiban dan ketenteraman) di Kabupaten Manggarai Timur	60 Kali	60 Kali
		Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	49 Orang	49 Orang
		Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran	2 Orang	2 Orang
2.	Mendorong peningkatan potensi daerah melalui pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	Penegakan Perda	15 Perda	15 Perda

e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

- a) Pegawai Negeri Sipil : 20 Orang
- b) Non Pegawai Negeri Sipil : 101 Orang

- Kualifikasi Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	2
2.	S1	8
4.	D3	3
5.	SLTA	7

- Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	6
3.	III	11
4.	IV	3
	Jumlah Keseluruhan	20

- Jabatan Struktural :
 - a) Eseon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 9 orang
- Staf : 5 orang

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Adapun Program/Kegiatan umum yang mendukung program/kegiatan tersebut diatas:

1. Program Pelayanan Administrasi, dengan total anggaran Rp.320.799.400,-, yang terdiri dari 8 Kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan jumlah anggaran Rp.1.140.000,-
 - 2) Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.73.077.000,-
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan jumlah anggaran Rp. 20.016.000,-
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan jumlah anggaran Rp.2.000.000,-
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan jumlah anggaran Rp.23.052.900,-
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan jumlah anggaran Rp. 3.294.800,-
 - 7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan jumlah anggaran Rp. 1.800.000,-
 - 8) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 196.418.700,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Total anggaran Rp. 254.019.409,-, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2) dialokasikan dana Rp. 142.380.000, digunakan untuk operasional kantor yang bertujuan untuk mengoptimalkan pekerjaan kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan dana Rp. 12.609.409, digunakan untuk pembelian meubeller (Meja) sebanyak 4 unit;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dialokasikan dana Rp.99.030.000,- digunakan untuk Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 2 dan roda 4.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :
 - a. Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan, dialokasikan dana Rp. 1.770.273.500, digunakan untuk belanja honor Non PNS anggota Polisi Pamong Praja 98 orang selama 12 bulan, belanja ATK.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dialokasikan dana Rp.114.000.000 digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah yakni patroli dan patwal dalam kota dan ke 9 kecamatan.
- c. Operasi Penertiban Penyerobotan Tanah Pemda/Negara dan PKL, dialokasikan dana Rp. 16.000.000,- digunakan untuk melakukan Operasi Penertiban Penyerobotan Tanah Pemda/Negara dan PKL;
Hasil/manfaat : terwujudnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- d. Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat, dialokasikan dana Rp.39.350.000,- digunakan untuk Melakukan Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat, contoh : Minuman Keras, Judi, Anak-anak sekolah yang berkeliaran, dll;
- e. Pembekalan Konsolidasi dan Pencegahan penyakit Masyarakat, dialokasikan dana Rp. 22.000.000,- digunakan untuk melakukan Pembekalan Konsolidasi dan Pencegahan Penyakit Masyarakat, contoh : sosialisasi.

36. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja tahun 2019 yakni:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokrasi	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	Kali	1
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kali	1

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja yang dicapai tahun 2019 yakni:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokrasi	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	Kali	1	1	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kali	1	1	100

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas Indikator Utama Badan KesbangPol Dan Linmas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari indikator jumlah kegiatan pembinaan terhadap Ormas dan LSM yang mengikuti pembinaan pada tahun 2019 terealisasi melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peningkatan toleransi dalam kehidupan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan target 1 kali kegiatan dan realisasi 1 kali kegiatan atau 100%
 - b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) target 1 kali kegiatan dan realisasi 1 kali atau 100%
 - c. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana dengan kegiatan pembentukan dan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) target 1 kali kegiatan, realisasi 1 kali atau 100%

Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2019. Dari indikator ini sebesar 100 % dari target RPJMD akhir 2019 sebanyak 5 (Lima) kali kegiatan pembinaan.
2. Dari indikator jumlah kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2019 realisasinya 100 % dari target 1 (satu) kali kegiatan. Pada tahun 2019 realisasinya 1 (satu) kali atau 100%. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dari Target akhir RPJMD 2019 sebanyak 5 kali kegiatan.

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	2017 (%)			2018 (%)			2019		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokrasi	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Kegiatan Pembinaan politik daerah	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokrasi	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	Kali	1	1

2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kali	1	1
---	--	-----------------------------------	------	---	---

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai.

1. Jumlah Pegawai

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebanyak 20 orang terdiri dari:

- PNS : 11 Orang
- THL : 9 Orang

2. Kualifikasi Pendidikan :

Ditinjau dari latar belakang pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari:

- S1 PNS : 9
- D3 PNS : 1 orang
- SLTA PNS : 1 orang
- S1 THL : 4 orang
- SLTA THL : 5 orang

3. Pangkat dan Golongan

- Golongan III : 10 orang
- Golongan II : 1 orang

4. Jabatan Struktural dan Fungsional

- Eselon III- B : 1 orang
- Eselon IV-A : 9 orang
- Non Eselon : 1 orang.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja yakni:

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.039.509	350.037.709	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.081.000	84.855.000	99,73
Total. Rp.435.120.509			Rp. 434.892.709;	99,35 %

37. Dinas Pangan

a) Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja Utama Dinas Pangan terdiri dari:

1. **Ketersediaan pangan utama**

Merupakan presentase ketersediaan pangan utama di Kabupaten Manggarai Timur.

Target : 160 %

2. **Regulasi ketahanan Pangan**

Merupakan regulasi yang selayaknya dibuat untuk mendukung upaya ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Timur

Target : 0 dok

b) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Rata rata ketersediaan pangan utama merupakan indikator kinerja utama Dinas Pangan.

Indikator ini didukung oleh 1 program yakni Program peningkatan Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.600.512.625 dengan realisasi sebesar

Rp.1.512.425.497 atau sebesar 94,50 %

N o	Sasaran	Indikator	Porgram/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Rata – rata Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketahanan Pangan	993.052.000	976.774.047	98,36
2		Jumlah Dokumen Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	93.350.000	92.937.000	99.56
3		Jumlah Laporan pola konsumsi dan suplai pangan	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	50.000.000	49.950.000	99.90
4		Jumlah Dokumen Analisis Ratio jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	18.055.000	17.980.000	99.58
5		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di dampingi	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	80.000.000	79.043.751	98.80

6	Jumlah Dokumen rekomendasi kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	20.050.000	20.025.000	99.88
7	Jumlah KWT yang dibantu	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	21.050.000	21.025.000	99.88
8	Jumlah Laporan Akses Pangan	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	20.525.000	20.500.000	99.88
9	Jumlah Dokumen Analisis Harga Pangan Pokok	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	45.517.600	44.440.600	97.63
10	Jumlah Unit	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertranian	65.085.000	65.010.000	99.88
11	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di dampingi	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	13.275.000	13.275.000	100
12	Jumlah Sidak yang dilaksanakan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	44.900.000	38.325.000	85.36
13	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	Penyuluhan Sumber Pangan alternatif (Hari Pangan Sedunia)	491.132.800	484.387.696	98.60
12	Jumlah Dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	29.875.000	99.58
Total			993.052.000	976.774.047	98,36

c) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	Realisasi	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			Tahun 0	2019	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor PPH	76,50%	80	77,5	81	82	84	84	84
2	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	3,56	3,56		3,73	3,82	3,91	3,99	3,99
3	Stok Pangan	29	30	40	32	35	40	45	45
4	Ketersediaan Pangan Utama	76,5	80	140	81	82	84	84	84
5	Presentase Industri Pengolahan hasil – hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan	762 unit	15		15	15	15	15	15
6	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	0,53	4		4	4	4	4	4
7	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	-50,76	5		10	25	30	35	35

d) Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Urusan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			Tahun 0	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skor PPH	76,50%	80	81	82	84	84	84
2	Stok Pangan	29	30	32	35	40	45	45
3	Ketersediaan Pangan Utama	76,5	80	81	82	84	84	84
4	Jumlah Regulasi Kehanan Pangan	1	1	0	0	0	0	2

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Dicapai.

Data PNS menurut jabatan struktural yakni:

No	J a b a t a n	Eselon	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II – B	Terisi
2.	Sekretaris Dinas	III – A	Terisi
	• Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	IV – A	Terisi
	• Sub Bagian Tata usaha	IV – A	Terisi
	• Sub Bagian Keuangan dan sarana	IV - A	Terisi
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	III – B	Belum Terisi
	• Sub Bidang Ketersediaan Pangan	IV - A	Terisi
	• Sub Bidang Sumberdaya Pangan	IV – A	Terisi
	• Sub Bidang Kerawanan Pangan	IV - A	Terisi
4.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	III – B	Belum Terisi
	• Sub Bidang Distribusi Pangan	IV - A	Terisi
	• Sub Bidang Harga Pangan	IV – A	Terisi
	• Sub Bidang Cadangan Pangan	IV - A	Terisi
5.	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	III – B	Terisi
	• Sub Bidang Konsumsi Pangan	IV - A	Terisi
	• Sub Bidang TTU Promosi Penganekaragaman Pangan	IV – A	Terisi
	• Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal	IV - A	Terisi
6.	Bidang Keamanan Pangan	III – B	Terisi
	• Sub Bidang Kelembagaan Pangan	IV - A	Belum Terisi
	• Sub Bidang Keamanan Pangan	IV – A	Terisi
	• Sub Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	IV - A	Terisi

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah:

No	Porgram/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	186.500	14.35
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	7.200.000	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	217.134.000	211.457.000	97.39
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.084.000	22.084.000	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.000.000	1.000.000	100
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.802.909	32.802.909	100
7	Kegiatan Penyediaan Barang	30.300.000	30.300.000	100

	Cetakan dan Penggandaan			
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000	19.380.000	85,92
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	2.400.000	1.080.000	45
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000	21.000.000	100
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000	199.605.132	99.80
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.270.000	145.269.282	100
11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.270.000	145.270.000	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	3.500.000	100
12	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3.500.000	3.500.000	100
	Total	703.870.909	694.864.823	98.72

BAB IX

P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2019 ini disusun dan disampaikan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan berlaku, dengan harapan kiranya dapat dievaluasi guna mendapatkan masukan positif - konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun anggaran berikutnya.

Borong, 24 Maret 2020

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS, SH,M.Hum

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban Umum	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	yaitu : 1. PERDA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 2. Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Ada	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah <u>rumah</u> ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB s.d akhir Tahun 2019, sebanyak 240 unit. - Jumlah seluruh rumah s.d akhir Tahun 2019, sebanyak 67.963 Unit.	0,35 %	
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	1. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penertiban Penanggulangan dan Pemberantasan Hewan Penular Rabies 2. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak 3. Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan	Ada	

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
	Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP= 168.685 - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP=193.650	87,10%	
		5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA	- Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA sebanyak=1.475 - Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA= 81.433	1,81%	
	Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 Per 10.000	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 20 orang - Penduduk pada akhir tahun 2019 berjumlah = 269.686 orang	0,0074 per 10.000 penduduk	
	Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Ada	
	Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	1. Perda Persampahan/Kebersihan dan PERDA Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Perbup No.51 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Manggarai Timur 3. Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun	Ada	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
						2018 tentang Pengelolaan sampah		
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2018 disampaikan pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai surat pengantar Nomor Pem.130/108/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.	Tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal 23 April 2018 sesuai surat pengantar Nomor BK.900/264/IV/2019 tanggal 23 April 2019 - Laporan Kinerja tahun 2018. disampaikan pada tanggal 2019 sesuai surat pengantar Nomor ORGAN.065/245/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019	Tepat	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	Keputusan Bupati Nomor 231.a Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Penerapan SPM Kabupaten Manggarai Timur	Ada	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 8 MOU yang terdiri dari: 1) HK.MOU/1 /Tahun 2019 MOU dengan Kementerian Pertanian tentang kerjasama antar Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur 2) HK.MOU/2/Tahun 2019 tentang addendum atas perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende 3) HK.MOU/3 /Tahun 2019 tentang Nota Kesepahaman antara pemerintah kabupaten Manggarai Timur, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai tentang supply (pemasokan) produk hortikultura dari Kabupaten surplus ke kabupaten deficit lingkup kabupaten Manggarai timur, pemerintah kabupaten	7 MOU	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
						<p>Manggarai Barat dan Pemerintah kabupaten Manggarai.</p> <p>4) HK.MOU/5/Tahun 2019 tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>5) HK.MOU/5.a/tahun 2019 tentang penyaluran dana transfer ke daerah dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa</p> <p>6) HK.MOU/6/Tahun 2019 tentang addendum perjanjian kerjasama anatar pemerintah kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende tentang kepesertaan program Jamkesmas bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur</p> <p>7) HK.MOU/8/Tahun 2019 tentang kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftar oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur</p>		

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
		Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 Program/agenda prioritas.	2,2%	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019 (APBD) = 24 urusan.	100%	
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	PERDA Nomor : 9 Tahun 2018 tentang APBD 2019 tanggal 21 Desember 2018	Tepat Waktu	
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PERDA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ditetapkan tanggal 14 Agustus 2010.	Ada	
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp.292.329.182.849,- 2) Urusan Kesehatan Rp.157.829.865.126,75 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.174.885.552.182,70,- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.3.935.390.598,-	57,58%	

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
					5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 6.042.565.018,- 6) Urusan Sosial Rp.3.135.599.609,- Total Belanja pelayanan dasar Rp.638.158.155.383,45,- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,-.		
		18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. 292.329.182.849,- 2) Urusan Kesehatan Rp. 157.829.865.126,75 Total Belanja Pend & Kes Rp. 450.159.047.975,75,-	40,62%	
	Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan public	1. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin trayek 3. Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 4. Perda Persampahan/Kebersihan dan PERDA Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	Ada	
		20	Ratio PNS terhadap	Jumlah PNS Kabupaten dibagi	- Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 sebanyak 3.825 orang.		

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
			penduduk	jumlah penduduk	- Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak 269.686 orang.	1,41%	
	Kepegawaian	21	Rasio PNS memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS memiliki Pendidikan Tinggi minimal DIII dibagi jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) 1.108 orang Jumlah PNSKabupaten Tahun 2019 sebanyak 3.825 orang Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database:SAPK (tentang kepegawaian)	28,97%	
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	yakni : Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Ada	
	Kelembagaan	23	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan OPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah SKPD, sbb : 1) Bagian (Setda) = 9 unit 2) Dinas = 20 unit 3) Badan = 3 unit 4) Inspektorat Daerah = 1 unit 5) Kantor = 0 unit 6) Rumah Sakit = 0 unit 7) Lembaga Teknis lainnya = 2 unit 8) Sekretariat DPRD = 1 unit 9) Sekretariat KORPRI = 1 unit 10) Kecamatan = 9 unit Jumlah SKPD = 46 unit	46 Unit	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 12 Perda (Daftar terlampir)	12 PERDA	Daftar PERDA Terlampir
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	- RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak 12 RAPERDA. - RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak 13 PERDA.	92,30 %	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD sebanyak 15 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 15 keputusan.	100 %	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanj ut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 281 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak 281 keputusan.	100%	
		Tindaklanj ut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 83 Per- Bupati. - Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak 83 Per- Bupati.	100%	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 12 Perda	0%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN				100%			
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi public	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi public	Ada/tidak PERDA/PerBup	PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Tidak ada	
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh public	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	- Lembaga Penyiaran Publik Lokal RKMT, Perda Nomor 2 tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal RKMT	Ada	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp.786.724.967.841,- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.788.240.681.626,-	99,81%	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp.447.171.405.242,10,- - DAU Tahun 2019, sebesar Rp.533.974.640.000,-	83,74%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp. 447.171.405.242,10,- - Total Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,-	40,35%	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.54.434.713.623,57,- - Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.1.114.412.388.087,57	4,88%	
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP	Opini tahun 2017 = WDP Opini tahun 2018= WTP	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2019, sebesar Rp.36.673.994.136,30,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.1.114.412.388.087,57,-	3,29%	
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.162.228.417.978,72,-	95,36%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian KInerja	Keterangan
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan BPKRI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 387 rekomendasi - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 477 rekomendasi. 	81,13 %	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp.54.434.713.623,57,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 APBD Rp.61.755.394.345,- 	88,14%	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total PAD pada Tahun 2019 sebesar (Rp. 54.434.713.623,57- 44.007.083.306,37) - Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp.44.007.083.306,37 	23,69%	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Ada	1 penghargaan	
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2017	Ada	
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak 51 ijin	51 ijin	

**DAFTAR PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN
TAHUN 2019**

No.	Nomor Perda	Tentang	Tanggal Perda
1.	Perda No. 1 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Dasar	Tanggal 08 Maret 2019
2.	Perda No. 2 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Tanggal 8 Maret 2019
3.	Perda No. 3 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa	Tanggal 16 Mei 2019
4.	Perda No. 4 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tanggal 16 Mei 2019
5.	Perda No. 5 Tahun 2019	Badan permusyawaratan Desa	Tanggal 16 Mei 2019
6.	Perda No. 6 Tahun 2019	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Tanggal 23 Juli 2019
7.	Perda No. 7 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa Kabupaten Manggarai Timur	Tanggal 28 Agustus 2019
8.	Perda No. 8 Tahun 2019	Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur	Tanggal 28 Agustus 2019
9.	Perda No. 9 Tahun 2019	RPJMD Kabupaten Manggarai Timur	Tanggal 28 Agustus 2019
10.	Perda No.10 Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun 2019	Tanggal 14 Oktober 2019
11.	Perda No.11 tahun 2019	Kabupaten Layak Anak	Tanggal 20 Desember 2019
12.	Perda No.12 Tahun 2019	APBD tahun anggaran 2020	Tanggal 20 Desember 2019

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.141.350.000,- dan realisasi Rp.141.350.000,- 2. Program upaya kesehatan masyarakat, anggaran Rp.51.486.617.000,- dan realisasi Rp.49.397.217.481,- 3. Program pencegahan & pemberantasan penyakit menular, anggaran Rp.560.720.000,- dan realisasi Rp.549.606.607,- 4. Program perbaikan gizi masyarakat, anggaran Rp.2.746.999.000,- dan realisasi Rp.2.740.798.850,- 5. Program obat dan perbekalan kesehatan, pagu Rp.2.180.277.913,- dan realisasi Rp.2.091.379.348,- 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan jaringannya, anggaran Rp.29.770.375.712,91,- dan realisasi Rp.27.855.569.978,66,- 7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa /rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, anggaran Rp.18.265.609.502,10,- dan realisasi Rp.17.844.836.391,09,- 	9 Program	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						8. Program standarisasi pelayanan kesehatan, anggaran Rp.319.553.000,- dan realisasi Rp.319.553.000,- 9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, anggaran Rp.4.343.169.756,- dan realisasi Rp.2.571.416.000,-		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada sebanyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tentang pengambilan obat di gudang farmasi 2. SOP tentang penyusunan profil kesehatan	2 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 jabatan	85,71%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada yakni 1. Dokter Umum dan Dokter Gigi 2. Penyuluh Kesehatan 3. Perawat dan Perawat Gigi 4. Bidan 5. Farmasi 6. Sanitarian 7. Fisioterapis 8. Radiografer 9. Rekam Medis	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 708 personel	18,50%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
	yang relevan dengan urusan terkait				- Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel			
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang	0,055%		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 18 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang	100%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak . 11 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 11 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah,	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 11 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.153.473.627.690,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,- 	13,20%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.146.458.931.881,75 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,- 	13,21%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 105.385.735.792,75,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.146.458.931.881,75,- 	71,95%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.41.073.196.089,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.146.458.931.881,75,- 	28,04%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku Inventaris 3. Daftar mutasi asset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.2.769.322.752,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 179.912.589.669,-	1,53%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 5 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PERTANIAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kesejahteraan petani, anggaran Rp.1.163.931.000 & realisasi Rp.630.398.100 2. Peningkatan hasil produksi peternakan, anggaran Rp.1.408.233.750 & realisasi Rp.1.364.340.663,- 3. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan), anggaran Rp.1.307.178.000,- dan realisasi Rp.1.264.664.190,- 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, anggaran Rp.367.269.750,- dan realisasi Rp.360.588.450,- 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, anggaran Rp.12.848.929.123,- dan realisasi Rp. 12.732.144.970,- 6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, anggaran Rp.2.022.920.750,- dan realisasi Rp.1.980.314.716,- 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, anggaran Rp.530.125.250,- dan realisasi Rp.512.039.970,-	8 program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
					8. Program peningkatan kualitas bahan baku, anggaran Rp.272.938.516,- dan realisasi Rp.262.987.584,-			
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang Penyusunan KUA-PPAS 2. SOP tentang laporan pengembangan intensifikasi padi dan palawija 3. SOP tentang surat pertanggung jawaban (SPJ) 4. SOP tentang laporan realisasi penerimaan 5. SOP tentang penilaian angka kredit penyuluh pertanian 6. SOP tentang surat keputusan usulan jabatan fungsional 7. SOP tentang pembuatan surat cuti tahunan 8. SOP tentang surat usulan mutasi pegawai 9. SOP tentang surat kenaikan gaji berkala 10. SOP tentang laporan pengendalian hama penyakit 11. SOP tentang SK penetapan lokasi dan kelompok 12. SOP tentang laporan perkembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan pokok (padi dan palawija) 13. SOP tentang alokasi pupuk dan SK Het 	Ada 13 SOP		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No 6 2010 Tahun tentang Penertiban Penanggulangan dan Pemberantasan Hewan Menular Rabies - Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak - Perda No 5 Tahun 2015 tentang Retribusi RPH - Perda No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah 	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 25 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 33 Jabatan	76 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman-Pengendali Hama Pertanian dan Penyuluh Lapangan	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS SKPD, sebanyak 105 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.825 personil	2,74%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 1 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 33 orang.	6,06 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 25 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 25 jabatan.	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 (tiga) jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				- RENJA PD - RKA PD				
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program.	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.28.934.382.522 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	2,48 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja perangkat daerah Rp.28.062.138.911,- - Total realisasi belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	2,53 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp.20.407.113.926 - Total realisasi belanja PD, sebesar Rp.28.062.138.911	72,72%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar Rp.7.655.024.985 - Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.28.062.138.911	27,27%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 4 (Empat) jenis, sbb: 1. RFK 2. NERACA 3. CaLK 4. LRA	Ada sebanyak 4 (Empat) jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB (A,B,C,D,E) 2. Buku Inventaris 3. Rekapitulasi Buku Inventaris 4. Daftar Mutasi Aset 5. Daftar Barang Rusak Berat (aset lainnya)	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp.4.239.793.282 - Asset yang dikuasai SKPD Rp.86.809.911.526,40	4,88 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Mobil Operasional RPH 2. Leaflet 3. Ruang Pengaduan 4. Papan Pengumuman 5. Pengumuman Media Masa 6. Baner Penyuluhan Pertanian	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program penataan administrasi kependudukan, anggaran Rp.737.505.500,- dan realisasi Rp.729.845.850,-. 2. Program penataan system administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK), anggaran Rp.1.201.732.000,- dan realisasi Rp.1.197.179.110,-.	2 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada sebanyak 8 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penertiban KTP 2. SOP tentang Penertiban KK 3. SOP tentang KIA 4. SOP tentang Penertiban akte kelahiran 5. SOP tentang penertiban akte perkawinan 6. SOP tentang penertiban akte pengakuan anak 7. SOP tentang penertiban akte kematian 8. SOP tentang penertiban akte perceraian	8 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No.3 Tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta pencatatan sipil	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 jabatan	85,71%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 23 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,60 %	
7			Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	14,29 %		
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 18 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	85,71%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada dokumen sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 Jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.4.261.853.307,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,-	0,37%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.197.579.514,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,38%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.377.831.510,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.197.579.514,-	56,65%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.819.748.004,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.197.579.514,-	35,42%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku inevtaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.337.409.021,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.1.578.566.386,-	21,37%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman diMass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Kotak saran 5. Pengumuman lewat radio dan media massa	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	13	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey tentang kepuasan masyarakat terkait pelayanan KTP, KK dan akte	Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pengembangan budidaya perikanan anggaran Rp.920.907.000,- dan realisasi sebesar Rp.918.980.000,- 2. Program pengembangan perikanan tangkap anggaran Rp.822.857.400,- dan realisasi Rp.817.799.911,- 3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, anggaran Rp.672.484.000,- dan realisasi Rp.672.323.000,-	3 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	56,25%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 14 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,36%	
7			Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak orang	6,25 %		
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.5.111.308.271,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,- 	0,43%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.907.089.269,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10 	0,44%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.3.547.274.711 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.907.089.269	72,28 %	
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.359.814.558,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.907.089.269,-	27,71 %		
	Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis :	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.230.075.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.8.776.231.900,-	2,62%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada /Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BADAN KEUANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.185.600.000,- dan realisasi Rp.170.593.440,- 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran Rp. 3.576.606.250,- dan realisasi Rp.3.487.172.432,-	2 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang LAKIP 2. SOP tentang pelaksanaan verifikasi SPJ Keuangan 3. SOP tentang penyusunan Renstra dan Renja 4. SOP tentang penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 5. SOP tentang penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran 6. SOP tentang penyusunan DPPA 7. SOP tentang penyusunan indeks kepuasan masyarakat 8. SOP tentang penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	14 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						program dan kegiatan 9. SOP tentang penyusunan perjanjian kinerja 10. SOP tentang penyusunan RKA 11. SOP tentang pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pajak 12. SOP tentang penyusunan dan pelaksanaan DPA PPKD dan DPPA – PPKD 13. SOP tentang pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas 14. SOP tentang pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi, penertiban surat ketetapan pemberhentian pembayaran (SKPP) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBD 2018 2. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan APBD TA.2019 3. Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBD TA.2020	Ada 3 Perda	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 24 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	100.%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak Ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 35 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,91 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 4 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 24 Orang	16,67 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 24 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 24 Orang	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 Jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program 	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. 	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. 	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.12.758.649.843,06 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72 	1,10 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.10.424.403.089,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10 	0,94 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.7.075.517.981,- - Total realisasi belanja perangkat daerah Rp.10.424.403.089,- 	67,87 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja Tidak langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.348.885.108,00 - Total realisasi belanja perangkat daerah Rp.10.424.403.089,00	32,13 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CaLK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Buku Manual Inventaris Aset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 962.417.600,00 - Asset yang dikuasai Perangkat daerah Rp. 8.916.481.823,13	10,79 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	sebanyak 1 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah anggaran Rp.2.124.450.800,- dan realisasi Rp.2.067.200.126,-. 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Pagu Rp.39.424.000,- realisasi Rp.35.525.140,-	2 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 5 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Ikhtisar Hasil Pengawasan 2. SOP tentang Pemeriksaan Reguler 3. SOP tentang Penyusunan PKPT Berbasis Risiko 4. SOP tentang Pemberlakuan Quality Assurance 5. SOP tentang Juklak tentang pemantauan tindak lanjut	Ada 5 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perbub No:59 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	88,88%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Auditor dan P2UPD	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 31 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,81 %	
7			Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	37,5 %		
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 8 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 Orang	100 %		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA	3 Jenis dokumen	
			Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.5.475.968.527,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,47 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.378.605.313,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	0,49 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.117.242.800,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.5.475.968.527,-	56,92 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.358.725.727,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.475.968.527,-	43,75%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis,sbb: 1.Neraca 2.LRA 3.Calk	Ada/ Sebanyak 3 jenis:	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, yakni 1.KIB B s/d E 2.Buku INventaris 3.Buku Mutasi Barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp.205.292.200,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.072.480.000,-	6.07 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Liflet 4.Website	4 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey kepuasan tentang proses audit	Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KETAHANAN PANGAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program peningkatan ketahanan pangan, anggaran Rp.993.052.000,- dan realisasi Rp.976.774.047	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang Penyusunan Analisis Pasokan dan Harga Pangan 2. SOP tentang Pembuatan Laporan Keuangan Tahunan SKPD 3. SOP tentang Prosedur Pengelolaan Surat Keluar 4. SOP tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk 5. SOP tentang Penyusunan Skor Pola Pangan harapan 6. SOP tentang Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan 7. SOP tentang Penyusunan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi 	Ada 7 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 19	89,47%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 27 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,71 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	17,65%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 17 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.3,851,658,692,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72 	0,33%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.493.235.790,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10 	0,32%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.671.638.870,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.493.235.790,- 	47,85%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.821.596.920 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.493.235.790	52,14%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada,-, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB B dan E	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 338.259.996 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.1.444.167.220	23,42%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Leaflet	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dialokasikan dana Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.31.900.000,- 2. Program peningkatan pelayanan angkutan, anggaran Rp.700.884.000,- dan realisasi Rp.671.732.650,- 3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, anggaran Rp.127.001.602,- dan realisasi Rp.109.368.000,-	3 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 1 SOP yakni SOP tentang pengujian kendaraan bermotor	Ada 1 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi terminal 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor 4. Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi	- Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 12	91,66%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					jumlah jabatan yang ada x 100%			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 16 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,41%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	18,18 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA 4. DPA	4 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.874.917.590,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,24%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.715.977.327,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,25%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.580.001.950,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.715.977.327	58,17%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.135.975.377,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.715.977.327,-	41,83%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Daftar inventaris Barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.36.726.300,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.25.675.611.278,46	0,14%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Mobil keliling	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, anggaran Rp.210.908.500,- dan realisasi Rp.209.672.703,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, anggaran Rp.108.288.000,- dan realisasi Rp.107.841.160,- 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, anggaran Rp.72.154.600,- dan realisasi Rp.70.974.600,- 4. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan anggaran Rp.103.961.350,- dan realisasi Rp.100.811.350,- 5. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, anggaran Rp.1.000.000.000,- dan realisasi Rp.997.105.180,- 6. Program peningkatan kesejahteraan perangkat Desa dan Kelurahan, anggaran Rp.319.315.000,- dan realisasi Rp.315.724.200,- 7. Program pemekaran wilayah desa dan kelurahan, anggaran	7 program	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						Rp.422.479.500,- dan realisasi Rp.420.511.497,-		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa - Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	85,71%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 24 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,62%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang	16,67%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 18 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 12 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 11 program 	109,09%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program 	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.4.538.152.931,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,39%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.497.804.890,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	0,41%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.2.718.267.182,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.497.804.890,-	60,43%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.779.537.708,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.497.804.890,-	39,56%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB B, C	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.705.708.500,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.3.323.092.760,-	21,23%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PARTISIPASI MASYARAKAT	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		3. Leaflet		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS SOSIAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, anggaran Rp.177.990.000,- dan realisasi Rp.155.690.000,- 2. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma, anggaran Rp.160.726.275,- dan realisasi Rp.160.644.275,- 3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT). Anggaran Rp. 634.740.000,- dan realisasi Rp.622.171.850,- 4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Anggaran Rp.54.765.700,- dan realisasi Rp.54.740.700,-	4 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang Penyusunan Jadwal Monitoring Pencairan Dana Bansos PKH 2. SOP tentang Penyusunan Jadwal Monitoring Penyaluran Bansos Rastra 3. SOP tentang Pencatatan Anak Terlantar dan Lansia Terlantar Ke Dalam Formulir Pendataan PMKS 4. SOP tentang Pencatatan Warga Tuna Sosial ke Dalam Formulir Pendataan PMKS 5. SOP tentang Pencatatan Penyandang Cacat ke dalam Formulir Pendataan PMKS 6. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Atas SKTM 7. SOP tentang Pemulangan Orang Terlantar	Ada 9 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						8. SOP tentang Surat Masuk 9. SOP tentang Surat Keluar		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18	88,89%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 18 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,47%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	12,5%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	116%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.3.199.767.334,- - Total Belanja APBD, Rp1.162.228.417.918,72	0,27 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.135.599.609,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10	0,28%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.1.599.750.150 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.3.135.599.609	51,02 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.535.849.459 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.135.599.609	48,98 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Neraca 2.CALK 3.LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Laporan Barang semesteran 2. Laporan Barang tahunan 3. Daftar pengadaan tahun 2019 4. KIB 5. KIR 6. Berita acara rekon asset	Ada 6 jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 240.380.348. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 1.593.379.800.	15,08 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Stiker	Jumlah sebanyak 2 jenis.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.50.000.000,- 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal, anggaran Rp.279.000.000,- dan realisasi Rp.274.768.741,- 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan, anggaran Rp.242.786.000,- dan realisasi Rp.242.786.000,- 4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.40.000.000,- 5. Program pendidikan politik masyarakat, anggaran Rp.6.000.000,- dan realisasi Rp.6.000.000,- 6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan realisasi Rp.35.000.000,-	6 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	SOP tentang pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik	Ada 1 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		pemerintah cq Kementerian / LPNK						
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	93%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 14 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,36%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	15,38%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 11 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 11 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	137,5%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.094.310.912,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,18%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.085.990.625,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,19%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.1.083.447.450; - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.085.990.625,-	51,94%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.002.543.175,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.085.990.625,-	48,06%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Buku inventaris 2. Daftar mutasi barang 3. Daftar inventaris tetap	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.150.970.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.928.187.244,-	16,26%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.1.563.451.789,- dan realisasi Rp.1.562.358.089,- 2. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, anggaran Rp.178.444.500,- dan realisasi Rp.156.656.050,- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.1.563.451.789,- dan realisasi Rp.1.562.358.089,- 4. Program pendidikan kedinasan, anggaran Rp.188.537.500,- dan realisasi Rp.159.512.007,- 5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, anggaran Rp.2.087.645.011,- realisasi Rp. 1.817.788.510,-	5 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP DIKLAT PIM II 2. SOP DIKLAT PIM III 3. SOP DIKLAT PIM IV 4. SOP Pemberhentian / Pensiun PNS Gol.I s/d IVC 5. SOP usul Konversi NIP 6. SOP usul kartu TASPEN dan KARPEG	Ada 18 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						7. SOP usul Stya Lencana Karya Setya 8. SOP Ujian Dinas Tingkat II 9. SOP Ujian Dinas Tingkat I 10. SOP Fasilitasi Tugas Belajar 11. SOP Fasilitasi Izin Belajar 12. SOP Pengadaan PNS 13. SOP Kenaikan Pangkat Gol III/d kebawah 14. SOP kenaikan pangkat PNS Golongan IV 15. SOP mutasi PNS antar wilayah dalam Provinsi 16. SOP Pemberhentian Sementara PNS 17. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS 18. SOP Penempatan PNS Berdasarkan Usulan OPD		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 12	83,33%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1. Analis kepegawaian 2. Auditor kpegawaian	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat daerah, sebanyak 22 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel 	0,58%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang 	10%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA 4. DPA	4 jenis	
			10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program 	100%	
			11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah,	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Program RENJA Perangkat Daerah		diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.6.385.918.857,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,55%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.6.010.555.850,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10,-	0,54%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.4.904.057.000,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.6.010.555.850,-	76,78%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.481.861.857,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.6.010.555.850,-	30,22%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.318.368.059,- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.3.432.982.963,-	9,27%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pengumuman di media massa	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, anggaran Rp.169.000.000,- dan realisasi Rp.143.749.947,- 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, anggaran Rp.83.300.000,- dan realisasi Rp.83.300.000,- 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, anggaran Rp.287.840.000,- dan realisasi Rp.277.247.600,- 4. Program pengendalian penanaman modal dan pelayanan data informasi, anggaran Rp.105.000.000,- dan realisasi Rp.102.704.500,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP izin prinsip penanaman modal 2. SOP izin usaha penanaman modal 3. SOP izin prinsip perluasan penanaman modal 4. SOP izin usaha perluasan 5. SOP izin prinsip perubahan penanaman modal 6. SOP izin usaha perubahan 7. SOP izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal 8. SOP usaha penggabungan perusahaan penanaman modal 9. SOP izin prinsip lokasi 10. SOP surat izin usaha perdagangan (siup)	Ada 142 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						11. SOP surat keterangan izin tempat usaha (skitu) 12. SOP tanda daftar perusahaan 13. SOP izin tempat penjualan minuman beralkohol 14. SOP tanda daftar gudang (tdg) 15. SOP izin pendirian depot air minum isi ulang 16. SOP izin operasional bengkel kendaraan bermotor (karoseri, usaha tambal ban dan cuci kendaraan) 17. SOP izin operasional bengkel kayu 18. SOP tanda daftar industri 19. SOP surat izin usaha industri 20. SOP izin koperasi simpan pinjam 21. SOP izin pembukaan kantor kas cabang koperasi 22. SOP izin praktek dokter 23. SOP izin praktek bidan 24. SOP izin apotik 25. SOP izin toko obat 26. SOP surat izin pendirian balai kesehatan ibu dan anak 27. SOP surat izin pendirian balai pengobatan 28. SOP surat izin praktek dokter spesialis 29. SOP izin pendirian optik 30. SOP surat izin praktek pengobatan tradisional 31. SOP izin laboratorium klinik kesehatan swasta/ laboratorium kesehatan masyarakat 32. SOP surat izin pendirian rumah/klinik bersalin 33. SOP surat izin praktek apoteker (sipa) 34. SOP surat izin praktek asisten apoteker 35. SOP surat izin praktek fisioteraphi (sipf) 36. SOP surat izin praktek perawat 37. SOP surat izin produksi makanan dan minuman usaha rumah tangga 38. SOP izin operasional depot air minum isi ulang		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						39. SOP izin mendirikan rumah sakit kelas c dan kelas d 40. SOP izin operasional rumah sakit kelas c dan d 41. SOP izin operasional puskesmas 42. SOP izin toko alkes 43. SOP izin usaha mikro obat tradisional (umot) 44. SOP izin praktek bersama dokter umum dan dokter gigi 45. SOP izin usaha jasa konstruksi 46. SOP izin mendirikan bangunan 47. SOP sertifikat laik fungsi bangunan 48. SOP rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan untuk pemasangan utilitas pada ruas jalan 49. SOP izin penggunaan alat berat 50. SOP izin pendirian tower atau menara antena 51. SOP surat izin usaha warnet dan wartel 52. SOP rekomendasi pendirian radio swasta 53. SOP izin jasa titipan 54. SOP izin trayek 55. SOP surat izin mendirikan gudang di dermaga 56. SOP surat izin dermaga rakyat 57. SOP surat izin penyelenggaraan tempat parkir 58. SOP izin penutupan badan jalan 59. SOP izin insidentil 60. SOP izin pendirian pendidikan anak usia dini 61. SOP izin pendirian lembaga pendidikan taman kanak-kanak (tk) 62. SOP izin pendirian pendidikan sekolah dasar (sd) 63. SOP izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm) 64. SOP izin kursus 65. SOP izin pendidikan dasar yang diselenggarakan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<p>oleh masyarakat</p> <p>66. SOP izin usaha perikanan</p> <p>67. Surat izin penangkapan ikan (sipi)</p> <p>68. SOP ktp nelayan andon</p> <p>69. SOP izin pendirian keramba apung</p> <p>70. SOP usaha perbenihan rakyat dan budidaya ikan</p> <p>71. SOP izin usaha menambak</p> <p>72. SOP izin usaha rumput laut</p> <p>73. SOP izin pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan</p> <p>74. SOP izin tempat penampungan/distribusi ikan</p> <p>75. SOP izin pengelolaan pembudidayaan ikan</p> <p>76. SOP izin usaha perkebunan</p> <p>77. SOP izin produksi produk olahan ternak (daging, susu dan telur)</p> <p>78. SOP surat izin toko saprodi pertanian, perikanan dan saponak peternakan</p> <p>79. SOP surat izin pembibitan tanaman pertanian, perkebunan (penangkaran benih)</p> <p>80. SOP izin usaha pembibitan tanaman kehutanan</p> <p>81. SOP izin usaha distributor/pengecer pengadaan dan penyalur pupuk bersubsidi</p> <p>82. SOP izin operasional penggilingan padi, huller dan pengosongan beras</p> <p>83. SOP izin usaha peternakan (pembibitan dan penggemukan ternak)</p> <p>84. SOP izin pengeluaran komoditi pertanian, perkebunan, peternakan</p> <p>85. SOP izin distributor obat hewan</p> <p>86. SOP izin toko obat hewan</p> <p>87. SOP izin praktek dokter hewan</p> <p>88. SOP izin usaha produksi pembenihan tanaman</p>		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					pangan 89. SOP izin usaha pembenihan tanaman 90. SOP surat keterangan sahnya pengeluaran hasil pertanian/ternak 91. SOP izin penyedia penyalur pangan pokok/pangan lainnya 92. SOP izin penyelenggaraan reklame 93. SOP izin pembangunan dan pengembangan perumahan 94. SOP sertifikat kepemilikan bangunan gedung 95. SOP izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman 96. SOP izin pembukaan tanah 97. SOP surat izin penelitian 98. SOP surat izin selesai penelitian 99. SOP surat izin kuliah kerja lapangan (kklp)/kkn 100. SOP surat izin selesai kegiatan kuliah kerja lapangan (kklp/kkn) 101. SOP izin lingkungan 102. SOP izin pengumpulan sumbangan dalam daerah 103. SOP tanda daftar orsos/lsm yang bergerak di bidang sosial 104. SOP izin pendirian tempat penampungan anak 105. SOP izin usaha penempatan tenaga kerja swasta 106. SOP izin lembaga pelatihan kerja 107. SOP izin pemanfaatan langsung panas bumi 108. SOP penerbitan perpanjangan imta (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) 109. SOP izin usaha pariwisata agen perjalanan wisata (travel) 110. SOP izin usaha pariwisata pramuwisata 111. SOP izin usaha pariwisata jasa konvensi insentif		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						dan pameran 112. SOP izin usaha pariwisata jasa impresariat 113. SOP izin usaha pariwisata jasa konsultan pariwisata 114. SOP izin usaha pariwisata jasa informasi pariwisata 115. SOP izin usaha pariwisata hotel bintang 116. SOP izin usaha pariwisata hotel non bintang 117. SOP izin usaha pariwisata pemondokan bangunan permanen 118. SOP izin usaha pariwisata pemondokan bangunan semi permanen 119. SOP izin usaha pariwisata pondok wisata 120. SOP izin usaha pariwisata rumah makan dan restoran 121. SOP izin usaha pariwisata kawasan taman rekreasi 122. SOP izin usaha pariwisata obyek wisata 123. SOP izin usaha pariwisata fasilitas tirta dan rekreasi air 124. Izin usaha pariwisata sarana dan fasilitas olah raga 125. SOP izin usaha pariwisata angkutan wisata 126. SOP izin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum 127. SOP surat izin usaha gelanggang renang 128. SOP surat izin usaha pemandian alam 129. SOP surat izin usaha kolam mancing 130. SOP surat izin usaha rumah billyard 131. SOP surat izin usaha klub malam 132. SOP surat izin usaha diskotik 133. SOP surat izin usaha karaoke 134. SOP surat izin usaha panti pijat 135. SOP surat izin usaha pagelaran musik dan tari		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						136. SOP surat izin usaha pusat kesegaran (fitnees centre) 137. SOP surat izin usaha playstation 138. SOP surat izin usaha salon kecantikan 139. SOP surat izin usaha barber shop 140. SOP tanda daftar usaha pariwisata spa 141. SOP izin penggunaan tanah lapang (stadion, tanah lapang umum negara dan daerah) 142. SOP izin operasional taman baca masyarakat		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Manggarai Timur	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	76,19%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 19 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,49%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang 	25%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.706.679.177,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,23%		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.647.493.731,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10	0,24%		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung		15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.113.721.662 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.647.493.731	42,06%	
				16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.533.772.069 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 2.647.493.731	57,93%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat	- KIB - Barang inventaris	Ada		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.135.500.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.3.435.769.205,-	3,94%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Banner 4. Ruang pengaduan dan informasi 5. Website	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Yakni : Survey Kepuasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan	Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAN HIDUP

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.47.500.000,- dan realisasi Rp.47.407.000,- 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, anggaran Rp.1.331.688.000,- dan realisasi Rp.1.327.956.225,- 3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, anggaran Rp.322.504.000,- dan realisasi Rp.270.363.450,- 4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, anggaran Rp.1.348.290.000,- dan realisasi Rp.1.344.893.513,- 5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), anggaran Rp.1.143.152.473,66,- dan realisasi Rp.1.040.716.230,66,- 	5 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada, sebanyak 11 SOP, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang Penyusunan RENSTRA 2. SOP tentang Penyusunan DPA 3. SOP tentang Pelayanan Retribusi Persampahan 4. SOP tentang Penertiban Rekomendasi Lingkungan Hidup 	Ada 11 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						5. SOP tentang Pengangkutan Sampah 6. SOP tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan 7. SOP tentang Pembuatan Laporan Analisis Laboratorium 8. SOP tentang Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat 9. SOP tentang Penanganan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP tentang Penanganan Surat Masuk 11. SOP tentang Penanganan Surat Keluar		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA Retribusi Sampah (No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan PERDA No 11 Tentang Perubahan Atas PERDA No 4 tahun 2012) - PERDA No 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Mata Air - PERDA No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 16	81,25 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 20 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825	0,052%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		yang relevan dengan urusan terkait				personel		
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 10 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 orang.	76,92 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 13 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 orang	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA SKPD	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	90 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.6.490.159.833,66.- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,55%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.6.316.193.978,66 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10	0,57%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.888.440.718,66 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.6.316.193.978,66	77,39%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.427.753.260 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.6.316.193.978,66	22,60%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Neraca 2.Calk 3.LRA	Ada sebanyak 3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, jenis dokumennya; 1. Buku Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Barang 3. Rekapitulasi Mutasi Barang	Ada, Sebanyak 3 jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 1.722.183.796,09 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 12.845.299.125,03	13.40%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah sebanyak 2 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana (Jumlah anggaran Rp. 3.592.140.500,- dan realisasi sebesar Rp. 3.224.030.037,-)	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tersebut.	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS OPD , sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak .3.825 personil	54,90%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 4 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang.	28,57%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 14 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	
			10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	100%	
			11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA OPD, sebanyak 4		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA OPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD, sebesar Rp. 6.323.038.708,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,54%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Total Realisasi belanja OPD, sebesar Rp. 5.825.668.794,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	0,53%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Realisasi belanja Langsung OPD, sebesar Rp. 4.244.707.206,- - Total Realisasi belanja OPD, sebesar Rp.5.825.668.794,-	72,86 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Realisasi belanja Tidak Langsung OPD, sebesar Rp 1.580.961.588,- - Total Realisasi belanja OPD, sebesar Rp. 5.825.668.794,-	27,13%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CaLK 3. LRA 4. RfK	Ada sebanyak 4 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIB B 2. KIB C 3. KIB D 4. Rekap Mutasi Barang 5. Laporan Mutasi Barang 	Ada sebanyak 5 jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0, - - Asset yang dikuasai OPD, sebesar Rp.9.539.919.500,- 	0 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos pengaduan / posko bencana 2. Papan pengumuman / rambu peringatan dini bencana 3. Roll Banner informasi pencegahan dini bencana 4. Mobil Operasional Penanganan Bencana 5. Sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bencana 	Jumlah sebanyak 5 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan disiplin aparatur, anggaran Rp.352.000.000,- dan realisasi Rp.336.443.790,- 2. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, anggaran Rp.5.938.983.000,- dan realisasi Rp.5.447.958.020,-	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada		Tidak Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	84,61%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat daerah, sebanyak 12 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel 	0,31%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang 	27,27%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis yakni: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
			10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program 	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.23.548.820.472,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	2,03%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.22.596.443.734,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	2,04%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.10.996.671.967,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.22.596.443.734,-	48,66%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.11.599.771.767,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.22.596.443.734,-	51,33%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Laporan mutasi barang 3. LBPS 4. LBPT	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.1.267.566.076,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.24.577.264.601,-	5,16 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Bank data DPRD	Ada 3 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : SEKRETARIAT KORPRI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program pembinaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan Korpri, anggaran Rp.114.032.260,- dan realisasi Rp.101.436.100,-	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5	60%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 4 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,010%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan kepemimpinan pelatihan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak	100%		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.350.760.800,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,03%		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.338.104.640,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,03%		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung		15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.338.104.640,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.338.104.640	100%	
				16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.338.104.640,-	0%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset	KIB Buku inventaris	Ada		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	DAERAH				Perangkat Daerah			
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.33.000.000,- dan realisasi Rp.32.987.700,- 2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, anggaran Rp.1.962.123.500,- dan realisasi Rp.1.821.609.500,- 3. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, anggaran Rp.158.075.000,- dan realisasi Rp.157.594.000,- 4. Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap Perda dan Perbup, anggaran Rp.75.200.000,- dan realisasi Rp.75.200.000,- 5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, anggaran Rp.15.000.000,- dan realisasi Rp.14.925.000,- 	5 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	<p>Ada 6 yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang operasi penertiban 2. SOP tentang pelaksanaan patrol 3. SOP tentang pelaksanaan pengamanan lokasi kunjungan kerja 4. SOP tentang pelaksanaan pengamanan rumah dinas 5. SOP tentang pelaksanaan penjagaan gedung 	Ada 6 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						dan asset penting 6. SOP tentang pengamanan upacara		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penertiban Penanggulangan dan Pemberantasan Hewan Penular Rabies 2. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Pemeliharaan dan Kepemilikan Ternak	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 20 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,52%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 17	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 17 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.4.179.405.006,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,36%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.956.574.393,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10,-	0,36%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.654.694.200,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.956.574.393,-	67,09%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.301.880.193,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.956.574.393,-	32,90 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.371.330.200,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 525.101.397,14,-	70,71%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan sumber daya aparatur, anggaran Rp.529.831.383,- dan realisasi Rp.528.961.308,- 2. Program penataan daerah otonomi baru, anggaran Rp.78.735.552,- dan realisasi Rp.69.393.752,- 3. Program pengembangan wilayah perbatasan, anggaran Rp. 215.438.705,- dan realisasi Rp.203.876.243,- 4. Program Kerja sama antar pemerintahan daerah, anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.25.000.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tentang LKPJ 2. SOP tentang LPPD	Ada 2 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	75%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 12 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,31%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	33,33%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari: 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.101.437.600,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72 	0,18%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.972.022.203,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10,- 	0,18%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.1.972.022.203,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.972.022.203 	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.972.022.203,-	0 %	Bagian Umum Setda
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB B 2. Buku Inventaris 3. Laporan Mutasi Barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.190.214.629,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.7.157.774.516,-	2,65%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pengumuman di media massa	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, anggaran Rp.62.551.500,- dan realisasi Rp.61.401.500,- 2. Program koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, anggaran Rp.104.717.000,- dan realisasi Rp.104.367.000,- 3. Program peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama, anggaran Rp.169.500.000,- dan realisasi Rp.164.149.400,-	3 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	SOP tentang hibah dan bantuan social	Ada 1 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 orang - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 orang	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 6 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,15%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	25%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada yakni: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.620.676.800,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,05%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 613.260.200,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	0,06%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.613.260.200,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.613.260.200,-	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 613.260.200,-	0%	Bagian Umum Setda
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.47.332.200,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.235.549.100,-	20,09%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN HUKUM-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah, anggaran Rp.59.260.000,- dan realisasi Rp.59.202.000,- 2. Program penataan peraturan perundang-undangan, anggaran Rp.642.195.500,- dan realisasi Rp.622.695.500,-	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	75%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Perangkat Daerah	organisasi Perangkat Daerah			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat daerah, sebanyak 5 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel 	0,078%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang 	33,33%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 3 dokumen yakni: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 1.030.676.800 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,09%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.993.124.300,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,09%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.993.124.300,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.993.124.300,-	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 993.124.300,-	0 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB Buku Inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.133.469.600,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.388.419.000,-	34,36%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, anggaran Rp.249.316.052,- dan realisasi Rp.238.615.882,-	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 5 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,013%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	25%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 3 dokumen: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis	
			10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100%	
			11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah		Perangkat Daerah	jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.629.394.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,05%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.601.418.219,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,05%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.601.418.219,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.601.418.219,-	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.601.418.219,-	0%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.218.426.055,68 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.854.924.104,13	25,55%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> Program fasilitasi kebijakan dan program pemerintah, anggaran Rp.59.788.400,- dan realisasi Rp.52.737.400,- Program koordinasi dan pembinaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, anggaran Rp.306.697.800,- dan realisasi Rp.298.017.000,- 	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	<p>Ada, sebanyak 6 SOP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP tentang Administrasi Pemerintahan penanganan surat masuk SOP tentang administrasi penyusunan dokumen hasil pendataan produksi daerah SOP tentang administrasi penyusunan laporan hasil penghitungan inflasi SOP tentang penghitungan inflasi Kabupaten Manggarai Timur SOP tentang administrasi penyusunan risalah rapat koordinasi TPID SOP tentang penyusunan laporan tindak lanjut permohonan /usulan 	Ada 6 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						masyarakat		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 5 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,07%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	25%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada dokumen, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.736.101.600,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,06%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.719.099.750,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,06%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.719.099.750 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.719.099.750,-	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.719.099.750,-	0%	Bagian Umum Setda
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp.59.664.400,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.608.364.200,-	9,80 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN ORGANISASI-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.362.379.000,- dan realisasi Rp.333.524.500,- 2. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, anggaran Rp.242.537.500,- dan realisasi Rp.218.185.500,- 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, anggaran Rp.32.165.000,- dan realisasi RP.22.920.000,-	3 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 2 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	50%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur	Ada, yakni Analisis Kepegawaian Pratama	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				organisasi Perangkat Daerah	organisasi Perangkat Daerah			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat daerah, sebanyak 10 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel 	0,26%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang 	50%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang 	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 2 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program 	33,33%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.146.183.200,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,09%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.051.290.700,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10,-	0,09%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.051.290.700,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.051.290.700,-	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.051.290.700,-	0%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						3. CALK		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada yakni: 1. KIB B 2. Buku inventaris 3. Laporan Mutasi Barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp.60.679.850,- - Aset yang dikuasai perangkat Daerah, Rp.577.817.350,-.	10,50%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Pengumuman di media massa	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.1.655.000,- dan realisasi Rp.1.655.000,- 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran Rp.140.750.000,- dan realisasi Rp.139.700.000,- 3. Program kerjasama informasi dengan mass media, anggaran Rp.194.458.000,- dan realisasi Rp.192408.000,-	3 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada terdiri dari: 1. SOP tentang kunjungan kerja kepala / wakil kepala daerah 2. SOP tentang penyediaan jasa iklan/ucapan selamat, undangan media cetak/elektronik	Ada 2 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	75%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 4 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,10%	
7			Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	33,33%		
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	
			Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang	100%

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						ditetapkan sebanyak 5 program		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 786.352.400,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,07%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.778.893.800,-. - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10	0,07%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.778.893.800,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.778.893.800,-	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.778.893.800,-	0%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, yakni: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada Sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Buku inventaris 2. KIB B 3. Laporan Mutasi barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.286.619.500,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.919.681.600	31,17%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Website 3. Media masa	3 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN UMUM-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran Rp.3.454.385.000,- dan realisasi Rp.3.323.365.614,-	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1 (satu) buah SOP tentang Pendistribusian surat	Ada 1 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 2 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	50%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan fungsional	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 12 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,31%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	50%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 2 orang Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3. jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
			10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100%	
			11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Program RENJA Perangkat Daerah		diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 14.664.199.708 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	1,26%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.14.310.519.920,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	1,29%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.8.611.878.372,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.14.310.519.920,-	60,18 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.5.698.641.548,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 14.310.519.920,-	39,82%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. BUku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.2.475.090.013,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.46.097.675.626,-	5,36%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman diMass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masy. terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.39.959.000,- dan realisasi Rp.39.959.000,- 2. Program pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa, anggaran Rp.554.433.000,- dan realisasi Rp.546.933.000;	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang laporan pemilihan penyedia 2. SOP tentang pbj melalui penyedia 3. SOP tentang penayangan RUP 4. SOP pbj melalui E- Katalog 5. SOP tentang pengumuman tender dan dokumen penawaran 6. SOP tentang penyimpanan dokumen asli 7. SOP tentang permintaan user dan paswor pokja pemilih 8. SOP tentang penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan	Ada 8 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 5 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,13%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang	0,25%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.902.023.200,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,07%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.892.660.556,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10,-	0,08%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.892.660.556,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.892.660.556,-	100 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 892.660.556,-	0%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB B 2. KIR 3. Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.311.749.330,-	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman 2. Website LPSE	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	MASYARAKAT			4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masy. terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN BORONG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.2.070.333.800,- dan realisasi Rp.2.023.998.195,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.53.870.000,- dan realisasi Rp.53.870.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, anggaran Rp.25.834.500,- dan realisasi Rp.25.809.500,- 4. Program penyelesaian konflik di masyarakat, anggaran Rp.179.582.000,- dan realisasi Rp.179.557.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	83,33%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 45 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	1,17%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	5%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 20 orang - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.5.718.195.905,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72 	0,49%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 5.521.167.285,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10 	0,50%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.2.698.619.095,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.521.167.285,-	48,87%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.2.822.628.189,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.521.167.285,-	51,12%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada,sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.53.414.754,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.7.508.967.747,-	0,72%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN POCO RANAKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.1.526.950.000,- dan realisasi Rp.1.524.910.000,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.22.027.000,- dan realisasi Rp.22.027.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, anggaran Rp.16.225.000,- dan realisasi Rp.16.225.000,- 4. Program penyelesaian konflik di masyarakat, anggaran Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	87,5%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 57 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	1,49%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 2	0 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 24 orang - Pejabat yang ada sebanyak 24 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 jenis dokumen	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.5.907.521.549,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,51%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.861.593.502,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,52%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.2.176.653.860,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.861.593.502,-	37,13 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.3.684.939.642,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.861.593.502,-	62,87%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis yakni: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Buku inventaris 2. KIB A,B dan C	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 36.566.791,40,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 3.034.910.414,-	1,20%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN KOTA KOMBA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.1.923.873.900,- dan realisasi Rp.1.916.693.250,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.33.875.000,- dan realisasi Rp.33.700.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.19.140.000,- dan realisasi Rp.19.115.000,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.32.013.500,- dan realisasi Rp.31.450.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	50%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 42 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	1,09%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepegangatan 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.5.000.431.861,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,43%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.969.144.417,-	0,45%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Realisasi Belanja APBD	Belanja APBD x 100%	- Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.2.356.946.100,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.969.144.417,-	47,43%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp. 2.612.198.317,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.4.969.144.417,-	52,56%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Neraca 2. LRA 3.CALK	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB A, B dan C 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp.187.688.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.4.477.634.500,-	4,19%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN LAMBA LEDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.434.802.000,- dan realisasi Rp.431.792.150,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, anggaran Rp.19.500.000,- dan realisasi Rp.19.500.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, anggaran Rp.15.026.000,- dan realisasi Rp.15.026.000,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.6.062.000,- dan realisasi Rp.5.962.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	50%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 21 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,054%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	40%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 5 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.176.485.822,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,19%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.138.679.437,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,19%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.764.985.200 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.138.679.437,-	35,77%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.373.694.237,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.138.679.437,-	64,23%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB A-C 2. Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.1.495.401.320,-	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN ELAR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.897.745.000,- dan realisasi Rp.897.732.100,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan, anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi Rp.30.000.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.10.500.000,- dan realisasi Rp.10.450.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada sebanyak 15	53,33%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan fungsional	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 28 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,73%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 orang - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.934.199.223,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,25%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.924.274.302,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,26%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.1.232.212.450,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 2.924.274.302,-	5,08 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp. 1.692.061.852,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.924.274.302,-	69,87%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Buku Inventaris 2. KIB A,B dan C 3. Laporan Mutasi asset 4. LPBS	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.110.000.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.874.546.333,-	1,25%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN SAMBI RAMPAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.3.284.976.000,- dan realisasi Rp.3.276.401.000,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp.10.000.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan (PKK), anggaran Rp.9.467.000,- dan realisasi Rp.9.467.000,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.15.000.000,- dan realisasi Rp.15.000.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 26 jabatan	80,76%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 42 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	1,09%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 Orang	9,5%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 21 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.6.809.923.762 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,-	0,59%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.6.774.211.618,- - Total Realisasi Belanja APBD,	0,61%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp.1.108.353.674.057,10,-		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.3.883.621.680,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.6.774.211.618,-	57,32 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.2.890.589.938,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.6.774.211.618,-	42,67%	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Neraca 2.CALK 3.LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. Buku inventaris Barang 2. KIB B,C dan F 3. Daftar Mutas iaset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp.495.438.252,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.4.593.659.631,-	10,79%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada 2 jenis yakni: 1. Papan pengumuman 2. Leaflet/baliho	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				di Mass media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN RANA MESE
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.173.930.000,- dan realisasi Rp.173.880.000,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.17.163.500,- dan realisasi Rp.17.163.500,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, anggaran Rp.6.000.000,- dan realisasi Rp.5.970.000,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.35.975.000,- dan realisasi Rp.35.935.000,- 	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 6 orang - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	66,66%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 23 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,060%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 6 orang	16,66%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 6 orang	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari: 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.269.987.372,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,20%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.256.109.843,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,20%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.652.403.855,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.2.256.109.843,-	28,91%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.603.705.988,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.256.109.843,-	71,08 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB A-C Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp.48.882.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.2.461.655.564,-	1,9%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	MASYARAKAT			3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa/kelurahan, anggaran Rp.355.262.000,- dan realisasi Rp.355.262.000,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.12.735.000,- dan realisasi Rp.12.735.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.15.373.000,- dan realisasi Rp.15.373.000,- 4. Program penyelesaian konflik di masyarakat, anggaran Rp.10.523.000,- dan realisasi Rp.10.523.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	55,55%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 20 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,29%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	20%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	120%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	3 jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.1.926.121.656,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,17%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.872.493.529,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10	0,17%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.646.448.900,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 1.872.493.529,-	34,52%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.226.044.629,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.872.493.529,-	65,47 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis yakni: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB A-C 2. Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.36.823.000,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 2.742.028.800,-	1,34%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : KECAMATAN ELAR SELATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.682.320.500,- dan realisasi Rp.680.959.500,- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, anggaran Rp.18.918.000,- dan realisasi Rp. 18.918.000,- 3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan, anggaran Rp.19.192.600,- dan realisasi Rp.19.192.600,- 4. Program penyelesaian konflik masyarakat, anggaran Rp.17.650.000,- dan realisasi Rp.8.300.000,-	4 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 15	70%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 17 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,47%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	14,28%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 7 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 Orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 3 jenis : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	3 jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program 	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. 	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program 	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.337.810.139,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72 	0,25%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.2.286.070.701,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10 	0,26%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.164.983.526,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 2.2.286.070.701,-	42,13%	
	16		Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.121.087.175,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.286.070.701,-	57,86%		
	Laporan keuangan OPD		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB Buku inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 2.871.472.576,-	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumumandi Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan pengumuman	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Ketenagakerjaan
2. Urusan Transmigrasi

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dialokasikan dana Rp.614.134.677,- dan realisasi Rp.569.978.587,- 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran Rp.524.447.500, dan realisasi Rp.521.803.500. 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dialokasikan dana Rp.254.258.500,- dan realisasi Rp. 229.038.329,- 4. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dialokasikan dana Rp.94.865.000,- dan realisasi Rp.43.958.800,-	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, anggaran Rp.170.289.000, dan realisasi Rp.168.490.600.	4 Program	1 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	SOP tentang Perijinan Ketenagakerjaan	Tidak ada SOP	Jumlah 1 SOP	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
		Kementerian / LPNK								
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 12	- Jabatan yang ada sebanyak 3 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	75%	75%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 13 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 3 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,33 %	0,07 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
		terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 3 Org	16,66 %	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100%	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 3 jenis yakni 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA	Ada 3 jenis yakni 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA	3 jenis dokumen	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 1 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 1 program	100 %	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100%	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1	100%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 3.411.016.830,- - Total Belanja APBD, Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.170.289.000,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,29%	0,01%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.148.239.967 - Total Realisasi Belanja APBD, Rp. 1.108.353.674.057,10,-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.168.490.600 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.108.353.674.057,10,-	0,29%	0,01%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.009.552.217,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.148.239.967,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.168.490.600,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.168.490.600,-	60,58%	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.138.687.750,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.148.239.967,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.168.490.600,-	34,33 %	0%`	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inevtaris barang	1. KIB 2. Buku inevtaris barang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.620.908.672,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 37.361.683.872,-	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.620.908.672 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 37.361.683.872,-	1,66%	Tidak ada pemisahan aset Perangkat daerah	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
						Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (1) Transmigrasi	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7B)	(7C)	(8B)	(8C)	(9)
					100 %					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman diMass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Ada jenis	Ada ...jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada			

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. Kepemudaan dan Olah Raga
2. Urusan Pariwisata

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan, anggaran Rp.593.800.000,- dan realisasi Rp.586.090.000,- 2. Program pembinaan dan pasyarakatan olah raga anggaran Rp. 113.603.000,- dan realisasi Rp.113.078.000,- 3. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, anggaran Rp.153.050.000,- dan realisasi Rp.152.938.000,-	1. Program pengembangan pemasaran pariwisata, anggaranRp.441.750.000,- dan realisasi Rp.419.565.750,- 2. Program pengembangan destinasi pariwisata, anggran Rp.1.254.829.000,- dan realisasi Rp.852.047.800,- 3. Program pengembangan kemitraan anggaran Rp.627.638.000,- dan realisasi Rp.592.833.000,-	3 program	3 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang surat masuk 2. SOP tentang surat keluar 3. SOP tentang penyusunan LAKIP 4. SOP tentang penyusunan LPPD 5. SOP tentang penyusunan PPAS dan PPASP 6. SOP tentang penyusunan RENJA 7. SOP tentang penyusunan	1. SOP tentang pendataan kunjungan wisatawan 2. SOP tentang rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) usaha penyediaan akomodasi 3. SOP tentang TDUP tanda usaha penyediaan jasa makan	Ada 19 SOP	Ada 6 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Renstra 8. SOP tentang penyusunan RKA 9. SOP tentang penyusunan Laporan keuangan semesteran 10. SOP tentang laporan realisasi anggaran, neraca, laporan mutasi asset dan CALK 11. SOP tentang pengajuan SPP UP/ Gu/TU 12. SOP tentang pengajuan LS barang dan jasa 13. SOP tentang pengajuan SPP LS Gaji 14. SOP tentang pengelolaan barang 15. SOP tentang penyusunan laporan fungsional dan laporan administrative 16. SOP tentang kegiatan Diklat kepemimpinan 17. SOP tentang kegiatan lomba kreasi seni 18. SOP tentang kegiatan pelatihan kewirausahaan 19. SOP tentang penyelenggaraan kompetensi olahraga	minum 4. SOP tentang pemungutan retribusi masuk objek wisata 5. SOP tentang layanan informasi pariwisata 6. SOP tentang pelaksanaan festival tahunan			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencan induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Manggarai Timur	Tidak ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Penyelenggaraan Urusan			tahun 2015-2025			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada sebanyak 12	77%	83%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 18 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 14 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,47 %	0,36%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	50%	10 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 4. RENSTRA PD 5. RENJA PD 6. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 3 jenis: 1. Renstra PD 2. Renja 3. RKA PD	Ada 3 jenis: 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	3 jenis dokumen	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 2 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 2 program	100%	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	%	%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					DPA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak 3	- Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.3.621.097.144,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,-	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.2.324.217.000,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72,-	0,31%	0,20%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.602.209.993,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10,-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.864.446.550,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	0,33%	0,17%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.396.107.250,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.602.209.993,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.864.446.550,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.2.324.217.000,-	0,39 %	0,80%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.206.102.743,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.602.209.993	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.2.324.217.000,-	40,36 %	0%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 5 jenis	Ada 5 jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						4. LPE 5. LO	4. LPE 5. LO			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inventaris barang	1. KIB 2. Buku inventaris barang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.69.186.486,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 12.980.397.613,-	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.107.292.030,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 12.980.397.613,-	0,53%	0,83%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	1. Buku pesona pariwisata Manggarai Timur 2. Website 3. Billboard promosi 4. Banner promosi pariwisata 5. Leaflet	Ada 1 jenis	Ada 4 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pekerjaan Umum
2. Urusan Tata Ruang

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, anggaran Rp.420.976.470,- dan realisasi Rp.420.976.470,- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, anggaran Rp.2.676.269.750,- dan realisasi Rp.153.842.750,- 3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, anggaran Rp.17.379.714.159,- dan realisasi Rp.10.773.367.150,- 4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, anggaran Rp.600.000.000,- dan realisasi Rp.600.000,- 5. Program pembangunan jalan dan jembatan, anggaran Rp.144.912.331.853,50,- dan realisasi Rp.133.920.918.383,-	1. Program perencanaan tata ruang, anggaran Rp.463.520.000,- dan realisasi Rp.421.177.386,- 2. Program pemanfaatan ruang, anggaran Rp.1.712.000.000,- dan realisasi Rp.1.257.089.517,- 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang, anggaran Rp.221.480.000,- dengan realisasi Rp.195.265.301,-	8 program	3 Program	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						<p>6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, anggaran Rp.23.988.477.584,50,- dan realisasi Rp.20.904.253.633,-</p> <p>7. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, anggaran Rp.1.513.907.000,- dan realisasi Rp.1.208.896.230,-</p> <p>8. Program pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, anggaran Rp.752.531.000,- dan realisasi Rp.645.016.174,-</p>				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	<p>Ada 6 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi 2. SOP ttg BA PHO 3. SOP ttg Rehab Jaringan Irigasi 4. SOP ttg Laporan RfK 5. SOP ttg Pergeseran/Perubahan Anggaran 6. SOP ttg Penerbitan SK 	SOP tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	Ada 6 SOP	Ada 1 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 18 - Jabatan yang ada, sebanyak 25	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	72 %	75 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 56 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 3 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	1,46%	0,08%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	40%	0%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi syarat	- Pejabat yang memenuhi syarat	94,44%	66,66 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				persyaratan kepengkatan	kepengkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	kepengkatan 17 orang - Pejabat yang ada sebanyak 18 orang	kepengkatan 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 jenis dokumen	3 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 11 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 11 program	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	100%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.197.373.828.724 - Total Belanja APBD, Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah, Rp. 2.397.000.000,- - Total Belanja APBD, Rp.1.162.228.417.918,72	16,98%	0,20%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.172.568.697.422,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10,-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.873.532.204 - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.1.108.353.674.057,10,-	15,57%	0,17 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, Rp.169.436.979.615 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.172.568.697.422,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.873.532.204 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.1.873.532.204,-	98,18%	100%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.131.717.807,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.172.568.697.422,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.1.873.532.204,-	1,81%	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Tata Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 jenis	Ada 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku ineventaris barang 3. Daftar Mutasi barang	1. LBPS 2. LBPT 3. KIB 4. Buku ineventaris barang 5. Daftar Mutasi aset	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.2.962.884.062,33 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.1.247.489.847.162,73	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.0,-	0,24 %	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	Ada 2 jenis	Ada 2 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pendidikan
2. Kebudayaan

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran Rp.231.020.000,- dan realisasi Rp.169.691.560,- 2. Program pendidikan anak usia dini, anggaran Rp.631.100.000,- dan realisasi Rp.620.074.900,- 3. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, anggaran Rp.24.451.694.448,- dan realisasi Rp.23.899.107.991,- 4. Program pendidikan non formal, anggaran Rp.1.407.574.630,- dan realisasi Rp.1.232.032.630,- 5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran Rp.12.924.695.100,- dan realisasi Rp.12.795.246.114,- 6. Program manajemen pelayanan pendidikan, anggaran Rp.1.804.982.800,- dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan nilai budaya, anggaran Rp.175.465.000,- dan realisasi Rp.147.782.926,- 2. Program pengelolaan keragaman budaya, anggaran Rp.110.000.000,- dan realisasi Rp.34.625.000,- 	7 program	2 program	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						realisasi Rp.1.543.157.112,- 7. Program BOS, anggaranRp.52.956.832.935,- dan realisasi Rp.49.604.475.615,-				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 8 SOP yakni 1. SOP tentang pengendalian konflik internal sekolah 2. SOP tentang usulan kenaikan pangkat Golongan III dan IV 3. SOP tentang perekrutan dan pengangkatan guru komite sebagai penerima dana insentif/BOSDA tahun anggaran 2019 4. SOP tentang pelayanan BOS SD/MI, SMP/MTs tahun 2015 5. SOP tentang pembayaran dana insentif /Bosda guru komite TA.2013 Kabupaten Manggarai Timur 6. SOP tentang pendataan peserta UN SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA 7. SOP tentang membuat surat tugas dan SPPD dalam daerah SOP tentang sertifikasi guru	Tidak ada	Ada 8 SOP	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 25 jabatan	- Jabatan yang ada sebanyak 3 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	80 %	75 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, pengawas sekolah	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 2.101 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 3 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	54,92%	0,07 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 3	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 20 orang - Pejabat yang ada sebanyak 25 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang 	80 %	75 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 4. RENSTRA PD 5. RENJA PD 6. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 4. Renstra OPD 5. Renja OPD 6. RKA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 9 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 9 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program 	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. 	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, Rp.300.723.430.915,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah, Rp.285.465.000,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	25,87 %	0,02 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 292.226.654.002,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.182.407.926,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp.1.108.353.674.057,10	26,36 %	0,01 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp. 93.613.220.724,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 292.226.654.002,-,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.182.407.926,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.182.407.926,-,-	32,03%	100 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, Rp.198.613.433.278,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 292.226.654.002,-,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.182.407.926,-	67,97 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kebudayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	Ada 35 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. Buku inventaris barang 2. Daftar pengadaan TA.2019	1. Buku inventaris barang 2. Daftar pengadaan TA.2019	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.81.006.208 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.264.516.925.181,87	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.264.516.925.181,87	0,03%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman lewat radio dan media massa	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman lewat radio dan media massa	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program KB : anggaran Rp.3.770.888.100, dan realisasi Rp.3.686.882.100, 2. Program pelayanan Contracepsy: anggaran Rp.3.077.972.134, realisasi Rp.3.040.367.110,		2 program	0 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 7 SOP yakni: 1. SOP Pemasangan IUD 2. SOP Implan 3. SOP Penyusunan renstra 4. SOP penyusuna LAKIP 5. SOP Penyusunan RENJA 6. SOP Pendistribusian Alokasi 7. SOP gaji berkala	Ada 3 SOP yakni: 1. SOP Penanganan kasus 2. SOP Penjangkauan korban 3. SOP Peendampingan korban	Ada 7 SOP	Ada 3 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Perda NO 11 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak	Tidak ada	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	- Jabatan yang ada sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	70%	50 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 16 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 2 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,4 %	0.05%	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak	16%	50%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET	
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)	
							2 orang				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang 	100 %	100 %		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah	7. RENSTRA PD 8. RENJA PD 9. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 1 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 1 program 	100%	100%		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah 				

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perangkat Daerah		diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.966.357.341 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.162.228.417.918,	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.15.400.000 - Total Belanja APBD, Rp. 1.162.228.417.918,	0,77%	0,001%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.8.790.712.158,- - Total Realisasi Belanja APBD, Rp. 1.108.353.674.057,10	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.15.400.000,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.108.353.674.057,10	0,79%	0,001%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.7.327.154.679, - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.790.712.158	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.15.400.000 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.400.000	83%	100 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.463.557.479 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 8.790.712.158	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 15.400.000	16,6 %	0%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis: 1. Neraca 2. CALK 3. RKA	Laporan keuangan ada 3 jenis; 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
7	PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku inevtaris barang	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku inevtaris barang	Ada	Ada	18

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET
						Urusan (1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.685.892.142,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.10.234.336.465	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.0,-	6,7%%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Ada 4 jenis	Ada 4 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Tata Ruang
2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTA HAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program perencanaan tata ruang, anggaran Rp.236.320.000,- dengan realisasi Rp.210.232.495,- 2. Program pemanfaatan ruang, anggaran sebesar Rp.62.779.724,- dan realisasi Rp.62.435.000,-	1. Program pengembangan data/informasi, anggaran Rp.714.200.000,- dan realisasi Rp.216.146.000,- 2. Program perencanaan pembangunan daerah, anggaran Rp.1.647.412.901,- dan realisasi Rp.1.574.282.513,- 3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, anggaran Rp.202.650.000,- dan realisasi Rp.196.675.958,- 4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran Rp.309.539.000,- dan realisasi Rp.272.801.966,-	2 program	7 program	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							5. Program perencanaan sosial dan budaya, anggaran Rp.328.664.000,- dan realisasi Rp.324.864.686,- 6. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, anggaran Rp.405.234.000,- dan realisasi Rp.398.521.354,- 7. Program pengembangan penelitian pembangunan daerah, anggaran Rp.322.701.000,- dan realisasi Rp.258.492.821,-			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada SOP	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada atau Tidak ada	Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024	Tidak ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 2 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	50 %	47,05 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----- --.	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 3 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 17 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,07 %	0,44 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 2 - Pejabat yang ada sebanyak 8	0 %	25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 10. RENSTRA PD 11. RENJA PD 12. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 2 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 2 program	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 10 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 10 program	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					100%		Perangkat Daerah, sebanyak 10			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.299.099.724,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah, Rp.6.463.898.517,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,02 %	0,55%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.272.667.495,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.728.712.822,- - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.108.353.674.057,10	0,02%	0,51 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, Rp.272.667.495,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.272.667.495,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, Rp.4.275.086.729,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.728.712.822,-	100 %	74,62%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.272.667.495,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp.1.453.626.093 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.5.728.712.822,-	0 %	25,37 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat	Ada atau tidak ada laporan keuangan	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis,			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. Neraca 2. LRA 3. CALK	sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku ineventaris barang	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku ineventaris barang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan OPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai OPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Nilai asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp.0,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.326.885.210,- - Nilai asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp.3.556.693.174,-	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	9,19%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Struktur Organisasi 3. Kotak saran	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Struktur Organisasi 3. Kotak saran	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Perpustakaan
2. Urusan Kearsipan

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELEN GGARA AN URUSAN PEMERINT AHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan kepastakaan, anggaran Rp.719.269.850,- dan realisasi Rp.713.345.860,-	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, anggaran Rp.211.783.259,- dan realisasi Rp.211.161.850,-.	1 program	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Yakni: 9 SOP 1. SOP ttg Pendaftaran Anggota Perpustakaan 2. SOP ttg Peminjaman Koleksi 3. SOP ttg Pengembalian dan Perpajakan koleksi 4. SOP ttg Pelayanan Perpustakaan Keliling 5. SOP ttg Pengolahan Buku 6. SOP ttg Penyusunan Ranperda 7. SOP ttg Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan 8. SOP ttg Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja 9. SOP ttg Penyusunan Indikator Kinerja Utama	yakni 1 SOP : SOP ttg Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip	Ada 9 SOP	Ada 1 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada yakni Peraturan Daerah Kabupaten manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Ada yakni Peraturan Daerah Kabupaten manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Ada	Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jabatan	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 jabatan - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jabatan	60,00 %	33,33%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada 1 orang yakni Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS yang menangani urusan (1) OPD , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.825 personil	- PNS yang menangani urusan (2) OPD , sebanyak 2 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.825 personil	0,31 %	0,05 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	22,22 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat daerah	1. RENSTRA Perangkat daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 4 program. - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	- Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 1 program. - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	1) Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 4 program. 2) Program dalam RKA OPD, sebanyak 4 program.	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat	- Program RKA OPD yang diakomodir	- Program RKA OPD yang diakomodir			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET	
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)	
		Program dan Anggaran		yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	dalam DPA OPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA OPD, sebanyak 4 program.	dalam DPA OPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD, sebesar Rp.3.333.600.622,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72,-	- Total Anggaran OPD, sebesar Rp.211.783.259,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.162.228.417.918,72	0,29 %	0,02 %		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.246.240.310,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.211.161.850,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.108.353.674.057,10,-	0,29 %	0,02%		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung		15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung perangkat daerah, sebesar Rp.2.050.609.684,- - Total Realisasi belanja perangkat Daerah, sebesar Rp3.246.240.310-	- Realisasi Belanja Langsung perangkat daerah, sebesar Rp.211.161.850,- - Total Realisasi belanja perangkat Daerah, sebesar Rp.3.246.240.310	63,17 %	65,05 %	
				16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.195.630.626,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.246.240.310,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.246.240.310,-	36,83 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Yakni : 1. CALK 2. Neraca 3. LRA	Yakni: 1. CALK 2. Neraca 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku ineventaris barang 3. Laporan Mutasi Barang	Apabila Ada, 1. KIB 2. Buku ineventaris barang 3. Laporan Mutasi barang	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Nilai aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 58.020.883 - Nilai aset yang dikuasai perangkat daerah, sebanyak Rp1.556.276.335,27	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.0,-	37,04 %	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Kotak saran 5. Pengumuman lewat radio dan media massa	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Kotak saran 5. Pengumuman lewat radio dan media massa	Ada 6 Jenis	Ada 1 jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pertanahan
2. Urusan Perumahan Rakyat

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, anggaran Rp.521.208.000,- dan realisasi Rp.486.133.340,- 2. Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan, anggaran Rp.189.584.000,- dan realisasi Rp. 188.289.000,-	1. Program pengembangan perumahan, anggaran Rp.728.640.800,- dan realisasi Rp.705.155.300,- 2. Program lingkungan sehat perumahan, anggaran Rp.175.335.000,- dan realisasi Rp.174.083.000,-	2 program	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang Penerbitan Sertifikat Tanah 2. SOP tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan	SOP tentang Pengembangan Perumahan	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 6	75%	83,33%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 14 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 8 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825 personel	0,18%	0,20 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 1 - Pejabat yang ada sebanyak 5 Org	28,57 %	20 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi	- Pejabat yang memenuhi			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				persyaratan kepengkataan	kepengkataan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	syarat kepengkataan 14 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang	syarat kepengkataan 5 Org - Pejabat yang ada sebanyak 5 Org	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 13. RENSTRA PD 14. RENJA PD 15. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 2 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 2 program	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Program dan Anggaran		yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.3.113.305.233,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.903.975.800,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,27%	0,07 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.056.152.298,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.879.238.300,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	0,28 %	0,07%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.1.337.105.740 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 3,056,152,298,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp.879.238.300,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.879.238.300,-	43,75%	100 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, Rp. 1,719,046,558,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3,056,152,298,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.879.238.300,-	56,24%	0 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA,	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	Urusan (1) Pertanahan	Urusan (2) Perumahan Rakyat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Calk)	komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	2. CALK 3. LRA	2. CALK 3. LRA			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB 2. Buku inevtaris barang 3. Laporan Barang Tahunan 4. Laporan Barang semeseteran	1. KIB 2. Buku inevtaris barang 3. Laporan Barang tahunan 4. Laporan Barang Semesetr	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerahx 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.15.796.300,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.374.279.140,-	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 374.279.140,-	4,22%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. KOMUNIKASI & INFORMATIKA
2. STATISTIK

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, anggaran Rp.417.356.000,- dan realisasi Rp.412.373.334,- 2. Program kerjasama informasi dan mass media, anggaran Rp.510.134.000,- dan realisasi Rp.504.898.650,- 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 417.356.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 412.373.334,-	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.598.970,-	3 program	1 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Tidak ada SOP	Tidak ada SOP	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	94,12 %	25%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS yang menangani urusan (1) OPD , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.825 personil	- PNS yang menangani urusan (2) OPD , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.825 personil	0,6 %	0,05 %	
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 15 orang	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang	66,6 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 15 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 2 orang 	86,6 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 16. RENSTRA PD 17. RENJA PD 18. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA OPD	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 1 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 1 program 	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					100%		program.			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 3.137.678.221,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.80.000.000,- - Total Belanja APBD Rp.1.162.228.417.918,72	0,26 %	0,01 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.3.109.432.206 - Total Realisasi belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.77.598.970,- - Total Realisasi belanja APBD Rp. 1.108.353.674.057,10	0,28 %	0,01%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.273.718.382,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.109.432.206,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 77.598.970,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 77.598.970,-	40,96 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 1.758.114.854,- - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 3.109.432.206,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 0,- - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 77.598.970,-	56,54%	0%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Yakni : 1. KIB 2. Buku Inventaris Barang 3. Daftar Mutasi Aset	Yakni : 1. KIB 2. Buku Inventaris Barang 3. Daftar Mutasi Aset	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan OPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai OPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.546.146.960,- - Nilai asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp.2.883.996.377,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Nilai asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 0,-	18,937%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1.Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pengumuman lewat radio dan media massa	1. Papan Pengumuman 2. website	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
						Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Komunikasi & Informatika	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPRASI DAN UKM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Koperasi dan UKM
2. Urusan Perindustrian
3. Urusan Perdagangan

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, anggaran Rp.359.450.000,- dan realisasi Rp.356.692.000,- 2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM anggaran Rp.221.000.000,- dan realisasi Rp.220.975.000,- 3. Program peningkatan	1. Program peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, anggaran Rp.447.759.000,- dan realisasi Rp.446.535.000,- 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaran Rp.183.400.000,- dan realisasi Rp.181.400.000,- 3. Program penataan	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan anggaran Rp.120.775.000,- dan realisasi Rp.110.850.000,- 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Anggaran Rp.1.238.602.000,- dan realisasi Rp.	3 program	3 program	2 program	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						kualitas kelembagaan koperasi anggaran Rp.897.905.000,- dan realisasi Rp.873.096.500,-	struktur Industri anggaran Rp.405.447.000,- dan realisasi Rp. 399.222.384,77	1.063.362.866,84				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 2 yakni 1. Bidang Koperasi SOP Penerbitan Badan Hukum Koperasi 2. Bidang UKM SOP Pelatihan Kewirausahaan	Ada 1 SOP yakni SOP Bantuan Peralatan Industri	Ada 2 SOP yakni 1. SOP ttg Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen dan Perda 2. Bidang Prijinan SOP Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2 SOP	1 SOP	1 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak ada	1. Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang izin usaha industry dan tanda daftar industri	1. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 2. Perda Nomor 18 Tahun 2009	Tidak ada	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
								tentang surat izin usaha perdagangan 3. Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang wajib daftar perusahaan				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13 jabatan	- Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	- Jabatan yang ada sebanyak 6 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7 jabatan	100%	100%	85,71%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 18 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 3.825	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 5 personel - Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 8 personel - Total PNS	0,47%	0,13 %	0,20%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait				personel	sebanyak 3.825 personel	Kabupaten sebanyak 3.825 personel				
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 0 - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 0 orang - Pejabat yang ada sebanyak 6 orang	23,07 %	0 %	0 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 6 orang	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah 19. RENSTRA PD 20. RENJA PD 21. RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPd	10	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	- Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 2 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 2 program	100 %	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah,	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					100%	sebanyak 5 program.	Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA OPD, sebanyak 5 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program. 	100 %	100 %	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp,3.769.206.265 - Total Belanja APBD, Rp. 1.162.228.417.918,72 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp,1.036.606.000 - Total Belanja APBD Rp . 1.162.228.417.918,72 	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Perangkat Daerah Rp.1.359.377.000 - Total Belanja APBD Rp . 1.162.228.417.918,72 	0,32 %	0,08%	0,12%	
		Realisasi Belanja perangkat daerah	14	Realisasi belanja perangkat daerah terhadap total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja perangkat daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.737.088.450 - Total Realisasi Belanja APBD,sebesar Rp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.1.027.157.384,77 - Total Realisasi Belanja APBD,sebesar Rp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp.1.174.212.866.84 	0,34 %	0,09%	0,10%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1.108.353.674.057,10	1.108.353.674.057,10	- Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.108.353.674.057,10				
		Besaran belanja langsung dan tidak langsung	15	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.717.441.751,61 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.965.890.400.	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0.	94,9%	0 %	0%	
		Besaran belanja langsung dan tidak langsung	16	Total belanja tidak langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp. 2.290.851.265 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.286.324.950	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp.0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0	99,8%	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. LO 5. LPE	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada yakni: 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang semesteran 3.Rekapitulasi daftar mutasi barang 4.Kartu inventaris Barang	Ada yakni: 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang semesteran 3.Rekapitulasi daftar mutasi barang 4.Kartu inventaris Barang	Ada yakni: 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang semesteran 3.Rekapitulasi daftar mutasi barang 4.Kartu inventaris Barang	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan Rp.102.048.700 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.71.636.653.150,60	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.0,-	- Asset yang tidak digunakan, Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp.0,-	0,14%	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	Tidak ada pemisahan asset Perangkat daerah	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet	Papan pengumuman	Papan pengumuman	Ada	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET.
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Perindustrian	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	MASYARAKAT	masyarakat										
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{1.732}{10.390} \times 100$	16,66%
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Pendidik PAUD}} \times 100 \%$	$\frac{31}{45} \times 100$	68,89%
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini}} \times 100 \%$	$\frac{60}{139} \times 100$	43,16%
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$	$\frac{190.844}{191.106} \times 100$	99,86%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{34.978}{38.719} \times 100$	90,33%
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{19.876}{20.043} \times 100$	99,16%
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{78}{39.353} \times 100$	0,20%
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	$\frac{40}{20.318} \times 100$	0,19%
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar}} \times 100 \%$	$\frac{1.641}{2.448} \times 100$	67,03%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama pendidik}} \times 100 \%$	$\frac{1.364}{1.470} \times 100$	87,79%
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP}} \times 100 \%$	$\frac{432}{467} \times 100$	92,50%
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{7.373}{7.413} \times 100$	99,45%
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{6.800}{6.883} \times 100$	99,52%
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{6.957}{7.373} \times 100$	94,35%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{5}{40.518} \times 100$	0,01%	
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{0}{269.686} \times 100$	0 %	
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0 %	
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}} \times 100\%$	$\frac{269.686}{708} \times 100$	38,09 %	
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{5.806}{7.240} \times 100$	80,19 %	
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{5.161}{5.409} \times 100$	95,41%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{5.281}{5.331} \times 100$	99,06%	
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{20.265}{25.981} \times 100$	77,99%	
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{1.198}{1.245} \times 100$	96,2%	
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{13.743}{181.153} \times 100$	7,58%	
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{2.742}{13.023} \times 100$	36,41%	
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{2.153}{57.105} \times 100$	3,77%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{146}{2.251} \times 100$	6,48%	
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{20}{415} \times 100$	4,81%	
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{199}{199} \times 100$	100%	
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{6}{6} \times 100$	100 %	
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	$\frac{141}{176} \times 100$	80 %	
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$	$\frac{69}{69} \times 100$	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	$\frac{147}{147} \times 100$	100 %
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Ibu Melahirkan}} \times 100.000$	$\frac{10}{5.350} \times 100.000$	186.915 orang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	$\frac{574.570}{1281.29} \times 100$	44,84 %
		36	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/Direkonstruksi}} \times 100\%$	$\frac{139.624}{837,91} \times 100$	16,66%
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100\%$	$\frac{300}{928.521} \times 100$	32,31%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)</p> $\frac{422}{929.4330} \times 100 \%$ <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)</p>	45,40%	
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.</p> $\frac{31.549}{56.247} \times 100 \%$ <p>Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut</p>	56,09%	
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> $\frac{0}{0} \times 100 \%$ <p>Jumlah rumah di Kabupaten A</p>	0%	Tidak dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur karena belum memiliki instalasi pengolahan limbah terpadu

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{128}{50} \times 100$	256%
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	$\frac{18.676}{56.247} \times 100$	33,20%
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	$\frac{17.037}{56.247} \times 100$	30,29%
		45	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	$\frac{83,66}{2.642,93} \times 100$	3,17 %
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	$\frac{350}{819} \times 100$	42,74 %

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		47	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{9.240,06}{15.391} \times 100$	60,04 %
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	$\frac{1.170 \text{ m}^2}{65.200 \text{ m}^2} \times 100$	1,79%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	13.381 unit ----- x 100 56.247 unit	23,79%	
		52	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	0 ----- x 100 56.247 unit	0%	
		53	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	42.866 unit ----- x 100 56.247 unit	76,21%	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	1 ----- x 100 1	100%	
		55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	15 ----- x 100 45	33,33%	
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		1	
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1	
		59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	$\frac{1}{1} \times 100$	100%	
		60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Setelah kejadian	
		61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ----- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	$\frac{0}{20} \times 100$	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 %</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p>	$\frac{2.684}{20.307} \times 100$	13,22%
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 %</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten</p>	$\frac{40}{418} \times 100$	9,56%
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	<p>Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x100%</p> <p>Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng</p>	$\frac{0}{0} \times 100$	0%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> $\frac{\text{-----}}{10} \times 100 \%$ <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga</p>	$\frac{10}{10} \times 100$	100%	
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<p>Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada</p> $\text{-----} \times 100 \%$ <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina</p>	$\frac{160}{20.307} \times 100$	0,78%	
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> $\text{-----} \times 100\%$ <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten</p>	$\frac{4}{20} \times 100$	20%	
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> $\text{-----} \times 100\%$ <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p>	$\frac{18}{90} \times 100$	20%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	$\frac{2.050}{158.907} \times 100$	13,05%	
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{52}{139} \times 100$	37,41%	
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{8}{123} \times 100$	6,50%	
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial}}{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100$	100%	
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Instruktur}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan}}{\text{Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	$\frac{15.400.000}{7.482.382.234} \times 100$	0,20582%	
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	$\frac{1}{107.065} \times 100$	0,00093%	
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	$\frac{11}{138.975} \times 100$	0,00792%	
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100$	100%	
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$	$\frac{83.254}{134.219} \times 100$	62,0285%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	$\frac{17.648,60036}{44.284,65445} \times 100$	40%	
		81	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan			Tidak Ada	
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL);}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		86	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$	$\frac{107.638 \text{ m}^2}{166.960 \text{ m}^2} \times 100$	64,46%	
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100$	100%	
11	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	0		0	
		90	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total vol timbunan sampah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.168,1 \text{ ton/tahun}}{40.897,22 \text{ ton/tahun}} \times 100$	5,3%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten -----x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{8}{29} \times 100$	27,59%	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran =73.569 ----- x 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun=101.835	$\frac{73.569}{101.835} \times 100$	72,24%	
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 159.227 -----x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas=193.650	$\frac{159.227}{193.650} \times 100$	82,22%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun -----x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	$\frac{25}{106} \times 100$	23,585%	
		95	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun -----x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	$\frac{0}{43} \times 100$	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		96	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	$\frac{186}{186} \times 100$	100%
		97	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	$\frac{559}{559} \times 100$	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98	TFR (Angka Kelahiran Total)			3,29
		99	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			6,638
		100	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$		75%
		101	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$		11,4%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Perhubungan	102	Rasio konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan</p>	0	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		103	Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,08
16	Komunikasi dan Informatika	104	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD		46,51%
		105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	2 ----- x 100 3	66,6%
		106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100% Jumlah penduduk	232.397 ----- x 100 269.686	86,17%
		107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada
		108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	0 ----- x 100 24	0%
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	15 ----- x 100 99	0,15%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{368}{1.946} \times 100$	18,91%	
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{15}{402} \times 100$	3,73%	
		112	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	$\frac{99}{99} \times 100$	100%	
18	Penanaman Modal	113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{73.324.726.765-26.355.565.485}{26.355.565.485} \times 100$	178%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kecamatan}} \times 100\%$	$\frac{14}{14} \times 100$	100%	
		115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	$\text{-----} \times 100$	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		Ada 3 yakni 1 perunggu, 2 emas	
		117	Presentase Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi}} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100$	100%	
20	Statistik	118	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{46}{46} \times 100$	100%	
		119	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{46}{46} \times 100$	100%	
21	Persandian	120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{1}{46} \times 100$	2,17%	
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{9}{9} \times 100$	100%	
		122	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Perpustakaan	123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	14.307	14.307
		124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = \frac{a'+b'}{a+b} \times 100\%$ $x = \text{persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan}$ $a' = \text{naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks)}$ $b' = \text{koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks)}$ $a = \text{koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)}$ $b = \text{koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)}$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{7.097}{13.337} \times 100$	53,21%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
24	Kearsipan	126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50	50	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	0	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan	128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)		4.318,13 ton
		129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ----- x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	$\frac{1}{1} \times 100$	100%
26	Pariwisata	130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) -----x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{150-55}{55} \times 100$	172,73%
		131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) -----x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{15.463-14.840}{14.840} \times 100$	4,20%
		132	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual -----x 100% Jumlah kamar yang tersedia	$\frac{1.635}{1.560} \times 100$	104,81%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	3.674,71(juta rupiah) $\frac{\quad}{2.991.244,95 \text{ (juta rupiah)}} \times 100$	0,12%	
		134	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$	3.674,71(juta rupiah) $\frac{\quad}{54.390.813.843,57} \times 100$	0,67%	
27	Pertanian	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$126.479,33/32.495,5 \times 100\%$	389,22%	
			- Padi sawah	$\frac{90.730,5 \text{ ton}}{22.750,7 \text{ ha}} \times 100$	4,0%		
			-Padi lahan kering	$\frac{2.281,62 \text{ ton}}{1.762,2 \text{ ha}} \times 100$	1,3%		
			-Jagung	$\frac{25.266,1 \text{ ton}}{6.106,5 \text{ ha}} \times 100$	4,1%		
			-Kacang kedelai	$\frac{48,55 \text{ ton}}{125,5 \text{ ha}} \times 100$	0,4%		

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				-Kacang hijau 124,88 ton ———— x 100 167,6 ha	0,7%		
				-Kacang tanah 49,61 ton ———— x 100 36,2 ha	1,4%		
				-Ubi kayu 6,775,7 ton ———— x 100 1.228,1 ha	5,5%		
				-Ubi jalar 1.202,37 ton ———— x 100 318,7ha	3,8%		
		136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100% Jumlah total PDRB	1.346.582,6 ————— x 100 2.991.245	42,02%	
		137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	573-333 ———— x 100 573	41,88%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Energi Sumber DayaMineral	138	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
29	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{369.389,1}{2.991.245} \times 100$	12,35%
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
		142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%
30	Perindustrian	143	Pertambahan jumlah industri besar di kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1})}{\text{Jumlah industri besar tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{26-42}{42} \times 100$	-38,09%

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten}}{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional}} \times 100\%$	$\frac{3}{5} \times 100$	0,6%	
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	0%	
31	Transmigrasi	148	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		Tidak Ada	

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	1. SIMDA Keuangan 2. Website Manggarai Timur 3. SIPD	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	$\frac{183}{191} \times 100\% = 95,81\%$	
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	$\frac{Rp.126.155.807.550}{Rp.1.162.228.417.918,72} \times 100\% = 0,11\%$	
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas	$\frac{Rp.54.434.713.623,57}{Rp.1.305.553,61} \times 100\% = 0,41\%$	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures -----X 100% jumlah belanja APBD	$\frac{Rp.905.926.289.107,72}{Rp.1.162.228.417.918,72} \times 100\% = 0,78\%$	
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 DC	
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 DC	
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal	0%	

			yang ditandatangani pada kuartal pertama	pertama tahun n -----X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n		
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	$\frac{108}{108} \times 100\% = 100\%$	
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% Total belanja langsung	$\frac{Rp.173.936.155.581}{Rp.559.737.338.240,66} \times 100\% = 0,31\%$	
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,88%	
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi -----X 100% Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{926}{1.120} = 82,67\%$	
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi -----X 100% Total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{(Rp.1.108.353.674.057,10)}{(Rp.1.162.228.417.918,72-1)} \times 100\% = 95,36\%$	

		14	Assets management	<p>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)</p> <p>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);</p>	Ya	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	<p>Nilai Realisasi SiLPA -----X 100%</p> <p>Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya</p>	$\frac{40.242.063.450,83}{1.074.838.174.803,11} \times 100\% = 0,04\%$	
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	<p>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100%</p> <p>Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda</p>	$\frac{Rp.224.396.000,-}{Rp.220.980.884,-} \times 100\% = 98,5\%$	
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	<p>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100%</p> <p>total jumlah dokumen yang telah dirinci</p>	$\frac{78}{78} \times 100\% = 100\%$	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	1 Jumlah	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	1 Jumlah	